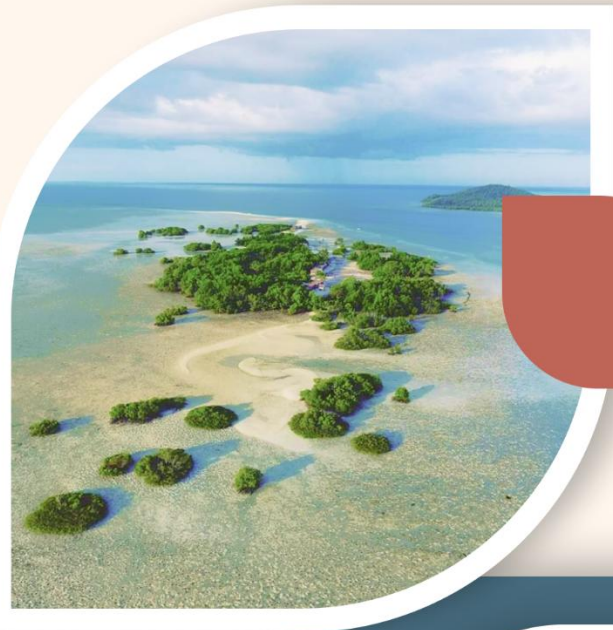




Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda) Kabupaten Muna Barat

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2025-2045



RANCANGAN AWAL

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN 2025-2045





BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025 – 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah mempunyai peran dan fungsi penting dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan daerah secara bertahap untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Muna Barat dalam kurun waktu 20 tahun dapat terarah, berkesinambungan, efektif dan efisien serta dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat, maka perlu disusun rencanapembangunan jangka Panjang daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2025-2045.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT

Dan

BUPATI MUNA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025- 2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muna Barat, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
10. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program pembangunan daerah periode 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.
- (2) Rincian dari program pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJPD mengacu kepada RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045 yang berorientasi pada karakteristik Kabupaten Muna Barat yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan.

Pasal 4

- (1) Sistematika RPJPD meliputi:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis.;
 - d. Bab IV Visi dan Misi Daerah;
 - e. Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah; dan
 - f. Bab VI Penutup.
- (2) Rincian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program Bupati.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 10-01-2025

Pj. BUPATI MUNA BARAT,



Diundangkan di Laworo
pada tanggal 10-01-2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,

L.M. HUSEIN TALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2025 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT PROVINSI
SULAWESI TENGGARA (1/3/2025)



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan yang mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mengoptimalkan peran serta masyarakat. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan amanat tersebut, maka perencanaan pembangunan di Kabupaten Muna Barat disusun dalam tahapan-tahapan baik dalam jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta dengan memperhatikan beberapa peraturan pelaksanaannya antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

RPJPD Tahun 2025 – 2045 memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Perencanaan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan menjadi acuan bagi yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara, dan menjadi acuan bagi keseluruhan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Muna Barat dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang.

RPJPD 2025 – 2045 dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya keterpaduan dan kesinambungan pembangunan daerah dalam jangka panjang untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah yang disepakati bersama.

Pelaksanaan RPJPD Tahun 2025 – 2045 setiap lima tahun dijabarkan ke dalam RPJMD sebagai suatu dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat prioritas visi, misi, strategi, kebijakan, dan program pembangunan yang dilengkapi dengan kerangka pendanaan, pentahapan, dan indikator kinerja.

RPJPD Tahun 2025 – 2045 merupakan perspektif masa depan Kabupaten Muna Barat tentang apa yang ingin dicapai dalam masa 20 (dua puluh) tahun ke depan melalui visi :

"Muna Barat 2045 yang Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan"

Dalam upaya mencapai perspektif masa depan tersebut secara terencana, terarah dan terukur serta dapat mengantisipasi kebutuhan pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan, maka disusunlah RPJPD Tahun 2025 – 2045.

Adapun maksud dari penyusunan dokumen RPJPD Tahun 2025 – 2045 adalah untuk memberikan landasan kebijakan Pemerintah Kabupaten Muna Barat dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yaitu Tahun 2025 – 2045, Sedangkan tujuan dari penyusunan RPJPD Tahun 2025 – 2045 adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai instrumen koordinasi efektif antar pelaku pembangunan Kabupaten Muna Barat.
- b. Meningkatkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintah Daerah, maupun antar Pemerintah Pusat dan Provinsi dengan Kabupaten Muna Barat dan antar Pemerintah Kabupaten Muna Barat dengan swasta dan masyarakat.
- c. Meningkatkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian pembangunan daerah.
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkesinambungan.
- e. Meningkatkan optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia, sekaligus mendorong kapasitas sektor swasta dan masyarakat, dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya swasta dan masyarakat secara bertanggung jawab.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR ...

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hadiyah-Nyalah sehingga Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2025-2045 dapat tersusun dengan baik.

Dokumen ini berisi data dan informasi tentang kondisi umum, visi dan misi pembangunan daerah, indikator makro ekonomi daerah, indikator kinerja utama pembangunan daerah dan proyeksi pembangunan daerah ke depannya di Kabupaten Muna Barat sepanjang tahun 2025-2045. Dokumen RPJPD ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara obyektif pencapaian sasaran pembangunan di Kabupaten Muna Barat dan selanjutnya dapat dijadikan pedoman guna penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan pada tahun-tahun berikutnya.

Apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Tim Pelaksana Kegiatan dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Muna Barat yang telah berkontribusi sehingga Dokumen RPJPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2025-2045 dapat terpublikasikan. Kami menyadari bahwa dalam penyajian dokumen ini masih terdapat banyak kekurangan baik secara penyajian, substansi profil pembangunan atau pun ketepatan waktu publikasi. Olehnya itu, saran dan masukan dari seluruh pihak diharapkan agar Rankhir dapat dilaksanakan dengan baik.



Laworo, Januari 2025

Kepala Bappeda Kabupaten Muna Barat

RADEN DJAMUN SUNJOTO. S.Pd., M.Si.

NIP. 19660804 199003 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	2
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RPJPD KABUPATEN MUNA BARAT	5
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN	7
1.3.1. Hubungan RPJPD Kabupaten Muna Barat dengan RPJPD Nasional dan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara	7
1.3.2. Hubungan RPJPD Kabupaten Muna Barat dengan RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara	7
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN	7
1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN	8
BAB 2 GAMBARAN KONDISI UMUM DAERAH	10
2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	11
2.1.1 Demografi.....	11
2.1.2 Geografi dan Administrasi Wilayah.....	12
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	15
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	15
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	31
2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM	40
2.3.1 Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar	40
2.3.2 Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.....	68
2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan.....	84
2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH	93
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	93
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur	94
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi.....	95
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia.....	96

2.5. REFLEKSI PEMBANGUNAN	97
2.5.1 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025.....	97
2.5.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II.....	113
2.6. TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK.....	114
2.6.1 Demografi.....	114
2.6.2 Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik.....	118
2.7. PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH.....	123
2.7.1 Identifikasi dan Analisis Pusat-pusat Pertumbuhan Wilayah.....	123
2.7.2 Identifikasi dan Analisis Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana	127
BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU SRATEGIS.....	138
3.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	139
3.2. ISU STRATEGIS	152
BAB 4 VISI DAN MISI DAERAH.....	179
4.1. VISI.....	180
4.2. MISI	185
BAB 5 ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK.....	191
5.1. ARAH KEBIJAKAN DAERAH	192
5.2. SASARAN POKOK.....	211
5.3. KINERJA WAJIB KABUPATEN MUNA BARAT.....	225
BAB 6 PENUTUP.....	228
6.1. KAIDAH PELAKSANAAN	229
6.2. PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	229

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Muna Barat Tahun 2023	11
Tabel 2. 2	Luas Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Muna Barat.....	12
Tabel 2. 3	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Muna Barat Atas Harga Konstan Menurut Kategori Lapangan Usaha (persen) 2018 – 2023.....	17
Tabel 2. 4	PDRB Kabupaten Muna Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 - 2023 (Miliar Rupiah).....	19
Tabel 2. 5	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Muna Barat, 2018-2023.....	211
Tabel 2. 6	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Muna Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kategori Lapangan Usaha (persen) 2018 – 2023	22
Tabel 2. 7	Perbandingan Gini Rasio di Kabupaten Muna Barat dan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2018-2023.....	23
Tabel 2. 8	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Muna Barat, 2018–2023	25
Tabel 2. 9	Indeks Kedalaman Kemiskinan Muna Barat diantara Daerah Lain di Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023.....	27
Tabel 2. 10	Indeks Keparahan Kemiskinan Muna Barat diantara Daerah Lain di Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023.....	29
Tabel 2. 11	Perkembangan Angka Melek Huruf Muna Barat Tahun 2018-2023	32
Tabel 2. 12	Angka HLS, RLS, AHH Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023.....	32
Tabel 2. 13	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2023.....	34
Tabel 2. 14	Angka Partisipasi Murni Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023.....	35
Tabel 2. 15	Angka Harapan Hidup Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023	37
Tabel 2. 16	Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Muna Barat Tahun 2018-2023	39
Tabel 2. 17	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Sekolah, Guru, dan Murid di Kabupaten Muna Barat Tahun 2023	40
Tabel 2. 18	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Sekolah, Guru, dan Murid Berdasarkan Jenjang di Kabupaten Muna Barat Tahun 2023.....	40

Tabel 2. 19	Persentase Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Muna Barat Tahun 2023.....	41
Tabel 2. 20	Angka Partisipasi Murni Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023.....	42
Tabel 2. 21	Fasilitas Kesehatan Kabupaten Muna Barat Tahun 2023.....	43
Tabel 2. 22	Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Muna Barat Tahun 2023	44
Tabel 2. 23	Tenaga Kesehatan di Kabupaten Muna Barat Tahun 2023.....	45
Tabel 2. 24	AKB, AKABA dan Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023.....	46
Tabel 2. 25	Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran Hidup Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023.....	47
Tabel 2. 26	Jumlah balita yang Pernah Diberikan Imunisasi Menurut Kecamatan dan Jenis Imunisasi di Kabupaten Muna Barat tahun 2023.....	47
Tabel 2. 27	Jumlah balita yang Pernah Diberikan Imunisasi Menurut Kecamatan dan Jenis Imunisasi di Kabupaten Muna Barat tahun 2023.....	48
Tabel 2. 28	Pencapaian Indikator Terkait dengan Pelayanan Penderita TBC di Kabupaten Muna Barat selama Tahun 2018-2023.....	49
Tabel 2. 29	Perbandingan Prevalensi Stunting Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Indonesia, Tahun 2018-2023.....	50
Tabel 2. 30	Rekapitulasi Realisasi Kinerja Kunci Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023.....	50
Tabel 2. 31	Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Muna Barat (km), 2019–2023.....	53
Tabel 2. 32	Pencapaian Indikator terkait Bidang Penyelenggaraan Jalan.....	53
Tabel 2. 33	Capaian Indikator Kinerja terkait Penyelenggaraan Bidang Irigasi	54
Tabel 2. 34	Capaian Indikator Kinerja terkait Pelayanan Air Minum.....	54
Tabel 2. 35	Capaian Indikator Kinerja terkait Pelayanan Air Limbah.....	56
Tabel 2. 36	Rasio Bangunan yang Memiliki Izin di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023	56
Tabel 2. 37	Jumlah Tenaga Konstruksi Terlatih di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023	56
Tabel 2. 38	Perkembangan Kawasan Permukiman yang Tertata di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023.....	58
Tabel 2. 39	Angka <i>Backlog</i> Rumah di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023	58

Tabel 2. 40	Perkembangan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023.....	59
Tabel 2. 41	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Kunci Lainnya Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023.....	59
Tabel 2. 42	Capaian Indikator Kinerja Kunci Lainnya Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023.....	61
Tabel 2. 43	Persentase PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2013.....	63
Tabel 2. 44	Persentase PPKS yang Tertangani di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023	63
Tabel 2. 45	Capaian Kinerja Indikator Kunci Lainnya dalam Penyelenggaraan Urusan Sosial di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023.....	64
Tabel 2. 46	Capaian Kinerja Indikator SPM Urusan Sosial Terkait Pelayanan Dasar di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023.....	64
Tabel 2. 47	Perkembangan Luas Area Tanaman Pangan, Produksi, dan Produktivitasnya di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023	65
Tabel 2. 48	Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023.....	67
Tabel 2. 49	Capaian Kinerja Indikator Kunci Lainnya dalam Penyelenggaraan Urusan Pangan di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023	67
Tabel 2. 50	Perkembangan Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pelayanan Pelatihan Tenaga Kerja di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023	68
Tabel 2. 51	Arus Penumpang Angkutan Umum di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023.....	69
Tabel 2. 52	Sebaran Pelabuhan Laut di Kabupaten Muna Barat.....	70
Tabel 2. 53	Capaian Kinerja Indikator Kunci Lainnya Penyelenggaraan Urusan Perhubungan di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023	71
Tabel 2. 54	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023	72
Tabel 2. 55	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023	72

Tabel 2. 56	Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Lingkungan Hidup di Kabupaten Muna Barat Selama Tahun 2018-2023	73
Tabel 2. 57	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Catatan Sipil Lainnya di Kabupaten Muna Barat Selama Tahun 2018-2023.....	75
Tabel 2. 58	Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional	76
Tabel 2. 59	Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender (DPG) Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional	76
Tabel 2. 60	Capaian Indikator Kinerja Kunci Berkaitan dengan Partisipasi Perempuan di Kabupaten Muna Barat Selama Tahun 2018-2023.....	77
Tabel 2. 61	Indikator Kinerja Kunci Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Muna Barat Selama Tahun 2018-2023	78
Tabel 2. 62	Perbandingan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Indonesia	79
Tabel 2. 63	Persentase Koperasi Aktif di Kab. Muna Barat Tahun 2018-2023.....	79
Tabel 2. 64	Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023	80
Tabel 2. 65	Perkembangan Capaian Indikator Layanan Kebudayaan di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023.....	80
Tabel 2. 66	Perkembangan Cakupan Jumlah Desa Berkembang dan Desa Mandiri di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023.....	81
Tabel 2. 67	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Kunci dalam Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023.....	82
Tabel 2. 68	Capaian Indikator Kinerja Kunci Pelayanan Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Muna Barat Selama Tahun 2018-2023.....	83
Tabel 2. 69	Cakupan Bina Kelompok Petani di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023	84
Tabel 2. 70	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023.....	85
Tabel 2. 71	Capaian Indikator Kinerja Kunci pada Urusan Pertanian di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023.....	85
Tabel 2. 72	Perkembangan Capaian Kinerja Indikator Terkait Pelayanan Pariwisata di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023.....	87

Tabel 2. 73	Produksi Perikanan di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023.....	87
Tabel 2. 74	Konsumsi Ikan di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023	88
Tabel 2. 75	Jumlah Kelompok Nelayan di Kab. Muna Barat Tahun 2018-2023.....	88
Tabel 2. 76	Jumlah Produksi Perikanan di Kab. Muna Barat Tahun 2018-2023.....	89
Tabel 2. 77	Nilai Tukar Nelayan di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023	90
Tabel 2. 78	Jumlah Produksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Skala Kecil dan Mikro di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023	90
Tabel 2. 79	Capaian Indikator Kunci Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018 – 2023	91
Tabel 2. 80	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023.....	92
Tabel 2. 81	Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023.....	93
Tabel 2. 82	Perbandingan Persentase Rumah Tangga (RT) Pengguna Energi Listrik di Kabupaten Muna Barat dan Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023	94
Tabel 2. 83	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan	95
Tabel 2. 84	Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Pelayanan Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023	95
Tabel 2. 85	Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023.....	97
Tabel 2. 86	Uraian Evaluasi Periode III dan IV RPJPD Kab. Muna Barat 2005-2025..	97
Tabel 2. 87	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Muna Barat	115
Tabel 2. 88	Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Muna Barat ...	116
Tabel 2. 89	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Muna Barat	116
Tabel 2. 90	Proyeksi Kebutuhan Rumah Kabupaten Muna Barat.....	119
Tabel 2. 91	Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Muna Barat.....	119
Tabel 2. 92	Proyeksi Kebutuhan TPS Kabupaten Muna Barat	120
Tabel 2. 93	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Muna Barat.....	120
Tabel 2. 94	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Muna Barat.....	121
Tabel 2. 95	Proyeksi Kebutuhan BTS Telekomunikasi Kabupaten Muna Barat.....	121
Tabel 2. 96	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Perdagangan dan Niaga Kabupaten Muna Barat	121
Tabel 2. 97	Proyeksi Kebutuhan Sarana Peribadatan Kabupaten Muna Barat.....	122

Tabel 2. 98 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kebudayaan dan Rekreasi Kabupaten Muna Barat	122
Tabel 2. 99 Proyeksi Kebutuhan Ruang Publik Kabupaten Muna Barat.....	123
Tabel 2. 100 Zona Pengembangan dan Sistem Perkotaan Kabupaten Muna Barat.....	124
Tabel 3. 1 Akar Permasalahan dan Inti Permasalahan Bidang Sosial	140
Tabel 3. 2 Akar Permasalahan dan Inti Permasalahan Bidang Ekonomi.....	143
Tabel 3. 3 Akar Permasalahan dan Inti Permasalahan Bidang Infrastruktur	145
Tabel 3. 4 Akar Permasalahan dan Inti Permasalahan Bidang Tata Kelola.....	149
Tabel 3. 5 Akar Permasalahan dan Inti Permasalahan Bidang Pangan	151
Tabel 3. 6 Akar Permasalahan dan Inti Permasalahan Bidang Lingkungan	152
Tabel 4. 1 Sasaran dan Indikator Visi RPJPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2025-2045	194
Tabel 5. 1 Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2025-2045	194
Tabel 5. 2 Arah Pembangunan dan Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2025-2045	212
Tabel 5. 3 Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2025-2045	219
Tabel 5. 4 Kinerja Wajib Kabupaten Muna Barat 2025-2045.....	224

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Persentase Luas Wilayah Kecamatan di Muna Barat	13
Gambar 2. 2	Peta Administrasi Kabupaten Muna Barat	15
Gambar 2. 3	Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan Kab. Muna Barat 2018-2022.....	19
Gambar 2. 4	Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Muna Barat dengan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2018-2023.....	26
Gambar 2. 5	Perbandingan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Muna Barat 2018-2023.....	26
Gambar 2. 6	Persentase Perbandingan Kemiskinan Muna Barat, Sulawesi Tenggara, dan Indonesia 2018-2023	26
Gambar 2. 7	Peta Kedalaman Kemiskinan Sulawesi Tenggara	28
Gambar 2. 8	Peta Kearifan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Tenggara.....	30
Gambar 2. 9	Persentase Perbandingan Angka HLS, RLS, AHH Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023	33
Gambar 2. 10	Perkembangan APS Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023.....	35
Gambar 2. 11	Angka Partisipasi Murni Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023	36
Gambar 2. 12	Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup Masyarakat Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023.....	37
Gambar 2. 13	Perkembangan IPM Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023.....	39
Gambar 2. 14	Angka Partisipasi Murni Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023.....	42
Gambar 2. 15	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Muna Barat Tahun 2023	45
Gambar 2. 16	AKB, AKABA, dan AKN di Kab. Muna Barat Tahun 2018-2023	46
Gambar 2. 17	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023	85
Gambar 2. 18	Piramida Penduduk Kabupaten Muna Barat Tahun 2020	118
Gambar 2. 19	Proyeksi Piramida Penduduk Kabupaten Muna Barat Tahun 2045.....	118
Gambar 2. 20	Peta Zona Pembangunan Ekonomi Kabupaten Muna Barat.....	128
Gambar 2. 21	Peta Zona Pengembangan Pesisir dan Kelautan	131
Gambar 2. 22	Peta Zona Pengembangan Pertanian dan Perkebunan.....	135
Gambar 2. 23	Peta Zona Pengembangan Perdagangan.....	137
Gambar 4. 1	<i>Roadmap</i> Implementasi RPJPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2025-2045.....	188

Gambar 5. 1	Pentahapan Implementasi RPJPN 2025-2045	192
Gambar 5. 2	Pentahapan Arah Kebijakan Umum Kabupaten Muna Barat 2025-2045	192
Gambar 5. 3	Pentahapam Arah Kebijakan Misi 1	196
Gambar 5. 4	Pentahapam Arah Kebijakan Misi 2	199
Gambar 5. 5	Pentahapam Arah Kebijakan Misi 3	203
Gambar 5. 6	Pentahapam Arah Kebijakan Misi 4	206
Gambar 5. 7	Pentahapam Arah Kebijakan Misi 5	209

BAB I

PENDAHULUAN



1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Muna Barat merupakan salah satu Kabupaten yang masih berusia cukup muda yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Muna. Sebagai daerah yang tergolong muda, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pembangunannya demi untuk mengejar ketertinggalannya dari daerah lain dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas di daerah. Keterbatasan sumberdaya alam dan besarnya tantangan pembangunan yang ada menjadikan perencanaan pembangunan menjadi hal yang vital untuk dapat memandu pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan bagian integral dari proses perencanaan pembangunan. Tujuan utamanya adalah menciptakan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan yang akan diimplementasikan oleh instansi pemerintah dan masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Undang-Undang ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, dilaksanakan melalui prinsip-prinsip demokrasi, kebersamaan, keadilan, keberlanjutan, keberwawasan lingkungan, dan kemandirian, dengan menjaga keseimbangan antara kemajuan dan persatuan nasional.

Situasi pembangunan daerah dalam era global memerlukan perencanaan yang cermat, agar dapat memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan. Daerah memainkan peran kunci dalam mengidentifikasi keunggulan, baik yang bersifat komparatif maupun kompetitif. Pentingnya tidak hanya mengenali keunggulan, tetapi juga memahami permasalahan dan isu-isu strategis di daerah beserta solusinya.

Perwujudan pembangunan berkelanjutan memerlukan perencanaan yang matang, tidak hanya fokus pada masalah dan isu saat ini, tetapi juga harus relevan dengan dinamika masa depan. Hal ini sangat penting karena Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah mengatur perencanaan untuk dua dekade ke depan. RPJPD Kabupaten Muna Barat akan menjadi panduan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama lima tahun dan kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang bersifat tahunan.

Upaya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan tercermin dalam kebijakan yang mencakup keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Dasar penyusunan pembangunan berkelanjutan dalam RPJPD diambil dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2025–2045. Dokumen ini mencakup arah kebijakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang merupakan komitmen global dan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mencakup 17 tujuan dan sasaran global tahun 2030. Proses penyusunan KLHS dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018, yang menekankan integrasi TPB ke dalam dokumen RPJPD. Pengintegrasian ini juga memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022, yang menetapkan implementasi pencapaian TPB di daerah sebagai bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk RPJPD. Proses penyusunan KLHS RPJPD dilakukan sebelum perumusan RPJPD untuk menganalisis kondisi dan pencapaian TPB, menanggapi isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan, serta memberikan rekomendasi terkait visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan yang substansinya memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah serta merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, bertahap dan sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan kabupaten dalam kurun waktu 20 tahun.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung setiap periode lima tahunan menjadi pertimbangan utama pentingnya penyusunan rencana pembangunan daerah yang berkesinambungan. Mengingat akan pentingnya rencana pembangunan dalam dimensi jangka panjang, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Kabupaten Muna Barat menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun (2005-2025). Dalam hal ini, secara garis besar penyusunan RPJPD ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Olehnya itu, tujuan utama pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, dalam upaya pencapaian pembangunan yang optimal, maka dibutuhkan suatu perencanaan yang matang dan berkelanjutan yang dapat mengoptimalkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Perencanaan

yang matang dibutuhkan untuk mewujudkan visi misi kepala daerah yang telah disampaikan kepada masyarakat melalui janji-janji politik pada saat kampanye pemilihan Kepala Daerah.

RPJPD Kabupaten Muna Barat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna Barat. Pada masing-masing tahapan dan periode RPJMD yang disusun sesuai dengan visi, misi dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Muna Barat yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat. Kebutuhan penting penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Muna Barat Tahun 2025-2045 adalah untuk mengantisipasi berbagai perubahan lingkungan strategis Kabupaten Muna Barat, baik yang bersifat internal maupun eksternal sampai dengan tahun 2045 ke depan.

Oleh karena itu, perencanaan jangka panjang yang akan disusun bersifat makro dan strategis, dengan materi pokok yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang kabupaten, serta merupakan satu kesatuan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025-2045, dan rencana pembangunan jangka panjang provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025-2045.

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Muna Barat adalah merupakan upaya perwujudan keadaan yang dicita-citakan dan diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan sesuatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari tujuan pembangunan nasional dalam jangka panjang.

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam tatanan sosial dan politik, mengiringi perubahan dalam tatanan birokrasi ke arah sistem manajemen pemerintah daerah yang lebih demokratis, transparan, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah, termasuk dalam fungsi pemerintah daerah sebagai perencana pembangunan, perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek

hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah. Kewenangan ini harus disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dan termasuk didalamnya adalah kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan negara sebagaimana yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, di samping melalui proses teknokratik, RPJPD Kabupaten Muna Barat juga harus disepakati melalui forum konsultasi publik yang diantaranya melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJPD Kabupaten Muna Barat, yang diikuti seluruh *stakeholder* pembangunan kota, untuk kemudian ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RPJPD KABUPATEN MUNA BARAT

Dasar hukum penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2025-2045 didasarkan pada beberapa peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561)
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang mengatur tentang prosedur, kriteria, dan mekanisme kajian lingkungan hidup strategis untuk rencana kebijakan, rencana program, dan rencana kegiatan
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
12. Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2)
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045
15. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017 Nomor 15)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muna Barat Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2020 Nomor 10).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN

1.3.1. Hubungan RPJPD Kabupaten Muna Barat dengan RPJPD Nasional dan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara

Dalam menyusun dokumen rencana pembangunan perencanaan jangka panjang daerah dituntut untuk mengacu pada dokumen rencana pembangunan jangka panjang nasional. Hal tersebut telah diatur pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 Pasal 6 ayat (1) bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah. RPJP Nasional merupakan dokumen perencanaan nasional untuk periode 20 tahun terhitung sejak tahun 2025 hingga tahun 2045. Berdasarkan ketentuan tersebut maka RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun terhitung sejak 2025 hingga 2045.

1.3.2. Hubungan RPJPD Kabupaten Muna Barat dengan RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara

Dalam menyusun dokumen perencanaan diperlukan sinkronisasi antar dokumen perencanaan. Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 25 ayat (1) disebutkan bahwa penyusunan RTRW Kabupaten mengacu pada RPJP Daerah. Selain itu, pada Pasal 26 ayat (2) disebutkan bahwa RTRW Kabupaten menjadi pedoman untuk penyusunan RPJP Daerah.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, disusun dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah Kabupaten Muna Barat dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah adalah:

1. Memberikan arah/pedoman yang jelas bagi pembangunan di Kabupaten Muna Barat dalam rentang waktu tahun 20 tahun mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2045;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), antar pemerintahan, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan;
3. Mendorong terciptanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

4. Mewujudkan rencana pembangunan daerah yang sinergi dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Muna Barat.
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penulisan laporan ini disusun dengan maksud agar memberikan informasi terkait materi-materi pembahasan dalam laporan Pendahuluan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Wapae dan sekitarnya. Adapun sistematika pembahasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang perlunya penyusunan RPJPD, dasar hukum, Hubungan keterkaitan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dokumen.

BAB 2 GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

Berisi kompilasi mengenai Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing, Aspek Pelayanan Umum, Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025, Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik, dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah.

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Berisi penjelasan tentang permasalahan, Isu Strategis Global, Isu Strategis Nasional, Isu Strategi Provinsi, dan Isu Strategis Kab./Kota.

BAB 4 VISI DAN MISI DAERAH

Berisi mengenai Visi Kab/Kota Tahun 2025-2045, Sasaran Visi Kab/Kota Tahun 2025-2045, Indikator Sasaran Visi Kab/Kota Tahun 2025-2045, dan Misi Kab/Kota Tahun 2025-2045.

BAB 5 ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Berisi tentang Arah Kebijakan, dan Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045.

BAB 6 PENUTUP

Berisi tentang Manajemen Resiko Pembangunan Daerah, dan Kesimpulan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Demografi

Pada tahun 2022, Kabupaten Muna Barat telah memasuki masa bonus demografi. Bonus Demografi adalah suatu keadaan di mana penduduk yang masuk ke dalam usia produktif jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif. Usia produktif yang dimaksud adalah berkisar antara 15 hingga 64 tahun. Sumber utama data kependudukan di Kabupaten Muna Barat adalah melalui Sensus Penduduk yang telah dilakukan sebanyak 7 kali sejak Indonesia merdeka yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010, dan 2020.

Ditinjau dari sumber daya manusia Muna Barat rata-rata pertumbuhan penduduknya di tahun 2022 mencapai 0,15 % dengan total penduduk mencapai 84.902 jiwa. Dampak dari kurangnya SDM di Muna Barat ini adalah jumlah sektor industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan yang sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja yang merantau ke luar daerah karena lapangan pekerjaan yang minim sehingga laju pertumbuhan penduduknya melambat. Berikut adalah jumlah penduduk dan laju pertumbuhannya per kecamatan di Kabupaten Muna Barat.

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Muna Barat Tahun 2022

Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
Tiworo Kepulauan	7.234	0,12
Maginti	9.022	0,06
Tiworo Tengah	7.663	0,07
Tiworo Selatan	5.797	0,19
Tiworo Utara	5.726	0,03
Lawa	8.804	0,09
Sawerigadi	8.165	0,41
Barangka	7.397	0,27
Wadaga	6.438	0,08
Kusambi	13.070	0,16
Napano Kusambi	5.586	0,11
Jumlah	84.902	0,15

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan Tabel 2.1 maka diketahui bahwa Kecamatan Kusambi merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar dan Kecamatan Napano Kusambi menjadi

kecamatan dengan jumlah penduduk yang paling sedikit di Muna Barat. Sedangkan, laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Kabupaten Muna Barat berada di Kecamatan Sawerigadi sebesar 0,41% dan yang terkecil di Kecamatan Tiworo Utara sebesar 0,03%.

2.1.2 Geografi dan Administrasi Wilayah

Kabupaten Muna Barat merupakan salah satu kabupaten di bawah administrasi pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara yang secara geografis berada pada posisi 4° 29' 30" – 05° 01' 30" Lintang Selatan dan 122° 09' 15" - 122° 41' 15" Bujur Timur. Ibukota Kabupaten Muna Barat berkedudukan di Laworo tepatnya di Kecamatan Sawerigadi. Posisi Kabupaten Muna Barat terletak di Pulau Muna bagian barat serta memiliki gugusan pulau-pulau kecil yang tersebar pada 36 Pulau Kecil yang terdiri dari 14 pulau yang berpenghuni tetap, 5 pulau yang berpenghuni tidak tetap dan 17 pulau yang tidak berpenghuni. Muna Barat memiliki luas wilayah daratan sebesar 81.327 Ha.

Secara administratif Kabupaten Muna Barat terbagi dalam 11 Kecamatan dan 86 Desa/Kelurahan. Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Muna Barat meliputi Kecamatan Sawerigadi, Barangka, Lawa, Wadaga, Tiworo Selatan, Maginti, Tiworo Tengah, Tiworo Utara, Tiworo Kepulauan, Kusambi dan Napano Kusambi. Luas wilayah administrasi Kecamatan di Muna Barat ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 2 Luas Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Muna Barat

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
1	Sawerigadi	102,60
2	Barangka	33,09
3	Lawa	85,17
4	Wadaga	175,05
5	Tiworo Selatan	66,98
6	Maginti	40,57
7	Tiworo Tengah	82,35
8	Tiworo Utara	62,05
9	Tiworo Kepulauan	77,90
10	Kusambi	103,33
11	Napano Kusambi	77,19
Total Luas Wilayah		906,28

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Kabupaten Muna Barat berdasarkan wilayah administrasinya memiliki luas wilayah 906,28 km² yang terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan dan 86 (delapan puluh enam)

desa/kelurahan. Dalam hal ini, Kecamatan Wadaga merupakan kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu 154,54 km² atau 18,99 persen sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu Kecamatan Maginti dengan luas wilayah sebesar 34,23 km² atau 4,20 persen dari total luas wilayah Kabupaten Muna Barat. Secara rinci, perbandingan luas wilayah masing-masing kecamatan dan wilayah administrasi Kabupaten Muna Barat dapat dilihat pada diagram berikut.



Gambar 2. 1 Persentase Luas Wilayah Kecamatan di Muna Barat

1. Kecamatan Sawerigadi memiliki luas 102,6 km², meliputi 10 desa yaitu Desa Ondoke, Desa Nih, Desa Marobea, Desa Waukuni, Desa Maperaha, Desa Kampobalano, Desa Wakoila, Desa Lakalamba, Desa Lawada Jaya, dan Desa Lombu Jaya.
2. Kecamatan Barangka memiliki luas 33,09 km² yang meliputi 8 desa yaitu Desa Barangka, Desa Walelei, Desa Lapolea, Desa Sawerigadi, Desa Bungkolo, Desa Wulai, Desa Wuna, dan Desa Lafinde.
3. Kecamatan Lawa memiliki luas 85,17 km², meliputi 2 kelurahan dan 6 desa yaitu Kelurahan Wamelai, Kelurahan Lapadaku, Desa Latugho, Desa Lalemba, Desa Madampi, Desa Watumela, Desa Lagadi, dan Desa Latompe.
4. Kecamatan Wadaga memiliki luas 175,05 km² yang meliputi 7 desa yaitu Desa Lailangga, Desa Lasosodo, Desa Wakontu, Desa Lakanaha, Desa Katobu, Desa Lindo, dan Desa Kampani.
5. Tiworo Selatan memiliki luas 66,98 km² yang meliputi 5 desa yaitu Desa Parura Jaya, Desa Katangana, Desa Kasimpa Jaya, Desa Sangia Tiworo, dan Desa Barakah.

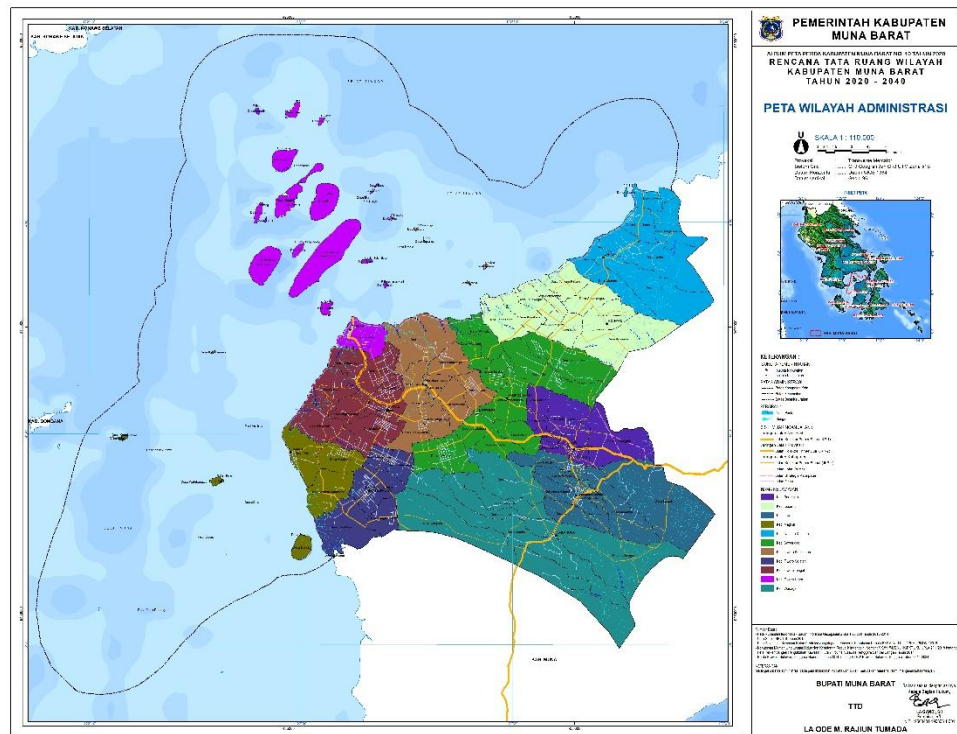
6. Kecamatan Maginti memiliki luas 40,57 km² yang meliputi 8 desa yaitu Desa Pajala, Desa Gala, Desa Maginti, Desa Abadi Jaya, Desa Pasipadanga, Desa Bangko, Desa Kangkunawe, dan Desa Kembar Maminasa.
7. Kecamatan Tiworo Tengah memiliki luas 82,35 km² yang meliputi 8 desa yaitu Desa Langku Langku, Desa Labukolo, Desa Wapae Jaya, Desa Mekar Jaya, Desa Wanseriwu, Desa Momuntu, Desa Lakabu, dan Desa Suka Damai.
8. Kecamatan Tiworo Utara memiliki luas 62,05 km² yang meliputi 6 desa yaitu Desa Tasipi, Desa Mandike, Desa Bero, Desa Santigi, Desa Tondasi, Desa Santiri, dan Desa Tiga.
9. Kecamatan Tiworo Kepulauan memiliki luas 77,9 km² yang meliputi 2 kelurahan dan 7 desa yaitu Kelurahan Tiworo, Kelurahan Waumere, Desa Katela, Desa Lasama, Desa Sido Makmur, Desa Waturempe, Desa Laworo, Desa Wulanga Jaya, dan Desa Wandoke.
10. Kecamatan Kusambi memiliki luas 103,33 km² yang meliputi 1 kelurahan dan 9 desa yaitu Kelurahan Konawe, Desa Guali, Desa Lapokainse, Desa Lemoambo, Desa Kusambi, Desa Kasakamu, Desa Lakawoghe, Desa Bakeramba, Desa Sidamangura, dan Desa Tanjung Pinang.
11. Kecamatan Napano Kusambi memiliki luas 77,19 km² yang meliputi 6 desa yaitu Desa Masara, Desa Lahaji, Desa Uмба, Desa Kombikuno, Desa Latawe, dan Desa Tangkumaho.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara, wilayah Kabupaten Muna Barat memiliki batas-batas administrasi sebagai berikut:

- Bagian Utara berbatasan dengan Selat Tiworo dan Kabupaten Konawe Selatan
- Bagian Timur berbatasan dengan Kecamatan Napabalano (Desa Langkumapo, Desa Napalakura, dan Desa Pentiro), Kecamatan Lasalepa (Desa Kombungo), Kecamatan Kontunga (Desa Lakapodo, Desa Matarawa Kecamatan Watopute, Desa Lapodidi, Desa Liabalano Desa Kontunaga) dan Kecamatan Lohia (Desa Liangkubori) Kabupaten Muna.
- Bagian Selatan berbatasan dengan Desa Komba-Komba, Desa Oensuli, Desa Kabangka Kecamatan Kabangka, Desa Kilambibito, Desa Lembo, Desa Bahutara Kecamatan Kontukowuna Kabupaten Muna.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Tiworo dan Kabupaten Bombana

Batas wilayah digambarkan pada peta wilayah lengkap dengan titik-titik koordinat yang telah mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak terkait yang tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara. Berikut adalah peta wilayah administrasi Kabupaten Muna Barat.



Gambar 2. 2 Peta Administrasi Kabupaten Muna Barat

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Capaian pembangunan daerah dapat digambarkan melalui perkembangan indikator ekonomi makro daerah secara berkala. Aspek kesejahteraan masyarakat pada bagian ini dijelaskan secara spesifik mengenai data dan informasi makro ekonomi Kabupaten Muna Barat yang meliputi beberapa agregat ekonomi seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), PDRB Per Kapita, PDRB Per Sektor, Laju Inflasi, Gini Ratio, dan Angka Kemiskinan. Selain itu, bagian ini juga mengulas mengenai fokus kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan kondisi eksisting persentase Angka Melek Huruf, Angka Harapan Hidup, dan Indeks Pembangunan Manusia pada daerah Kabupaten Muna Barat.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Daya saing suatu wilayah dapat dilihat dari angka pendapatan asli daerah yang dimilikinya, dalam hal ini semakin tinggi pendapatan yang dimilikinya maka akan semakin baik juga performanya dalam melakukan pembiayaan guna mendukung kegiatan pembangunan di

daerah. Hal ini sebagaimana diketahui bahwa adanya pembangunan pasti memerlukan alokasi dana Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber alokasinya.

Pendapatan suatu daerah dapat dilihat dari hasil akumulasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dimilikinya. Produk domestik regional bruto adalah nilai tambah bruto dari seluruh hasil akumulasi barang dan jasa yang dihasilkan suatu wilayah akibat adanya aktivitas ekonomi pada sektor-sektor yang dimilikinya. Pada dasarnya, PDRB dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku yaitu dalam penyusunannya dilakukan berdasarkan harga yang berlaku pada suatu periode tertentu, yang bertujuan untuk melihat struktur perekonomian pada suatu wilayah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan pada harga tahun dasar yang bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yang ada di suatu wilayah.

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Angka pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran terjadinya perubahan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sebagai hasil dari pembangunan yang telah dilaksanakan. Olehnya itu, kebijakan-kebijakan umum dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah harus mempertimbangkan kondisi perekonomian tahun sebelumnya, tahun berjalan dan proyeksi tahun berikutnya yang didukung oleh data-data yang akurat dan dapat dipercaya. Bappeda Kabupaten Muna Barat sebagai leading sektor dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sejak dini terus berupaya menyediakan data-data pertumbuhan ekonomi.

Perekonomian di Kabupaten Muna Barat pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya, namun empirisnya masih bersifat fluktuatif atau tidak stabil. Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Muna Barat ditunjukkan dengan terjadinya peningkatan persentase PDRB pada tahun 2023 yang mencapai 5,46 persen, sedangkan pada tahun sebelumnya di tahun 2022 hanya mencapai 4,08 persen. Walaupun demikian, sebenarnya pada tahun-tahun sebelumnya kondisi perekonomian Muna Barat mampu mencapai pertumbuhan sebesar 6,79 persen di tahun 2019, kemudian 6,62 persen pada tahun 2018, serta 5,31 persen di tahun 2017. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor konstruksi yang menyumbang untuk pertumbuhan PDRB pada tahun 2023 sekitar 8,36 persen. Rata-rata sektor lapangan usaha di Kabupaten Muna Barat memberikan pertumbuhan yang

positif di tahun 2023, hanya lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negative adalah industri pengolahan sebesar 6,66 persen dan jasa Kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 4,51 persen.

Selama periode 2017-2023, struktur ekonomi masyarakat Kabupaten Muna Barat di dominasi dari kelompok lapangan usaha sekunder yang terlihat dari besarnya kenaikan/penurunan peranan masing-masing kelompok lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Muna Barat. Berdasarkan kondisi eksisting, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib memberikan sumbangan tertinggi sebesar 9,40%, kemudian di susul jasa lainnya sebesar 7,20% dan sektor pertanian, kehutanan, perikanan sebesar 6,50%. Selanjutnya sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial memberikan sumbangan sebesar 6,20% dan jasa Pendidikan sebesar 6,10%.

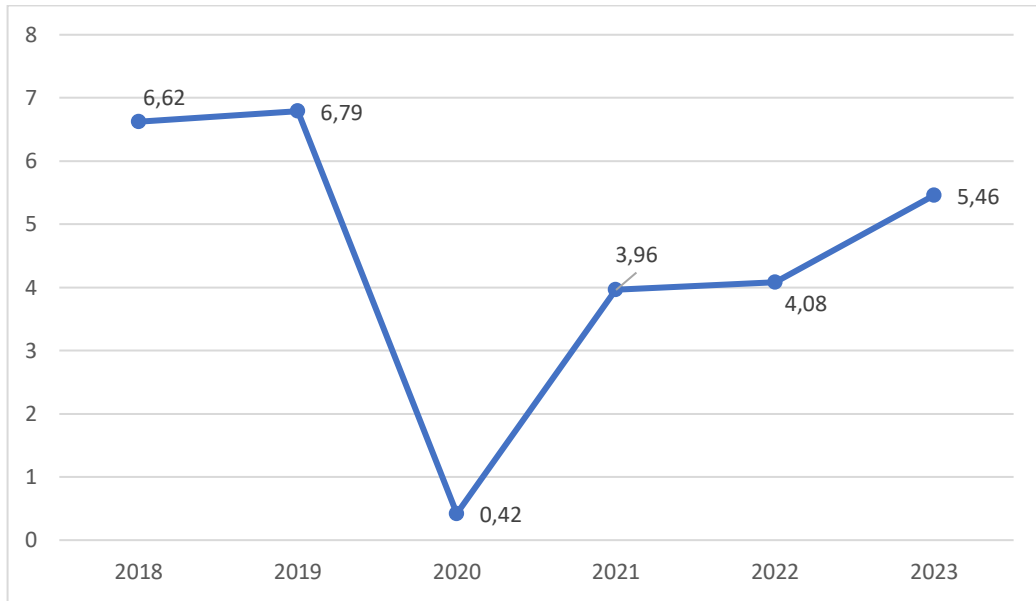
Sementara itu, laju pertumbuhan pertumbuhan PDRB Kabupaten Muna Barat Atas Harga Konstan Menurut Kategori Lapangan Usaha dalam 5 (lima) tahun terakhir di dominasi oleh sektor konstruksi dengan persentase kontribusi terhadap PDRB yaitu sebesar 5,39 % pada tahun terakhir 2021, dan kemudian disusul oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan persentase kontribusi sebesar 4,95 serta sektor Pertambangan dan Penggalian dengan akumulasi kontribusi sebesar 4,92 % pada tahun 2021. Adapun secara detail kontribusi masing-masing sektor perekonomian Daerah Kabupaten Muna Barat terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 3 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Muna Barat Atas Harga Konstan Menurut Kategori Lapangan Usaha (persen) 2018 – 2023

Lapangan Usaha / <i>Industry</i>		2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan / <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	6,31	5,50	2,50	4,33	6,50	5,04
B	Pertambangan dan Penggalian / <i>Mining and Quarrying</i>	7,36	7,30	-3,56	4,92	0,08	4,91
C	Industri Pengolahan / <i>Manufacturing</i>	1,65	3,67	-1,99	2,77	1,85	-6,66
D	Pengadaan Listrik dan Gas / <i>Electricity and Gas</i>	5,93	7,33	0,16	3,98	4,75	5,70
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang / <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	1,78	2,24	1,34	0,45	2,67	7,59
F	Konstruksi / <i>Construction</i>	9,79	9,81	-0,80	5,26	-1,02	8,36

Lapangan Usaha / Industry		2018	2019	2020	2021	2022	2023
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor <i>/ Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	6,98	7,93	-2,02	4,95	5,77	6,39
H	Transportasi dan Pergudangan / <i>Transportation and Storage</i>	5,05	3,51	-2,55	1,80	5,56	2,99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum / <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	8,60	8,13	-0,59	1,77	4,04	8,23
J	Informasi dan Komunikasi / <i>Information and Communication</i>	6,92	7,72	7,83	1,23	2,13	4,34
K	Jasa Keuangan dan Asuransi / <i>Financial and Insurance Activities</i>	5,54	6,55	2,54	3,56	3,39	4,80
L	Real Estat / <i>Real Estate Activities</i>	4,11	6,17	0,37	1,22	3,05	3,86
M, N	Jasa Perusahaan / <i>Business Activities</i>	5,72	5,64	-1,22	1,90	5,68	5,25
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib / <i>Public Administration and Defense; Compulsory Social Security</i>	3,37	5,24	1,93	-0,71	9,40	7,61
P	Jasa Pendidikan / <i>Education</i>	4,42	6,52	1,90	1,13	6,10	7,75
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial <i>/ Human Health and Social Work Activities</i>	6,35	7,98	4,15	4,09	6,20	-4,51
R,S, T,U	Jasa lainnya / <i>Other Services Activities</i>	4,06	5,24	-1,70	1,85	7,20	1,87
Produk Domestik Regional Bruto / Gross Regional Domestic Product		6,62	6,79	0,42	3,96	4,08	5,46

Sumber: Kabupaten Muna Barat Dalam Angka, 2024



Gambar 2. 3 Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan Kab. Muna Barat 2018-2023

Berdasarkan grafik perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Muna Barat tahun 2018-2023 dapat diketahui bahwa terjadi pertumbuhan yang fluktuatif pada persentase perekonomian Daerah Muna Barat. Dalam hal ini, laju pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebelum terjadinya pandemi yaitu sebesar 6,79%, dan pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Muna Barat mengalami kontraksi drastis sehingga berada pada persentase 0,42% sebelum kembali meningkat di tahun 2023 menjadi sebesar 5,46%. Hal ini terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2020 diakibatkan banyaknya kegiatan perekonomian di daerah Muna Barat yang turut terdampak akibat pandemi *Covid-19*. Bahkan, kondisi itu turut berimplikasi pada daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga yang terus menurun selama pandemi *Covid-19* sehingga turut mempengaruhi kegiatan produksi yang secara akumulasi berdampak pada penurunan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, akumulasi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir di Muna Barat dapat dilihat berdasarkan tabel berikut.

Tabel 2. 4 PDRB Kabupaten Muna Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 - 2023 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha / Industry	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan / <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	903,51	984,16	1.012,63	1.091,28	1.210,29	1330,61
B Pertambangan dan Penggalian	246,39	273,42	263,00	278,69	315,82	359,48

Lapangan Usaha / Industry	2018	2019	2020	2021	2022	2023
/ <i>Mining and Quarrying</i>						
C Industri Pengolahan / <i>Manufacturing</i>	78,73	83,55	83,34	88,02	94,99	92,75
D Pengadaan Listrik dan Gas / <i>Electricity and Gas</i>	0,66	0,72	0,73	0,77	0,84	0,92
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang / <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	0,44	0,45	0,46	0,46	0,50	0,54
F Konstruksi / <i>Construction</i>	482,81	545,62	545,41	588,23	625,46	700,77
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor / <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	233,46	258,29	257,66	274,11	308,82	344,32
H Transportasi dan Pergudangan / <i>Transportation and Storage</i>	35,52	37,44	36,49	37,58	44,24	50,20
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum / <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	3,86	4,28	4,28	4,36	4,66	5,13
J Informasi dan Komunikasi / <i>Information and Communication</i>	23,99	25,78	27,33	27,31	28,00	28,89
K Jasa Keuangan dan Asuransi / <i>Financial and Insurance Activities</i>	16,61	18,03	18,39	19,92	21,91	23,36
L Real Estate / <i>Real Estate Activities</i>	38,03	40,64	40,91	41,96	45,16	47,93
M,N Jasa Perusahaan / <i>Business Activities</i>	0,42	0,46	0,47	0,49	0,54	0,59
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib / <i>Public Administration and Defense; Compulsory Social Security</i>	123,55	132,14	137,23	138,68	153,05	167,22
P Jasa Pendidikan / <i>Education</i>	111,51	120,56	124,43	127,22	141,35	158,83
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial / <i>Human Health and Social Work Activities</i>	25,73	28,33	30,10	31,73	34,37	33,29
R,S, T,U Jasa lainnya / <i>Other Services Activities</i>	33,05	35,13	35,23	36,30	40,02	42,16
Produk Domestik Regional Bruto / Gross Regional Domestic Product	2.358,29	2.589,01	2.618,06	2.787,12	3.070,00	3.386,99

Sumber: Kabupaten Muna Barat Dalam Angka, 2024

2.2.1.2 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang di terima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Nilai PDRB per kapita dapat menjadi salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah

dalam periode satu tahun. Nilai PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB atas dasar harga berlaku per kepala atau per satu orang penduduk dalam suatu daerah. Olehnya itu, perkembangan nilai PDRB per kapita dipengaruhi oleh nilai PDRB atas dasar berlaku dan pertumbuhan jumlah penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Muna Barat atas dasar harga berlaku sejak tahun 2018 hingga 2023 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 PDRB per kapita berdasar harga berlaku tercatat sebesar 29,25 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2023 mencapai 37,94 juta rupiah (lihat tabel 2.5). Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Pada tahun 2023 pertumbuhan PDRB per kapita berdasar harga konstan 2010 di Kabupaten Muna Barat mencapai 3,46 persen, sementara tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 2,07 persen. Peningkatan ini menunjukkan bahwa terjadinya pertumbuhan ekonomi per kapita yang nyata dirasakan oleh penduduk di Kabupaten Muna Barat. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain tingkat daya beli masyarakat yang meningkat, kategori perdagangan mengalami ekspansi, atau meningkatnya kegiatan investasi.

Tabel 2. 5 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Muna Barat, 2018-2023

Nilai PDRB (milyar rupiah)							
No.	Kategori	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	ADHB	2.358,29	2.589,01	2.618,06	2.787,12	3 070,00	3.386,98
2.	ADHK	1.725,89	1.843,10	1.850,88	1.926,50	2.002,58	2.111,98
PDRB per Kapita (juta rupiah)							
1.	ADHB	29,25	31,72	30,93	32,88	36,16	37,94
2.	ADHK	21,41	22,58	21,87	22,72	23,59	23,65
3.	Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	5,34	5,48	-3,16	3,79	3,93	3,46
Jumlah Penduduk (ribu orang)		79,65	80,62	84,64	84,77	84.902	84,90
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (%)		1,22	1,25	4,98	0,15	0,15	1,93

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Muna Barat Menurut Lapangan Usaha 2018 – 2023, BPS Kab. Muna Tahun 2024

2.2.1.3 PDRB Per Sektor

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Muna Barat dalam 5 (lima) tahun terakhir masih mendominasi sebagai sektor unggulan dengan kontribusi terbesar dibanding sektor lainnya. Pada tahun 2018 sektor itu memiliki persentase kontribusi terhadap PDRB mampu mencapai 38,31% dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 39,29%, sehingga kondisi tersebut menggambarkan bahwa sektor pertanian/perkebunan menjadi

komoditas teratas dalam struktur perekonomian Daerah Muna Barat serta mencerminkan sosial masyarakatnya yang masih sebagian besar menggeluti sektor primer tersebut. Selain itu, pada posisi ke dua teratas disusul sektor komoditas konstruksi yang juga sejak tahun 2018 persentasenya tergolong fluktuatif, namun masih tergolong dalam trend yang cukup baik dimana di tahun tersebut sektor ini memiliki akumulasi kontribusi terhadap PDRB mencapai 20,47 dan menurun pada tahun 2023 menjadi 20,69. Selanjutnya disusul sektor Pertambangan dan Penggalian dengan persentase 10,61% tahun 2023 dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan persentase kontribusi sebesar 10,17% terhadap PDRB pada tahun 2023.

Tabel 2. 6 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Muna Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kategori Lapangan Usaha (persen) 2018 – 2023

Lapangan Usaha / Industry		2018	2019	2020	2021	2022	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan / <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	38,31	38,01	38,68	39,15	39,42	39,29
B	Pertambangan dan Penggalian / <i>Mining and Quarrying</i>	10,45	10,56	10,05	10,00	10,29	10,61
C	Industri Pengolahan / <i>Manufacturing</i>	3,34	3,23	3,18	3,16	3,09	2,74
D	Pengadaan Listrik dan Gas / <i>Electricity and Gas</i>	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang / <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F	Konstruksi / <i>Construction</i>	20,47	21,07	20,83	21,11	20,37	20,69
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor / <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	9,90	9,98	9,84	9,83	10,06	10,17
H	Transportasi dan Pergudangan / <i>Transportation and Storage</i>	1,51	1,45	1,39	1,35	1,44	1,48
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum / <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	0,16	0,17	0,16	0,16	0,15	0,15
J	Informasi dan Komunikasi / <i>Information and Communication</i>	1,02	1,00	1,04	0,98	0,91	0,85
K	Jasa Keuangan dan Asuransi / <i>Financial and Insurance Activities</i>	0,70	0,70	0,70	0,71	0,71	0,69
L	Real Estat / <i>Real Estate Activities</i>	1,61	1,57	1,56	1,51	1,47	1,42
M, N	Jasa Perusahaan / <i>Business Activities</i>	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Lapangan Usaha / Industry		2018	2019	2020	2021	2022	2022
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib / <i>Public Administration and Defense; Compulsory Social Security</i>	5,24	5,10	5,24	4,98	4,99	4,94
P	Jasa Pendidikan / <i>Education</i>	4,73	4,66	4,75	4,56	4,60	4,69
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial / <i>Human Health and Social Work Activities</i>	1,09	1,09	1,15	1,14	1,12	0,98
R,S, T,U	Jasa lainnya / <i>Other Services Activities</i>	1,40	1,36	1,35	1,30	1,30	1,24
Produk Domestik Regional Bruto / Gross Regional Domestic Product		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kabupaten Muna Barat Dalam Angka, 2024

2.2.1.4 Indeks Gini Ratio

Ada berbagai tolok ukur yang dapat digunakan untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan, antara lain *Kurva Conrad Lorenz*, *Corrado Gini Coefficient*, *Kuznets Index*, *Oshima Index* dan *Theil Decomposition Index*. Namun yang paling banyak dan juga digunakan di Indonesia adalah *Gini Coefficient* atau lebih dikenal dengan nama *Gini Ratio (GR)*. Dalam hal ini, indeks gini atau gini rasio adalah ukuran distribusi pendapatan di seluruh populasi. Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh pada suatu daerah. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

Pada tahun 2023 Kabupaten Muna Barat memiliki gini ratio sebesar 0,318. Angka ini tergolong meningkat artinya semakin menurunnya kesenjangan di Muna Barat dibandingkan pada capaian tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 (0,41), 2019 (0,37), 2020 (0,37), 2021 (0,33) dan 2022 (0,32) Secara lebih jelas dalam 6 (enam) tahun terakhir capaian gini ratio Kabupaten Muna Barat memiliki indeks gini ratio secara akumulasi tergambar berdasarkan tabel berikut.

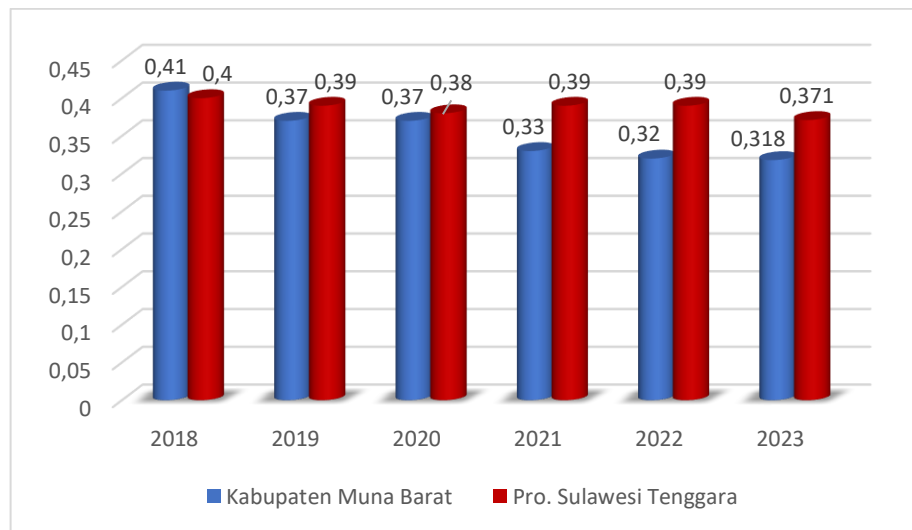
Tabel 2. 7 Perbandingan Gini Rasio di Kabupaten Muna Barat dan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2018-2023

Tahun	Gini Ratio Muna Barat	Gini Ratio Sulawesi Tenggara
2018	0,41	0,41
2019	0,37	0,39
2020	0,37	0,38
2021	0,33	0,39

2022	0,32	0,39
2023	0,318	0,371

Sumber: Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam lima tahun terakhir nilai gini ratio Muna Barat terus mengalami fluktuatif dan cenderung mengalami trend yang positif pada tahun 2023 yang hanya mencapai 0,318. Bahkan nilai tersebut mampu menempatkannya berada diatas nilai capaian ratio provinsi yaitu sebesar 0,371. Perbandingan indeks gini Kabupaten Muna Barat dengan Provinsi Sulawesi Tenggara pada beberapa tahun terakhir ini dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.4 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Muna Barat dengan Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023

Sumber: Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka, 2024

2.2.1.5 Kemiskinan

a) Penduduk di Atas Garis Kemiskinan

Kemiskinan didasarkan pada ketidakmampuan individu untuk mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemiskinan absolute yang pengukuran tingkat kemiskinan didasarkan pada satu garis yang disebut sebagai Garis Kemiskinan (GK). Garis kemiskinan ini terdiri dari 2 komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil di konsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan

2.100 kilo kalori per kapita per hari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan cara menghitung terlebih dahulu harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/sub kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas konsumsi pengeluaran. GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin.

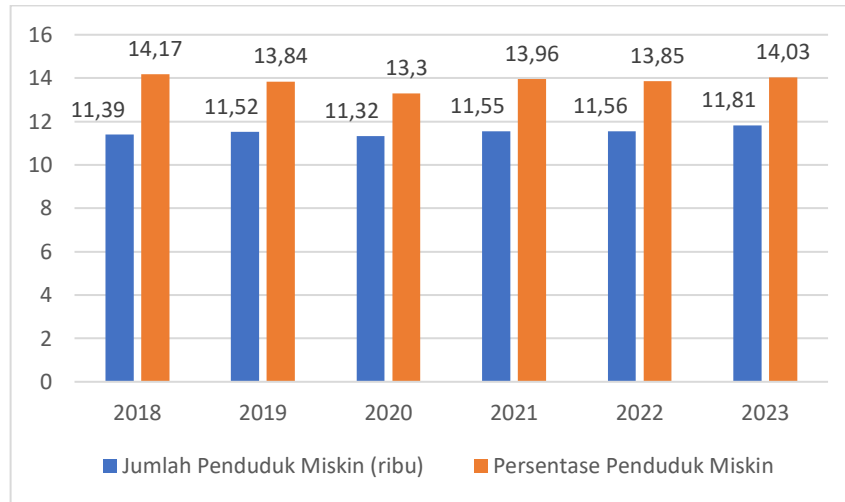
Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap GK. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari GK. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Masalah kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang menjadi pusat perhatian Pemerintah Daerah. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 8 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Muna Barat, 2018–2023

Tahun	Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
2018	315.009,00	11,39	14,17
2019	342.811,00	11,52	13,84
2020	357.477,00	11,32	13,30
2021	367.868,00	11,55	13,96
2022	382.129,00	11,56	13,85
2023	412.697	11,81	14,03

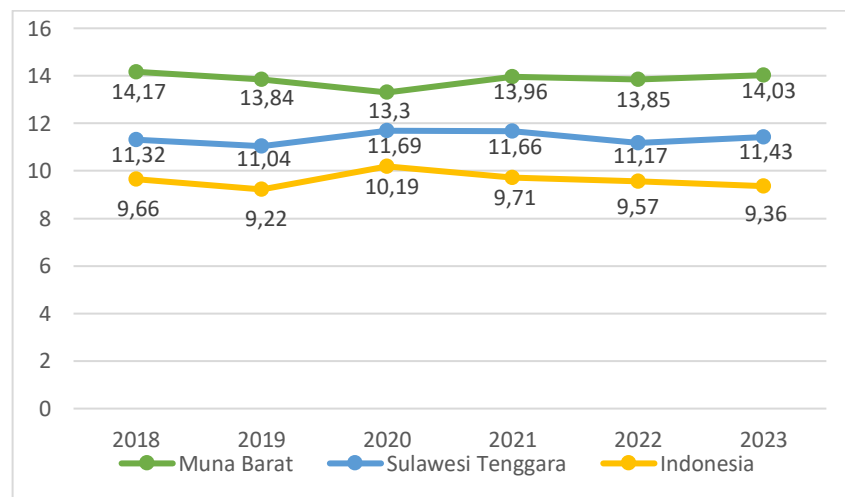
Sumber: Kabupaten Muna Barat Dalam Angka, 2024



Gambar 2. 5 Perbandingan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023

Sumber: Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka, 2024

Berdasarkan data kemiskinan di atas maka dapat diketahui bahwa garis kemiskinan masyarakat Kabupaten Muna Barat dalam enam tahun terakhir persentasenya mengalami kenaikan dimana pada tahun 2018 mencapai 315.009 jiwa dan pada tahun 2023 menjadi 412.697 jiwa. Sementara itu berdasarkan persentasenya, kemiskinan Muna Barat pada tahun 2023 tercatat mencapai 14,03% dan itu masih diatas perolehan Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 11,43% dan Nasional yang berada pada 9,36%. Secara lebih jelas akumulasi skema perbandingan persentase penduduk miskin Muna Barat, Sulawesi Tenggara, dan Indonesia dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2. 6 Persentase Perbandingan Kemiskinan Muna Barat, Sulawesi Tenggara, dan Indonesia 2018-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik 2023

b) Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin, sehingga kondisi tersebut menjadi semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Adapun indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 9 Indeks Kedalaman Kemiskinan Muna Barat diantara Daerah Lain di Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023

Daerah	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)					
	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Buton	2.08	1.87	1.94	1.84	1.25	1.93
Kab. Muna	1.70	1.71	1.86	1.90	1.57	2.21
Kab. Konawe	2.47	2.23	1.71	2.67	2.86	2.35
Kab. Kolaka	2.92	1.79	1.99	3.02	1.54	1.95
Kab. Konawe Selatan	1.50	1.65	1.77	1.98	2.18	2.20
Kab. Bombana	2.46	1.01	1.35	1.94	1.32	2.05
Kab. Wakatobi	2.90	2.19	2.73	2.37	2.18	3.64
Kab. Kolaka Utara	2.71	3.20	2.28	2.52	2.80	2.93
Kab. Buton Utara	1.95	1.63	2.34	2.46	2.66	2.13
Kab. Konawe Utara	2.85	2.66	2.92	2.40	2.52	2.47
Kab. Kolaka Timur	3.55	2.25	2.18	2.18	1.86	2.49
Kab. Konawe Kepulauan	4.59	3.73	2.56	4.05	3,09	2.79
Kab. Muna Barat	2.09	2.20	1.98	2.03	1.99	1.92
Kab. Buton Tengah	1.23	1.64	1.91	2.14	1.81	1.72
Kab. Buton Selatan	3.32	2.38	1.82	1.87	2.12	2.00
Kota Kendari	0.70	0.80	0.67	0.84	0.73	0.64
Kota Bau-Bau	1.00	1.05	1.05	1.05	0.80	1.21
Sulawesi Tenggara	2.04	2.23	2.04	2.16	1.82	1.96

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, 2024

Berdasarkan data indeks kedalaman kemiskinan di atas, dapat diketahui bahwa seluruh daerah kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami kondisi yang fluktuatif dari tahun 2018 hingga 2023. Sementara itu, Kabupaten Muna Barat telah berada pada nilai indeks 2 (dua) dalam hal indeks kemiskinan, sehingga kondisinya belum cukup baik.

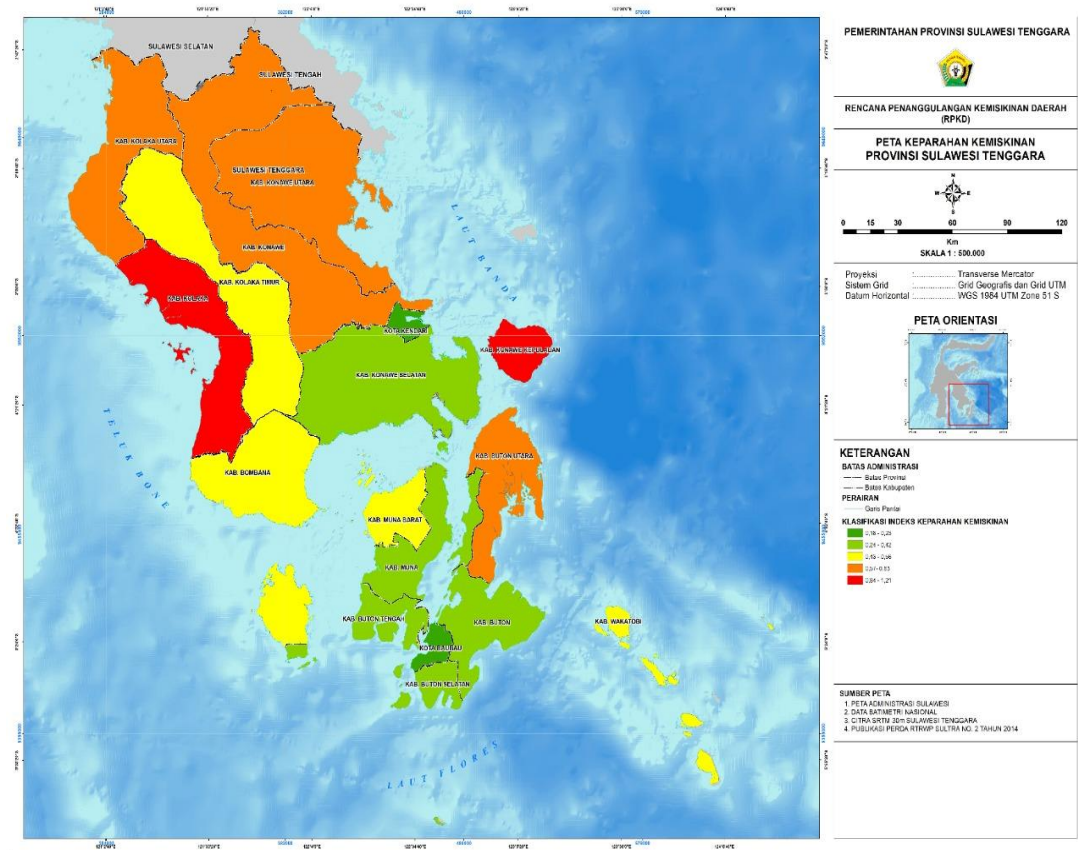
Hasil akhir dari indeks keparahan kemiskinan ini menetapkan, semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Tabel 2. 10 Indeks Keparahhan Kemiskinan Muna Barat diantara Daerah Lain di Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023

Daerah	Indeks Keparahhan Kemiskinan (P1)					
	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Buton	0.47	0.41	0.41	0.42	0.24	0.37
Kab. Muna	0.34	0.40	0.46	0.39	0.30	0.50
Kab. Konawe	0.65	0.58	0.35	0.83	0.85	0.60
Kab. Kolaka	0.96	0.50	0.55	0.98	0.31	0.50
Kab. Konawe Selatan	0.32	0.38	0.41	0.52	0.57	0.55
Kab. Bombana	0.73	0.20	0.32	0.56	0.27	0.55
Kab. Wakatobi	0.74	0.58	0.73	0.52	0.46	1.22
Kab. Kolaka Utara	0.74	1.13	0.64	0.68	0.82	0.90
Kab. Buton Utara	0.37	0.36	0.61	0.61	0.72	0.48
Kab. Konawe Utara	0.81	0.74	0.86	0.63	0.69	0.63
Kab. Kolaka Timur	1.22	0.58	0.53	0.46	0.46	0.64
Kab. Konawe Kepulauan	1.56	1.14	0.60	1.21	0.90	0.73
Kab. Muna Barat	0.40	0.48	0.39	0.47	0.47	0.37
Kab. Buton Tengah	0.25	0.34	0.38	0.38	0.34	0.34
Kab. Buton Selatan	1.31	0.61	0.42	0.38	0.43	0.44
Kota Kendari	0.21	0.26	0.16	0.23	0.15	0.13
Kota Bau-Bau	0.22	0.28	0.20	0.18	0.17	0.38
Sulawesi Tenggara	0.52	0.59	0.53	0.56	0.42	0.56

Sumber: Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka, 2024

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa posisi Muna Barat dalam hal Indeks Keparahhan Kemiskinan sudah cukup baik karena telah berada di bawah 1 (satu). Walaupun demikian namun, sesungguhnya pencapaian ini masih belum cukup memuaskan jika dibandingkan pencapaian daerah lain di Sulawesi Tenggara seperti Kota Kendari sebesar 0.13 dan Kabupaten Buton Tengah 0.34. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi pencapaian Indeks Keparahhan Kemiskinan Muna Barat dalam enam tahun terakhir mulai tahun 2018 hingga tahun 2023 terjadi fluktuasi namun cenderung ke arah positif setiap tahunnya. Adapun secara visualisasi sebaran keparahan kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 8 Peta Keperahan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Tenggara

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pemerintah Kabupaten Muna Barat telah menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2022-2026 yang menjabarkan profil gambaran tentang kondisi kemiskinan konsumsi dan nonkonsumsi selama 5 periode terakhir di Kabupaten Muna Barat. Dokumen ini disusun untuk menjadi acuan bagi stakeholder dalam mewujudkan percepatan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Muna Barat serta untuk menjabarkan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan yang telah tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2005-2025. Selain itu, RPKD juga menjabarkan strategi dasar penanggulangan kemiskinan nasional ke dalam konteks permasalahan yang ada di daerah Kabupaten Muna Barat. Dokumen RPKD juga bertujuan untuk mendorong sinergitas dan penyelarasan serta memastikan agar penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas intervensi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah, swasta, masyarakat dan pihak lainnya.

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Muna Barat didasari oleh karakteristik permasalahan dan potensi yang dimiliki. Tujuan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten

Muna Barat adalah **meningkatkan status kesejahteraan penduduk miskin** ke tingkat yang lebih tinggi hingga berada di atas garis kemiskinan. Sasaran yang akan dicapai dalam penanggulangan kemiskinan adalah menurunnya angka kemiskinan konsumsi dan percepatan penghapusan penduduk miskin ekstrem.

Berdasarkan sasaran, strategi, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Muna Barat, maka dirumuskan program terkait penanggulangan kemiskinan daerah yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun hingga tahun 2026. Terdapat tiga program utama dalam penanggulangan kemiskinan daerah yang merujuk pada Permendagri No. 53 Tahun 2020 yaitu **pertama** Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu **kedua** Program Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil, dan **ketiga** Program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Angka Melek Huruf (AMH)

Salah satu kebutuhan dasar penduduk untuk berkomunikasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Dimana hal ini merupakan keterampilan minimum yang dibutuhkan penduduk dalam proses bermasyarakat. sehingga penduduk dapat berperan lebih aktif dalam pembangunan ekonomi yang berkesinambungan di Kabupaten Muna Barat. Kemampuan membaca dan menulis tercermin dari indikator angka melek huruf. Angka Melek Huruf (AMH) merupakan salah satu indikator pencapaian program pendidikan di Indonesia. Secara matematis. angka ini memperlihatkan rasio antara jumlah penduduk yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia lima belas tahun keatas dalam satuan ratusan. Indikator tersebut penting mengingat melek huruf merupakan pintu dari segala ilmu pengetahuan. Pada tahun 2023 terdapat 94.86 persen penduduk berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten Muna Barat yang sudah mampu membaca dan menulis huruf latin.

Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu. karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi. sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Akumulasi persentase angka melek huruf masyarakat Muna Barat lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 11 Perkembangan Angka Melek Huruf Muna Barat Tahun 2018-2023

Tahun	Angka Melek Huruf (%)
2018	88.33
2019	88.38
2020	89.95
2021	89.47
2022	93,72
2023	94,86

Sumber: Kabupaten Muna Barat Dalam Angka, 2024

Pendidikan merupakan salah satu penentu kualitas penduduk. Indikator atau ukuran yang bisa digunakan untuk melihat tingkat kemajuan pendidikan di suatu daerah antara lain adalah dengan melihat persentase harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Kualitas sumber daya manusia sangatlah bergantung dari pembangunan di bidang pendidikan.

2.2.2.2 Rata-Rata Lama Sekolah

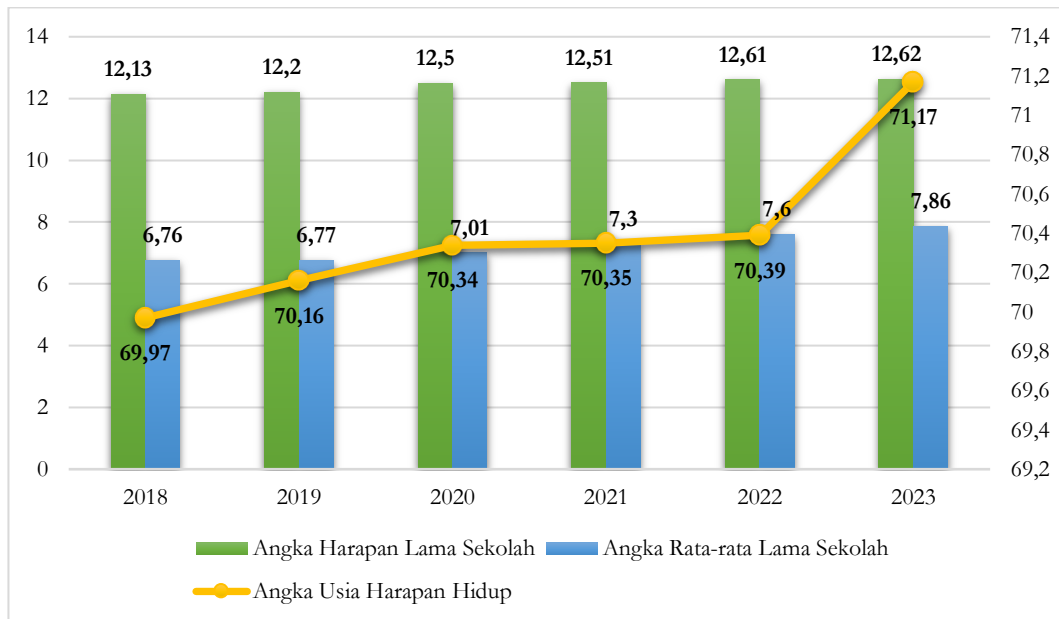
Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh seluruh jenjang pendidikan formal yang dijalani dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir.

Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Muna Barat pada tahun 2023 mencapai 7,86 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk Muna Barat baru dapat bersekolah hingga jenjang SMP kelas satu. Sementara itu, Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Muna Barat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dalam hal ini, Angka Harapan Hidup masyarakat Muna Barat pada tahun 2023 mencapai sebesar 71,17 tahun.

Tabel 2. 12 Angka HLS, RLS, AHH Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023

No.	Tahun	Angka Harapan Lama Sekolah	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Angka Usia Harapan Hidup
1.	2018	12.13	6.76	69.97
2.	2019	12.20	6.77	70.16
3.	2020	12.50	7.01	70.34
4.	2021	12.51	7.30	70.35
5.	2022	12.61	7.60	70.39

Sumber: Kabupaten Muna Barat Dalam Angka, 2024



Gambar 2. 9 Persentase Perbandingan Angka HLS, RLS, AHH Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023

Sumber: Kabupaten Muna Barat Dalam Angka, 2024

Berdasarkan visualisasi komponen data Angka Harapan Lama Sekolah, Angka rata-rata lama sekolah, dan Angka usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Muna Barat dalam lima tahun terakhir secara konsisten terus mengalami peningkatan sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Kondisi ini menjadi peluang yang cukup baik dalam mendukung terwujudnya kapasitas sumber daya manusia yang berkualitas di Muna Barat yang dicerminkan melalui terwujudnya Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Muna Barat tahun 2023 sebesar 67,44 dan walaupun nilai tersebut masih berada dibawah nilai IPM Provinsi yaitu 72,79 dan Nasional 74,39 angka tersebut sudah tergolong cukup baik bila dibandingkan dengan daerah otonomi baru pada Sulawesi Tenggara yaitu Kabupaten Buton Tengah yang memiliki IPM 66,94 dan Kabupaten Buton Selatan 67,19. Bahkan, persentase Indeks Pembangunan Manusia Muna Barat tentu dapat terus meningkat seiring dengan upaya transformasi sistem pendidikan serta peran serta pemerintah daerah dalam mendukung serta meningkatkan kesiapan fasilitas pembelajaran serta tenaga pendidik yang berkompeten.

2.2.2.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

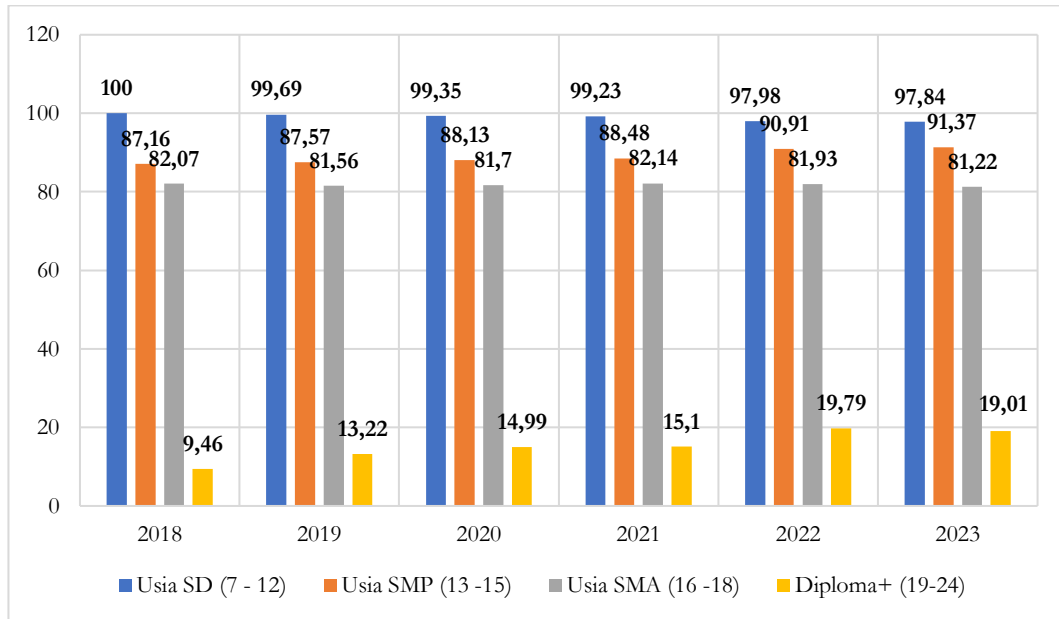
Pada tahun 2023 APS Kabupaten Muna Barat, untuk anak usia 7-12 tahun sebesar 97,84 persen. Angka ini menunjukkan bahwa persentase anak usia 7-12 tahun yang bersekolah hanya 97,84 persen. Sisanya tidak bersekolah. Anak yang tidak bersekolah terdiri dari anak yang sudah memasuki usia sekolah tetapi belum bersekolah dan anak yang putus sekolah. Sementara itu, APS anak usia 13-15 tahun lebih rendah dibanding APS anak usia 7-12 tahun. Demikian juga APS anak usia 16-18 tahun jauh lebih rendah dibanding APS anak usia 7-12 tahun. APS anak usia 13-15 tahun sebesar 91,37 persen dan APS anak usia 16-18 tahun sebesar 81,22 persen. Angka ini menunjukkan bahwa ada sekitar 91 anak usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah dari 100 anak usia 13-15 tahun. Sedangkan untuk anak usia 16-18 tahun keadaannya lebih rendah, yaitu dari 100 anak usia 16-18 tahun hanya sekitar 81 anak yang sedang bersekolah. Semakin tinggi usia anak, partisipasi sekolahnya semakin menurun. Adapun akumulasi lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 13 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Usia SD (7 - 12)	100.00	99.69	99.35	99.23	97,98	97,84
Usia SMP (13 -15)	87.16	87.57	88.13	88.48	90,91	91,37
Usia SMA (16 -18)	82.07	81.56	81.70	82.14	81,93	81,22
Diploma+ (19-24)	9.46	13.22	14.99	15.10	19,79	19,01

Sumber: Kabupaten Muna Barat Dalam Angka, 2024

Berdasarkan data pada Tabel 2.13, APS Kabupaten Muna Barat menunjukkan trend yang beragam. Partisipasi pada usia SD terus berada pada tingkat yang sangat baik, sementara partisipasi pada usia SMP menunjukkan peningkatan positif. Namun, partisipasi pada usia SMA mengalami stagnasi, dan tingkat partisipasi untuk pendidikan tinggi masih rendah meskipun terus meningkat. Upaya untuk mempertahankan partisipasi tinggi pada usia SD dan SMP, serta meningkatkan partisipasi pada tingkat SMA dan pendidikan tinggi, menjadi penting dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia yang lebih baik di Kabupaten Muna Barat.



Gambar 2. 10 Perkembangan APS Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023

Sumber: Kabupaten Muna Barat Dalam Angka, 2024

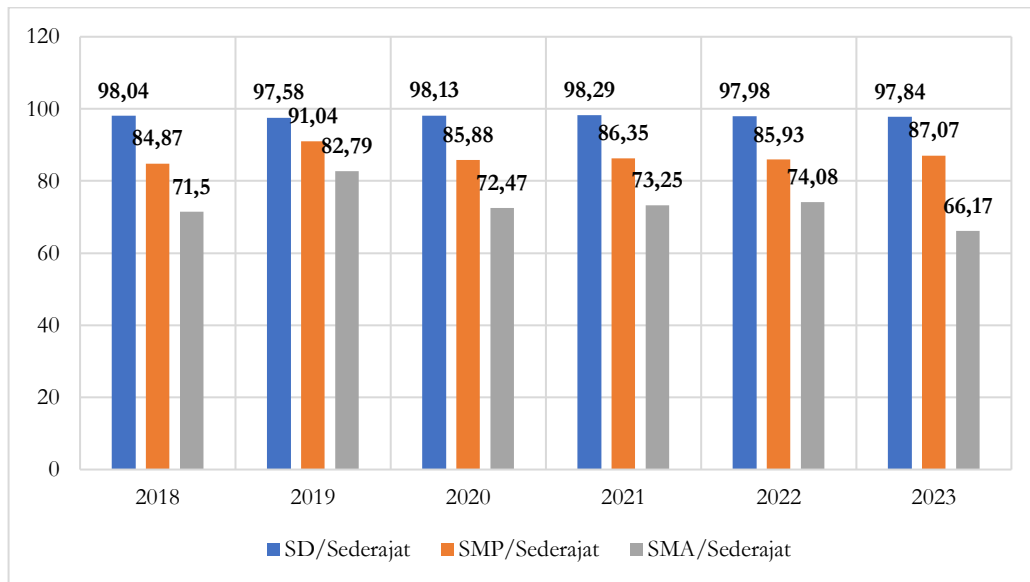
2.2.2.4 Angka Partisipasi Murni (APM)

Selain angka partisipasi sekolah, umumnya untuk melihat partisipasi anak/masyarakat terhadap dunia pendidikan digunakan juga Angka Partisipasi Murni (APM). APM merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Muna Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 14 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023

Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
SD/Sederajat	98,04	97,58	98,13	98,29	97,98	97,84
SMP/Sederajat	84,87	91,04	85,88	86,35	85,93	87,07
SMA/Sederajat	71,50	82,79	72,47	73,25	74,08	66,17

Sumber: Kabupaten Muna Barat Dalam Angka, 2024



Gambar 2. 4 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023

Sumber: Kabupaten Muna Barat Dalam Angka 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 APM penduduk di Kabupaten Muna Barat untuk jenjang pendidikan SD/ sederajat tercatat sebesar 97,84 persen. Angka ini menunjukkan bahwa dari 100 anak usia 7-12 tahun di Kabupaten Muna Barat ada sekitar 98 anak diantaranya sedang bersekolah pada jenjang pendidikan SD/ Sederajat. Sedangkan APM jenjang pendidikan SMP/ Sederajat 87,07 dan SMA/ Sederajat masing-masing tercatat sebesar 66,17 persen dibandingkan dengan provinsi angka partisipasi murni Kabupaten Muna Barat telah berada di atas yaitu dengan persentase mencapai 97,84 persen untuk SD, 87,07 persen SMP dan 66,17 persen SMA. sehingga capaian APM Muna Barat masih lebih baik dibandingkan Provinsi Sulawesi Tenggara.

2.2.2.5 Angka Harapan Hidup

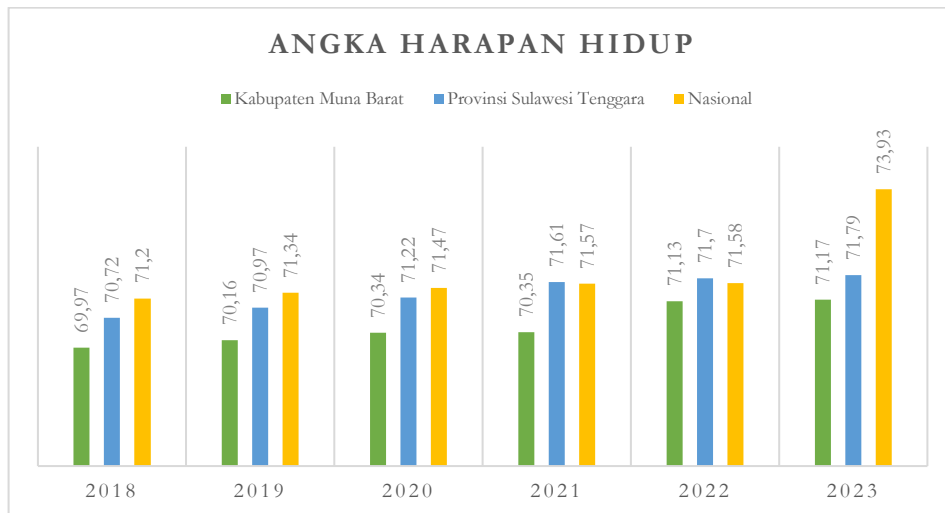
Derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi yang secara tak langsung dapat meningkatkan angka harapan hidup. Angka harapan hidup pada saat lahir (*life expectancy at birth*) ialah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka Harapan Hidup penduduk Muna Barat dari tahun ke tahun terus meningkat. Meningkatnya atau menurunnya Angka Harapan Hidup tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi, diantaranya ketersediaan sarana kesehatan yang memadai, petugas kesehatan yang kompeten dan kesadaran masyarakat. Usia harapan hidup masyarakat Muna Barat mengalami pertumbuhan setiap tahunnya.

Tabel 2. 15 Angka Harapan Hidup Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023

No.	Tahun	Angka usia Harapan Hidup
1.	2018	69,97
2.	2019	70,16
3.	2020	70,34
4.	2021	70,35
5.	2022	71,13
6.	2023	71,17

Sumber: Kabupaten Muna Barat Dalam Angka, 2024

Berdasarkan data di atas maka dapat diketahui bahwa angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Muna Barat dari tahun ke tahun cenderung meningkat dari tahun 2018 hingga tahun 2023, tercatat pada tahun 2018 sebesar 69,97, tahun 2019 mencapai 70,16 tahun 2020 mencapai 70,34, tahun 2021 mencapai 70,35, tahun 2022 mencapai 71,13 dan pada tahun 2023 mencapai 71,17. Peningkatan angka harapan hidup ini menunjukkan peningkatan derajat hidup masyarakat. Angka Harapan Hidup Kabupaten Muna Barat tahun 2023 sebesar 71,17. Gambar berikut ini memberikan gambaran kondisi perbandingan angka harapan hidup tingkat Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional.



Gambar 2. 5 Perbandingan Angka Usia Harapan Hidup Masyarakat Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2018-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

2.2.2.6 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

Secara umum, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Muna Barat terus mengalami peningkatan selama periode 2018 hingga 2023. IPM Muna Barat meningkat dari 64,11 pada tahun 2018 menjadi 67,44 pada tahun 2023, walaupun IPM Muna Barat masih berada dibawah IPM Provinsi 72,94 dan Nasional 74,39. Selama periode 2018 hingga 2023, IPM Muna Barat menunjukkan kemajuan yang besar, status pembangunan manusia Muna Barat mengalami peningkatan.

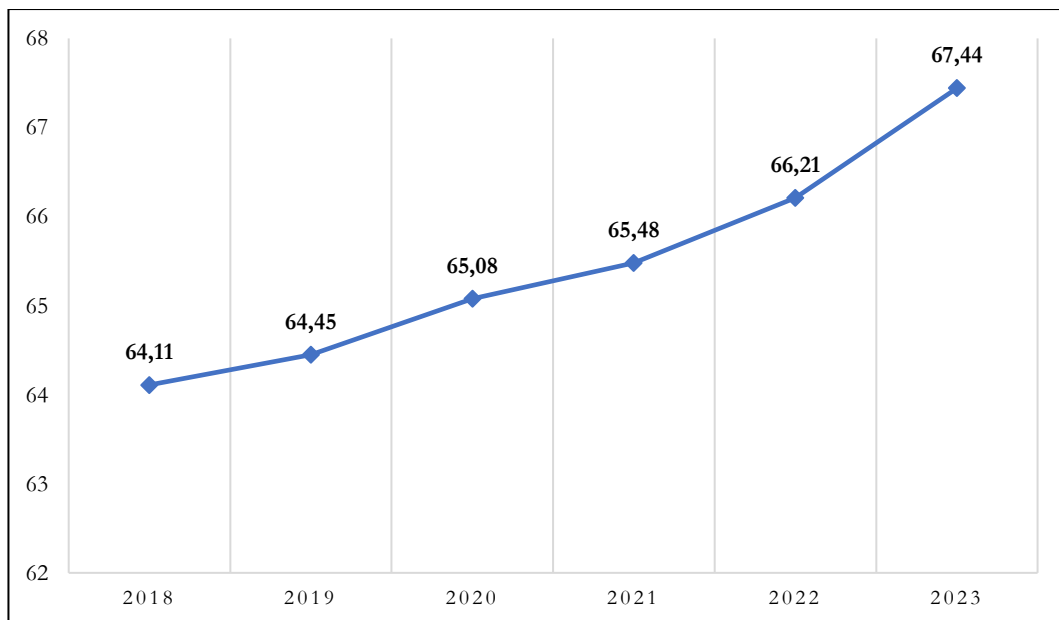
Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun.

Tabel 2. 16 Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Muna Barat Tahun 2018-2023

Komponen	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Harapan Hidup Saat lahir (AHH)	Tahun	69,97	70,16	70,34	70,35	70,39	71,17
Harapan Lama Sekolah(HLS)	Tahun	12.13	12.20	12.50	12.51	12,61	12,62
Rata-rata Lama Sekolah(RLS)	Tahun	6.76	6.77	7.01	7.3	7,60	7,86
Pengeluaran per Kapita	Rp000	7.405,00	7.526,00	7.485,00	7.502,00	7.668,000	8.076,00
IPM	Poin	64,11	64,45	65,08	65,81	66,53	67,44

Sumber: Kabupaten Muna Barat Dalam Angka, 2024

Seiring dengan meningkatnya angka IPM Kabupaten Muna Barat. indeks masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2018 hingga 2023. IPM tertinggi adalah terjadi pada tahun 2023 yaitu 67,44. Sedangkan untuk Kabupaten dengan IPM paling rendah yaitu terjadi pada tahun 2018 yang mencapai sebesar 64,11.



Gambar 2. 6 Perkembangan IPM Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023

Sumber: Kabupaten Muna Barat Dalam Angka, 2024

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.3.1.1 Urusan Pendidikan dan Kebudayaan

Tingkat kemajuan peradaban suatu wilayah dapat dilihat dari kualitas pendidikannya. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Penduduk dengan pendidikan yang tinggi akan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi diwilayahnya, sebaliknya daerah dengan rata-rata pendidikan penduduknya yang rendah, maka dapat berdampak pada tingkat produktivitas yang rendah pula pada masyarakatnya. Kabupaten Muna Barat pada tahun 2023 secara akumulasi ketersediaan sarana sekolah dan tenaga pengajar (guru) dapat dilihat berdasarkan tabel berikut.

Tabel 2. 17 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Sekolah, Guru, dan Murid di Kabupaten Muna Barat Tahun 2023

No.	Kecamatan	Sekolah	Guru	Murid
1.	Tiworo Kepulauan	18	252	1999
2.	Maginti	19	243	2393
3.	Tiworo Tengah	13	159	1552
4.	Tiworo Selatan	10	143	1252
5.	Tiworo Utara	16	200	1354
6.	Lawa	13	221	2033
7.	Sawerigadi	18	243	1637
8.	Barangka	16	258	1728
9.	Wadaga	13	221	1296
10.	Kusambi	23	479	3949
11.	Napano Kusambi	11	162	1279
Muna Barat		170	2.581	20.472

Sumber: Kabupaten Muna Barat Dalam Angka, 2024

Tabel 2. 18 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Sekolah, Guru, dan Murid Berdasarkan Jenjang di Kabupaten Muna Barat Tahun 2023

No.	Tingkat	Sekolah	Guru	Murid
1.	SD/MI	100	1093	10.698
2.	SMP/MTs	48	796	5104
3.	SMA/MA	22	692	4670

Sumber: Kabupaten Muna Barat Dalam Angka, 2024

Berdasarkan data pada tabel 2.17 dan 2.18, terlihat bahwa sarana pendidikan berupa sekolah telah tersedia di seluruh 11 kecamatan di Kabupaten Muna Barat. Fasilitas pendidikan ini mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA, yang menunjukkan pemerataan distribusi sekolah di setiap wilayah. Hal ini memberikan akses yang cukup baik bagi siswa untuk memperoleh layanan pendidikan, tanpa terkendala oleh jarak atau keterbatasan fasilitas di kecamatan masing-masing.

Ketersediaan sekolah yang merata ini menjadi potensi besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Muna Barat. Dengan fasilitas yang sudah mencakup semua jenjang pendidikan, kondisi ini juga turut mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan wajib belajar 12 tahun. Pemerataan fasilitas pendidikan ini tidak hanya menjawab kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga memperkuat pondasi pembangunan manusia di masa depan.

a) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. Perkembangan capaian Angka Partisipasi Kasar menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Muna Barat sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.

Tabel 2. 19 Persentase Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Muna Barat Tahun 2023

Jenjang Pendidikan	Persentase Capaian Angka Partisipasi Kasar		
	2021	2022	2022
SD/MI	105,17	105,33	104,32
SMP/MTs	95,10	99,05	99,21
SMA/MA	82,32	82,68	77,85

Sumber: Kabupaten Muna Barat Dalam Angka, 2024

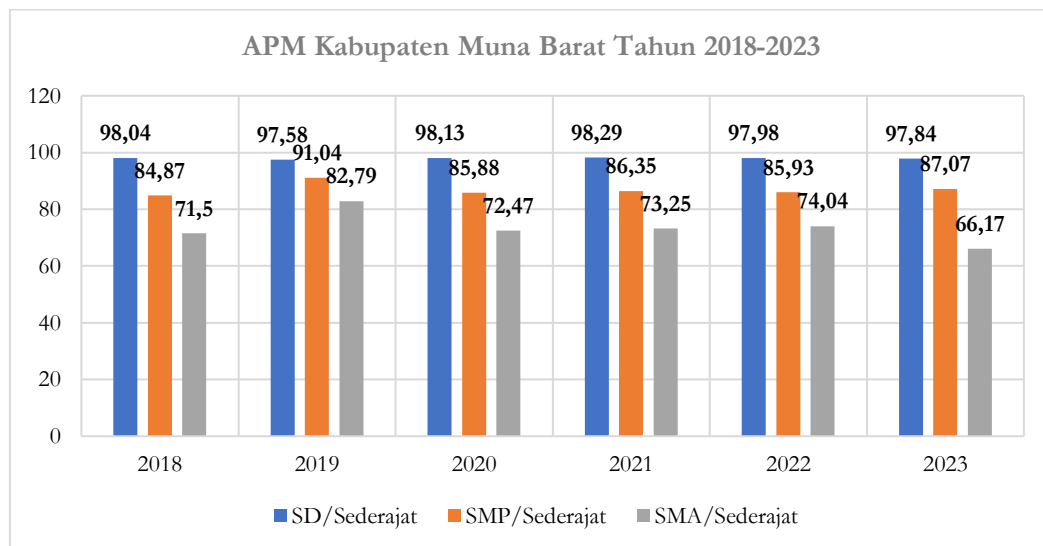
b) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan dan juga merupakan salah satu indikator tonggak kunci keberhasilan terhadap pemerataan serta perluasan akses pendidikan. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Muna Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 20 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023

Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
SD/Sederajat	98,04	97,58	98,13	98,29	97,98	97,84
SMP/Sederajat	84,87	91,04	85,88	86,35	85,93	87,07
SMA/Sederajat	71,50	82,79	72,47	73,25	74,04	66,17

Sumber: Kabupaten Muna Barat Dalam Angka, 2024



Gambar 2. 7 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023

Sumber: Kabupaten Muna Barat Dalam Angka, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 APM masyarakat Muna Barat untuk jenjang pendidikan SD/ sederajat tercatat sebesar 97,84% atau menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 98,98%. Angka ini menunjukkan bahwa dari 100 anak usia 7-12 tahun di Kabupaten Muna Barat ada sekitar 97 anak diantaranya sedang bersekolah pada jenjang pendidikan SD/ Sederajat. Sedangkan APM jenjang pendidikan SMP/ Sederajat dan SMA/ Sederajat masing-masing tercatat sebesar 87,07% dan 66,17% sementara dibandingkan dengan Provinsi Angka Partisipasi Murni Kabupaten Muna Barat telah berada di atas yaitu dengan persentase mencapai 98,48 persen untuk SD, 76,54 persen SMP, dan 64,00 persen SMA, sehingga capaian APM Muna Barat masih lebih baik dibandingkan Provinsi Sulawesi Tenggara.

2.3.1.2 Urusan Kesehatan

Dinas Kesehatan merupakan salah satu lembaga yang berperan penting dalam upaya mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Aspek-aspek kesehatan yang berkaitan dengan produktivitas masyarakat melalui kondisi kesehatan yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini menjadi penting mengingat dengan ketersediaan layanan kesehatan yang bermutu mampu mendukung terwujudnya sasaran dari rencana strategis Dinas Kesehatan maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muna Barat.

a) Fasilitas Kesehatan

Selain itu, kondisi kesehatan yang baik mampu mempengaruhi tingkat fungsional seseorang, baik dari segi fisiologis, psikologis dan dimensi sosiokultural. Tubuh yang memiliki kondisi kurang sehat dapat menyebabkan kesulitan dalam memperoleh makanan yang berkualitas dan bergizi tinggi, sehingga menjadi rentan terjerumus dalam jurang kemiskinan (Mulyadi 2011). Hal ini disebabkan karena pada prinsipnya bersama dengan pendidikan, kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi. Olehnya itu ketersediaan sarana dan tenaga kesehatan yang baik secara kuantitas maupun kualitas menjadi hal positif yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Muna Barat.

Tabel 2. 21 Fasilitas Kesehatan Kabupaten Muna Barat Tahun 2023

Fasilitas Kesehatan	Ketersediaan
Rumah Sakit	1
Puskesmas	16
Puskesmas Pembantu	31
Dokter Praktek	4

Fasilitas Kesehatan	Ketersediaan
Apotek	15
Toko Obat	1

Sumber: Kabupaten Muna Barat Dalam Angka, 2024

Berdasarkan akumulasi ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Muna Barat pada tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa secara kuantitas jenis fasilitasnya tergolong cukup baik. Hal ini dapat diketahui bahwa dengan tersedianya rumah sakit daerah yang ditunjang dengan 16 puskesmas dan 31 puskesmas pembantu yang tersebar merata pada 11 kecamatan di Muna Barat sehingga kondisi itu memungkinkan masyarakat dapat memperoleh kemudahan dalam mengakses layanan kesehatan. Adapun sebaran masing-masing fasilitas kesehatan menurut kecamatan di Muna Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 22 Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Muna Barat Tahun 2023

Kecamatan	Rumah Sakit Umum	Rumah Sakit Bersalin	Toko Obat	Apotik	Puskesmas / Puskesmas Pembantu	Praktek Dokter
Tiworo Kepulauan	-	-	-	3	5	2
Maginti	-	-	-	-	4	-
Tiworo Tengah	-	-	-	1	3	1
Tiworo Selatan	-	-	-	1	5	-
Tiworo Utara	-	-	-	-	5	-
Lawa	-	-	-	1	1	-
Sawerigadi	1	-	-	2	6	-
Barangka	-	-	-	2	4	-
Wadaga	-	-	-	1	5	-
Kusambi	-	-	1	3	6	1
Napano Kusambi	-	-	-	1	3	-
Muna Barat	1	0	1	15	47	4

Sumber: Kabupaten Muna Barat Dalam Angka, 2024

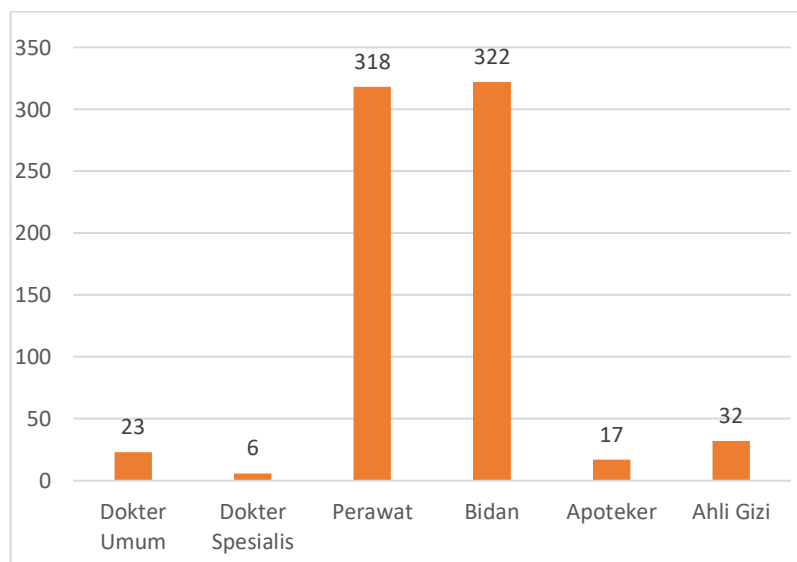
b) Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan merupakan komponen utama dalam hal penanganan kesehatan. Ketersediaan tenaga kesehatan yang tercukupi secara kuantitas dan memiliki kapasitas SDM yang baik menjadi hal penting dalam rangka mendukung kegiatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Muna Barat. Adapun jumlah tenaga kesehatan di Muna Barat pada tahun 2023 menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 23 Tenaga Kesehatan di Kabupaten Muna Barat Tahun 2023

Kecamatan	Dokter Umum	Dokter Spesialis	Perawat	Bidan	Apoteker	Ahli Gizi
Tiworo Kepulauan	2	-	9	16	1	1
Maginti	2	-	29	28	1	2
Tiworo Tengah	1	-	16	17	-	3
Tiworo Selatan	1	-	12	12	1	2
Tiworo Utara	-	-	20	11	2	2
Lawa	2	-	28	23	1	3
Sawerigadi	7	6	115	106	8	9
Barangka	2	-	28	37	1	3
Wadaga	1	-	13	17	1	3
Kusambi	3	-	30	34	1	2
Napano Kusambi	2	-	18	21	-	2
Muna Barat	23	6	318	322	17	32

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat, 2023



Gambar 2. 8 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Muna Barat Tahun 2023

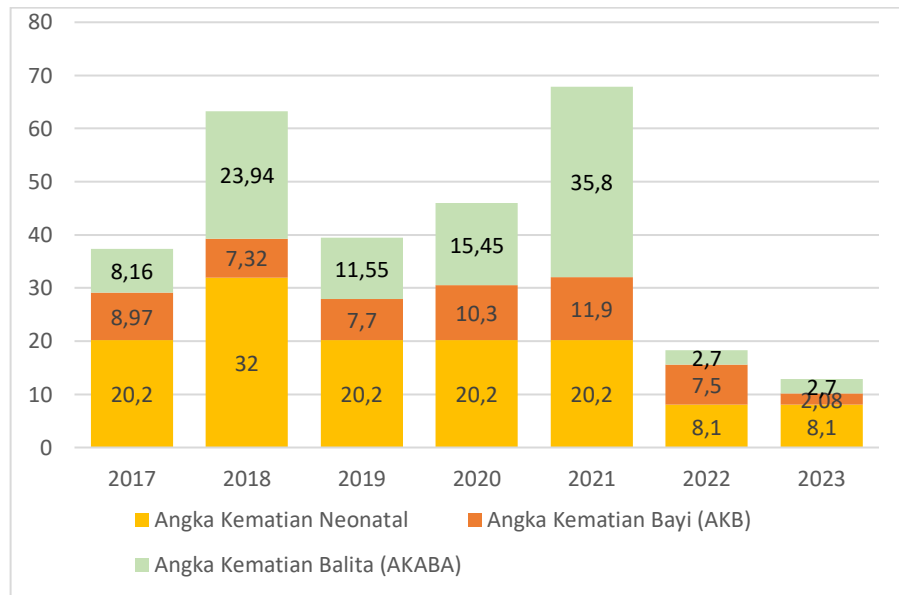
Sumber: Kabupaten Muna Barat Dalam Angka, 2024

c) Kematian Bayi, Balita, dan Neonatal

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator status kesehatan masyarakat yang terkait dengan berbagai indikator kesehatan dan indikator pembangunan lainnya. AKB juga terkait langsung dengan angka rata-rata harapan hidup penduduk di suatu daerah. Pada tahun 2030, dunia mendorong SDGs dengan target penurunan angka kematian

bayi dan balita di bawah 12 per 1.000 kelahiran hidup dan Target AKB Nasional Tahun 2024 adalah 16 per 1.000 kelahiran.

Angka Kematian Bayi (AKB), AKABA, dan angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Muna Barat selama Tahun 2018-2023 mengalami fluktuatif sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.15. dan Tabel 2.24. Selama tahun 2019-2020, AKB, AKABA, dan angka kematian neonatal di Kabupaten Muna Barat jauh lebih tinggi dibanding dengan target SGDs. Sementara angka AKB telah berada di bawah Target Nasional 2024.



Gambar 2. 9 AKB, AKABA, dan AKB di Kab. Muna Barat Tahun 2018-2023

Tabel 2. 24 AKB, AKABA dan Angka Kematian Neotal per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	7,32	7,7	10,30	11,90	7,50	2,08
Angka kelangsungan hidup bayi per 1000 kelahiran	992,68	992,3	89,70	88,10	90,00	988,19
Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	23,94	11,55	15,45	35,80	2,70	2,70
Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	32,00	20,20	20,20	20,20	8,10	8,10
Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	197	0	127	351	135	208

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat, 2023

d) Angka Kematian Ibu

Menurut hasil Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), AKI di Indonesia 305 per 100.000 kelahiran hidup, sementara target AKI Nasional tahun 2024 adalah sebesar 183 per 100.000 kelahiran hidup. AKI Kabupaten Muna Barat Tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan target nasional yaitu 208 kasus AKI per 100.000 Kelahiran hidup. Capaian ini menjadi kondisi yang kurang baik dalam rangka mendukung terwujudnya target nasional pada Tahun 2024, maka dibutuhkan peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan ibu di Kabupaten Muna Barat agar menjadi lebih baik.

Tabel 2. 25 Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran Hidup Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023

Indikator Kinerja	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	197	0	127	351	135	208

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat, 2024

e) *Universal Child Immunization (UCI)*

Universal Child Immunization adalah Indikator lain, selain dari imunisasi dasar lengkap, untuk mengukur keberhasilan pemberian imunisasi. UCI desa/kelurahan adalah gambaran suatu desa/kelurahan dimana $\geq 80\%$ dari jumlah bayi yang ada di desa/kelurahan tersebut telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Upaya imunisasi perlu terus ditingkatkan untuk mencapai tingkat kekebalan masyarakat yang tinggi (*herd immunity*) sehingga penyakit-penyakit yang dapat diimunisasi (PD3I) dapat dibasmi, dieliminasi atau dikendalikan, dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan upaya imunisasi dapat semakin efektif bermutu dan efisien. Jumlah balita yang pernah diberikan Imunisasi Menurut Kecamatan dan Jenis Imunisasi di Kabupaten Muna Barat tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 26 Jumlah balita yang Pernah Diberikan Imunisasi Menurut Kecamatan dan Jenis Imunisasi di Kabupaten Muna Barat Tahun 2023

Kecamatan	HB-O	BCG	DPT		
			1	2	3
Tiworo Kepulauan	156	138	131	137	127
Maginti	65	58	72	76	66
Tiworo Tengah	144	130	83	66	81
Tiworo Selatan	115	88	72	62	73

Kecamatan	HB-O	BCG	DPT		
			1	2	3
Tiworo Utara	101	155	147	136	120
Lawa	79	99	84	80	72
Sawerigadi	180	205	209	197	195
Barangka	68	69	64	65	63
Wadaga	92	110	95	104	100
Kusambi	240	295	281	279	209
Napano Kusambi	89	91	90	84	87
Muna Barat	1.329	1.438	1.328	1.286	1.193

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat, 2024

Tabel 2. 27 Jumlah balita yang Pernah Diberikan Imunisasi Menurut Kecamatan dan Jenis Imunisasi di Kabupaten Muna Barat Tahun 2023

Kecamatan	Campak	Polio			
		1	2	3	4
Tiworo Kepulauan	110	138	141	143	138
Maginti	44	65	92	93	75
Tiworo Tengah	110	133	93	95	98
Tiworo Selatan	79	94	82	73	78
Tiworo Utara	163	159	167	166	159
Lawa	71	99	84	80	73
Sawerigadi	198	209	203	199	193
Barangka	86	69	72	71	64
Wadaga	91	109	94	102	92
Kusambi	199	308	322	304	156
Napano Kusambi	104	92	93	90	96
Muna Barat	1.255	1.475	1.442	1.416	1.222

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat, 2024

f) Pelayanan Penderita TBC

Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan insidensi kasus tuberkulosis menjadi 65 per 100.000 penduduk pada tahun 2030. Upaya penanggulangan tuberkulosis di Indonesia Tahun 2020-2024 diarahkan untuk mempercepat upaya Indonesia untuk mencapai eliminasi

tuberkulosis pada tahun 2030, serta mengakhiri epidemi tuberkulosis di tahun 2050. Target penurunan insidensi 37 per 100.000 penduduk di tahun 2024. Target Indonesia 2024 masih jauh dari tingkat Prevelensi TBC di Kabupaten Muna Barat, yakni masih mencapai diatas 100 per 100.000 penduduk. Gambaran pencapaian indikator terkait dengan pelayanan penderita TBC di Kabupaten Muna Barat selama Tahun 2018-2023 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 28 Pencapaian Indikator Terkait dengan Pelayanan Penderita TBC di Kabupaten Muna Barat selama Tahun 2018-2023

Indikator	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	50	53	57	60	66	61,0
Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	128	165,1	102	111,5	120	124
Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	3	2	1	-	2	n.a
Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	82	85	86	87	134	n.a
Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	63	70	75	78	83	n.a

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat, 2024

g) Prevalensi Stunting

Stunting menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya di bawah standar. Pada tahun 2018 prevalensi *stunting* di Indonesia sebesar 30,8% dan pada tahun 2023 prevalensi *stunting* di Indonesia menurut data SKI yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan R.I, yaitu sebesar 12,9%.

Permasalahan *stunting* harus ditangani secara komprehensif, terpadu dan multi sektoral dengan melakukan pendampingan terhadap keluarga yang beresiko melahirkan bayi *stunting*. Pendampingan dilakukan mulai dari periode: remaja putri dan calon pengantin, pada masa kehamilan dan masa pasca persalinan, serta balita. Pendampingan pada masa-masa tersebut dilakukan dengan intervensi spesifik serta juga melakukan intervensi sensitif dan yang akan diberikan intervensi harus dipastikan sampai kepada penerima manfaat sehingga dapat menurunkan angka prevalensi *stunting* 14% pada tahun 2024.

Data prevalensi stunting Kabupaten Muna Barat dari tahun 2018 hingga tahun 2023 menunjukkan trend yang fluktuatif, namun untuk prevalensi stunting Provinsi Sulawesi Tenggara dan Indonesia menunjukkan trend penurunan. Nilai prevalensi stuntingnya Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 sebesar 31,44%, mengalami penurunan setiap tahunnya, hingga di tahun 2023 sebesar 18,6%. Sedang prevalensi stunting Indonesia Tahun 2018 sebesar 30,8%, menunjukkan penurunan setiap tahun hingga di tahun 2023 sebesar 12,9%. Namun prevalensi stunting Kabupaten Muna Barat di tahun 2023 turun sebanyak 7,3% yaitu 24,4% dengan prevalensi stunting pada tahun 2022 sebesar 31,7%. Adapun data Prevalensi Stunting untuk Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 29 Perbandingan Prevalensi Stunting Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Indonesia, Tahun 2018-2023

Prevalensi Stunting (%)	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Muna Barat	31,3	36,49	n.a	29,0	31,7	24,4
Sulawesi Tenggara	28,7	31,44	n.a	30,2	27,7	18,6
Indonesia	30,8	27,67	n.a	24,4	21,6	12,9

Sumber: Kementerian Kesehatan R.I, 2024 (SSGI dan SKI)

Selain dari beberapa indikator kinerja utama tersebut, terdapat indikator-indikator kunci lainnya yang saling terkait dengan pencapaian indikator kinerja utama dalam pelayanan kesehatan sebagaimana terangkum dalam Tabel berikut.

Tabel 2. 29 Rekapitulasi Realisasi Kinerja Kunci Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023

No.	Indikator	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Angka kelangsungan hidup bayi	84,04	92,30	89,70	88,10	85,79	98,50
2.	Rasio posyandu per satuan balita	78,30	78,70	85,00	86,00	85,00	87,00
3.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
4.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Rasio dokter per satuan penduduk	27,00	32,00	34,00	35,00	24,00	24,00
6.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	6,60	6,70	6,72	6,80	7,20	7,20

No.	Indikator	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
7.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	90,00	90,00
8.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100,00	100,00	100,00	100,00	83,00	85,00
9.	Cakupan Desa / kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	97,90	98,57	91,20	72,00	80,00	67,40
10.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11.	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
12.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	70,00	71,30	72,30	74,00	75,60	76,35
13.	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	80,4	82,23	81,70	82,50	81,75	83,76
15.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	Penderita diare yang ditangani	53,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	Angka kejadian Malaria	0	2	11	4	1	1
18.	Tingkat kematian akibat malaria	0	0	0	0	0	0
19.	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
20.	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,0048	0,0048	0,0048	0,0048	0,0048	0,0048
22.	Penggunaan kondom pada hubungan seks beresiko tinggi terakhir	54	64	65	67	68	68
23.	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	komprehensif tentang HIV/AIDS						
24.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	100	100	100	100
25.	Cakupan kunjungan bayi	100	100	100	100	100	100
26.	Cakupan puskesmas	136,36	136,36	136,36	136,36	145,50	145,50
27.	Cakupan pembantu puskesmas	45,35	45,35	45,35	45,35	45,35	65,12
28.	Persentase cakupan kunjungan ibu hamil K4	66,02	70,00	75,00	80,00	71,20	75,35
29.	Cakupan Pelayanan Nifas	83,31	90,00	92,00	92,00	93,00	93,00
30.	Cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani	4	100	100	100	100	100
31.	Cakupan pelayanan anak balita	24,5	100	100	100	100	100
32.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	67	71	73	73,5	75	76
33.	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	83,00	84,00	87,00	89,00	92,73	92,73
34.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	67	72	72	73	75	75
35.	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100	100	100	100	100
36.	Persentase cakupan skinning kesehatan usia Lanjut	6,2	23	23,1	22,4	61,46	100,00
37.	Persentase cakupan penanganan penderita hipertensi	27,4	34	37	18,87	20,17	24,40
38.	Persentase cakupan penanganan penderita diabetes melitus	48,4	41,3	41,6	41,5	32,70	30,42
39.	Persentase cakupan penanganan penderita ODGJ	90	100	100	100	100	56,96

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat, 2024

2.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a) Jaringan Jalan

Jaringan Jalan di Kabupaten Muna Barat meliputi Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, dan Jalan Desa sepanjang 571,76 Km. Jaringan Jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat yang berstatus sebagai jalan Kabupaten memiliki panjang 390,53 Km dan Jalan Desa sepanjang 127,05 Km, jalan Provinsi sepanjang 15,10 Km serta Jalan Nasional sepanjang 39,08 Km.

Tabel 2. 30 Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Muna Barat (km), 2020–2023

Kewenangan (Status Jalan)	2020	2021	2022	2023
Nasional	39,05	37,00	39,08	39,08
Provinsi	15,10	15,10	15,10	15,10
Kabupaten	390,53	390,53	390,53	390,53
Desa	127,05	127,05	127,05	127,05
Panjang Total	571,73	569,68	571,76	571,76

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Muna Barat, 2024

Selama tahun 2020-2023 proporsi jalan di Kabupaten yang berkualifikasi baik dan terus mengalami peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh fokus pembangunan selama ini diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Capaian kinerja indikator kinerja jalan yang meliputi indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, indikator persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/Jam), dan Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Muna Barat selama tahun 2018-2022 ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 31 Pencapaian Indikator terkait Bidang Penyelenggaraan Jalan

Indikator Kinerja	Realisasi Capaian					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	37,00	41,00	47,81	50,83	53,43	39,10
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam)	42,89	45,09	51,93	58,19	59,47	49,49
Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk (km/1000 penduduk)	9,44	9,33	8,98	8,86	8,80	8,75

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Muna Barat, 2024

b) Jaringan Irigasi

Total luasan daerah irigasi di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023 menunjukkan trend yang semakin baik. Pada tahun 2018, persentase saluran irigasi dalam kondisi baik sebesar 81,42 persen, sedangkan pada tahun 2023 total luasan irigasi Kabupaten Muna Barat adalah 1.937 Ha dengan persentase saluran irigasi kabupaten dalam kondisi baik adalah 90,38 persen. Capaian indikator kinerja pembangunan dalam penyelenggaraan irigasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 32 Capaian Indikator Kinerja terkait Penyelenggaraan Bidang Irigasi

Indikator Kinerja	Realisasi Capaian (%)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	81,42	85,63	88,11	89,84	90,03	90,38
Rasio Jaringan Irigasi	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Muna Barat, 2024

c) Layanan Air Minum

Penduduk berakses air minum di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023 menunjukkan trend yang cukup baik. Pada tahun 2018 persentase penduduk berakses air minum sebesar 73,27 persen, sedangkan persentase penduduk berakses air minum pada tahun 2023 adalah sebesar 91,96 persen. Begitu pula untuk indikator proporsi rumah tangga berakses air minum dengan akses air minum layak, perkotaan dan perdesaan mengalami peningkatan. Peningkatan yang signifikan dalam pelayanan air minum di dorong oleh prioritas daerah dalam penyediaan infrastruktur air bersih.

Tabel 2. 33 Capaian Indikator Kinerja terkait Pelayanan Air Minum

Indikator Kinerja	Realisasi Capaian (%)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase cakupan pelayanan akses air minum masyarakat	73,27	81,08	81,11	85,65	90,54	91,96
Proporsi rumah tangga berakses air minum dengan akses air minum layak, perkotaan dan perdesaan	79,00	82,50	81,11	85,65	90,54	91,96
Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (%)	79,00	82,50	81,11	85,65	90,54	91,96

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Muna Barat, 2024

Penyediaan air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan juga hak sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Ketersediaan air minum menjadi salah satu penentu kesejahteraan masyarakat, dimana peningkatan ketersediaan air minum juga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat serta mendorong peningkatan produktivitas masyarakat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana air minum menjadi salah satu hal yang penting dalam pengembangan ekonomi wilayah.

Melalui beberapa program, pemerintah terus melaksanakan pembangunan penyediaan air minum untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat miskin. Penyediaan air minum merupakan agenda nasional yang terdapat di dalam RPJMN 2020-2024. Pemerintah telah menetapkan target MDGs di bidang air minum dimana pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua masyarakat dengan akses layak 100% dan Akses Aman 20 %. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2030 seluruh masyarakat di Indonesia sudah harus terlayani air bersih (100%) dengan akses “layak dan aman.”

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Pengairan, PP No. 122 tahun 2005 tentang SPAM, pemerintah telah memberikan pedoman untuk penyelenggaraan Pelayanan air minum di masyarakat dan lebih diperjelas dengan rinci dalam Permen PUPR No. 27 Tahun 2016 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Muna Barat memandang perlu dalam rangka memenuhi kewajiban dan wewenang serta menyelaraskan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu dengan mengadakan Penyusunan Dokumen Induk RISPAM Kabupaten Muna Barat. Dokumen ini memberikan gambaran kebutuhan air minum, potensi air baku dan menyusun skenario/program pengembangan RISPAM di Kabupaten Muna Barat sampai dengan tahun 2035.

Permasalahan pemenuhan kebutuhan air minum di Kabupaten Muna Barat secara umum adalah (1) rendahnya tingkat pelayanan air minum akibat sistem yang dibangun tidak sampai ke pelayanan, (2) kurangnya pengelolaan sistem yang sudah terbangun, dan (3) terbatasnya kapasitas sistem penyediaan air minum yang terbangun sehingga tidak mampu memberikan jangkauan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Sumber air baku yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan SPAM di Kabupaten Muna Barat adalah Sumber Air Permukaan seperti Mata Air (MA) Kahi, MA. Barakati (jangka

mendesak), MA. Mataidi, peningkatan sistem IKK Lamayo. Sedangkan untuk program jangka panjang diharapkan berasal dari beberapa Sumber Mata Air maupun Sumber Air Permukaan. Selain mengidentifikasi kebutuhan air minum di Kabupaten Muna Barat, dokumen RISPAM juga memuat program yang dibutuhkan untuk mencapai target pelayanan SPAM di Kabupaten Muna Barat. Sampai tahun 2035 kebutuhan air minum Kabupaten ini diperkirakan mencapai 225,03 l/det dengan tingkat pelayanan sebesar 100%.

d) Layanan Air Limbah

Hunian berakses air limbah di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2022 menunjukkan trend yang membaik. Pada tahun 2018 persentase hunian berakses air limbah sebesar 82,83% dan tahun 2022 meningkat menjadi 87,23%. Perkembangan realisasi indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2022 ditunjukkan pada Tabel 2.34 berikut ini.

Tabel 2. 34 Capaian Indikator Kinerja terkait Pelayanan Air Limbah

No.	Uraian	Realisasi Capaian (%)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah RT	18,53	19,23	19,09	20,17	20,22	23,20
2.	Jumlah RT memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	15,35	15,99	16,06	17,44	18,42	18,82
3.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	82,83	83,20	84,12	86,46	87,23	87,31

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Muna Barat, 2024

e) Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya

Penataan bangunan dan lingkungan menurut Permen PU Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan adalah kegiatan pembangunan untuk merencanakan, melaksanakan, memperbaiki, mengembangkan atau melestarikan bangunan dan lingkungan/kawasan tertentu sesuai dengan prinsip pemanfaatan ruang dan pengendalian bangunan gedung dan lingkungan secara optimal, yang terdiri atas proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran gedung dan lingkungan.

Dalam hal pengendalian penataan gedung dan lingkungan secara optimal yang sesuai dengan pemanfaatan ruang Pemerintah Kabupaten Muna Barat melalui Dinas PU dan Penataan Ruang mensosialisasikan agar dalam mendirikan bangunan diharuskan mengurus

surat izin yaitu IMB yang dikenal sekarang adalah Persetujuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Sebagai daerah Otonom Baru Kabupaten Muna Barat telah menerbitkan IMB/PBG, ada pun data rasio bangunan yang memiliki izin dari Tahun 2018-2023, dapat dilihat pada berikut.

Tabel 2. 36 Rasio Bangunan yang Memiliki Izin di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023

No.	Uraian	Realisasi					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Bangunan Ber-IMB/PBG	10	80	96	101	115	119
2.	Jumlah Bangunan	22.655	22.765	22.765	22.998	23.094	23.437
3.	Rasio Bangunan yang memiliki izin	0,0004	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Muna Barat, 2024

Jumlah bangunan yang mengurus izin pembangunannya pada tahun 2018 adalah sebanyak 10 bangunan dengan rasio bangunan yang memiliki izin sebesar 0,0004, sedangkan sampai pada Tahun 2023 ada 119 bangunan yang memiliki IMB/PBG dengan rasio bangunan yang memiliki izin sebesar 0,005.

Dalam rangka mengembangkan inovasi dalam teknologi konstruksi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas bangunan, maka Pemerintah Kabupaten Muna Barat melalui Dinas PU dan Penataan Ruang salah satunya menyelenggarakan pelatihan bagi para pelaku konstruksi untuk meningkatkan kompetensi di bidang bangunan, sehingga melahirkan tenaga konstruksi yang terlatih. adapun jumlah tenaga konstruksi yang terlatih di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018 dan 2023, seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 37 Jumlah Tenaga Konstruksi terlatih di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023

Uraian	Realisasi						Total
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Jumlah Tenaga Konstruksi yang Terlatih	30	374	0	260	0	0	644

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Muna Barat, 2024

2.3.1.4 Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman

a) Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Kabupaten

SK Kawasan Kumuh Kab. Muna Barat ditetapkan pada pertengahan Tahun 2017, sehingga pengukuran indikator yang terkait dengan permukiman di Kabupaten Muna Barat belum dapat diukur dalam tahun 2017. Pada Tahun 2018 persentase permukiman tertata di Kabupaten Muna Barat sebesar 89,13 persen dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 90,14

persen, terjadi peningkatan penanganan kawasan kumuh kewenangan kabupaten (<10 Ha) mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2023, sedangkan persentase permukiman yang tertata mulai dari tahun 2018 sampai dengan 2023 juga terjadi peningkatan.

Tabel 2. 35 Perkembangan Kawasan Permukiman yang Tertata di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023

Indikator Kinerja	Realisasi Capaian (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Kabupaten (<10 Ha)	23,40	23,03	21,73	20,05	18,17
Persentase permukiman yang tertata	89,13	89,15	89,19	89,25	89,32

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan Kab. Muna Barat, 2024

Indikator persentase kawasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten (<10 Ha) juga merupakan indikator untuk mengukur tingkat perkembangan penanganan kawasan kumuh. Selama tahun 2018-2023, kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Muna Barat berangsur-angsur menurun, yakni Pada tahun 2018 sebesar sebesar 23,40 persen dan pada tahun 2023 berkurang menjadi 18,00 persen. Hal ini disebabkan karena adanya program PSU yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun APBD Provinsi, selain itu pula adanya Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dari APBD Kabupaten dan SNVT Penyediaan Perumahan yang kemudian secara akumulasi mampu berkontribusi terhadap capaian realisasi pengurangan dan jumlah persentase penanganan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Muna Barat.

b) **Kebutuhan Rumah (*Backlog* Rumah)**

Backlog Rumah adalah salah satu indikator yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang terkait bidang perumahan untuk mengukur jumlah kebutuhan rumah. *Backlog* adalah selisih antara Jumlah kepala keluarga dan jumlah Rumah. Angka *Backlog* rumah di Muna Barat dari tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 36 Angka *Backlog* Rumah di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Rumah	52.133	57.241	61.876	62.118	62.276	22.876
Jumlah Kepala Keluarga	67.239	73.736	79.318	85.314	91.017	36.228
Angka <i>Backlog</i> Rumah	15.106	16.495	17.442	17.523	17.611	17.698

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan Kab. Muna Barat, 2024

Angka *backlog* rumah di Kabupaten Muna Barat dari tahun 2018-2023 cenderung mengalami peningkatan dimana tahun 2018 kepala keluarga yang belum memiliki rumah sebanyak 15.106 KK dan tahun 2023 meningkat menjadi 17.698 KK. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah KK baru lebih tinggi dibanding dengan jumlah rumah yang terbangun.

c) Ketersediaan Rumah Layak Huni

Cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Muna Barat selama Tahun 2018-2023 cenderung mengalami peningkatan sampai pada tahun 2022 sedangkan pada tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 1,4 persen. Kondisi ini terjadi karena pertambahan jumlah rumah relatif tingginya pada tiap tahunnya bahkan seiring dengan penambahan jumlah penanganan rumah tidak layak huni yang juga semakin bertambah kuantitas maupun cakupannya namun di tahun 2023 adanya pengurangan anggaran untuk menghadapi tahapan Pilkada serentak tahun 2024.

Tabel 2. 40 Perkembangan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023

Uraian	Persentase					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan ketersediaan rumah layak huni	59,44	59,94	63,35	67,32	71,30	71,50

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan Kab. Muna Barat, 2024

Di samping indikator tersebut diatas, capaian kinerja pelayanan urusan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Muna Barat selama Tahun 2018-2023 yang merupakan bagian dari Indikator Kinerja Kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 41 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Kunci Lainnya Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023

No.	Uraian	Realisasi Capaian (%)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten / kota yang mendapat fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	100	100	100	100	100

No.	Uraian	Realisasi Capaian (%)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
3.	Rasio rumah layak huni	0.1645	0.1676	0.1716	0.1843	0.1916	0,1938
4.	Rasio permukiman layak huni	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	0,9755
5.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	59.44	59.94	63.35	67.32	71,42	71,94
6.	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	0	0	0	0	0	0
7.	Persentase lingkungan permukiman kumuh	10,87	10,85	10,81	10,75	10,62	10,60
8.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
9.	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
10.	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
11.	Angka <i>backlog</i> Perumahan	15,106	16,495	17,442	17,523	17,661	17,698

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan Kab. Muna Barat, 2024

2.3.1.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

a) Angka Kriminalitas

Kasus kriminal di Kabupaten Muna Barat yang termuat dalam Muna Barat dalam Angka (BPS, 2024) adalah sebanyak 444 Kasus yang dilaporkan dengan berbagai bentuk motif kejadian. Dengan demikian angka kriminalitas di Kabupaten Muna Barat tahun 2024 per 100.000 penduduk adalah 444, sedangkan rata-rata angka kriminalitas di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 230 per 100.000 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ketenteraman dan ketertiban di Kabupaten Muna Barat walaupun secara kuantitas juga tergolong tinggi namun secara komparasi dengan tingkat kriminalitas provinsi, maka Muna Barat masih lebih kondusif dibandingkan dengan rata-rata wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara.

b) Polisi Pamong Praja dan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Jumlah tenaga Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna Barat pada tahun 2018 sebanyak 152 personil dan pada tahun 2022 menjadi 278 personil. Sementara jumlah petugas perlindungan masyarakat tahun 2018 sebanyak 248 personil dan mulai tahun 2018 telah mencapai sebesar 484. Peningkatan Linmas disebabkan oleh penyesuaian jumlah TPS pada pelaksanaan Pilcaleg dan Pilpres tahun 2019 sebanyak 242 TPS.

c) Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten

Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten Muna Barat tahun 2018 mencapai 20,13 persen dan pada tahun 2019/2020 sudah mencapai 22,11 persen. Minimnya luas

jangkauan wilayah manajemen kebakaran di Kabupaten Muna Barat diakibatkan oleh masih minimnya ketersediaan maupun dukungan sarana dan prasarana pemadam kebakaran. Disamping indikator tersebut diatas, indikator kinerja kunci lainnya ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 42 Capaian Indikator Kinerja Kunci Lainnya Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian (%)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Penegakan PERDA	100	100	100	100	100	100
2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100	100	100	100	100	100
3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	35	35	35	35	35	35
4.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (Menit)	-	≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 19
5.	Cakupan Patroli Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1	1,2	1,2	1,8	1,8	2
6.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	96	97	98	100	100	100
7.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100	100	100
8.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	100	100	100	100	100	100
9.	Penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	100	100	100	100
10.	Penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100	100	100	60
11.	Penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100	100	100
12.	Penduduk yang memperoleh	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian (%)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran						

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Daerah Muna Barat, 2024

2.3.1.6 Urusan Sosial

a) Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

Menurut Kementerian Sosial RI, saat ini tercatat ada 26 jenis PPKS meliputi: Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak berhadapan dengan hukum, Anak Jalanan, Anak dengan Kedisabilitasan (ADK), Anak yang memerlukan perlindungan khusus, Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Disabilitas, Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Kelompok Minoritas (waria, dll), Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP), Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), Korban Penyalahgunaan NAPZA, Korban *Trafficking*, Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS), Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, Fakir Miskin, Keluarga bermasalah sosial psikologis, Keluarga Berumah Tidak Layak Huni, dan Komunitas Adat Terpencil.

Selama Tahun 2018-2022, penyelenggaraan urusan urusan sosial di Kabupaten Muna Barat didukung oleh baik dari program nasional maupun program daerah yang meliputi penyediaan jaminan sosial, Program Keluarga Harapan, bantuan sosial, program sembako, dan program rehabilitasi sosial, termasuk bantuan sosial secara tunai dalam penanggulangan dampak akibat pandemi Covid-19. Selama tahun 2021-2022, 100 persen PPKS di Kabupaten Muna Barat memperoleh bantuan sosial. Secara jumlah PPKS yang memperoleh bantuan sosial dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 37 Persentase PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023

No.	Tahun	Jumlah PPKS yang Seharusnya Menerima Bantuan (KK)	Jumlah PPKS yang Diberikan Bantuan (KK)	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)x100
1.	2018	12.017	9803	81,58
2.	2019	11.989	10211	85,17
3.	2020	11.925	11.925	100
4.	2021	11.894	11.894	100
5.	2022	12.008	12.008	100
6.	2023	19.165	18.165	94,74

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat, 2024

b) Persentase PPKS yang Tertangani

Persentase PPKS yang tertangani menjadi keluarga mandiri selama tahun 2018-2023 di Kabupaten Muna Barat relatif masih sedikit yakni dibawah 1,50 persen. Hal ini disebabkan oleh keluarga PPKS tidak memiliki keterampilan dan aset produktif untuk meningkatkan produktivitas keluarga. Perkembangan PPKS yang tertangani di Kabupaten Muna Barat selama tahun 2018-2023 ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 38 Persentase PPKS yang Tertangani di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023

No.	Tahun	Jumlah PPKS yang Ada	Jumlah PPKS yang Tertangani	Persentase PPKS yang Tertangani
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)x100
1.	2018	12.017	28	0,23
2.	2019	11.989	24	0,20
3.	2020	11.925	31	0,26
4.	2021	11.894	42	0,35
5.	2022	12.008	47	0,39
6.	2023	19.165	289	1,50

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat, 2024

Disamping capaian kinerja Indikator utama dalam penyelenggaraan urusan sosial tersebut diatas, capaian kinerja indikator kunci lainnya dalam penyelenggaraan urusan sosial di Kabupaten Muna Barat selama tahun 2018-2023 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 39 Capaian Kinerja Indikator Kunci Lainnya dalam Penyelenggaraan Urusan Sosial di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian (%)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase PPKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	81.58	85.17	100	100	100	100
2.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	100	100
5.	Persentase korban bencana yang di evakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	0	0	0	0	0	0
6.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat, 2024

Dari 26 jenis PPKS menurut Kementerian Sosial R.I, ada 5 jenis PPKS yang juga merupakan bagian dari SPM bidang sosial. Antara lain: penyandang diluar panti, anak terlantar diluar panti, lanjut usia diluar panti, gelandangan dan pengemis diluar panti dan korban bencana daerah kabupaten/kota. Adapun indikator kinerja bidang sosial yang juga termasuk SPM bidang sosial, ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 40 Capaian Kinerja Indikator SPM Urusan Sosial terkait Pelayanan Dasar di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian (%)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Penyandang Disabilitas yang memperoleh Rehabilitasi Sosial di luar Panti	100	100	100	100	100	100
2.	Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di luar Panti	100	100	100	100	100	100
3.	Warga Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial di luar Panti	100	100	100	100	100	100
4.	Gelandangan dan pengemis yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial di luar panti	0	0	0	0	0	0
5.	Korban bencana memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	100	100	100	100	100

2.3.1.7 Urusan Pangan

a) Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar

Bahan pangan utama lokal di Kabupaten Muna Barat, meliputi padi, ubi kayu dan jagung. Produktivitas padi, ubi kayu, dan jagung di Kabupaten Muna Barat pada tahun 2018 adalah sebesar 3.37 Ton/ Ha; 32,05 T/Ha; dan 2,98 T/ ha secara berturut-turut. Sedangkan melihat produktivitas ketiga komoditas tersebut pada tabel 2.46 menunjukkan terlihat fluktuasi produktivitas mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tidak menentu dari tahun ke tahun, sehingga mempengaruhi pola tanam para petani. adapun produktivitas bahan pangan di Kabupaten Muna Barat selama tahun 2018-2023 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 41 Perkembangan Luas Area Tanaman Pangan, Produksi, dan Produktivitasnya di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023

No.	Tahun/Komoditi	Luas Areal Tanaman Pangan	Produksi Tanaman	Produktivitas Bahan Pangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)x100
1.	2018			
	Padi	1.068	3.603	3,37
	Ubi Kayu	252	8.076	32,05
	Jagung	6.779	20.221	2,98
2.	2019			
	Padi	1.046	3.660	3,5

No.	Tahun/Komoditi	Luas Areal Tanaman Pangan	Produksi Tanaman	Produktivitas Bahan Pangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)x100
	Ubi Kayu	367	9.175	25
	Jagung	5.095	22.928	4,5
3.	2020			
	Padi	1.048	4.193	4
	Ubi Kayu	258	6.450	25
	Jagung	6.373	31.869	5
4.	2021			
	Padi	2.496	8.735	4
	Ubi Kayu	281	7.029	25,01
	Jagung	6.633	33.163	5
5.	2022			
	Padi	1.474	5.239	3,5
	Ubi Kayu	295	9693	32,85
	Jagung	8.194	25.895	3,16
6.	2023			
	Padi	900	4.052	4,5
	Ubi Kayu	204	5100	25
	Jagung	7.611	38.052,5	5

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Muna Barat, 2024

b) Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia bahwa rata-rata angka kecukupan energi sebesar 2.100 kkal/kapita/hari pada tingkat konsumsi, dan rata-rata angka kecukupan protein sebesar 57 gr/kapita/hari. Rata-rata ketersediaan energi dan protein di Kabupaten Muna Barat Selama tahun 2018-2023, tiga tahun terakhir berada diatas standar kecukupan energi dan protein nasional, yaitu pada tahun 2018, 2019 dan 2021. Perkembangan Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita di Kabupaten Muna Barat tahun 2018-2023 ditunjukkan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 42 Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita di Kabupaten Muna Barat
Tahun 2018-2023**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian (%)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Ketersediaan Energi (kkal/ kapita/ hari)	2.135	2.180	1.181	2.053	1.924	1.882
2.	Ketersediaan Protein (gram/ kapita/ hari)	62,20	59,16	52,20	60,30	55,90	55,74

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muna Barat, 2024

Disamping capaian kinerja indikator utama dalam penyelenggaraan urusan pangan tersebut diatas, capaian kinerja indikator kunci lainnya dalam penyelenggaraan urusan pangan di Kabupaten Muna Barat selama tahun 2018-2023 ditunjukkan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 43 Capaian Kinerja Indikator Kunci Lainnya dalam Penyelenggaraan Urusan Pangan
di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian (%)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Ketersediaan Pangan Utama (Kg/ kapita)	91,79	93,80	82,75	87,75	90,25	89,6
2.	Cakupan Bina Kelompok Petani	94,95	94,95	95,12	94,86	95,78	92,74
3.	Penguatan Cadangan Pangan	74,00	76,56	70,00	74,38	77,19	134,3
4.	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	100	100	100	100	100	100
5.	Keberadaan Regulasi Ketahanan Pangan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
6.	Keberadaan Peraturan tentang Kebijakan Ketahanan Pangan.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
7.	Persentase desa/ berstatus swasembada	12,35	12,35	16,05	16,05	16,05	16,05

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muna Barat, 2024

2.3.2 Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Urusan Ketenagakerjaan

Indikator utama mengukur tingkat keberhasilan pelayanan urusan tenaga kerja adalah tingkat pengangguran terbuka, angka partisipasi angkatan kerja, rasio penduduk yang bekerja dan laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian aspek daya saing daerah. Indikator kinerja kunci lainnya berkaitan dengan layanan urusan ketenagakerjaan dapat dilihat juga dari aspek pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pelayanan pelatihan tenaga kerja. Perkembangan indikator ini selama tahun 2018-2023 di Kabupaten Muna Barat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 44 Perkembangan Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pelayanan Pelatihan Tenaga Kerja di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian (%)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial						
1.1	Angka sengketa pengusaha pekerja Per tahun	0	0	0	0	0	0
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	100	100	100	100	100	100
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	100	100	100	100	100	82
1.4	Keselamatan dan perlindungan	100	100	100	100	100	100
1.5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	n.a	86	70	73	0	10
1.6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	0	0	0	0	0	0
1.7	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	100	100	100	100	100	100
1.8	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	0	0	0	0	0	0
2.	Pelayanan Pelatihan Kerja						
2.1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100.00	86.00	70.00	73	75	10
2.2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan berbasis Masyarakat	100	100	100	100	100	100
2.3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	8,7	9,2	4,4	5,6	6,1	10
2.4	Rasio lulusan S1/S2/S3 (per 10.000 penduduk)	329	334	341	348	352	n.a

Sumber: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Muna Barat, 2024

2.3.2.2 Urusan Perhubungan

a) Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Jumlah arus penumpang angkutan umum, di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023 baik arus masuk maupun arus keluar menunjukkan trend menurun dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Hal ini ternyata diakibatkan oleh tidak beroperasinya Dermaga Tondasi pada tahun 2019 dan akibat pembatasan perjalanan dalam masa Pandemi *Covid-19*. Namun untuk angkutan umum darat secara umum cenderung mengalami peningkatan. Perkembangan arus angkutan umum di Kabupaten Muna Barat selama tahun 2018-2023 ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 45 Arus Penumpang Angkutan Umum di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023

No.	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Arus penumpang yang masuk (orang) menggunakan moda:						
	Mobil Penumpang dan Bus	21.600	24.840	28.566	34.279	35.119	43.052
	Kapal Laut/ Ferry/Speed Boat	71.210	51.360	40.460	21.840	22.123	19.217
	Pesawat Udara	18.400	n.a	n.a	n.a	n.a	2.741
	Jumlah Arus Masuk (orang)	111.210	76.200	69.026	56.119	57.242	65.010
2.	Arus penumpang yang keluar daerah (orang) pengguna moda:						
	Mobil Penumpang dan Bus	27.000	31.050	35.708	46.120	47.111	58.987
	Kapal Laut/ Ferry/Spit	89.760	66.480	39.960	29.280	22.243	24.889
	Pesawat Udara	19.800	n.a	n.a	n.a	n.a	2.901
	Jumlah Arus Masuk (orang)	16.560	97.530	75.668	75.400	69.354	93.504

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Muna Barat, 2024

b) Prasarana Transportasi Darat, Laut, dan Udara

Prasarana Transportasi Darat, Laut dan Udara yang ada di Kabupaten Muna Barat hingga tahun 2022 meliputi 1 (satu) bandar Udara, 1 (satu) pelabuhan pengumpan regional (Pelabuhan Ferry Tondasi) dan 34 pelabuhan pengumpan lokal (dermaga rakyat). Peran pelabuhan ferry selama tahun 2018-2022 dalam mendorong perekonomian daerah sangat signifikan khususnya dengan adanya pengembangan rute Tondasi-Bombana. Di samping Pelabuhan Tondasi, terdapat 2 Pelabuhan penyeberangan lainnya yang memiliki peran strategis dalam kegiatan perekonomian di Kabupaten Muna Barat yakni Pelabuhan Pajala dan Pelabuhan Latawe. Pelabuhan Penyeberangan yang ada di Kabupaten Muna Barat umumnya belum berfungsi optimum akibat kapal/perahu tidak dapat berlabuh pada kondisi air laut surut akibat ujung *causenway* dermaga masih jauh dari tidak surut terjauh. sebaran pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Muna Barat ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 46 Sebaran Pelabuhan Laut di Kabupaten Muna Barat

No.	Nama Pelabuhan Pengumpan	Lokasi (Desa/Pulau)	Keterangan
A.	Pengembangan Pelabuhan Pengumpan regional		
1.	Pelabuhan Kontainer Latawe - Kombikuno (Provinsi)	Desa Kombikuno	Proses Perencanaan
2.	Pelabuhan Lokal Pajala – Momuntu	Desa Momuntu	Proses Perencanaan sebagai Pelabuhan Pengumpan Regional
3.	Pelabuhan ASDP Tondasi	Desa Tondasi	Pengembangan rute Tondasi-Torobula
4.	Pelabuhan Pelelangan Ikan TPI Tondasi (Provinsi)	Desa Tondasi	Proses Perencanaan
5.	Pelabuhan Barang Tondasi	Desa Tondasi	
B.	Pelabuhan Pengumpan Lokal		
	Wilayah Pesisir		
1.	Tangkumaho	Desa Tangkumaho	<i>Causeway</i> tdk opt.
2.	Latawe Darat	Desa Latawe	<i>Causeway</i> tdk opt.
3.	Umba	Desa Umba	<i>Causeway</i> tdk opt.
4.	Kontu	Desa Lakawoghe	<i>Causeway</i> tdk opt.
5.	Lakawoghe	Desa Lakawoghe	<i>Causeway</i> tdk opt.
6.	Kasakamu	Desa Kasakamu	<i>Causeway</i> tdk opt.
7.	Lemoambo	Desa Lemoambo	<i>Causeway</i> tdk opt.
8.	Wakoila	Desa Wakoila	<i>Causeway</i> tdk opt.
9.	Mangga Dua	Desa Wakoila	<i>Causeway</i> tdk opt.
10.	Lasama	Desa Lasama	<i>Causeway</i> tdk opt.
11.	Tondasi	Desa Tondasi	<i>Causeway</i> tdk opt.
12.	Bone-Bone	Desa Wanseriwu	<i>Causeway</i> tdk opt.
13.	Baraka	Desa Baraka	<i>Causeway</i> tdk opt.
14.	Waturempe	Desa Waturempe	<i>Causeway</i> tdk opt.
	Wilayah Pulau-pulau		
1.	Pulau Katela	Desa Katela	<i>Causeway</i> tdk opt.
2.	Pulau Mandike	Desa Mandike	<i>Causeway</i> tdk opt.
3.	Pulau Tiga	Desa Tiga	<i>Causeway</i> tdk opt.
4.	Pulau Santigi	Desa Santigi	<i>Causeway</i> tdk opt.
5.	Pulau Bero	Desa Bero	<i>Causeway</i> tdk opt.
6.	Pulau Tasipi	Desa Tasipi	<i>Causeway</i> tdk opt.
7.	Pulau Balu	Desa Santiri	<i>Causeway</i> tdk opt.
8.	Pulau Maginti	Desa Maginti	<i>Causeway</i> tdk opt.
9.	Pulau Gala	Desa Gala	<i>Causeway</i> tdk opt.
10.	Pulau Pasipadanga	Desa Pasipadanga	<i>Causeway</i> tdk opt.
11.	Pulau Bangko	Desa Bangko	<i>Causeway</i> tdk opt.

No.	Nama Pelabuhan Pengumpan	Lokasi (Desa/Pulau)	Keterangan
	Destinasi Wisata		
1.	Tambatan Perahu Pulau Indo	Desa Lasama	<i>Causeway</i> tdk opt.
2.	Tambatan Perahu Pulau Kajuangin	Desa Mandike	<i>Causeway</i> tdk opt.
3.	Tambatan Perahu Pulau Rangku	Desa Kangkunawe	<i>Causeway</i> tdk opt.
4.	Tambatan Perahu Pulau Gala Kecil	Desa Gala	<i>Causeway</i> tdk opt.

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Muna Barat, 2024

Disamping capaian kinerja Indikator utama dalam penyelenggaraan urusan perhubungan tersebut diatas, capaian kinerja indikator kunci lainnya dalam penyelenggaraan urusan perhubungan di Kabupaten Muna Barat selama tahun 2018-2023 ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 47 Capaian Kinerja Indikator Kunci Lainnya Penyelenggaraan Urusan Perhubungan di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023

No.	Uraian	Realisasi Capaian (%)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Izin trayek per 10.000 penduduk	1,36	1,35	1,30	1,26	1,21	1,28
2.	Jumlah Uji Kir angkutan umum Yang dibuat/dirakit di dalam negeri	93	77	81	0	0	0
3.	Persentase layanan Angkutan Darat	0,05	0,04	0,04	0,04	0,11	0,13
4.	Persentase Kepemilikan KIR Kendaraan Wajib Uji	79,65	83,66	88,37	88,37	88,37	88,37
5.	Persentase Pemasangan Rambu-rambu	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
6.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	54	53	48	47	49	49
7.	Rasio Angkutan darat terhadap Penumpang angkutan Darat	0,3	0,9	1,7	1,9	1,9	1,9

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Muna Barat, 2024

2.3.2.3 Urusan Lingkungan Hidup

a) Kualitas Air

Titik pantau pengukuran indeks kualitas air dilakukan pada 4 titik pantau yakni Mata Air Matakidi, Mata Air Ambolo Balano – Desa Latugho, Mata Air Kaaghi-Desa Lakanaha, dan Mata Air Tobi-Desa Katobu. Hasil pengukuran indeks kualitas air di Kabupaten Muna Barat tahun 2018-2023 adalah dengan dengan kriteria baik atau memenuhi baku mutu. Pada tahun

2018 nilai indeks kualitas air (PI) adalah 68,03 dengan mutu air adalah baik dan pada tahun 2023 nilai indeks kualitas air adalah 58,57 dengan mutu air sedang.

**Tabel 2. 48 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air di Kabupaten Muna Barat
Tahun 2018-2023**

No.	Tahun	Nilai Indeks Kualitas Air	Mutu Air (Baik, Cemar Ringan/ Sedang/ Berat)
1.	2018	68,03	Baik (memenuhi Baku Mutu)
2.	2019	68,08	Baik (memenuhi Baku Mutu)
3.	2020	68,11	Baik (memenuhi Baku Mutu)
4.	2021	68,15	Baik (memenuhi Baku Mutu)
5.	2022	68,19	Baik (memenuhi Baku Mutu)
6.	2023	58,57	Sedang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Barat, 2024

b) Kualitas Udara

Titik pantau pengukuran kualitas udara dilakukan pada 4 titik yakni transportasi di Kelurahan Waumere, lokasi pemukiman Desa Mekar Jaya, lokasi kegiatan industri di Desa Wapae, dan lokasi perkantoran Desa Maperaha. Nilai indeks kualitas udara di Kabupaten Muna Barat tahun 2018 berkisar 95,58 dan pada tahun 2022 menjadi 96,33.

**Tabel 2. 49 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Muna Barat
Tahun 2018-2023**

No.	Tahun	Nilai Indeks Kualitas Udara	Kategori (Baik, Cemar Ringan/ Sedang/ Berat)
1.	2018	95,58	Sangat baik
2.	2019	95,88	Sangat baik
3.	2020	95,85	Sangat baik
4.	2021	96,03	Sangat baik
5.	2022	96,33	Sangat baik
6.	2023	95,71	Sangat baik

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Barat, 2024

Disamping indikator kinerja utama diatas, indikator lainnya yang menjadi indikator kinerja kunci pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Muna Barat selama tahun 2018-2023 ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 50 Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Lingkungan Hidup di Kabupaten Muna Barat Selama Tahun 2018-2023

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian (%)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Tersusunnya RPPLH Kab/Kota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak ada
2.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/ Kota	0	0	0	0	0	1
3.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Kabupaten	-	Ada	-	-	-	2
4.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	0
5.	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	0	0	0	100	100	100
6.	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kab/Kota (unit)	3	5	5	5	0	0
7.	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	0	0	0	0	0	0
8.	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	0	0	0	0	0	0
9.	Penetapan hak MHA	0	0	0	0	0	0
10.	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	94	100	0	0	0	0
11.	Terfasilitasi penyediaan sarana/ prasarana	100	100	100	100	30	30
12.	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Masyarakat	2	1	1	1	1	0
13.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	0	0	0	0	0	0
14.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kab/Kota	0	0	0	1	1	0
15.	Timbulan sampah yang ditangani	0	0	0	110.185	22.130	22.416

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian (%)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
16	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	0	0	0	0,5	0,5	0,5
17.	Persentase cakupan area pelayanan	0	0	0	65	65	65
18.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	0	0	0	0,5	0,5	0,5
19.	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	belum ada
20.	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	0	0	0	0	0	0
21.	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap Peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	0	0
22.	Pengelolaan Keaneka ragaman Hayati	0	0	0	90	75	25
23.	Pengelolaan Persampahan	0	0	0	0	0	100
24.	Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam	99,75	100	99	0	0	0

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Barat, 2024

2.3.2.4 Urusan Pertanahan

Salah satu indikator utama dalam pelayanan urusan pertanahan di Kabupaten Muna Barat adalah kinerja cakupan layanan pertanahan. Pada tahun 2018 pencapaian indikator ini sesuai dengan target yakni 100%, begitu pula tahun-tahun selanjutnya sampai dengan akhir tahun 2023. Kondisi ini menggambarkan bahwa semua permohonan layanan pertanahan khususnya kebutuhan tanah untuk kepentingan umum telah ditindaklanjuti dan diselesaikan, untuk indikator lainnya seperti penyelesaian konflik/ kasus tanah negara dan izin lokasi tidak ada satu pun yang masuk, sehingga capaian indikator ini diasumsikan tercapai 100%.

2.3.2.5 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Keberhasilan penyelenggaraan utama urusan ini dilihat dari indikator yang berkaitan dengan keterpenuhan kepemilikan akta catatan sipil yang meliputi NIK, akta kelahiran, buku nikah, pencatatan perceraian, dan akta kematian, target nasional terhadap pemenuhan kepemilikan akta catatan sipil tahun 2024 adalah sebesar 100%.

Kinerja capaian indikator yang terkait dengan kepemilikan Kartu Keluarga, penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), dan penerbitan akta kelahiran masih dibawah 100%. Hal ini diakibatkan oleh perangkat sistem pengelolaan data terjadi kerusakan, dan saat ini telah

berfungsi baik. Target nasional 100% diharapkan dapat dicapai di tahun 2024. Perkembangan capaian indikator kinerja utama tersebut termasuk indikator kinerja kunci lainnya dalam penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil di Muna Barat tahun 2018-2023 yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 51 Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Catatan Sipil Lainnya di Kabupaten Muna Barat Selama Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian (%)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga	85,41	87,20	88,75	89,65	90,24	96,07
2.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)	85,61	86,33	87,34	88,76	89,89	98,18
3.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	66,86	67,43	89,88	71,43	80,19	89,36
4.	Rasio pasangan berakta menikah	100	100	100	100	100	100
5.	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
7.	Persentase Penduduk yang Memiliki Akta Kematian	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100
8.	Cakupan pencatatan Perceraian	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat, 2024

2.3.2.6 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a) Pembangunan dan Pemberdayaan Gender

Keberhasilan Pembangunan Gender diukur dari pencapaian Nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan keberhasilan pemberdayaan gender diukur dari pencapaian nilai (Indeks Pemberdayaan Gender) IDG. Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengungkapkan keadilan pencapaian laki-laki dan perempuan dalam dimensi dan variabel yang sama seperti IPM. Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender (*Gender Empowerment Index*) yang selanjutnya di singkat IDG adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan.

Pencapaian keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan gender di Kabupaten Muna Barat selama 6 (enam) tahun terakhir terlihat pada tabel perbandingan IPG dan IDG Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional sebagai berikut.

Tabel 2. 52 Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional

No.	Wilayah	Indeks Capaian Tahunan					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Muna Barat	88,05	88,82	88,65	88,91	89,35	89,59
2.	Sulawesi Tenggara	90,24	90,56	90,50	90,68	91,04	91,20
3.	Nasional	90,99	91,07	91,06	91,27	93,64	91,85

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna Barat, 2024

Selama tahun 2018-2023, Kabupaten Muna Barat memiliki IPG posisi 8 tertinggi dari 17 Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan klasifikasi daerah setara menurut kelompok daerah dengan IPG pada persentil 33-67. Kabupaten Muna Barat bersama Kabupaten Muna, Konawe Selatan, Wakatobi, dan Kolaka tergolong dalam daerah dengan IPG Sedang. Dibanding dengan kabupaten daerah setara tersebut, perubahan IPG Kabupaten Muna Barat selama Tahun 2018-2023 meningkat paling tinggi yakni sebesar 1,54 poin.

Tabel 2. 53 Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender (DPG) Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional

No.	Wilayah	Indeks Capaian Tahunan					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Muna Barat	45,09	50,64	51,76	55,66	57,35	57,58
2.	Sulawesi Tenggara	71,54	71,40	72,54	73,10	73,7	73,58
3.	Nasional	72,10	75,24	75,57	76,26	76,59	76,9

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna Barat, 2024

Kabupaten Muna Barat selama tahun 2018-2022 memiliki IDG paling rendah di Sulawesi Tenggara yakni posisi 17, namun pada tahun 2022 meningkat menjadi posisi ke-16 melampaui Kabupaten Konawe Kepulauan dan hal ini berlanjut sampai dengan tahun 2023 dengan indeks capaian sebesar 57,58. Berdasarkan klasifikasi daerah setara menurut kelompok daerah dengan IDG pada persentil 33-67. Kabupaten Muna Barat bersama Kabupaten Muna, Kolaka, Bombana, Konawe Utara, dan Konawe Kepulauan tergolong dalam daerah IDG rendah. Dibanding dengan Sulawesi Tenggara yang indeks capaiannya mengalami penurunan pada tahun 2023, capain IDG Kab. Muna Barat terus mengalami peningkatan dari 45,09 pada tahun 2018 meningkat menjadi 57,58 pada tahun 2023.

b) Partisipasi Perempuan

Jumlah persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Kabupaten Muna Barat menunjukkan trend fluktuatif, hal ini berbanding lurus dengan jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintahan. Pada tahun 2018 persentase partisipasi perempuan di lembaga

pemerintahan naik dari 2,86% tahun 2022 menjadi 5,45% kemudian pada tahun 2023 turun menjadi 4,65%. Capaian indikator kinerja kunci terkait dengan partisipasi perempuan di Kabupaten Muna Barat selama tahun 2018-2023 ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 54 Capaian Indikator Kinerja Kunci Berkaitan dengan Partisipasi Perempuan di Kabupaten Muna Barat Selama Tahun 2018-2023

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian (%)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	2,86	3,39	4,77	5,21	5,45	4,65
2.	Proporsi kursi yang diduduki Perempuan di DPRD	10	20	20	20	20	20
3.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	10,7	10,5	11,81	11,8	11,82	18,88
4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	6,18	64,86	65,35	65,40	65,47	42,71
5.	Kontribusi Perempuan dalam Pekerjaan Upahan Di Sektor Non Pertanian	48,28	51,67	53,05	46,20	49,36	56,37
6.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,05	88,82	88,65	88,91	89,35	89,59
7.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	45,09	50,64	52,76	n.a	53,67	57,58

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna Barat, 2024

c) Perlindungan Perempuan dan Anak

Jumlah KDRT di Kabupaten Muna Barat selama 5 tahun terakhir sebanyak 10-11 Kasus per tahun dengan rasio 0,05% dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,06%. Capaian ini masih lebih baik rata-rata Kabupaten di Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2018, jumlah kasus KDRT di Sulawesi Tenggara sebanyak 222 kasus (rata-rata 13,06 per Kabupaten/Kota) dan tahun 2023 meningkat sebanyak 545 kasus (200 kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa dan 345 kasus kekerasan terhadap anak). Jumlah tenaga kerja di bawah umur di Kabupaten Muna Barat mengalami fluktuatif dari tahun 2018-2022 dengan rata-rata sebanyak empat kasus, dan pada tahun 2023 sudah tidak ada lagi anak di bawah umur yang dipekerjakan.

Jumlah Laporan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang melapor dan mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu (UPT) selama tahun 2018-2023 rasio capaian penanganannya sebesar 100%. Pada tahun 2018

terdapat 6 kasus dan tahun 2020 menjadi 20 kasus, namun tahun 2023 menurun menjadi 10 kasus. Capaian indikator kinerja kunci pelayanan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Muna Barat selama tahun 2018-2023 ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 55 Indikator Kinerja Kunci Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Muna Barat Selama Tahun 2018-2023

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian (%)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rasio KDRT (per 100 RT)	0,05	0,05	0,04	0,05	0,05	0,06
2.	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur	0.01	0.02	0.03	0.02	0.03	0
3.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan petugas terlatih di UPT	100	100	100	100	100	100
4.	Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (AKK)	100	100	100	100	100	100
5.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100	100	100	100
6.	Persentase Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna Barat, 2024

2.3.2.7 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a) Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan Kabupaten Muna Barat selama tahun 2018-2023 lebih rendah dari laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara. Walaupun demikian, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Muna Barat relatif masih jauh lebih tinggi dibanding dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia. Perbandingan Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 56 Perbandingan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Indonesia

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian (%)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Muna Barat	1,20	1,23	1,40	0,22	0,15	1,93
2.	Sulawesi Tenggara	1,53	1,51	1,47	1,75	1,66	1,64
3.	Nasional	1,06	1,03	1,00	1,22	1,17	1,13

Sumber: Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Muna Barat, 2024

2.3.2.8 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a) Koperasi

Koperasi memegang peran penting dalam perekonomian masyarakat Muna Barat. Perkembangan koperasi selama tahun 2018-2023 di Kabupaten Muna Barat mengalami peningkatan. Jumlah koperasi aktif dari tahun 2018-2022 mengalami kenaikan dari 88 untuk tahun 2018 menjadi 117 untuk tahun 2022. Pada tahun 2023 jumlah koperasi aktif mengalami penurunan 102 koperasi dari jumlah seluruh koperasi yaitu 123 koperasi. Perkembangan koperasi di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023 ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 57 Persentase Koperasi Aktif di Kab. Muna Barat Tahun 2018-2023

No.	Tahun	Jumlah Seluruh Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif
1.	2018	111	88	79,28
2.	2019	113	97	85,84
3.	2020	116	100	86,21
4.	2021	118	116	98,31
5.	2022	117	117	100
6.	2023	123	102	82,93

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Muna Barat, 2024

b) Usaha Mikro dan Kecil

Peran UMK (Usaha Mikro dan Kecil) sangat penting dalam mendukung perekonomian di Muna Barat. Jumlah UMK di Kabupaten Muna Barat selama 6 tahun terakhir terus mengalami perkembangan dan di dominasi (sekitar 99 persen) Usaha Mikro dan Kecil. Pertumbuhan pelaku usaha yang cukup baik disebabkan masyarakat mulai mengenal program kewirausahaan, sehingga banyak masyarakat yang mulai tertarik untuk terjun ke dunia usaha. Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023 ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 58 Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023

No.	Tahun	Jumlah Usaha				Persentase UMK
		Mikro	Kecil	Menengah	Total	
1.	2018	4.095	47	21	4.163	99,50
2.	2019	4.289	65	24	4.378	99,45
3.	2020	4.465	82	26	4.550	99,43
4.	2021	4.689	112	30	4.831	99,38
5.	2022	4.358	72	22	4.452	99,41
6.	2023	5.328	49	6	5.383	99,42

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Muna Barat, 2024

Seluruh UKM (4.452 pelaku usaha) di Kabupaten Muna Barat merupakan UKM Non BPR/LKM yang aktif. Sementara untuk BPR/LKM aktif, tidak ditemukan di Kabupaten Muna Barat.

2.3.2.9 Urusan Kebudayaan

Upaya pelestarian dan pengembangan budaya daerah di tengah-tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat perlu dilakukan antara lain melalui kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong daya tarik masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal daerah. Penyelenggaraan festival seni dan budaya merupakan salah satu kegiatan untuk meningkatkan daya tarik masyarakat akan perkembangan dan kelestarian budaya daerah. Selama tahun 2018-2023 capaian indikator layanan kebudayaan di Kabupaten Muna Barat cenderung tidak mengalami penambahan seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 59 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Kebudayaan di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023

No.	Indikator Kinerja	Realisasi					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	3	3	3	3	3	3
2.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	31	31	31	31	31	31
3.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	1	1	1	1	1	1
4.	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	1	1	1	1	1	1

Sumber: Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Muna Barat Tahun, 2024

2.3.2.10 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a) Desa Berkembang dan Desa Mandiri

Indikator Kinerja utama dalam mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Muna Barat adalah digunakan

indikator cakupan jumlah desa berkembang dan desa mandiri. Pengalokasian dana desa yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD telah mendorong percepatan tingkat perkembangan pembangunan desa yang sangat signifikan di Kabupaten Muna Barat.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Muna Barat yang mulai dilaksanakan tahun 2019 melalui pendampingan desa binaan oleh Kementerian Desa dan PDT menunjukkan bahwa pada tahun 2019 masih terdapat 1 (satu) dengan dengan kategori sangat tertinggal dan tahun 2020 kategori desa sangat tertinggal sudah tidak ada. Cakupan Jumlah Desa Berkembang dan Desa Mandiri di Kabupaten Muna Barat setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang signifikan dari 14,81% di tahun 2018 menjadi 81,48% di tahun 2023. Perkembangan cakupan jumlah desa berkembang dan desa mandiri di Kabupaten Muna Barat selama Tahun 2018-2023 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 60 Perkembangan Cakupan Jumlah Desa Berkembang dan Desa Mandiri di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Desa	81	81	81	81	81	81
Jumlah Desa Berkembang dan Mandiri	12	47	56	60	62	66
Cakupan jumlah desa berkembang dan desa mandiri	14,81	58,02	69,14	74,07	76,54	81,48%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muna Barat Tahun, 2024

b) Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa

Selama tahun 2018-2023, kantor desa dengan kondisi baik mencakup 65 kantor desa atau sebanyak 70,03%. Akibat adanya *refocusing* Dana Desa dan ADD dalam rangka penanggulangan Pandemi *Covid-19* selama tahun 2020 dan 2021 sehingga membatasi desa untuk melaksanakan perbaikan kantor desa. Disamping capaian indikator kinerja utama dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, capaian indikator kinerja kunci lainnya di Kabupaten Muna Barat selama tahun 2018-2023 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 61 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Kunci dalam Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023

No.	Indikator Kinerja	Realisasi					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	0	0	0	0	0	0
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	1	1	1	1	1	9
3.	Persentase LSM Aktif (Kesbang)	81,82	84,30	84,30	85,91	86,13	45%
4.	Persentase LPM Berprestasi	0	0	0	0	0	0
5.	Persentase PKK Aktif	100	100	100	100	100	100
6.	Persentase Posyandu Aktif	100	100	100	100	100	99
7.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	0	0	0	0	0	0
8.	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	0	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muna Barat Tahun, 2024

Selama tahun 2018-2023, tidak terdapat program/kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari swadaya masyarakat. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan masyarakat terhadap Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk memenuhi kebutuhan prioritas Desa. Demikian pula dengan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat, swadaya masyarakat kreatif tidak ada.

2.3.2.11 Urusan Komunikasi dan Informatika

Layanan pelaksanaan urusan Komunikasi Informatika di Kabupaten Muna Barat selama 5 tahun terakhir diarahkan untuk merumuskan kebijakan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data *center*, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan keamanan *e-Government*, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah daerah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah

daerah dan masyarakat, serta layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten.

Capaian kinerja pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Muna Barat selama tahun 2018-2023 antara lain adalah jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet telah mencapai 93% dan diikuti oleh peningkatan jumlah konten informasi OPD yang terintegrasi dengan *website* pemda. Disamping itu, cakupan pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan telah terbentuk di 3 (tiga) Kecamatan, serta layanan telekomunikasi telah mencapai 72 persen. Perkembangan capaian indikator Kinerja Kunci pelayanan urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Muna Barat selama tahun 2018-2023 yang sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 62 Capaian Indikator Kinerja Kunci Pelayanan Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Muna Barat Selama Tahun 2018-2023

No.	Indikator Kinerja	Realisasi (%)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Cakupan pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	100
2.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	60	56	61	64	68	72
3.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	69,78	71	75	81	86	91
4.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	41,93	48	51	58	63	67
5.	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	23,95	58	60	62	64	66
6.	Persentase Konten informasi SKPD yang terintegrasi dengan website pemda	5	10	12,5	55	55	57
7.	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet Pemda	0	72,5	85	90	90	93

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik & Persandian Kabupaten Muna Barat Tahun, 2024

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

2.3.3.1 Urusan Pertanian

a) Kelompok Tani

Jumlah kelompok tani (Poktan) di Kabupaten Muna Barat tahun 2018-2023, mengalami peningkatan dari 376 Poktan tahun 2018 menjadi 496 Poktan pada tahun 2023. Jumlah Poktan yang mendapat bantuan dari pemerintah daerah baik itu yang bersumber dari DAK dan DAU setiap tahunnya terus meningkat dari 357 Poktan di tahun 2018 meningkat menjadi 460 Poktan pada tahun 2023. Selama 6 (enam) tahun cakupan Poktan yang mendapatkan bantuan dari Pemda rata-rata 94,41 persen setiap tahun yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

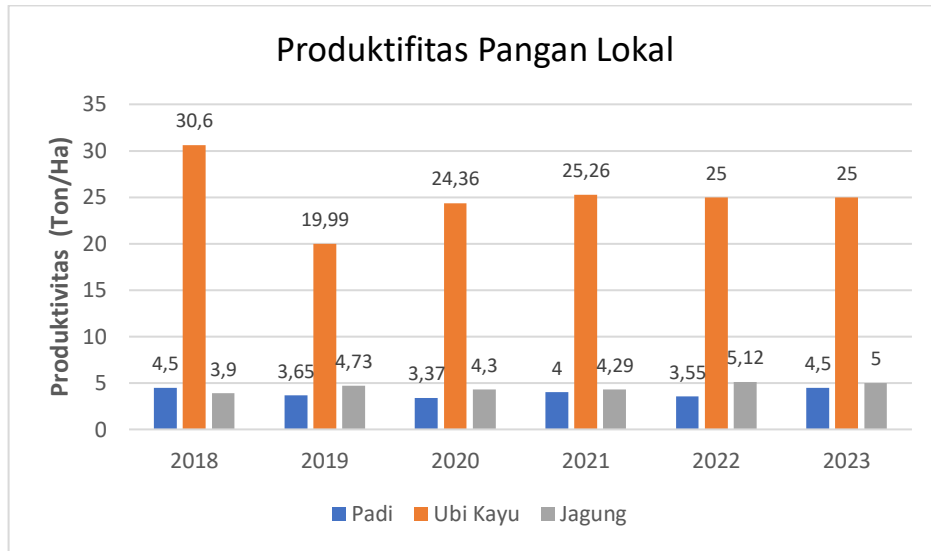
Tabel 2. 63 Cakupan Bina Kelompok Petani di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023

No.	Tahun	Jumlah Kelompok Tani	Jumlah Kelompok Petani yang mendapat bantuan	Persentase PPKS yang Tertangani
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)x100
1.	2018	376	357	94,95
2.	2019	376	357	94,95
3.	2020	410	421	94,12
4.	2021	448	421	94,86
5.	2022	448	425	94,87
6.	2023	496	460	92,74

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Muna Barat Tahun, 2024

b) Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar

Bahan pangan lokal utama di Kabupaten Muna Barat, meliputi: padi, ubi kayu dan Jagung. Produktivitas pangan lokal utama di Kabupaten Muna Barat selama tahun 2018-2023 mengalami fluktuatif. Tahun 2018 produktivitas padi, ubi kayu dan jagung mencapai nilai tertinggi dibandingkan dengan tahun sesudahnya yaitu produktivitas padi 4,5 Ton/Ha, Produktivitas Ubi Kayu 30,6 Ton/Ha dan Jagung 3,16 Ton/Ha. Perubahan yang fluktuatif utamanya disebabkan oleh adanya perubahan musim hujan yang tidak menentu dan luas lahan tanaman yang juga fluktuatif. Gambaran perkembangan produktivitas bahan pangan lokal di Kabupaten Muna Barat ditunjukkan pada Gambar berikut ini.



Gambar 2. 10 Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Muna Barat Tahun, 2024

Perkembangan luas area tanaman pangan, produksi, dan produktivitasnya di Kabupaten Muna Barat selama tahun 2018-2023 ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 64 Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023

No.	Tahun/Komoditi	Luas Areal Tanaman Pangan	Produksi Tanaman	Produktivitas Bahan Pangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)x100
1.	2018			
	Padi	1.397	6.287	4,5
	Ubi Kayu	483	29.560	30,6
	Jagung	5.833	45.497	3,9
2.	2019			
	Padi	1.048	3.828	3,65
	Ubi Kayu	378	15.112	19,99
	Jagung	5.046	23.918	2,37
3.	2020			
	Padi	1.295	4.364	3,37
	Ubi Kayu	528	25.724	24,36
	Jagung	6.373	27.404	2,15
4.	2021			
	Padi	1.626	6.504	4,0
	Ubi Kayu	409	15.672	26,12
	Jagung	2.513	13.821	2,75
5.	2022			
	Padi	1.474	5.239	3,5

No.	Tahun/Komoditi	Luas Areal Tanaman Pangan	Produksi Tanaman	Produktivitas Bahan Pangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)x100
	Ubi Kayu	295	9,693	32,85
	Jagung	8.194	25.895	3,16
6.	2023			
	Padi	900,48	4052,16	4,5
	Ubi Kayu	204	5100	25
	Jagung	7.610,5	38052,5	5

Sumber: Dinas Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Muna Barat, 2024

Disamping indikator tersebut, indikator kerja kunci lainnya dalam penyelenggaraan urusan pertanian di Kabupaten Muna Barat. Nilai tukar petani di Kabupaten Muna Barat dari tahun 2018-2023 terus mengalami peningkatan dengan capaian 101,05 di tahun 2018 kemudian meningkat menjadi 103,39 pada tahun 2023. Capaian Indikator Kinerja Kunci pada Urusan Pertanian di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2022 terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.71. Capaian Indikator Kinerja Kunci pada Urusan Pertanian di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Nilai Tukar Petani	101,05	101,10	100,77	101,06	101,11	103,39

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Muna Barat, 2024

2.3.3.2 Urusan Pariwisata

Perkembangan kinerja pelayanan pariwisata di Kabupaten Muna Barat belum memberikan hasil yang optimal. Hal ini antara lain terlihat dari kunjungan wisata di Kabupaten Muna Barat selama tahun 2018-2023 masih di dominasi oleh wisatawan domestik/lokal dengan jumlah kunjungan 81.679 (99,95 persen). Destinasi wisata Kabupaten Muna Barat, khususnya destinasi wisata Selat Tiworo telah ditetapkan sebagai salah satu dari 7 (tujuh) Destinasi Wisata Unggulan Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun demikian, kondisi sarana dan prasarana destinasi wisata di Kabupaten Muna Barat umumnya belum optimal dalam mendukung peningkatan kunjungan wisata di Kabupaten Muna Barat. Perkembangan indikator pelayanan pariwisata di Kabupaten Muna Barat selama tahun 2018-2023 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 65 Perkembangan Capaian Kinerja Indikator Terkait Pelayanan Pariwisata di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rata-rata kunjungan wisata mancanegara dalam satu tahun (hari)	2	2	2	2	34	43
2.	Rata-rata jumlah Kunjungan Wisata Domestik / lokal dalam satu tahun (kali)	2	2	2	2	57.996	81.679
3.	Jumlah Kunjungan	150.132	33.836	34.093	39.543	58.030	82.722
4.	Jumlah Rumah makan	51	54	54	54	54	81
5.	Jumlah Penginapan	1	1	1	1	1	3

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Muna Barat, 2024

2.3.3.3 Urusan Kelautan dan Perikanan

a) Produksi Perikanan

Produksi perikanan sejak tahun 2018 hingga tahun 2019 Muna Barat relatif mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Muna Barat memiliki potensi perikanan yang besar untuk dikembangkan. Potensi tersebut meliputi perikanan laut dimana Kabupaten Muna Barat dengan memiliki panjang garis pantai ± 182 km dengan luas perairan sebesar 1.456,87 km² yang didukung oleh ekosistem terumbu karang, mangrov dan ekosistem padang lamun, dan juga perikanan darat melalui usaha budidaya air tawar dan air payau. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan produksi dibandingkan dengan produksi tahun 2019. Hal ini terjadinya karena dampak dari Pandemi *Covid-19* karena adanya pembatasan aktivitas masyarakat dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan maupun usaha budidaya perikanan. Produksi perikanan di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023 seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 66 Produksi Perikanan di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023

No.	Tahun	Target Produksi Ikan Daerah (Kg)	Jumlah Produksi Ikan (Kg)	Tingkat Produksi Perikanan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)×100
1.	2018	10.707.150	12.238.550	114,30
2.	2019	13.462.405	28.922.980	214,84
3.	2020	31.815.278	19.076.440	59,96
4.	2021	20.984.084	25.325.910	120,69
5.	2022	27.858.501	28.294.275	101,56
6.	2023	29.708.989	29.972.601	100,89

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat, 2024

b) Konsumsi Ikan

Konsumsi Ikan masyarakat Muna Barat dari tahun 2018 hingga 2023 terus mengalami peningkatan. Persentase konsumsi ikan terus mengalami peningkatan dari angka 97,8% pada tahun 2018 hingga 101,53% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi ikan semakin tinggi. Disamping itu ketersediaan ikan di pasar juga cukup memadai. Adapun konsumsi ikan masyarakat Muna Barat ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 67 Konsumsi Ikan di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023

No.	Tahun	Target Konsumsi Ikan (kg)	Jumlah Konsumsi Ikan (kg)	Tingkat Konsumsi Ikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)×100
1.	2018	3.444.163	3.370.508	97,8
2.	2019	3.529.566	3.471.235	98,3
3.	2020	3.529.566	3.557.321	100,7
4.	2021	3.665.086	3.684.983	100,5
5.	2022	3.738.388	3.777.108	101,04
6.	2023	3.794.464	3.852.650	101,53

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat, 2024

c) Bina Kelompok Nelayan

Jumlah nelayan yang membentuk kelompok bersama dari tahun 2018 hingga tahun 2023 terus meningkat. Artinya bahwa kesadaran tentang pentingnya bekerja secara berkelompok juga semakin meningkat karena dapat saling menguatkan diantara anggota kelompok. Cakupan bina kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan Pemda terlihat terus mengalami penurunan dikarenakan semakin banyaknya kelompok nelayan yang terbentuk. Adapun jumlah kelompok nelayan di Kabupaten Muna Barat tahun 2018-2023 ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 68 Jumlah Kelompok Nelayan di Kab. Muna Barat Tahun 2018-2023

No.	Tahun	Jumlah kelompok nelayan	Jumlah kelompok nelayan yang mendapat bantuan	Cakupan bina kelompok nelayan yang mendapat bantuan pemda
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)×100
1.	2018	218	97	44,49
2.	2019	276	64	23,18
3.	2020	380	53	13,94
4.	2021	402	72	17,91
5.	2022	417	29	6,95
6.	2023	428	28	6,54

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat, 2024

d) Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Produksi perikanan tangkap yang bersumber dari kelompok nelayan relatif mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena semakin banyaknya kelompok nelayan yang terbentuk setiap tahunnya sehingga memberi dampak terhadap peningkatan jumlah tangkapan ikan oleh kelompok nelayan. Cakupan produksi perikanan kelompok nelayan juga memperlihatkan trend yang meningkat pada setiap tahunnya. Artinya bahwa dengan bertambahnya kelompok yang terbentuk, maka hasil tangkapan yang diperoleh juga semakin besar.

Pada tahun 2023 cakupan produksi perikanan kelompok nelayan mengalami peningkatan. Hal ini semakin menegaskan bahwa dengan berkelompoknya nelayan akan memberi manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan bila nelayan tersebut bekerja sendiri/perorangan. Jumlah produksi perikanan nelayan di Kabupaten Muna Barat tahun 2018-2023 ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 69 Jumlah Produksi Perikanan di Kab. Muna Barat Tahun 2018-2023

No.	Tahun	Jumlah Produksi Perikanan Daerah (ton)	Produksi perikanan Kelompok nelayan (ton)	Cakupan Produksi Perikanan kelompok nelayan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)x100
1.	2018	9.695,303	2.882,031	29,73
2.	2019	10.316,70	3.241,16	31,42
3.	2020	9.301,59	3.932,54	42,28
4.	2021	11.369,10	3.780,92	33,26
5.	2022	12.805,40	4.711,98	36,80
6.	2023	13.647,33	5.154,25	37,77

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat, 2024

e) Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Nelayan adalah nilai tukar nelayan di Daerah Sulawesi Tenggara. Dengan asumsi bahwa nelayan yang ada di Kabupaten Muna Barat pada dasarnya memiliki kultur yang hampir sama dengan nelayan di Kabupaten lainnya, maka dapat diasumsikan bahwa Nilai Tukar Nelayan Kabupaten Muna Barat akan relatif memiliki kesamaan dengan Nilai Tukar Nelayan Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun nilai tukar nelayan di Kabupaten Muna Barat tahun 2018-2023 ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 70 Nilai Tukar Nelayan di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023

No.	Tahun	Nilai Tukar Nelayan
1.	2018	116,46
2.	2019	117,36
3.	2020	97,75
4.	2021	102,54
5.	2022	105,68
6.	2023	105,00

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat, 2024

f) Produksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Skala Kecil dan Mikro

Produksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Skala Kecil dan Mikro pada tahun 2018 hingga tahun 2023 terus mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam melakukan diversifikasi usaha perikanan. Untuk itu Pemerintah terus mendorong usaha pengolahan hasil perikanan skala kecil dan mikro dengan memberi diklat dan pelatihan serta penguatan permodalan bagi para pengolah hasil perikanan di Kabupaten Muna Barat.

Pada tahun 2020 terlihat ada penurunan produksi. Hal ini terjadi karena adanya Pandemi *Covid-19* yang turut memberi pengaruh terhadap produk olahan Perikanan. Beberapa perusahaan besar yang ada di Kota Kendari yang selama ini menampung olahan perikanan (olahan daging rajungan) dari pengumpul dan pengolah hasil perikanan di Kabupaten Muna Barat berhenti membeli produk tersebut. Akibatnya produksi olahan perikanan juga mengalami penurunan.

Tabel 2. 71 Jumlah Produksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Skala Kecil dan Mikro di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023

No.	Tahun	Target Produksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Skala Kecil dan Mikro (ton)	Jumlah Produksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Skala Kecil dan Mikro (Ton)	Tingkat Produksi Perikanan Tangkap
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)x100
1.	2018	81,64	84,42	103,40
2.	2019	86,94	90,68	104,30
3.	2020	87,4	85,65	98,00
4.	2021	89,94	97,69	108,62
5.	2022	102,57	199,67	194,67
6	2023	205,66	139,73	67,94

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat, 2024

Tabel 2. 72 Capaian Indikator Kunci Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018 – 2023

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Ton)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	12.238,55	28.922,98	19.076,44	25.325,91	28.294,28	29.972,60
2.	Produksi perikanan tangkap	9.695,30	10.316,70	9.301,59	11.369,10	12.805,40	13.647,33
3.	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	2.543,25	18.606,28	9.774,85	13.956,81	15.488,87	16.325,27
4.	Produksi usaha pengolahan hasil perikanan skala kecil dan mikro (Ton)	84,42	90,68	85,65	97,69	199,67	139,73
5.	Produksi usaha pengolahan hasil perikanan skala kecil dan mikro terhadap target daerah (%)	103,40	104,30	98,00	108,62	194,67	67,94
6.	Produksi perikanan tangkap terhadap target daerah (%)	113,16	115,99	99,99	116,11	102,39	101,5
7.	Produksi perikanan budidaya terhadap target daerah (%)	118,89	561,52	213,07	232,62	100,89	100,38
8.	Produksi perikanan tangkap dan budidaya terhadap target daerah (%)	114,30	236,92	137,34	160,38	101,56	100,89
9.	Konsumsi ikan terhadap target daerah (%)	97,8	98,3	100,7	100,5	101,04	101,53
10.	Produksi perikanan kelompok nelayan terhadap produksi ikan daerah (%)	29,73	31,42	42,28	33,26	36,8	37,77
11.	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	n.a	n.a	n.a	n.a	21,65	n.a
12.	Cakupan bina kelompok nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan	44,49 (%)	23,18 (%)	13,94 (%)	17,91 (%)	6,95	6,54

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Ton)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
13.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	154,71	145,40	161,26	131,94	117,14	109,91
14.	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial	1,09	1,09	1,09	2,05	2,05	2,05
15.	Nilai tukar nelayan	116,46	117,36	97,62	102,54	105,68	105

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat, 2024

2.3.3.4 Urusan Perdagangan

a) Ekspor Impor

Neraca perdagangan di Kabupaten Muna Barat pada tahun 2018-2023 dengan luar wilayah yang direpresentasikan oleh komponen ekspor dan impor, menunjukkan ekspor yang cenderung selalu lebih rendah dari impor. Kecenderungan pada periode itu menunjukkan posisi “defisit” atau merugi, hal ini menunjukkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di wilayah Kabupaten Muna Barat masih harus di topang barang dan jasa dari luar wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa nilai impor lebih besar dari pada nilai ekspor. Perkembangan ekspor impor di Kabupaten Muna Barat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 73 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023

Perdagangan	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Impor	72.72%	70.31%	67.35%	39%	68.81%	67.56%
Ekspor	20.01%	19.31%	17.80%	20.05%	21.24%	17.32%

Sumber: PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Muna Barat, 2024

b) Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Jumlah Pasar yang terdapat di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 sebanyak 23 (dua puluh tiga) pasar. Dari 23 (dua puluh tiga) tersebut terdapat 12 (dua belas) pasar yang telah dikelola Pemda dan ditarik retribusinya atau 53,17 persen. Pembinaan yang dilaksanakan dalam bentuk pembangunan/revitalisasi sarana distribusi (lapak pedagang) pada 12 (dua belas) pasar.

2.3.3.5 Urusan Perindustrian

Pada tahun 2022 jumlah pengrajin yang ada di Kabupaten Muna Barat sebanyak 762 orang dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 774 pengrajin. Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari sektor perdagangan sendiri, pajak hotel, restoran, sementara pada tahun ini karena terjadinya perubahan tahun dasar maka kontribusi sektor perdagangan terhadap Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna Barat terdiri dari perdagangan besar dan eceran.

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia yang menunjukkan kemampuan konsumsi dan daya beli masyarakat terhadap berbagai barang dan jasa tersebut. Semakin tinggi angka konsumsi rumah tangga, maka secara umum kemampuan ekonomi masyarakat juga mengindikasikan perkembangan yang positif. Berdasarkan data BPS tahun 2023 menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Muna Barat, sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2018 – 2023 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami fluktuasi (peningkatan maupun penurunan) signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Peningkatan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi keseluruhan. Semakin tinggi angka konsumsi rumah tangga (RT), maka secara umum kemampuan ekonomi masyarakat juga mengindikasikan perkembangan yang positif.

**Tabel 2. 74 Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Muna Barat
Tahun 2018-2023**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
Total Konsumsi Rumah Tangga						
ADHB (Milyar Rp)	2.060,20	2.238,58	2.269,20	2.387,70	2.609,33	2.866,80
ADHK (Milyar Rp)	1.634,39	1.734,04	1.732,39	1.783,53	1.864,61	1.960,26
Proporsi terhadap PDRB (persen ADHB)	87,36	86,46	86,68	85,6	84,99	84,64
Rata-rata konsumsi per- kapita/tahun						

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
ADHB (Juta Rp)	25,55	27,49	26,81	27,79	27,79	32,11
ADHK (Juta Rp)	20,27	21,3	20,47	20,76	21,29	21,96
Laju Pertumbuhan						
Total konsumsi Rumah Tangga	6,34	6,1	-0,1	2,94	4,56	5,13
Per Kapita	5,06	5,08	-3,89	1,43	2,54	3,14
Jumlah Penduduk (jiwa)	80.619	81.428	84.641	85.904	87.594	89.285

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Kabupaten Muna Barat 2018 – 2023, BPS Kab.Muna 2024

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

2.4.2.1 Energi Listrik

Jumlah Rumah Tangga (RT) pengguna listrik di Kabupaten Muna Barat selama tahun 2018-2023 terus mengalami peningkatan. Pengguna listrik di Kabupaten Muna Barat tahun 2023 terdiri dari 88,46% listrik dari PLN dan 8,12% listrik Non PLN, Perbandingan Persentase Rumah Tangga (RT) pengguna energi listrik di Kabupaten Muna Barat dan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018-2023 ditunjukkan pada tabel 2.81 berikut ini.

Tabel 2. 75 Perbandingan Persentase Rumah Tangga (RT) Pengguna Energi Listrik di Kabupaten Muna Barat dan Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Muna Barat	100	97,38	98,63	98,76	97,64	96,58
2.	Sulawesi Tenggara	98,43	98,72	99,12	99,43	99,7	99,78

Sumber: Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kab. Muna Barat, 2024

2.4.2.2 Prasarana Transportasi

Prasarana transportasi yang tersedia di Kabupaten Muna Barat meliputi prasarana transportasi udara, laut, dan darat. Aksesibilitas antara Kabupaten Muna Barat dengan wilayah lainnya di Indonesia telah dihubungkan dengan prasarana transportasi udara dan transportasi laut. Prasarana transportasi udara yakni Bandara Sugimanuru menghubungkan Pulau Muna dan Kota Makassar-Sulawesi Selatan. Prasarana transportasi laut yang ada di Kabupaten Muna Barat yang berfungsi sebagai pelabuhan pengumpan regional adalah Pelabuhan Ferry Tondasi. Pelabuhan ini telah menghubungkan Pulau Muna dengan Kabupaten Bombana dan Kabupaten Bulukumba-Sulawesi Selatan. Selain itu pula, untuk mempercepat aksesibilitas antara Pelabuhan Tondasi / bandara udara ke pusat kegiatan dan pemukiman telah terhubung dengan prasarana transportasi darat atau jalan yang berstatus sebagai jalan nasional.

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.3.1 Urusan Penanaman Modal

Kinerja pelayanan Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Muna Barat selama tahun 2018-2023 menunjukkan nilai yang fluktuatif, nilai kepuasan masyarakat tahun 2018 yaitu 80 dan tahun 2023 nilai survey kepuasan masyarakat yaitu 81,73. Walaupun demikian, pada tahun 2022 nilai kepuasan masyarakat meningkat dengan kategori baik. Hal ini ditunjukkan dari hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan pada 6 (enam) tahun terakhir yang dapat dilihat pada Tabel 2.78 berikut ini.

Tabel 2. 76 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80	82,28	89,84	81,52	88,35	81,73

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna Barat, 2024

Secara rinci pencapaian Indikator Kinerja Kunci pelayanan urusan penanaman modal di Kabupaten Muna Barat selama tahun 2018-2023 ditunjukkan pada Tabel 2.83 berikut ini.

Tabel 2. 77 Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Pelayanan Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah investor berskala Nasional/daerah (PMDN)	131	82	132	143	1331	1354
2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional /daerah –PMDN (Rp. M)	31,33	27,11	15,5	14,33	16,47	37,04
3.	Kenaikan Nilai Realisasi PMDN (Rp. M)	5,68	4,22	11,61	1,17	9,55	20,57
4.	Jumlah realisasi PMA	0	0	0	0	0	0
5.	Pertumbuhan nilai realisasi Investasi (%)	22,14	-13,47	-42,83	-7,55	66,62	55,12
6.	Jumlah izin yang dikeluarkan	131	82	132	143	1331	1293

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna Barat, 2024

Investor yang ada di Kabupaten Muna Barat pada umumnya merupakan investor daerah. Walaupun jumlah investor cenderung mengalami peningkatan selama tahun 2018-2023, namun nilai investasi dan pertumbuhan nilai realisasi investasi cenderung mengalami penurunan. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam peningkatan nilai investasi adalah belum terselesaikan Perda iklim investasi di Kabupaten Muna Barat. Selain itu pula, terdapat beberapa aspek yang harus dibenahi terutama sarana dan prasarana, serta implementasi inovasi **“Sapa Kampung”** dalam akselerasi pelayanan perizinan pada semua desa.

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.4.1 Urusan Pendidikan

Pengembangan Bidang Pendidikan di Kabupaten Muna Barat masih tertinggal dibanding dengan kabupaten lainnya di wilayah Sulawesi Tenggara, sebagaimana ditunjukkan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang berada pada posisi paling rendah. Namun demikian, Siswa-siswi asal Muna Barat selama tahun 2018-2023 juga telah memperoleh prestasi di Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara baik di bidang olahraga maupun prestasi pendidikan. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan siswa asal Muna Barat yang mewakili Provinsi Sulawesi Tenggara di Tingkat Nasional baik di bidang olahraga maupun bidang pendidikan.

Rendahnya indeks pendidikan di Kabupaten Muna Barat disebabkan oleh relatif tingginya penduduk Kabupaten Muna Barat yang memiliki pendidikan tinggi mencari pekerjaan, bekerja, dan menjadi penduduk di daerah lain. Dalam upaya terus meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Muna Barat maka Pemerintah Daerah disamping terus memantapkan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan, juga terus mendorong dan memfasilitasi upaya pendirian Pendidikan Tinggi di wilayah Muna Barat.

2.4.4.2 Urusan Kesehatan

Penyelenggaraan Urusan Kesehatan di Kabupaten Muna Barat hal. Ini salah satunya diindikasikan dari jumlah kasus *Covid-19* yang relatif sangat kecil dan cakupan masyarakat yang mendapatkan layanan vaksin *Covid-19* telah melampaui 30%. Selain itu pula, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan perorangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat telah mengupayakan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang sementara ini dalam tahapan penyelesaian kebutuhan bangunan gedung dan peralatan kedokteran, termasuk mendatangkan dokter ahli. Selama tahun 2018-2023, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Barat tidak hanya melayani masyarakat Muna Barat tetapi juga melayani masyarakat kabupaten lainnya khususnya bagi pasien yang membutuhkan pelayanan dokter ahli bedah.

2.4.4.3 Urusan Pemuda dan Urusan Olahraga

Kabupaten Muna Barat merupakan salah satu lumbung atlet olahraga di Sulawesi Tenggara, khususnya pada cabang olahraga karate, takraw, dan dayung. Keberhasilan penyelenggaraan urusan pemuda dan olahraga di Kabupaten Muna Barat dapat terlihat dari capaian Indikator Kinerja Kunci yang ditunjukkan pada tabel 2.84 berikut ini.

Tabel 2. 78 Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Muna Barat Tahun 2018-2023

No.	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase pemuda aktif	100	97,59	86,17	81,90	100	98,62
2	Persentase wirausaha muda	1,22	1,22	1,23	1,25	8	8,5
3	Cakupan pembinaan olahraga	100	52,94	64,71	100	100	90
4	Cakupan pelatih yang bersertifikat (%)	30,60	31,88	33,33	33,33	62	62
5	Cakupan pembinaan atlet muda (%)	100	100	0	0	10	10
6	Jumlah atlet berprestasi	18	21	-	2	14	15
7	Jumlah prestasi olahraga	3	7	-	8	77	3

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Muna Barat, 2024

2.5. REFLEKSI PEMBANGUNAN

2.5.1 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Muna Barat merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang berlaku selama 20 tahun dengan sifat kualitatif. Jangka waktu berlakunya RPJPD adalah dari tahun 2005 hingga 2025, namun karena Kabupaten Muna Barat baru terbentuk pada tahun 2014 dan dokumen perencanaan pembangunan disahkan pada tahun 2017 maka Kabupaten Muna Barat hanya menjabarkan capaian kinerja selama 2 periode. Periode yang dimaksud di sini adalah periode III yaitu tahun 2015-2020 dan periode IV tahun 2020-2025. Berikut adalah kesimpulan yang diperoleh dari hasil evaluasi RPJPD 2005-2025:

Tabel. 2.86 Uraian Evaluasi Periode III dan IV RPJPD Kab. Muna Barat Tahun 2005-2025

Visi RPJPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2005-2025						
Mewujudkan Kabupaten Muna Barat yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan Tahun 2025						
Misi	Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran Kinerja	Target Kinerja Tahap III (2015-2020)	Target Kinerja Tahap IV (2020-2025)	Capaian Kinerja Tahap III (2015-2020)	Capaian Kinerja Tahap IV (2020-2025)
Misi 1: Meningkatkan ekonomi Kabupaten Muna Barat berbasis potensi sektoral	Sasaran 1.1: Pertumbuhan ekonomi berbasis agropolitan dan minapolitan	Pertumbuhan produksi sumberdaya lahan (sektor pertanian) dikembangkan melalui konsep agropolitan	Mengembangkan model kampung mandiri pangan dengan memanfaatkan potensi pangan yang dimiliki	Bertambahnya kampung mandiri pangan dan pengembangan sistem jaringan antar kampung mandiri	Merencanakan model kampung mandiri pangan berdasarkan potensi pangan yang dimiliki	Merancang konsep kampung mandiri pangan berdasarkan sumberdaya lahan dan kapasitas

Visi RPJPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2005-2025

Mewujudkan Kabupaten Muna Barat yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan Tahun 2025

Misi	Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran Kinerja	Target Kinerja Tahap III (2015-2020)	Target Kinerja Tahap IV (2020-2025)	Capaian Kinerja Tahap III (2015-2020)	Capaian Kinerja Tahap IV (2020-2025)
				pangan di berbagai wilayah	masing-masing kecamatan	produksi hasil tani antar desa
		Pertumbuhan produksi perikanan (tangkap dan budidaya) dikembangkan melalui konsep minapolitan	Berkembangnya sistem jaringan antar kelompok budidaya dan kelompok nelayan produktif	Berkembangnya sistem jaringan regional antar kelompok budidaya dan kelompok nelayan yang produktif	Membangun kerjasama antara OPD teknis terkait dengan kelompok budidaya dan kelompok nelayan produktif	Mempelajari sistem jaringan pemasaran yang dapat dibentuk antar kelompok budidaya dan nelayan produktif
		Tumbuh kembangnya usaha pengolahan hasil sektor agropolitan dan minapolitan	Semakin banyaknya jaringan pemasaran lokal dan regional bagi produk olahan pangan berbahan lokal	Mengembangkan jaringan pemasaran regional dan nasional bagi produk olahan pangan berbahan lokal	Semakin banyaknya jaringan pemasaran lokal dan regional bagi produk olahan	Mengembangkan jaringan pemasaran regional dan nasional bagi produk olahan

Visi RPJPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2005-2025

Mewujudkan Kabupaten Muna Barat yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan Tahun 2025

Misi	Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran Kinerja	Target Kinerja Tahap III (2015-2020)	Target Kinerja Tahap IV (2020-2025)	Capaian Kinerja Tahap III (2015-2020)	Capaian Kinerja Tahap IV (2020-2025)
					pangan berbahan lokal	pangan berbahan lokal
	Sasaran 1.2: Tergalinya potensi-potensi wisata yang handal dan kearifan lokal sehingga dapat dikembangkan dan di jaga kelestariannya	Teridentifikasi potensi pariwisata di Kabupaten Muna Barat	90% potensi wisata teridentifikasi dan 70% potensi-potensi pariwisata telah terkelola	Potensi wisata teridentifikasi secara keseluruhan dan mengembangkan potensi wisata baru yang akan di kelola	70% potensi wisata teridentifikasi dan 40% potensi pariwisata telah terkelola	Potensi wisata teridentifikasi dan mengembangkan potensi wisata baru yang akan di kelola
		Dilaksanakan program pariwisata berwawasan ekowisata	Memiliki kelembagaan lokal pariwisata dari masyarakat dalam mengelola pariwisata	Seluruh objek wisata memiliki kelembagaan lokal pariwisata dari masyarakat dalam mengelola pariwisata	Sebagian tempat wisata telah memiliki kelembagaan lokal dari masyarakat dalam mengelola pariwisata	Membangun strategi agar kelembagaan lokal dari masyarakat dalam semakin merata di semua titik pariwisata

Visi RPJPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2005-2025

Mewujudkan Kabupaten Muna Barat yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan Tahun 2025

Misi	Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran Kinerja	Target Kinerja Tahap III (2015-2020)	Target Kinerja Tahap IV (2020-2025)	Capaian Kinerja Tahap III (2015-2020)	Capaian Kinerja Tahap IV (2020-2025)
		Meningkatnya jumlah orang yang berkunjung ke Kabupaten Muna Barat	Penyebaran informasi dan melakukan promosi pariwisata dalam lingkup regional maupun nasional	Melakukan promosi dengan konsep yang berbeda dan lebih menarik bagi wisatawan	Penyebaran informasi dan melakukan promosi pariwisata dalam lingkup regional maupun nasional	Melakukan promosi dengan konsep yang berbeda dan lebih menarik bagi wisatawan
		Tempat wisata-wisata potensial semakin banyak dikunjungi terutama pada wisata bahari	Peningkatan kualitas objek wisata potensial serta menyebarkan informasi dan melakukan promosi dalam lingkup regional maupun nasional	Melakukan promosi dengan konsep yang berbeda dan lebih menarik bagi wisatawan regional, nasional, dan internasional	Peningkatan kualitas objek wisata potensial serta menyebarkan informasi dan melakukan promosi dalam lingkup regional maupun nasional	Melakukan promosi dengan konsep yang berbeda dan lebih menarik bagi wisatawan regional, nasional, dan internasional

Visi RPJPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2005-2025

Mewujudkan Kabupaten Muna Barat yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan Tahun 2025

Misi	Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran Kinerja	Target Kinerja Tahap III (2015-2020)	Target Kinerja Tahap IV (2020-2025)	Capaian Kinerja Tahap III (2015-2020)	Capaian Kinerja Tahap IV (2020-2025)
		Pelestarian lingkungan sosial dan budaya sehingga menjadi daya tarik wisata dan nilai nilai sosial budaya yang masih tetap terjaga	Penyediaan gedung maupun sarana dan media pewarisan budaya	Melakukan kerjasama dengan objek wisata dalam pelestarian budaya melalui pertunjukan	Penyediaan gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah sebagai sarana media pengenalan budaya	Merencanakan kerjasama dengan objek wisata dalam pelestarian budaya melalui pertunjukan
	Sasaran 1.3: Berkembangnya pasar rakyat dari hasil sumberdaya lokal	Terbangunnya pasar yang memadai bagi penjualan produk produk segar dan olahan lokal	Meningkatkan kualitas fisik, layanan, dan fasilitas pasar rakyat di seluruh kecamatan	Mengembangkan inovasi fisik pasar rakyat sesuai kebutuhan pengembangan pasar	Meningkatkan kualitas fisik, layanan, dan fasilitas pasar rakyat di seluruh kecamatan	Merencanakan inovasi fisik pasar rakyat sesuai kebutuhan pengembangan pasar

Visi RPJPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2005-2025

Mewujudkan Kabupaten Muna Barat yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan Tahun 2025

Misi	Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran Kinerja	Target Kinerja Tahap III (2015-2020)	Target Kinerja Tahap IV (2020-2025)	Capaian Kinerja Tahap III (2015-2020)	Capaian Kinerja Tahap IV (2020-2025)
		Meningkatnya jumlah pedagang dan kemampuan berdagang warga masyarakat	Meningkatkan etos dagang dan kapasitas dagang para pedagang kecil di pasar rakyat melalui sekolah dagang tingkat daerah	Mengembangkan berbagai inovasi baru di tengah-tengah pedagang dan pasar rakyat	Belum ada sekolah dagang tingkat daerah sehingga untuk meningkatkan etos dagang maka Pemda hanya melakukan sosialisasi	Mengembangkan konsep sekolah dagang sebagai inovasi dalam meningkatkan etos dagang
	Sasaran 1.4: Berkembangnya sistem dan lembaga keuangan rakyat	Terdapat pengelola lembaga keuangan yang mengelola keuangan masyarakat	Mengembangkan jejaring antar lembaga keuangan rakyat di dalam dan luar daerah	Mengembangkan inovasi layanan lembaga keuangan rakyat berbasis teknologi informasi	Mengembangkan jejaring antar lembaga keuangan rakyat di dalam dan luar daerah	Merancang inovasi layanan lembaga keuangan rakyat berbasis teknologi informasi

Visi RPJPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2005-2025

Mewujudkan Kabupaten Muna Barat yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan Tahun 2025

Misi	Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran Kinerja	Target Kinerja Tahap III (2015-2020)	Target Kinerja Tahap IV (2020-2025)	Capaian Kinerja Tahap III (2015-2020)	Capaian Kinerja Tahap IV (2020-2025)
		Terpenuhinya permodalan usaha rakyat melalui pembiayaan oleh lembaga keuangan	Meningkatkan akses usaha ekonomi rakyat terhadap pembiayaan dan pendampingan dari lembaga keuangan rakyat	Memperluas layanan dan jangkauan lembaga keuangan rakyat hingga pelosok daerah	Meningkatkan akses usaha ekonomi rakyat terhadap pembiayaan dan pendampingan dari lembaga keuangan rakyat	Memperluas layanan dan jangkauan lembaga keuangan rakyat hingga pelosok daerah
		Persentase pertumbuhan industri UMKM	Menggalakan gerakan investasi lokal di tengah-tengah masyarakat dengan fasilitas layanan lembaga keuangan lokal milik masyarakat	Mengembangkan inovasi layanan investasi masyarakat dan ekonomi rakyat berbasis teknologi informasi	Menggalakan gerakan investasi lokal di tengah-tengah masyarakat dengan fasilitas layanan lembaga keuangan lokal milik masyarakat	Merencanakan inovasi layanan investasi masyarakat dan ekonomi rakyat berbasis teknologi informasi

Visi RPJPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2005-2025

Mewujudkan Kabupaten Muna Barat yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan Tahun 2025

Misi	Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran Kinerja	Target Kinerja Tahap III (2015-2020)	Target Kinerja Tahap IV (2020-2025)	Capaian Kinerja Tahap III (2015-2020)	Capaian Kinerja Tahap IV (2020-2025)
Misi 2: Meningkatkan kualitas infrastruktur yang memadai	Sasaran 2.1: Tersedianya infrastruktur transportasi darat, udara, dan laut yang memadai baik secara kuantitas dan kualitas	Dibukanya segala kemungkinan akses darat, udara dan laut yang memadai di semua kecamatan	Peningkatan kualitas jalan atau transportasi darat di setiap kecamatan, pembangunan pelabuhan rakyat pada setiap pulau di Muna Barat dan peningkatan bandar Sugimanuru	Peningkatan kualitas jalan transportasi darat di setiap kecamatan, pembangunan dan peningkatan kualitas pelabuhan rakyat pada setiap pulau di Muna Barat, dan peningkatan kualitas pelayanan bandara Sugimanuru	Peningkatan kualitas jalan atau transportasi darat di setiap kecamatan, pembangunan pelabuhan rakyat pada setiap pulau di Muna Barat dan pembangunan peningkatan bandara Sugimanuru	Peningkatan kualitas jalan transportasi darat di setiap kecamatan, pembangunan dan peningkatan kualitas pelabuhan rakyat pada setiap pulau di Muna Barat, dan peningkatan kualitas pelayanan bandara Sugimanuru
	Sasaran 2.2: Terjadinya	Masyarakat memiliki	Membuka atau membangun akses	Membuka atau membangun dan	Membuka atau membangun akses	Berupaya membuka atau

Visi RPJPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2005-2025

Mewujudkan Kabupaten Muna Barat yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan Tahun 2025

Misi	Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran Kinerja	Target Kinerja Tahap III (2015-2020)	Target Kinerja Tahap IV (2020-2025)	Capaian Kinerja Tahap III (2015-2020)	Capaian Kinerja Tahap IV (2020-2025)
	pemerataan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana transportasi.	kemudahan akses yang relatif sama terhadap sarana transportasi. Kemudahan akses antar wilayah	dan memelihara akses antar wilayah dan antar pulau setiap tahunnya	memelihara akses antar wilayah dan antar pulau tiap tahunnya	dan memelihara akses antar wilayah dan antar pulau setiap tahunnya	membangun dan memelihara akses antar wilayah dan antar pulau tiap tahunnya
	Sasaran 2.3: Tersedianya sistem drainase yang memadai baik secara kualitas dan kuantitas.	Terbangunnya sistem drainase yang memadai serta berfungsi dengan baik	Meningkatkan kualitas drainase melalui perbaikan dimensi, pengerasan, serta bangunan pelengkap dan permukiman baru wajib menyiapkan sistem drainase dan sumur resapan	Meningkatkan kualitas drainase melalui perbaikan dimensi, pengerasan, serta bangunan pelengkap dan swadaya masyarakat dalam mengelola dan merawat drainase	Meningkatkan kualitas drainase melalui perbaikan dimensi, pengerasan, serta bangunan pelengkap dan permukiman baru wajib menyiapkan sistem drainase	Meningkatkan kualitas drainase melalui perbaikan dimensi, pengerasan, serta bangunan pelengkap dan swadaya masyarakat dalam mengelola dan

Visi RPJPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2005-2025

Mewujudkan Kabupaten Muna Barat yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan Tahun 2025

Misi	Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran Kinerja	Target Kinerja Tahap III (2015-2020)	Target Kinerja Tahap IV (2020-2025)	Capaian Kinerja Tahap III (2015-2020)	Capaian Kinerja Tahap IV (2020-2025)
				permukiman secara berkelanjutan	dan sumur resapan	merawat drainase permukiman secara berkelanjutan
	Sasaran 2.4: Terpenuhinya kebutuhan akses telekomunikasi yang memudahkan masyarakat.	Kemudahan akses memanfaatkan telekomunikasi bagi masyarakat	Masyarakat dapat berkomunikasi dengan mudah, lancar dan tanpa hambatan di seluruh wilayah, termasuk pulau-pulau di Kabupaten Muna Barat	Masyarakat memiliki banyak pilihan dalam menggunakan jasa layanan telekomunikasi yang disediakan pihak swasta	Berupaya untuk memperbaiki akses telekomunikasi di wilayah daratan dan pulau-pulau	Berupaya untuk berkomunikasi dengan mudah, lancar dan tanpa hambatan di seluruh wilayah daratan dan pulau-pulau
	Sasaran 2.5: Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap air	Meningkatnya persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih	70% kebutuhan air bersih dan air minum bagi rumah tangga telah terpenuhi	90% kebutuhan air bersih dan air minum bagi rumah tangga telah terpenuhi	70% kebutuhan air bersih dan air minum bagi rumah tangga telah terpenuhi	80% kebutuhan air bersih dan air minum bagi rumah tangga telah terpenuhi

Visi RPJPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2005-2025

Mewujudkan Kabupaten Muna Barat yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan Tahun 2025

Misi	Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran Kinerja	Target Kinerja Tahap III (2015-2020)	Target Kinerja Tahap IV (2020-2025)	Capaian Kinerja Tahap III (2015-2020)	Capaian Kinerja Tahap IV (2020-2025)
	bersih layak minum					
	Sasaran 2.6: Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan listrik	Meningkatnya persentase rumah tangga dalam memperoleh listrik	70% kebutuhan listrik bagi rumah tangga telah terpenuhi	90% kebutuhan listrik bagi rumah tangga telah terpenuhi	50% kebutuhan listrik bagi rumah tangga telah terpenuhi	75% kebutuhan listrik bagi rumah tangga telah terpenuhi
Misi 3: Meningkatkan Kualitas SDM	Sasaran 3.1: Meningkatnya akses seluruh masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan	Meningkatnya angka partisipasi sekolah	Menuntaskan program wajib belajar 12 tahun hingga 70%	Menuntaskan program wajib belajar 12 tahun hingga 90%	Menuntaskan program wajib belajar 12 tahun hingga 70%	Menuntaskan program wajib belajar 12 tahun hingga 85%
		Meningkatnya pelayanan kesehatan melalui fasilitas kesehatan pemerintah	Menyediakan fasilitas kesehatan sesuai standar nasional serta pembangunan Rumah Sakit Kabupaten	Mengembangkan layanan kesehatan mobile berbasis IT	Menyediakan fasilitas kesehatan sesuai standar nasional serta pembangunan	Mengembangkan layanan kesehatan mobile berbasis IT

Visi RPJPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2005-2025

Mewujudkan Kabupaten Muna Barat yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan Tahun 2025

Misi	Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran Kinerja	Target Kinerja Tahap III (2015-2020)	Target Kinerja Tahap IV (2020-2025)	Capaian Kinerja Tahap III (2015-2020)	Capaian Kinerja Tahap IV (2020-2025)
					Rumah Sakit Kabupaten	
		Pendidikan dan kesehatan dapat di akses dengan mudah dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	Mengembangkan sistem jaminan sosial semesta khususnya di bidang sosial dan kesehatan	Mengembangkan inovasi sistem jaminan sosial semesta dan mengembangkan akses pendidikan dan kesehatan berbasis IT	Mengembangkan sistem jaminan sosial semesta khususnya di bidang sosial dan kesehatan	Merencanakan inovasi sistem jaminan sosial semesta dan mengembangkan akses pendidikan dan kesehatan berbasis IT
	Sasaran 3.2: Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan	Terpenuhinya jumlah sekolah dan guru	Memenuhi kebutuhan sekolah guru, dan tenaga pendidikan pada setiap jenjang di seluruh wilayah	Memenuhi kebutuhan struktural sekolah sesuai standar nasional	Berusaha memenuhi kebutuhan sekolah guru, guru, dan tenaga pendidikan pada	Memenuhi kebutuhan struktural sekolah sesuai standar nasional

Visi RPJPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2005-2025

Mewujudkan Kabupaten Muna Barat yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan Tahun 2025

Misi	Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran Kinerja	Target Kinerja Tahap III (2015-2020)	Target Kinerja Tahap IV (2020-2025)	Capaian Kinerja Tahap III (2015-2020)	Capaian Kinerja Tahap IV (2020-2025)
					setiap jenjang di seluruh wilayah	
		Terpenuhinya jumlah puskesmas, dokter, dan tenaga medis	Terpenuhinya kebutuhan Puskesmas, dokter, dan tenaga medis di seluruh wilayah	Terpenuhinya kebutuhan dokter spesialis di RSUD	Berupaya memenuhi kebutuhan Puskesmas, dokter, dan tenaga medis di seluruh wilayah	Berupaya memenuhi kebutuhan dokter spesialis di RSUD
		Meningkatnya kualitas dan kompetensi guru dan tenaga kesehatan	Meningkatkan keahlian soft skill guru dan tenaga kesehatan	Memenuhi 100% kebutuhan guru dan tenaga kesehatan yang sesuai standar dan sudah tersertifikasi Nasional	Meningkatkan keahlian soft skill guru dan tenaga kesehatan	Berusaha memenuhi 100% kebutuhan guru dan tenaga kesehatan yang sesuai standar dan sudah

Visi RPJPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2005-2025

Mewujudkan Kabupaten Muna Barat yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan Tahun 2025

Misi	Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran Kinerja	Target Kinerja Tahap III (2015-2020)	Target Kinerja Tahap IV (2020-2025)	Capaian Kinerja Tahap III (2015-2020)	Capaian Kinerja Tahap IV (2020-2025)
						tersertifikasi nasional
	Sasaran 3.3: Meningkatnya kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas dan kemandirian masyarakat	Terselenggaranya pendidikan berbasis kearifan sosial, budaya dan lingkungan	Mengembangkan modul pembelajaran berbasis kearifan lokal	Inovasi kurikulum bermuatan lokal di semua jenjang pendidikan	Mengembangkan modul pembelajaran berbasis kearifan lokal	Mengusulkan kurikulum bermuatan lokal di semua jenjang pendidikan
		Meningkatnya mutu dan daya saing masyarakat pada sektor basis	Tersedianya sekolah tani, sekolah dagang, dan sekolah industri kecil serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di tingkat daerah.	Penyediaan dan kemudahan akses dalam menjangkau sekolah tani, sekolah dagang, dan sekolah industri kecil dan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) di Tingkat Daerah).	Merencanakan konsep sekolah tani, sekolah dagang, dan sekolah industri kecil serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di tingkat daerah.	Merencanakan pembangunan sekolah tani, sekolah dagang, dan sekolah industri kecil dan pusat kegiatan belajar masyarakat

Visi RPJPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2005-2025

Mewujudkan Kabupaten Muna Barat yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan Tahun 2025

Misi	Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran Kinerja	Target Kinerja Tahap III (2015-2020)	Target Kinerja Tahap IV (2020-2025)	Capaian Kinerja Tahap III (2015-2020)	Capaian Kinerja Tahap IV (2020-2025)
						(PKBM di Tingkat Daerah).
	Sasaran 3.4: Tersedianya tenaga produksi dan wirausaha masyarakat	Tidak ada lagi sumber daya alam yang tidak diolah karena kekurangan tenaga produksi dan wirausahawan	Mengembangkan ajang pameran dan promosi produk olahan lokal di tingkat daerah	Mengembangkan <i>creativepreneur</i> yang menguasai kreatif marketing di tingkat daerah dan kecamatan	Mengembangkan ajang pameran dan promosi produk olahan lokal di tingkat daerah	Mengembangkan <i>creativepreneur</i> yang menguasai kreatif marketing di tingkat daerah dan kecamatan
		Jumlah pengangguran dan tenaga tidak terampil berkurang drastis	Mengembangkan <i>Job Centre</i> untuk menempatkan tenaga produktif sesuai bidang keahliannya	Mengembangkan <i>Man Power Planning</i> sebagai tidak lanjut penyediaan sarana dan sumberdaya manusia terampil	Merencanakan konsep <i>Job Centre</i> untuk menempatkan tenaga produktif sesuai bidang keahliannya	Menyiapkan sarana dan sumberdaya manusia terampil

Visi RPJPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2005-2025

Mewujudkan Kabupaten Muna Barat yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan Tahun 2025

Misi	Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran Kinerja	Target Kinerja Tahap III (2015-2020)	Target Kinerja Tahap IV (2020-2025)	Capaian Kinerja Tahap III (2015-2020)	Capaian Kinerja Tahap IV (2020-2025)
	Sasaran 3.5: Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat	Meningkatnya pola hidup sehat dan kualitas kesehatan lingkungan	Masyarakat secara mandiri mampu menjaga pola hidup sehat dan menjaga kualitas lingkungan sekitarnya	Masyarakat mampu memberi contoh dalam menjaga pola hidup sehat dan menjaga kualitas lingkungan sekitarnya	Sosialisasi kepada masyarakat agar mampu menjaga pola hidup sehat dan menjaga kualitas lingkungan sekitarnya	Masyarakat dapat memberi contoh dalam menjaga pola hidup sehat dan menjaga kualitas lingkungan sekitarnya
		Tersedianya daya dukung sarana dan prasarana kesehatan	Mengembangkan kapasitas tenaga medis dalam penanganan penyakit	Mudahnya mendapat layanan dan fasilitas kesehatan yang memadai dan berbasis IT	Mengembangkan kapasitas tenaga medis dalam penanganan penyakit	Adanya layanan dan fasilitas kesehatan yang memadai dan berbasis IT

Visi RPJPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2005-2025

Mewujudkan Kabupaten Muna Barat yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan Tahun 2025

Misi	Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran Kinerja	Target Kinerja Tahap III (2015-2020)	Target Kinerja Tahap IV (2020-2025)	Capaian Kinerja Tahap III (2015-2020)	Capaian Kinerja Tahap IV (2020-2025)
Misi 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sasaran 4.1: Tersedianya sarana dan prasarana sebagai penunjang pemerintahan.	Terpenuhinya fasilitas pemerintahan dan tenaga kerja di pemerintahan.	Terpenuhinya fasilitas perkantoran dan aparatur pemerintah daerah yang sesuai standar pelayanan pemerintahan	Mengembangkan fasilitas penunjang kegiatan pemerintahan berbasis IT	Terpenuhinya fasilitas perkantoran dan aparatur pemerintah daerah yang sesuai standar pelayanan pemerintahan	Mengembangkan fasilitas penunjang kegiatan pemerintahan berbasis IT
	Sasaran 4.2: Meningkatnya kualitas aparatur pemerintahan yang profesional	Penyelenggaraan evaluasi dan monitoring kinerja pemerintah daerah telah diikuti oleh seluruh SKPD	Seluruh aparatur pemerintah mengikuti diklat pelatihan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip good governance dan seluruh aparatur daerah mengikuti	Mengembangkan inovasi dalam evaluasi dan monitoring kinerja pemerintah daerah	Sebagian aparatur pemerintah mengikuti diklat pelatihan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip good governance	Mengembangkan inovasi dalam evaluasi dan monitoring kinerja pemerintah daerah

Visi RPJPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2005-2025

Mewujudkan Kabupaten Muna Barat yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan Tahun 2025

Misi	Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran Kinerja	Target Kinerja Tahap III (2015-2020)	Target Kinerja Tahap IV (2020-2025)	Capaian Kinerja Tahap III (2015-2020)	Capaian Kinerja Tahap IV (2020-2025)
			penyelenggaraan evaluasi dan monitoring kinerja pemerintah daerah setiap tahunnya		dan seluruh aparatur daerah mengikuti penyelenggaraan evaluasi dan monitoring kinerja pemerintah daerah setiap tahunnya	
	Sasaran 4.3: Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Terinformasikannya laporan hasil kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat	Penyampaian informasi umum terkait kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat dalam forum	Laporan hasil kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahunnya dapat di akses setiap tahunnya oleh masyarakat	Penyampaian informasi umum terkait kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat dalam forum	Laporan hasil kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahunnya dapat di akses setiap

Visi RPJPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2005-2025

Mewujudkan Kabupaten Muna Barat yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan Tahun 2025

Misi	Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran Kinerja	Target Kinerja Tahap III (2015-2020)	Target Kinerja Tahap IV (2020-2025)	Capaian Kinerja Tahap III (2015-2020)	Capaian Kinerja Tahap IV (2020-2025)
						tahunnya oleh masyarakat
	Sasaran 4.4: Terciptanya pemerintahan yang berlandaskan hukum dan adil	Tegaknya peraturan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku secara adil	Peningkatan kapasitas dan kualitas aparat penegak hukum dan aparatur penyelenggara ketertiban masyarakat yang memadai	Tersedianya aparat penegak hukum dan aparatur penyelenggara ketertiban masyarakat yang sesuai dengan standar pelayanan	Peningkatan kapasitas dan kualitas aparat penegak hukum dan aparatur penyelenggara ketertiban masyarakat yang memadai	Tersedianya aparat penegak hukum dan aparatur penyelenggara ketertiban masyarakat yang sesuai dengan standar pelayanan
		Terwujudnya pemerintahan yang bersih dari KKN	Penyampaian informasi pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat dalam forum	Informasi pengelolaan keuangan daerah dapat di akses secara online oleh masyarakat	Penyampaian informasi pengelolaan keuangan daerah kepada	Merencanakan konsep pengelolaan sistem informasi

Visi RPJPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2005-2025

Mewujudkan Kabupaten Muna Barat yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan Tahun 2025

Misi	Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran Kinerja	Target Kinerja Tahap III (2015-2020)	Target Kinerja Tahap IV (2020-2025)	Capaian Kinerja Tahap III (2015-2020)	Capaian Kinerja Tahap IV (2020-2025)
					masyarakat dalam forum	keuangan secara online

Evaluasi konsistensi pelaksanaan sasaran pokok dan indikator kinerja dapat dilihat pada uraian capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Sasaran pokok dalam RPJPD berjumlah sebanyak 23 poin yang dijabarkan dari 4 Misi RPJPD Kabupaten Muna Barat
- b. Indikator dari prioritas pembangunan jangka panjang terdiri dari 36 indikator yang dijabarkan berdasarkan sasaran pokok dari arah kebijakan pembangunan RPJPD Kabupaten Muna Barat.
- c. Pada periode III (2015-2020) RPJPD diperoleh capaian indikator kinerja yang terlaksana 32 indikator (88,88%), tidak terlaksana 4 indikator (11,11%), tercapai 27 indikator (75%), dan tidak tercapai sebanyak 9 indikator (25%).
- d. Pada periode IV (2020-2025) RPJPD diperoleh capaian indikator kinerja yang terlaksana 29 indikator (80,55%), tidak terlaksana 7 indikator (19,44%), tercapai 19 indikator (52,77%), dan tidak tercapai sebanyak 17 indikator (47,22%).

Hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Muna Barat pada periode III (2015-2020) memperoleh realisasi kinerja sebesar 88% yang berarti berdasarkan skala nilai peringkat kinerja, Kabupaten Muna Barat berhasil merealisasikan indikator kinerja dengan mendapat predikat tinggi yaitu pada rentang 76%-90%. Perolehan nilai ini dipengaruhi oleh adanya *Covid-19* yang mempengaruhi banyak sektor, sehingga capaian realisasi belum bisa mencapai diatas 90%. Kemudian, hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Muna Barat untuk periode IV (2020-2025) memperoleh realisasi kinerja sebesar 80,55% yang berarti berdasarkan skala nilai peringkat kinerja maka Muna Barat berhasil merealisasikan indikator kinerja dengan mendapat predikat tinggi yaitu pada rentang 76%-90%. Perolehan nilai ini belum mencapai 100% indikator kinerja dilaksanakan karena saat evaluasi dilakukan, baru memasuki tiga tahun dari periode IV. Sehingga, diharapkan saat masa RPJPD berakhir capaiannya telah meningkat lebih dari 90%.

Indikator Kinerja Makro pada Kabupaten Muna Barat di akhir 2022 menunjukkan bahwa Angka Pengangguran mengalami kenaikan yang sangat tinggi hingga mencapai 504%. Hal ini dipengaruhi karena data awal periode perencanaan masih terpengaruh oleh data Kabupaten Muna sebelum Kabupaten Muna Barat terbentuk, sehingga mempengaruhi capaian tahun berjalan saat ini. Selain itu, indikator Pertumbuhan Ekonomi juga mengalami penurunan dari data awal periode perencanaan tahun 2017 sehingga pertumbuhannya 77% dipengaruhi oleh *Covid-19* yang membuat perekonomian turun drastis serta isu inflasi yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Selain indikator yang telah disebutkan diatas, terdapat dua indikator makro

yang cenderung menurun dan lima indikator makro lainnya mengalami peningkatan, bahkan ada beberapa indikator yang lebih dari 100%.

Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2005-2025 maka dihasilkan rekomendasi dan saran untuk penyusunan rancangan awal RPJPD tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. Target pada RPJPD diubah menjadi kuantitatif agar kedepannya dalam bentuk angka atau persentase, sehingga saat mengevaluasi RPJPD tiap periodenya dapat diketahui tolak ukur untuk menentukan pertumbuhan atau penurunan dari tiap indikator kinerja maupun sasaran pokok, sehingga pengukuran dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif dibandingkan secara kualitatif.
2. Indikator makro pembangunan di dalam dokumen RPJPD harus ditampilkan sebagai data dasar dalam perencanaan untuk tiap tahapan, sehingga evaluasi akan terstruktur, konsisten dan terpadu dalam perencanaan pembangunan daerah kedepannya.

Berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi diatas, maka dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2025-2045 hendaknya mempertimbangkan capaian kinerja pembangunan yang sudah tercapai dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pada periode RPJPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2005-2025.

2.5.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II

Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai dengan triwulan II bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara sasaran pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Analisa kinerja pencapaian program tersebut diukur dengan menghitung nilai rata-rata indikator program. Rata-rata indikator capaian dihitung dengan membandingkan realisasi capaian pada triwulan kedua program kegiatan tahun 2023 pada tiap OPD dengan target yang harus dicapai pada tahun 2023. Perjalanan pemerintahan di Kabupaten Muna Barat sejak dua tahun terakhir ini berlangsung dalam kondisi yang kondusif. Walaupun demikian, disadari bahwa dengan segala keterbatasan yang ada khususnya keterbatasan kemampuan keuangan daerah menyebabkan kebutuhan prioritas pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasayarakatan belum dapat terakomodir sepenuhnya.

Penilaian evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai dengan triwulan II digunakan untuk mengetahui hal-hal berikut.

- a. Realisasi antara rencana kegiatan dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD; dan

- b. Realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD.

Penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja masing Perangkat Daerah menggunakan kriteria penilaian kinerja dalam Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017 dengan skala penilaian kinerja mengikuti interval nilai 91-100 sangat tinggi, 76-90 tinggi, 66-75 sedang, 51-65 rendah, dan dibawah 50 sangat rendah.

2.6. TREND DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

2.6.1 Demografi

Proyeksi penduduk dapat menggambarkan jumlah penduduk dengan menggunakan perhitungan khusus yang didasarkan pada asumsi-asumsi tentang faktor-faktor seperti kelahiran, kematian, dan migrasi. Proyeksi ini memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan masa depan, terutama dalam kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) di Indonesia. SPPN adalah sebuah kerangka perencanaan pembangunan yang menciptakan rencana jangka panjang, menengah, dan tahunan yang diimplementasikan oleh pemerintah dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004. Secara sederhana, proyeksi penduduk berfungsi sebagai data dasar dan target untuk merumuskan kebijakan pembangunan di berbagai sektor.

Seperti yang sudah diketahui bahwa hampir semua perencanaan pembangunan memerlukan data tentang jumlah penduduk, distribusinya, dan strukturnya berdasarkan usia yang relevan dengan rencana tersebut. Untuk mendukung perencanaan pembangunan jangka panjang, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, penting untuk memiliki pemahaman tentang populasi saat ini dan proyeksi populasi 20 tahun mendatang. Data kependudukan tidak hanya mencakup situasi saat rencana dibuat, tetapi juga informasi tentang masa lalu, dan yang tak kalah pentingnya adalah estimasi untuk masa depan. Data mengenai jumlah penduduk di masa lalu dan saat ini dapat diperoleh melalui survei dan sensus, sementara untuk memenuhi kebutuhan data penduduk di masa depan, perlu dilakukan proyeksi penduduk, yaitu perkiraan jumlah penduduk dan komposisinya di masa mendatang. Oleh karena itu, dilakukan proyeksi penduduk Kabupaten Muna Barat hingga tahun 2045 dengan tahun dasar 2020. Proyeksi ini dilakukan dengan menggunakan data BPS dan untuk keperluan proyeksi, dilakukan pergeseran penduduk dasar dari hasil SP2020 ke pertengahan tahun 2020.

Tabel 2. 79 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Muna Barat

Penduduk Tahun 2023 (Ribu Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Ribu Jiwa)				
	2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
89,29	92,63	100,89	108,94	116,59	123,66

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 (diolah)

Jumlah penduduk Kabupaten Muna Barat pada tahun 2023 adalah sebesar 89,29 ribu jiwa. Jumlah penduduk tersebut diperkirakan terus bertambah sebanyak 34,37 ribu jiwa, sehingga menjadi sebanyak 123,66 ribu jiwa pada tahun 2045. Meskipun jumlah penduduk Kabupaten Muna Barat terus bertambah, tetapi laju pertumbuhan penduduknya terus melemah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,55% per periodenya. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Muna Barat dan terbatasnya luas wilayah, kepadatan penduduk di wilayah tersebut juga terus meningkat. Pada tahun 2045, diproyeksikan kepadatan penduduk Kabupaten Muna Barat adalah sebesar 136,45 jiwa per km².

Peningkatan kepadatan penduduk di Kabupaten Muna Barat perlu diantisipasi dengan baik karena akan mempengaruhi kualitas hidup penduduknya. Seiring dengan semakin tingginya kepadatan penduduk, dapat memunculkan berbagai permasalahan sosial ekonomi, kesejahteraan, keamanan, ketersediaan lahan, air bersih dan kebutuhan pangan yang terus meningkat. Jika tidak diatasi dengan bijak, maka kepadatan penduduk yang terus meningkat dapat berimbas pada kerusakan lingkungan.

Pada tahun 2045, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Muna Barat sebesar 101,22. Artinya, terdapat sekitar 101 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Jika dilihat dari besaran nilainya, rasio jenis kelamin memiliki trend peningkatan pada periode 2025-2045 yang menunjukkan bahwa pertambahan jumlah penduduk laki-laki diprediksi akan melebihi pertambahan jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Muna Barat dalam kurun 20 tahun kedepan. Meskipun demikian, proporsi di antara keduanya masih cukup seimbang. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan perbandingan antara keduanya secara lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 80 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Muna Barat

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (Ribuan Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Ribuan Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-laki	44,29	46,03	50,33	54,51	58,52	62,18
Perempuan	45,00	46,61	50,56	54,43	58,08	61,44
Rasio	98,42	98,76	99,54	100,14	100,76	101,22

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 (diolah)

Proporsi penduduk usia 0-14 tahun di Kabupaten Muna Barat diproyeksikan menurun dari 28,60% pada tahun 2023, menjadi 24,78% pada tahun 2045. Di sisi lain, terdapat trend peningkatan pada proporsi penduduk usia produktif atau umur 15-64 tahun dari 65,31% menjadi 66,36% pada periode waktu yang sama. Selain itu, proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas, yang sebelumnya hanya sebesar 6,09% juga turut meningkat menjadi 8,86% pada tahun 2045.

Perubahan komposisi umur penduduk Kabupaten Muna Barat dipengaruhi oleh semakin menurunnya nilai *Total Fertility Rate* (TFR) yang menyebabkan semakin sedikitnya proporsi penduduk usia 0-4 tahun. Sebaliknya, penurunan nilai TFR ini juga dibarengi dengan menurunnya nilai *Infant Mortality Rate* (IMR) yang menyebabkan semakin banyaknya proporsi penduduk usia lanjut atau 65 tahun ke atas. Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Muna Barat secara lebih rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 81 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Muna Barat

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (Ribuan Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Ribuan Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0-14 Tahun	25,55	26,14	27,48	28,82	29,80	30,64
15-64 Tahun	58,35	60,67	66,42	71,78	77,11	82,06
65+ Tahun	5,44	5,82	7,00	8,37	9,67	10,96
Angka Ketergantungan	53,11	52,70	51,91	51,81	51,19	50,69

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 (diolah)

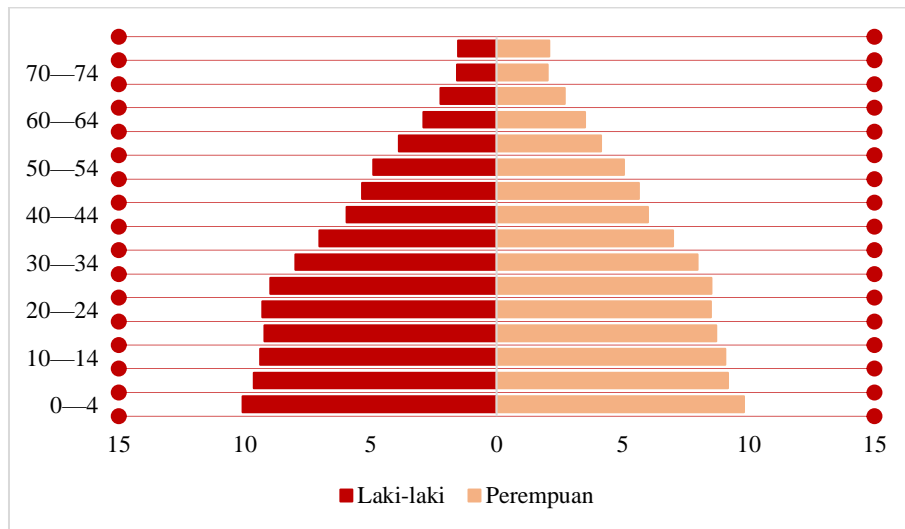
Pada tahun 2045, rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Muna Barat diproyeksikan menurun menjadi 50,69% dari sebesar 53,11% pada tahun 2023. Artinya, dapat diprediksi pada tahun 2045, dari setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan menanggung sekitar 51 penduduk usia non-produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Dalam hal ini, semakin tinggi persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non-produktif. Sebaliknya,

semakin rendah persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin ringan beban penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non-produktif.

Berdasarkan besaran angka ketergantungannya, diketahui bahwa dalam kurun waktu 20 tahun kedepan, Kabupaten Muna Barat belum akan menikmati bonus demografi yang ditunjukkan dari besaran proporsi penduduk usia produktif adalah dua kali lipat penduduk usia non-produktif atau nilai rasio ketergantungannya kurang dari 50%. Namun, tidak menutup kemungkinan juga bila bonus demografi ini akan datang lebih cepat di akhir periode RPJPD karena trend angka ketergantungan yang terus menurun mendekati angka 50%. Oleh karena itu, dalam rangka menyongsong bonus demografi yang akan datang diperlukan berbagai intervensi untuk mempersiapkan agar bonus demografi nantinya dapat memberikan dampak yang positif bagi pembangunan Kabupaten Muna Barat di masa mendatang.

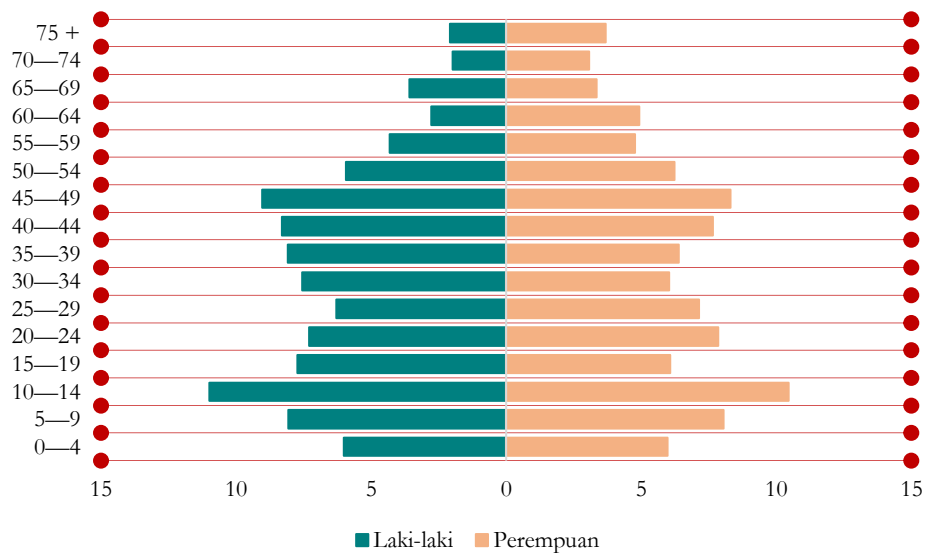
Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin Kabupaten Muna Barat, disajikan secara visual pada grafik piramida penduduk. Jika dilihat dari strukturnya, pada tahun 2020, piramida penduduk Kabupaten Muna Barat dapat dikategorikan ke dalam bentuk piramida stationer. Piramida ini mencerminkan fase transisi menuju populasi dewasa dengan angka kelahiran dan kematian yang mulai menurun. Selain itu, piramida ini juga menunjukkan perbandingan yang relatif seimbang antara persentase populasi muda dan dewasa. Bentuk piramida *stationer* mengindikasikan adanya penurunan tingkat kelahiran, walaupun angkanya masih cukup tinggi.

Pada tahun 2045, bentuk piramida penduduk Kabupaten Muna Barat diprediksi mulai bergeser ke arah konstruktif, walaupun belum sempurna. Piramida bentuk ini menunjukkan jumlah penduduk usia kerja yang relatif lebih besar dibandingkan jumlah anak-anak dan orang tua. Kondisi ini dapat terjadi akibat menurunnya tingkat kelahiran dan kematian serta perlambatan pertumbuhan penduduk. Selain itu, piramida bentuk ini juga mengindikasikan semakin rendahnya angka ketergantungan di Kabupaten Muna Barat.



Gambar 2. 11 Piramida Penduduk Kabupaten Muna Barat Tahun 2020

Sumber: BPS, 2023



Gambar 2. 12 Proyeksi Piramida Penduduk Kabupaten Muna Barat Tahun 2045

Sumber: BPS, 2023 (diolah)

2.6.2 Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Akses terhadap sarana dan prasarana memberikan landasan penting bagi upaya mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan di Kabupaten Muna Barat. Dengan menginvestasikan sumber daya dan sumber daya pada fasilitas tersebut, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang sehat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Apalagi pengkajian dan perencanaan terkait sumber daya dan fasilitas tersebut tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Muna Barat saja,

namun juga bertujuan untuk menjadikannya lebih baik dan lebih baik lagi. Hal ini mencakup upaya peningkatan aksesibilitas, dukungan dan ketersediaan berbagai fasilitas seperti air bersih, listrik, transportasi, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Rencana pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di Kabupaten Muna Barat didasarkan pada penilaian jumlah penduduk dan kriteria cakupan pelayanan menurut standar Indonesia 03-1733-2004. Dengan demikian, setiap penduduk Kabupaten Muna Barat diharapkan mempunyai kesempatan yang sama dan berkelanjutan dalam mengakses layanan yang diperlukan untuk meningkatkan taraf hidupnya dan pada akhirnya mencapai masyarakat sejahtera dan berkeadilan.

Kebutuhan infrastruktur dasar di Kabupaten Muna Barat saat ini nampaknya telah tercukupi dengan baik. Ini disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar fasilitas yang saat ini ada di daerah tersebut sudah melampaui jumlah minimum yang seharusnya ada. Pada tahun 2045, permintaan akan rumah di daerah ini diperkirakan akan meningkat secara signifikan.

Tabel 2. 82 Proyeksi Kebutuhan Rumah Kabupaten Muna Barat

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (jiwa)	87.590	92.630	100.890	108.940	116.590	123.660
Proyeksi Kebutuhan Rumah	22.998	22.998	22.998	22.998	22.998	29.411

Mengenai kebutuhan air minum, proyeksi kebutuhan air minum di Kabupaten Muna Barat diproyeksikan naik setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan jumlah penduduk di Kabupaten Muna Barat yang terus meningkat.

Tabel 2. 83 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Muna Barat

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Air Minum (debit/hari)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (jiwa)	87.590	92.630	100.890	108.940	116.590	123.660
Proyeksi Kebutuhan Air Minum	n/a	6.484,10	7.062,30	7.625,80	8.161,30	8.656,20

Selain itu, terkait dengan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), jumlah TPS yang sudah ada di Kabupaten Muna Barat tampaknya sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bahkan hingga tahun 2045.

Tabel 2. 84 Proyeksi Kebutuhan TPS Kabupaten Muna Barat

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Tempat Pembuangan Sementara (unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (jiwa)	87.590	92.630	100.890	108.940	116.590	123.660
Proyeksi Kebutuhan Tempat Pembuangan Sementara	n/a	13	13	13	13	13

Fasilitas pelayanan kesehatan di daerah ini juga sudah tersedia dalam jumlah yang memadai. Jumlah tersebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Muna Barat hingga tahun 2045.

Tabel 2. 85 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Muna Barat

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Fasilitas Kesehatan (unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (jiwa)	87.590	92.630	100.890	108.940	116.590	123.660
Proyeksi Kebutuhan Rumah Sakit	1	1	1	1	1	1
Proyeksi Kebutuhan Posyandu	n/a	74	81	87	93	99
Proyeksi Kebutuhan Klinik Bersalin	0	3	3	4	4	4
Proyeksi Kebutuhan Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	22	22	22	22	22	22
Proyeksi Kebutuhan Puskesmas dan Balai Pengobatan	43	43	43	43	43	43
Proyeksi Kebutuhan Apotek/ Rumah Obat	11	11	11	11	11	11

Kebutuhan akan fasilitas pendidikan di Kabupaten Muna Barat jumlahnya sudah memadai dan mencukupi hingga tahun 2045. Hal tersebut dikarenakan jumlah eksisting sudah mampu melayani minimum penduduk sesuai SNI. Walaupun jumlahnya sudah memenuhi, untuk agenda setiap tahun, tetap diperlukan perawatan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan agar tetap terjaga dan terawat.

Tabel 2. 86 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Muna Barat

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Fasilitas Pendidikan (unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (jiwa)	87.590	92.630	100.890	108.940	116.590	123.660
Proyeksi Kebutuhan TK	98	98	98	98	98	99
Proyeksi Kebutuhan SD/MI	100	100	100	100	100	100
Proyeksi Kebutuhan SM/MTs	48	48	48	48	48	48
Proyeksi Kebutuhan SMA/MA	25	25	25	25	25	26

Mengenai kebutuhan BTS Telekomunikasi, terdapat 35 BTS yang harus disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muna Barat hingga tahun 2045. Kemudian, hal penting yang berkenaan dengan telekomunikasi di Kabupaten Muna Barat yaitu terkait dengan peningkatan kualitas jaringan di setiap cakupan wilayah. Kebutuhan akan jaringan telekomunikasi yang stabil merupakan hal yang krusial dikarenakan kegiatan masyarakat saat ini sudah banyak memanfaatkan jaringan telekomunikasi yang stabil. Selain itu, jaringan telekomunikasi yang stabil juga mampu meningkatkan efektivitas kegiatan masyarakat, terutama dalam pelayanan publik dan pemerintahan.

Tabel 2. 87 Proyeksi Kebutuhan BTS Telekomunikasi Kabupaten Muna Barat

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan BTS Telekomunikasi (unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (jiwa)	87.590	92.630	100.890	108.940	116.590	123.660
Proyeksi Kebutuhan BTS Telekomunikasi	n/a	35	35	35	35	35

Di sektor pasar dan niaga, jumlah fasilitasnya juga sudah memadai. Dalam hal tempat ibadah, khususnya musholah, jumlahnya diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2045

Tabel 2. 88 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Perdagangan dan Niaga Kabupaten Muna Barat

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Fasilitas Perdagangan dan Niaga (unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (jiwa)	87.590	92.630	100.890	108.940	116.590	123.660

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Fasilitas Perdagangan dan Niaga (unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Proyeksi Kebutuhan Pertokoan	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317
Proyeksi Kebutuhan Pasar	29	29	29	29	29	29

Kebutuhan akan sarana peribadatan di Kabupaten Muna Barat sudah mencukupi. Untuk jumlah mushola, diproyeksikan jumlahnya meningkat tiap tahunnya.

Tabel 2. 89 Proyeksi Kebutuhan Sarana Peribadatan Kabupaten Muna Barat

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Sarana Peribadatan (unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (jiwa)	87.590	92.630	100.890	108.940	116.590	123.660
Proyeksi Kebutuhan Masjid	123	123	123	123	123	123
Proyeksi Kebutuhan Mushola	50	371	404	436	466	495
Proyeksi Kebutuhan Gereja Protestan	1	1	1	1	1	1
Proyeksi Kebutuhan Gereja Katolik	4	4	4	4	4	4
Proyeksi Kebutuhan Vihara	3	3	3	3	3	3
Proyeksi Kebutuhan Pura	9	9	9	9	9	9

Demikian pula, untuk balai pertemuan warga, Kabupaten Muna Barat di masa depan mampu menyediakan balai pertemuan dalam jumlah yang terus bertambah hingga tahun 2045.

Tabel 2. 90 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kebudayaan dan Rekreasi Kabupaten Muna Barat

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Fasilitas Kebudayaan dan Rekreasi (unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (jiwa)	87.590	92.630	100.890	108.940	116.590	123.660
Proyeksi Kebutuhan Balai Warga/Balai Pertemuan	0	37	40	44	47	49
Proyeksi Kebutuhan Gedung Serbaguna	4	4	4	4	4	4

Hal yang sama juga berlaku untuk taman dan tempat bermain yang diharapkan akan terus berkembang hingga tahun 2045.

Tabel 2. 91 Proyeksi Kebutuhan Ruang Publik Kabupaten Muna Barat

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Ruang Publik (unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (jiwa)	87.590	92.630	100.890	108.940	116.590	123.660
Proyeksi Kebutuhan Taman/Tempat Main	14	37	40	44	47	49
Proyeksi Kebutuhan Taman/Lapangan Olahraga	236	236	236	236	236	236
Proyeksi Kebutuhan Tempat Pemakaman Umum	86	86	86	86	86	86

2.7. PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

2.7.1 Identifikasi dan Analisis Pusat-pusat Pertumbuhan Wilayah

Salah satu misi RPJPN 2025-2045 adalah transformasi ekonomi yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Salah satu caranya adalah melalui pembentukan koridor ekonomi berdasarkan potensi masing-masing wilayah dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (*superhub* ekonomi nusantara). Pusat-pusat pertumbuhan wilayah dibangun dengan tujuan untuk mendukung perkembangan Indonesia sebagai negara Nusantara, dengan mempertimbangkan dinamika global, nasional, dan lokal. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan diharapkan dapat merangsang peningkatan investasi dan nilai tambah, serta memperluas kesempatan kerja melalui penerapan konsep ekonomi hijau dan biru. Fokus pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah terletak pada sentra dan kawasan berdasarkan potensi unggulan, yang didukung oleh kawasan perkotaan.

Kabupaten Muna Barat memiliki beberapa pusat pertumbuhan lokal dalam sistem perkotaan yang terdiri atas Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Di mana PKL yang ditetapkan di Kabupaten Muna Barat berada di kawasan perkotaan Laworo yang berfungsi melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Selanjutnya terdapat beberapa PPK sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa yang terdiri atas PPK Wapae di Kecamatan Tiworo Tengah, PPK Wamelai di Kecamatan Lawa, PPK Tondasi di Kecamatan Tiworo Utara, dan PPK Konawe di Kecamatan Kusambi. PPL sebagai pusat permukiman yang berfungsi melayani kegiatan skala antar desa di Kabupaten Muna Barat

terdiri atas PPL Kasimpa Jaya di Kecamatan Tiworo Selatan, PPL Pajala di Kecamatan Maginti, PPL Barangka di Kecamatan Barangka, PPL Lahaji di Kecamatan Napano Kusambi, PPL Tiworo di Kecamatan Tiworo Kepulauan, dan PPL Lailangga di Kecamatan Wadaga.

Pusat-pusat pertumbuhan memiliki peran yang penting dalam mendukung pengembangan potensi wilayah di Kabupaten Muna Barat. pengoptimalan pemanfaatan sumber daya yang ada dapat didukung dengan melakukan regionalisasi wilayah secara cermat berdasarkan potensi keunggulan yang terdapat di berbagai bagian wilayah tersebut. Dalam hal ini, Kabupaten Muna Barat diklasterkan ke dalam tiga tema utama yang mencakup sektor-sektor kunci, yaitu perikanan dan kelautan, pertanian dan perkebunan, serta perdagangan dan jasa. Secara lebih rinci, area di sepanjang pesisir dan kepulauan Muna Barat memiliki fokus utama untuk pengembangan potensi di sektor perikanan dan kelautan. Dengan mengidentifikasi dan memanfaatkan kekayaan sumber daya laut yang melimpah di wilayah ini, upaya pengembangan berkelanjutan dapat diarahkan untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi kelautan. Sementara itu, area daratan Muna Barat dirancang dengan dua fokus pengembangan utama. Pertama, sektor pertanian dan perkebunan menjadi target pengembangan strategis untuk memaksimalkan potensi sumber daya pertanian dan menghasilkan produk pertanian yang berkualitas tinggi. Kedua, daerah daratan yang letaknya strategis dan memiliki karakteristik perkotaan dikembangkan dengan fokus pada sektor perdagangan dan jasa. Melalui penekanan pada pengembangan sektor ini, diharapkan dapat tercipta pusat-pusat ekonomi yang dinamis dan berdaya saing serta mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Muna Barat. Zona pengembangan dan juga sistem perkotaan di Kabupaten Muna Barat dapat dilihat lebih jelas pada tabel berikut.

Tabel 2. 92 Zona Pengembangan dan Sistem Perkotaan Kabupaten Muna Barat




No	Kecamatan	Desa	Zona Pengembangan
1	Kec. Barangka	Desa Barangka	Zona Perdagangan
2	Kec. Sawerigadi	Desa Kampobalano	Zona Perdagangan
3	Kec. Sawerigadi	Desa Lakalamba	Zona Perdagangan
4	Kec. Lawa	Desa Latughu	Zona Perdagangan
5	Kec. Tiworo Kepulauan	Desa Laworo	Zona Perdagangan
6	Kec. Sawerigadi	Desa Lumbu Jaya	Zona Perdagangan
7	Kec. Sawerigadi	Desa Marobebe	Zona Perdagangan
8	Kec. Sawerigadi	Desa Ondoke	Zona Perdagangan
9	Kec. Kusambi	Desa Sidamangura	Zona Perdagangan
10	Kec. Tiworo Tengah	Desa Suka Damai	Zona Perdagangan
11	Kec. Tiworo Tengah	Desa Wapae	Zona Perdagangan

No	Kecamatan	Desa	Zona Pengembangan
12	Kec. Lawa	Desa Watumela	Zona Perdagangan
13	Kec. Barangka	Desa Wuna	Zona Perdagangan
14	Kec. Kusambi	Kelurahan Konawe	Zona Perdagangan
15	Kec. Lawa	Kelurahan Wamelai	Zona Perdagangan
16	Kec. Maginti	Desa Abadi Jaya	Zona Pertanian dan Perkebunan
17	Kec. Barangka	Desa Bungkolo	Zona Pertanian dan Perkebunan
18	Kec. Kusambi	Desa Guali	Zona Pertanian dan Perkebunan
19	Kec. Wadaga	Desa Kampani	Zona Pertanian dan Perkebunan
20	Kec. Tiworo Selatan	Desa Kasimpa Jaya	Zona Pertanian dan Perkebunan
21	Kec. Tiworo Selatan	Desa Katangana	Zona Pertanian dan Perkebunan
22	Kec. Wadaga	Desa Katobu	Zona Pertanian dan Perkebunan
23	Kec. Kusambi	Desa Kusambi	Zona Pertanian dan Perkebunan
24	Kec. Tiworo Tengah	Desa Labokolo	Zona Pertanian dan Perkebunan
25	Kec. Barangka	Desa Lafinde	Zona Pertanian dan Perkebunan
26	Kec. Lawa	Desa Lagadi	Zona Pertanian dan Perkebunan
27	Kec. Napano Kusambi	Desa Lahaji	Zona Pertanian dan Perkebunan
28	Kec. Wadaga	Desa Lailangga	Zona Pertanian dan Perkebunan
29	Kec. Wadaga	Desa Lakanaha	Zona Pertanian dan Perkebunan
30	Kec. Lawa	Desa Lalemba	Zona Pertanian dan Perkebunan
31	Kec. Tiworo Tengah	Desa Langku-Langku	Zona Pertanian dan Perkebunan
32	Kec. Kusambi	Desa Lapokainse	Zona Pertanian dan Perkebunan
33	Kec. Barangka	Desa Lapolea	Zona Pertanian dan Perkebunan
34	Kec. Wadaga	Desa Lasosodo	Zona Pertanian dan Perkebunan
35	Kec. Lawa	Desa Latombe	Zona Pertanian dan Perkebunan
36	Kec. Sawerigadi	Desa Lawada	Zona Pertanian dan Perkebunan
37	Kec. Wadaga	Desa Lindo	Zona Pertanian dan Perkebunan
38	Kec. Lawa	Desa Madampi	Zona Pertanian dan Perkebunan
39	Kec. Sawerigadi	Desa Maperaha	Zona Pertanian dan Perkebunan
40	Kec. Napano Kusambi	Desa Masara	Zona Pertanian dan Perkebunan
41	Kec. Tiworo Tengah	Desa Mekar Jaya	Zona Pertanian dan Perkebunan
42	Kec. Sawerigadi	Desa Nihl	Zona Pertanian dan Perkebunan
43	Kec. Tiworo Selatan	Desa Parura Jaya	Zona Pertanian dan Perkebunan
44	Kec. Tiworo Selatan	Desa Sangia Tiworo	Zona Pertanian dan Perkebunan
45	Kec. Barangka	Desa Sawerigadi	Zona Pertanian dan Perkebunan
46	Kec. Tiworo Kepulauan	Desa Sido Makmur	Zona Pertanian dan Perkebunan
47	Kec. Napano Kusambi	Desa Tangkumaho	Zona Pertanian dan Perkebunan
48	Kec. Napano Kusambi	Desa Umba	Zona Pertanian dan Perkebunan
49	Kec. Wadaga	Desa Wakontu	Zona Pertanian dan Perkebunan
50	Kec. Barangka	Desa Walelei	Zona Pertanian dan Perkebunan
51	Kec. Tiworo Kepulauan	Desa Wandoke	Zona Pertanian dan Perkebunan
52	Kec. Tiworo Kepulauan	Desa Watuempempe	Zona Pertanian dan Perkebunan
53	Kec. Barangka	Desa Waulai	Zona Pertanian dan Perkebunan
54	Kec. Tiworo Kepulauan	Desa Wulanga Jaya	Zona Pertanian dan Perkebunan
55	Kec. Lawa	Kelurahan Lapadaku	Zona Pertanian dan Perkebunan
56	Kec. Tiworo Kepulauan	Kelurahan Tiworo	Zona Pertanian dan Perkebunan
57	Kec. Tiworo Kepulauan	Kelurahan Waumere	Zona Pertanian dan Perkebunan
58	Kec. Kusambi	Desa Bakeramba	Zona Pesisir dan Kelautan

No	Kecamatan	Desa	Zona Pengembangan
59	Kec. Maginti	Desa Bangko	Zona Pesisir dan Kelautan
60	Kec. Tiworo Selatan	Desa Barakkah	Zona Pesisir dan Kelautan
61	Kec. Tiworo Utara	Desa Bero	Zona Pesisir dan Kelautan
62	Kec. Maginti	Desa Gala	Zona Pesisir dan Kelautan
63	Kec. Maginti	Desa Kangkunawe	Zona Pesisir dan Kelautan
64	Kec. Kusambi	Desa Kasakamu	Zona Pesisir dan Kelautan
65	Kec. Tiworo Kepulauan	Desa Katela	Zona Pesisir dan Kelautan
66	Kec. Maginti	Desa Kembar Maminasa	Zona Pesisir dan Kelautan
67	Kec. Napano Kusambi	Desa Kombikuno	Zona Pesisir dan Kelautan
68	Kec. Napano Kusambi	Desa Lahaji	Zona Pesisir dan Kelautan
69	Kec. Tiworo Tengah	Desa Lakabu	Zona Pesisir dan Kelautan
70	Kec. Kusambi	Desa Lakawoghe	Zona Pesisir dan Kelautan
71	Kec. Tiworo Kepulauan	Desa Lasama	Zona Pesisir dan Kelautan
72	Kec. Napano Kusambi	Desa Latawe	Zona Pesisir dan Kelautan
73	Kec. Kusambi	Desa Lemoambo	Zona Pesisir dan Kelautan
74	Kec. Maginti	Desa Maginti	Zona Pesisir dan Kelautan
75	Kec. Tiworo Utara	Desa Mandike	Zona Pesisir dan Kelautan
76	Kec. Napano Kusambi	Desa Masara	Zona Pesisir dan Kelautan
77	Kec. Tiworo Tengah	Desa Momuntu	Zona Pesisir dan Kelautan
78	Kec. Maginti	Desa Pajala	Zona Pesisir dan Kelautan
79	Kec. Maginti	Desa Passi Padangan	Zona Pesisir dan Kelautan
80	Kec. Tiworo Utara	Desa Santigi	Zona Pesisir dan Kelautan
81	Kec. Tiworo Utara	Desa Santiri	Zona Pesisir dan Kelautan
82	Kec. Kusambi	Desa Tanjung Pinang	Zona Pesisir dan Kelautan
83	Kec. Tiworo Utara	Desa Tasipi	Zona Pesisir dan Kelautan
84	Kec. Tiworo Utara	Desa Tiga	Zona Pesisir dan Kelautan
85	Kec. Tiworo Utara	Desa Tondasi	Zona Pesisir dan Kelautan
86	Kec. Napano Kusambi	Desa Umba	Zona Pesisir dan Kelautan
87	Kec. Sawerigadi	Desa Wakoila	Zona Pesisir dan Kelautan
88	Kec. Tiworo Tengah	Desa Wanseriwu	Zona Pesisir dan Kelautan
89	Kec. Sawerigadi	Desa Waukuni	Zona Pesisir dan Kelautan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Keterangan:

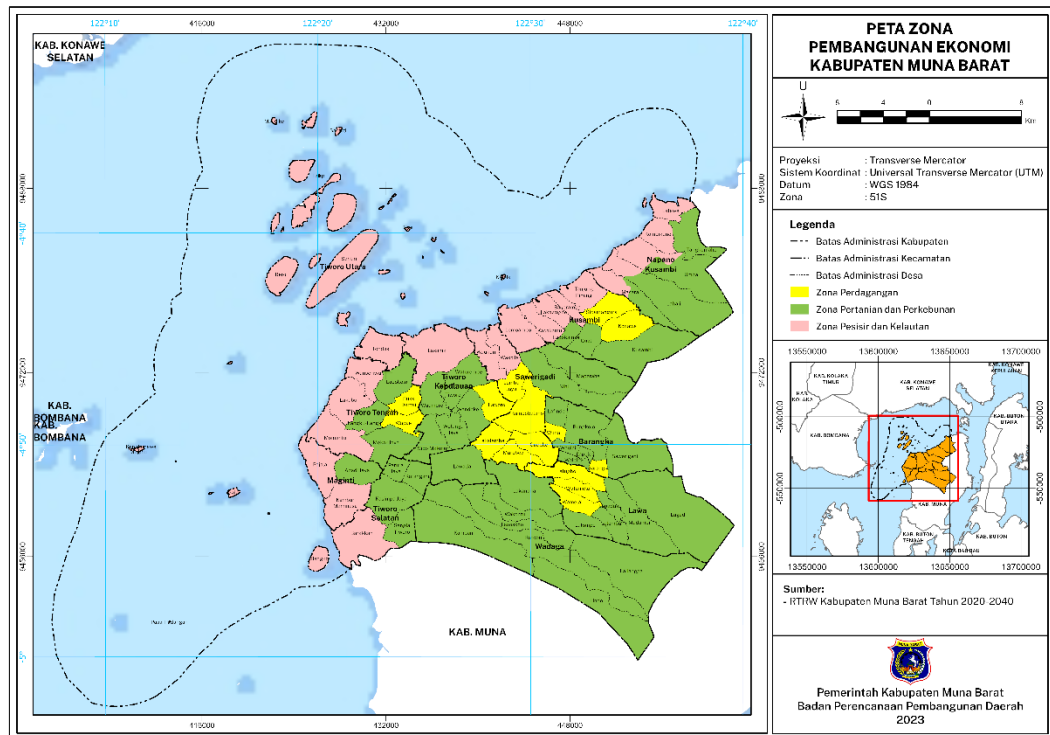
	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
	Pusat Pelayanan Lokal (PPL)

2.7.2 Identifikasi dan Analisis Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana

Berdasarkan pemetaan tematik transformasi ekonomi kewilayahan, koridor ekonomi Sulawesi diarahkan sebagai penunjang *superhub* ekonomi nusantara dan industri berbasis sumberdaya alam yang berperan sebagai wilayah penyangga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) beserta 6 klaster ekonomi sebagai *superhub* ekonomi Nusantara serta pintu gerbang internasional Kawasan Timur Indonesia (KTI) melalui pengembangan industri hilirisasi mineral dan lumbung pangan nasional. Berdasarkan arah pembangunan tersebut, pembangunan di wilayah Sulawesi mencakup 5 prioritas, yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia serta mendorong pembangunan ekosistem riset dan inovasi.
2. Pembangunan ekonomi yang diarahkan untuk penguatan rantai produksi dan rantai nilai, serta peningkatan produktivitas dan daya saing perekonomian wilayah yang berkelanjutan.
3. Pembangunan sarana dan prasarana konektivitas untuk mendukung fungsi penghubung dan pintu gerbang internasional KTI serta peningkatan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital.
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan serta penguatan stabilitas pertahanan dan keamanan.
5. Peningkatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, termasuk penguatan pengendalian rencana tata ruang wilayah yang mempertimbangkan resiko bencana.

Dalam rangka mewujudkan Sulawesi sebagai penunjang *superhub* ekonomi nusantara dan industri berbasis sumberdaya alam, wilayah Sulawesi dibagi ke dalam beberapa tema pembangunan dan arah kebijakan sesuai dengan potensi wilayahnya masing-masing. Cara yang sama juga dapat diadopsi di Kabupaten Muna Barat, di mana Kabupaten Muna Barat juga membagi wilayahnya ke dalam 3 zona pengembangan sesuai dengan potensi wilayahnya yang terdiri atas zona perikanan dan kelautan, zona pertanian dan perkebunan, serta zona perdagangan dan jasa.



Gambar 2. 13 Peta Zona Pembangunan Ekonomi Kabupaten Muna Barat

a. Zona Pesisir dan Kelautan

Kabupaten Muna Barat terdiri dari dua wilayah yaitu darat dan laut, dimana wilayah laut terdiri dari desa-desa pesisir dan pulau-pulau kecil. Selat Tiworo menjadi perairan utama yang menghubungkan wilayah satu dengan lainnya. Wilayah laut ini kemudian ditentukan menjadi zona pembangunan ekonomi yaitu zona pesisir dan kelautan. Zona ini mencakup 32 Desa di Kabupaten Muna Barat yang tersebar di Kecamatan Kusambi, Maginti, Napano Kusambi, Sawerigadi, Tiworo Kepulauan, Tiworo Selatan, Tiworo Tengah, dan Tiworo Utara. Pada zona ini, terdapat banyak kegiatan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang cukup beragam seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya, wisata alam bahari, transportasi, pemukiman penduduk, serta kegiatan konservasi laut. Zona pengembangan pesisir dan kelautan memiliki satu Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang berada di Desa Tondasi, Kecamatan Tiworo Utara dan juga memiliki satu Pusat Pelayanan Lokal (PPL) yang berada di Desa Pajala, Kecamatan Maginti. Kedua pusat ini berperan sebagai pusat pertumbuhan kawasan bagi zona pesisir dan kelautan.

Berdasarkan dokumen RTRW Kabupaten Muna Barat Tahun 2020-2040 kawasan perikanan di Kabupaten Muna Barat mencakup 2.064 hektar yang terdiri atas kawasan perikanan tangkap dan budidaya. Kawasan perikanan tangkap memiliki sarana dan prasarana

perikanan tangkap seperti Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang juga berfungsi sebagai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berada di Kecamatan Maginti, Tiworo Utara dan Napano Kusambi. Pada tahun 2021 produksi perikanan tangkap laut di Kabupaten Muna Barat mencapai 11.369,09 ton dimana jumlah mengalami kenaikan yang cukup tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya mencapai 9.153,0 ton. Hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Muna Barat memiliki produksi perikanan tangkap kecuali Kecamatan Lawa, Barangka, dan Wadaga. Kecamatan Tiworo Utara menduduki peringkat pertama dalam produksi perikanan tangkap yaitu mencapai 2.046,44 ton.

Kawasan perikanan budidaya tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Muna Barat. Produksi perikanan budidaya di Kabupaten Muna Barat mencapai 13.956,83 ton pada tahun 2021 yang mana jumlah ini terus meningkat pesat dari sebelumnya pada tahun 2020 hanya mencapai 2.566,10 ton. Kawasan perikanan budidaya ini terdiri dari perikanan air laut, perikanan air tawar, perikanan air payau, dan perikanan rumput laut. Kecamatan dengan produksi perikanan budidaya terbesar adalah Kecamatan Tiworo Kepulauan yaitu sebanyak 3.669,51 ton. Komoditas utama pada perikanan budidaya di Kabupaten Muna Barat adalah binatang air berkulit keras yang mencapai 7.538,77 ton. Kegiatan perikanan budidaya air tawar di Kabupaten Muna Barat pada tahun 2022 mencapai 1.678,28 ton dimana jumlah produksi ini menandakan bahwa terdapat potensi perikanan air tawar yang apabila terus dikembangkan mampu mendukung diversifikasi jenis budidaya perikanan di Kabupaten Muna Barat.

Potensi perikanan yang melimpah di Kabupaten Muna Barat perlu menjadi perhatian khusus untuk dikembangkan menjadi kawasan minapolitan. Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa dan/atau kegiatan pendukung lainnya. Menurut RTRW Kabupaten Muna Barat, strategi kawasan minapolitan adalah dengan mengembangkan kawasan perikanan budidaya didukung adanya balai benih ikan, mengembangkan pelabuhan perikanan yang terpadu dengan kegiatan penyimpanan, dan pengolahan dalam suatu kawasan minapolitan. Selain itu, strategi yang dijalankan adalah dengan meningkatkan infrastruktur pendukung distribusi hasil perikanan yang ada. Kawasan perikanan budidaya yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan terbagi dalam tiga pusat yaitu pusat pengolahan hasil perikanan, pusat pengembangan balai benih ikan dan udang, serta pusat pengolahan rumput laut. Potensi perikanan di Kabupaten Muna Barat dapat menjadi tumpuan utama pembangunan ekonomi daerah, mengingat pertumbuhan penduduk dan semakin menipisnya sumber daya lahan darat di Kabupaten Muna Barat.

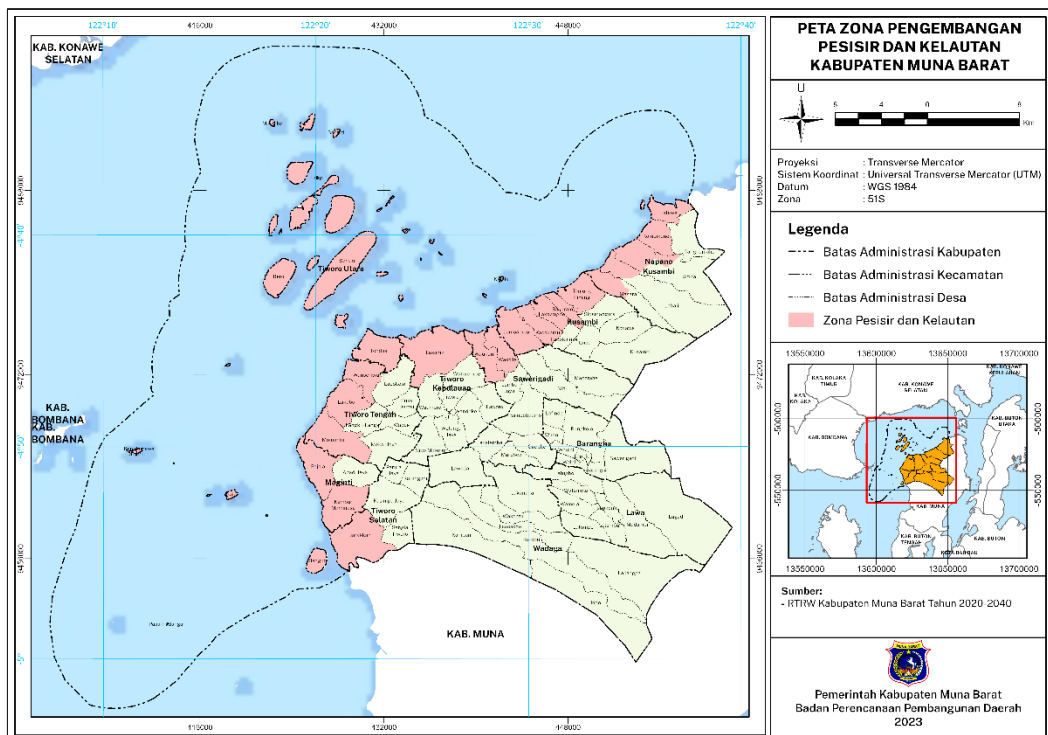
Zona pesisir dan kelautan di Kabupaten Muna Barat terdiri dari daerah pesisir dan beberapa pulau kecil yang menyajikan eksotisme keindahan alam laut sehingga pada zona ini terdapat potensi wisata khususnya pada wilayah perairan Selat Tiworo. Oleh karena itu, wisata alam bahari menjadi jenis wisata yang mendominasi di Kabupaten Muna Barat. Jumlah objek wisata bahari di Kabupaten Muna Barat pada tahun 2022 mencapai 32 objek yang tersebar di Kecamatan Tiworo Kepulauan, Maginti, Tiworo Utara, Kusambi, dan Napano Kusambi. Kecamatan dengan objek wisata bahari yang paling banyak adalah Kecamatan Tiworo Utara yaitu sebanyak 22 objek wisata. Salah satu objek wisata bahari yang terkenal di Kecamatan ini adalah Pulau Indo yang menyajikan keindahan alam seperti air laut yang biru dan jernih, pasir putih yang panjang, dan keindahan bawah laut. Pengembangan wisata bahari dapat terus dilakukan dengan meningkatkan infrastruktur pariwisata, menambah variasi aktivitas wisata, melibatkan masyarakat lokal, meningkatkan pemasaran dan promosi, serta memastikan pelestarian lingkungan laut. Pariwisata bahari di Kabupaten Muna Barat dapat dikembangkan untuk menggali potensi wisata daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata.

Karakter geografis berupa pulau-pulau kecil yang saling terpisah satu sama lain membuat jaringan transportasi laut menjadi sangat penting untuk mendukung aktivitas sehari-hari masyarakat serta menjadi prasarana penghubung dengan kawasan lainnya. Pada zona ini terdapat jaringan transportasi laut berupa pelabuhan atau dermaga sebagai tempat bersandarnya kapal yang menghubungkan satu pulau dengan pulau yang lain. Berdasarkan RTRW Kabupaten Muna Barat Tahun 2020-2040 terdapat pelabuhan penyeberangan kelas I yaitu pelabuhan yang terletak di pesisir Tondasi, Kecamatan Tiworo Utara. Selain itu, terdapat juga pelabuhan penyeberangan kelas II di Pajala yang terletak di Kecamatan Maginti serta pelabuhan penyeberangan Latawe di Kecamatan Napano Kusambi. yang terletak di pesisir Pajala. Letak Kabupaten Muna Barat yang strategis memunculkan alur pelayaran yang menghubungkan pelabuhan Pajala dengan Kabupaten Bombana, pelabuhan Tondasi dengan Kabupaten Bombana, pelabuhan Latawe dengan Kabupaten Konawe Selatan, serta alur pelayaran Laut Nusantara Kendari – Latawe – Tondasi – Pajala – Mawasangka – Bau-Bau. Terdapat lintas penyeberangan antar provinsi pada perairan Teluk Bone yang menghubungkan Pelabuhan Penyeberangan Tondasi dengan Pelabuhan Penyeberangan Bira di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan hal-hal tersebut, pengembangan PPK Tondasi difokuskan dalam pengembangan pelabuhan pengumpan lokal, sedangkan PPL Pajala difokuskan untuk pembangunan pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan pengumpan lokal.

Pengembangan zona pesisir dan kelautan menjadi sangat penting untuk diperhatikan, termasuk dalam konteks aspek konektivitas antar wilayah. Upaya pengembangan tersebut tidak hanya akan menjadi sumber pertumbuhan baru yang signifikan untuk mendorong pembangunan Kabupaten Muna Barat, tetapi juga berperan dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kelompok sosial. Peningkatan konektivitas antar wilayah, baik melalui infrastruktur transportasi maupun komunikasi, akan mempercepat arus pertumbuhan ekonomi, pertukaran informasi, dan distribusi sumber daya. Dengan demikian, memperhatikan aspek konektivitas dapat menjadi langkah strategis dalam merancang dan melaksanakan pengembangan zona pesisir dan kelautan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih holistik dan berkelanjutan.

Fokus Pembangunan

- 1) Pengembangan kawasan minapolitan untuk mendukung pengembangan sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya baik di laut maupun air tawar
- 2) Pengembangan sektor pariwisata alam laut/bahari pada wilayah perairan Selat Tiworo
- 3) Pengendalian kegiatan budidaya di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rangka menjaga fungsi konservasi perairan laut Selat Tiworo
- 4) Pengembangan sistem jaringan transportasi laut yang terintegrasi dan efisien



Gambar 2. 14 Peta Zona Pengembangan Pesisir dan Kelautan

b. Zona Pertanian dan Perkebunan

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Muna Barat merupakan sektor yang mendominasi kontribusi ekonomi PDRB Kabupaten Muna Barat sejak pertama kabupaten ini terbentuk pada tahun 2014. Bahkan, pada tahun 2022, kontribusi sektor ini mencapai 39,42% dari total PDRB Kabupaten Muna Barat. Selain itu, sektor pertanian juga menjadi salah satu sektor ekonomi yang mampu bertahan saat terjadi kontraksi akibat adanya Pandemi *Covid-19*. Oleh karena itu, pengembangan zona pertanian dan perkebunan di Kabupaten Muna Barat dinilai memiliki peran yang penting dalam pembangunan wilayahnya.

Berdasarkan dokumen RTRW Kabupaten Muna Barat Tahun 2020-2040, kawasan pertanian di Kabupaten Muna Barat terdiri atas kawasan tanaman pangan dan perkebunan. Kawasan tanaman pangan di Kabupaten Muna Barat tersebar di Kecamatan Maginti, Sawerigadi, Kusambi, Tiworo Kepulauan, Tiworo Selatan, Tiworo Tengah, Tiworo Utara, Lawa, Barangka, dan Wadaga. Terdapat 39 desa dan 3 kelurahan di Kabupaten Muna Barat yang termasuk ke dalam zona pertanian dan perkebunan. Zona pertanian dan perkebunan ini memiliki 4 Pusat Pelayanan Lokal (PPL) yang berada di Desa Kasimpa Jaya, Desa Lahaji, Desa Lailangga, dan Kelurahan Tiworo yang berperan sebagai pusat pertumbuhan lingkungan.

Pada tahun 2022, luas lahan sawah di Kabupaten Muna Barat mencapai 1.989 hektar yang terdiri atas 1.937 hektar lahan sawah yang menggunakan irigasi dan 52 hektar lahan sawah non-irigasi. Di mana Kecamatan Tiworo Selatan memiliki lahan sawah irigasi terluas di antara wilayah lainnya. Di dalam kawasan pangan tersebut terdapat kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 1.587 hektar yang tersebar di Kecamatan Tiworo Selatan, Maginti, Tiworo Tengah, Tiworo Kepulauan, Sawerigadi, dan Wadaga.

Jenis tanaman pangan utama yang diproduksi di Kabupaten Muna Barat terdiri atas padi sawah, jagung, kacang tanah, kacang kedelai, ubi kayu, dan ubi jalar. Jika dilihat dari besaran luas panen tanaman pangannya, luas panen komoditas padi terbesar berada di Kecamatan Sawerigadi; luas panen komoditas kacang tanah dan jagung terbesar berada di Kecamatan Wadaga; luas panen komoditas ubi kayu terbesar berada di Kecamatan Maginti; serta luas panen komoditas ubi jalar, kedelai, dan kacang hijau terbesar berada di Kecamatan Tiworo Selatan.

Selain tanaman pangan, Kabupaten Muna Barat juga memiliki beragam jenis tanaman hortikultura yang dikelola dengan cukup beragam. Di sektor sayuran, terdapat berbagai jenis tanaman seperti cabai rawit, kacang panjang, kangkung, pete/sawi, cabai besar, bawang daun, tomat, terung, ketimun, dan lainnya. Kacang panjang dan tomat menjadi tanaman yang memberikan hasil produksi paling besar di antara jenis tanaman lainnya. Selain itu, tanaman

buah-buahan seperti pisang, pepaya, rambutan, dan nanas merupakan komoditas utama di Kabupaten Muna Barat. Produksi keempat jenis tanaman buah tersebut pada tahun 2022 masing-masing mencapai 30.155 kuintal, 11.576 kuintal, 6.753 kuintal, dan 3.690 kuintal.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Muna Barat Tahun 2020-2040, kawasan perkebunan di Kabupaten Muna Barat terdiri atas tiga, yaitu kawasan perkebunan, kawasan perkebunan yang berada di dalam *outline* kawasan Hutan Produksi Tetap seluas kurang lebih 478 hektar, dan kawasan perkebunan yang berada dalam *outline* kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas kurang lebih 176 hektar. Pada sektor perkebunan ini, jambu mete menjadi komoditi perkebunan paling banyak diproduksi di Kabupaten Muna Barat. Luas tanam jambu mete di Kabupaten Muna Barat mencapai 9.285 hektar dengan produksi sebesar 3.635,72 ton pada tahun 2022. Di mana produksi jambu mete terbesar berada di Kecamatan Lawa dan Wadaga. Selain jambu mete, Kabupaten Muna Barat juga memiliki komoditas perkebunan lainnya seperti kelapa sawit, kelapa, karet, kopi, dan kakao.

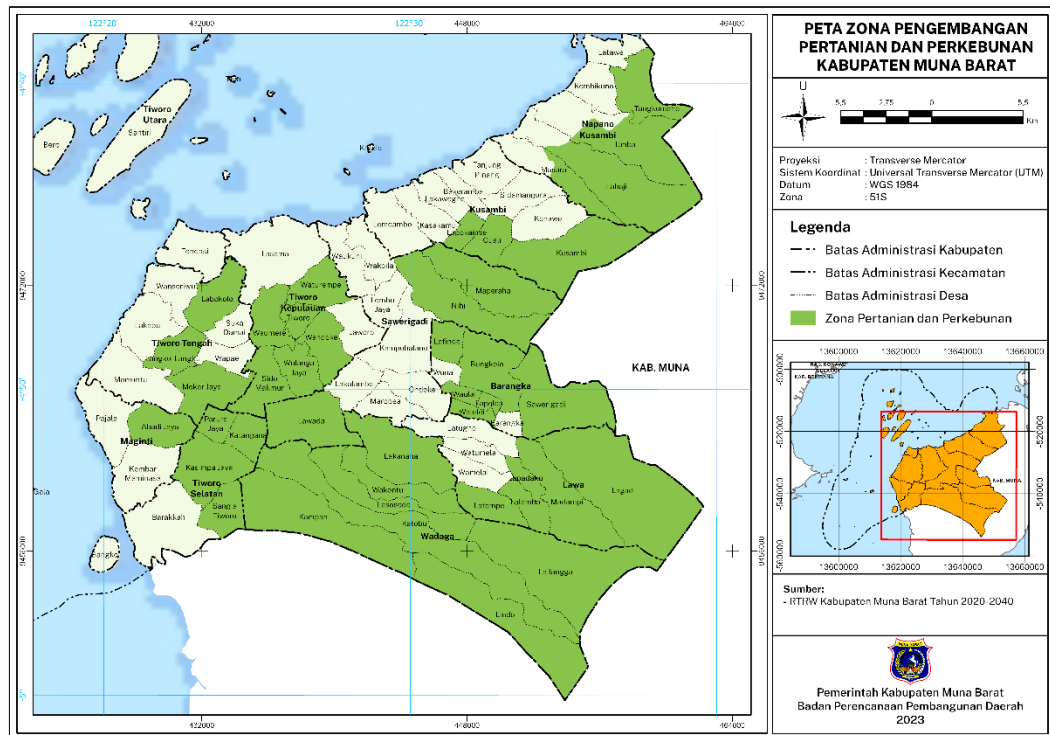
Dari berbagai potensi di zona pertanian dan perkebunan, telah ditetapkan kawasan agropolitan yang berada di Kecamatan Tiworo Selatan dan Maginti sebagai kawasan strategis sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Strategi pengembangan kawasan agropolitan ini diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan kawasan budidaya pertanian untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian unggulan; mengembangkan kawasan perdesaan untuk mendukung kegiatan ekonomi berbasis pertanian yang dilengkapi dengan sentra produksi pertanian unggulan serta fasilitas pendukung produksi; dan memelihara dan meningkatkan jaringan irigasi teknis, semi teknis, irigasi sederhana, dan irigasi desa untuk mendukung pengembangan kegiatan budidaya pertanian lahan basah.

Pengembangan agropolitan melalui pengembangan sentra produksi pertanian perlu memperhatikan konsep 5 A, yaitu agroproduksi, agroindustri, agrobisnis, agroteknologi, dan agrowisata. Pada sektor agroproduksi, fokus pengembangan ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi komoditas pertanian dan perkebunan agar produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasar. Dalam fase pasca panen, peningkatan nilai tambah komoditas hasil pertanian dapat didukung oleh sektor agroindustri. Dengan demikian diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian. Kemudian, untuk memasarkan hasil panen diperlukan sektor agrobisnis yang mencakup serangkaian aktivitas bisnis mulai dari pengadaan penyaluran, termasuk promosi hasil produk pertanian. Dalam pengembangan sektor agrobisnis ini diperlukan keterlibatan masyarakat sebagai pelaku usaha (wirausaha) yang bertindak sebagai penggerak ekonomi di Kabupaten Muna Barat.

Dalam rangka mempermudah kinerja sektor agroproduksi, agroindustri, dan agrobisnis diperlukan adanya agroteknologi. Di mana keberadaan teknologi ini dapat mempermudah kinerja ketiga sektor lainnya. Jika agroproduksi, agroindustri, agrobisnis, dan agroteknologi sudah terpenuhi, maka sektor pertanian dan perkebunan dapat dikembangkan lagi menjadi agrowisata. Fokus pengembangan agrowisata tidak lagi hanya pada produk-produk komoditas pertanian, tetapi sudah mulai menjual jasa dan pengalaman. Dengan adanya agrowisata, dapat menambah penghasilan petani, sehingga tidak hanya bergantung pada hasil panen saja.

Fokus Pengembangan:

- 1) Pengembangan dan peningkatan fungsi sarana dan prasarana penunjang kegiatan pertanian.
- 2) Peningkatan produktivitas hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura.
- 3) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pengolahan lahan pertanian dan perladangan berpindah untuk menjamin kelestarian sumberdaya lahan dan air.
- 4) Perbaikan sistem produksi, panen, dan pasca panen, termasuk pengolahan dan pengemasan produk hasil pertanian.
- 5) Pengembangan pemasaran produk pertanian dan perkebunan.
- 6) Perluasan jaringan transportasi dan logistik pertanian dan perkebunan.
- 7) Pengembangan agroindustri kecil dan menengah
- 8) Pengembangan teknologi yang mendukung mekanisasi pertanian dan perkebunan.
- 9) Optimalisasi potensi pertanian dan perkebunan dengan mengembangkan kawasan agrowisata.



Gambar 2. 15 Peta Zona Pengembangan Pertanian dan Perkebunan

c. Zona Perdagangan

Berdasarkan RTRW Kabupaten Muna Barat Tahun 2020-2040, zona perdagangan di Kabupaten Muna Barat meliputi 15 desa dan kelurahan yang tersebar di Kecamatan Barangka, Sawerigadi, Lawa, Tiworo Kepulauan, Kusambi, dan Tiworo Tengah. Desa Barangka di Kecamatan Barangka berperan sebagai Pusat Pelayanan Lokal (PPL). Desa Laworo di Kecamatan Tiworo Kepulauan berperan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Desa Wapae di Kecamatan Tiworo Tengah, Kelurahan Konawe di Kecamatan Kusambi, serta Kelurahan Wamelai di Kecamatan Lawa memiliki peran sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).

Kawasan strategis dari perspektif pertumbuhan ekonomi melibatkan daerah-daerah seperti minapolitan di Kecamatan Tiworo Tengah, Tiworo Kepulauan, dan Sawerigadi; selain itu, termasuk juga kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kecamatan Tiworo Kepulauan dan Kecamatan Sawerigadi. Desa Barangka di Kecamatan Barangka difokuskan untuk pengembangan fasilitas perekonomian KUD, UMKM, dan perbankan. Desa Barangka sendiri memiliki jumlah fasilitas perdagangan yang lebih banyak dibandingkan dengan desa lain di Kecamatan Barangka. Terdapat satu bangunan pasar permanen serta satu bangunan pasar semi permanen. Untuk jumlah warung, Desa Barangka memiliki 3 warung dan 10 warung

kelontong. Desa Laworo di Kecamatan Tiworo Kepulauan difokuskan untuk pembangunan permukiman perkotaan, pengembangan industri kecil dan menengah.

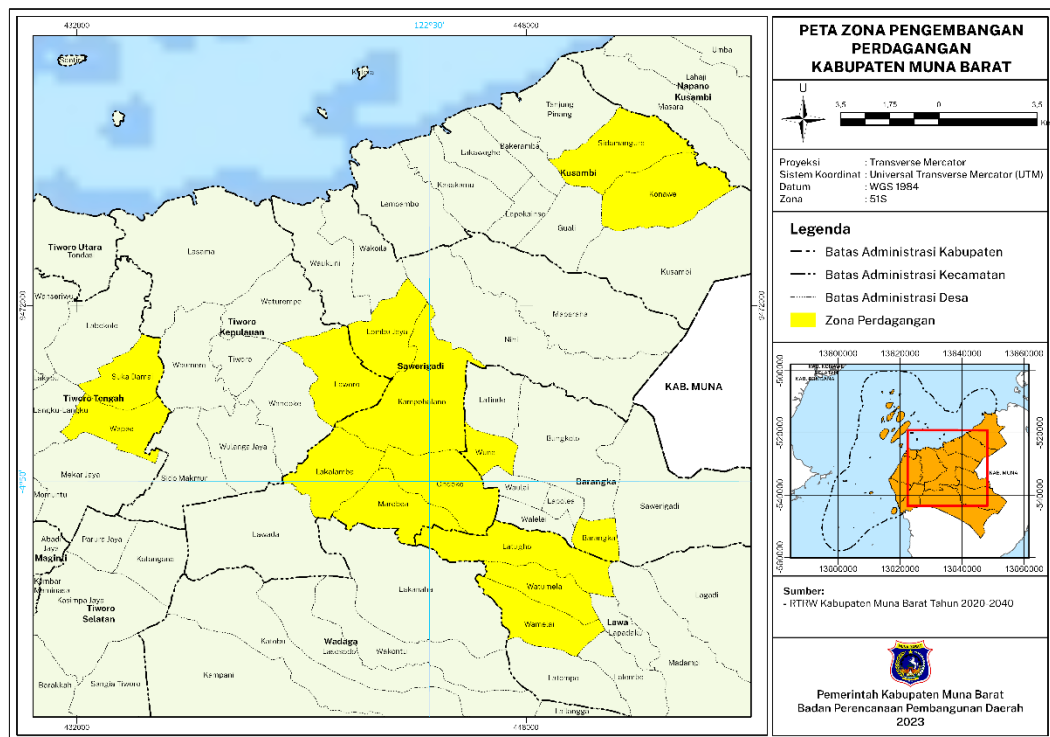
Desa Wapae di Kecamatan Tiworo Tengah difokuskan pada pengembangan perbankan dan jasa keuangan lainnya. Desa Wapae memiliki 2 unit lembaga keuangan. Kedua lembaga keuangan tersebut tidak ada di desa maupun kelurahan lain di Kecamatan Tiworo Tengah. Selain itu, Desa Wapae juga memiliki berbagai fasilitas perdagangan. Mengenai jumlah pedagang yang ada di desa tersebut, untuk saat ini terdapat 13 pedagang besar dan 34 pedagang ecer. Rumah makan yang berada di Desa Wapae berjumlah 4 unit, sedangkan untuk toko ada 9 unit, dan warung kelontong ada 19 unit. Pengembangan Kawasan perdagangan di Desa Wapae dapat didukung juga dengan keberadaan UMKM tahu, tempe, dan kerupuk.

Kelurahan Konawe yang terletak di Kecamatan Kusambi juga difokuskan pada pengembangan perbankan dan jasa keuangan lainnya. Untuk fasilitas perdagangan, Kelurahan Konawe memiliki 1 bangunan pasar permanen. Selain itu, terdapat juga 2 warung dan 30 toko. Kemudian, pengembangan Kelurahan Konawe juga dapat menitikberatkan pada potensi perdagangan berbasis pesisir dan perikanan. Kelurahan Wamelai di Kecamatan Lawa difokuskan pada pengembangan perbankan dan jasa keuangan lainnya. Kelurahan Wamelai untuk saat ini memiliki 1 pasar desa.

Kecamatan Barangka, Sawerigadi, Lawa, Tiworo Kepulauan, Kusambi, dan Tiworo Tengah menjadi lokasi strategis yang berperan penting dalam mendukung kegiatan ekonomi utama, seperti perikanan, pertanian, dan perkebunan. Fasilitas dan prasarana perdagangan serta perbankan di wilayah ini dirancang dan diupayakan untuk memberikan dukungan optimal terhadap sektor-sektor tersebut. Pasar sebagai pusat kegiatan perdagangan lokal, menjadi tempat di mana para petani, nelayan, dan pemilik kebun dapat menjual hasil-hasil mereka secara langsung kepada konsumen. Sentra perdagangan yang terorganisir membantu memfasilitasi pertukaran barang dan jasa secara efisien. Keberadaan bank dan lembaga keuangan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan perbankan, seperti pinjaman usaha dan kredit pertanian, yang mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi utama. Infrastruktur transportasi yang baik, pelabuhan, dan dermaga mendukung distribusi hasil pertanian dan perikanan ke pasar regional dan nasional. Selain itu, pusat informasi pertanian dan perikanan juga membantu petani dan nelayan dalam mendapatkan informasi terkini untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha mereka. Dengan demikian, fasilitas dan prasarana di kecamatan-kecamatan ini secara holistik berperan dalam memperkuat perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fokus Pengembangan:

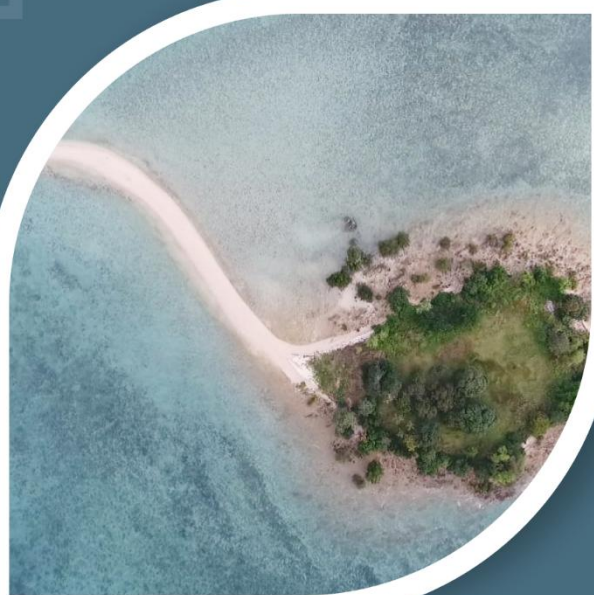
- 1) Penambahan jumlah sarana dan prasarana perdagangan.
- 2) Penambahan jumlah sarana dan prasarana kegiatan perbankan dan jasa keuangan lainnya.
- 3) Pengembangan dan perluasan terhadap akses menuju pusat perdagangan.
- 4) Pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perdagangan.
- 5) Pemanfaatan teknologi yang tepat guna untuk menunjang keberlanjutan aktivitas perdagangan yang optimal.



Gambar 2. 16 Peta Zona Pengembangan Perdagangan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS



3.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja pembangunan pada RPJMD Tahun 2017-2022, dapat diidentifikasi berbagai permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terbagi dalam enam aspek yang mencakup bidang sosial, ekonomi, infrastruktur, tata kelola, lingkungan, dan ketahanan.

Tingkat ketidaksetaraan sosial yang terlihat di Kabupaten Muna Barat menciptakan sejumlah permasalahan yang memerlukan perhatian serius dalam pembangunan wilayah ini. Pertama, ketidakmerataan distribusi tenaga pengajar, terutama di pulau-pulau kecil yang dapat mengancam kualitas pendidikan dan aksesibilitasnya. Tantangan kedua muncul dari belum optimalnya cakupan layanan pendidikan kesetaraan yang menyebabkan kesenjangan dalam akses pendidikan bagi berbagai lapisan masyarakat. Masalah ketiga melibatkan mutu pendidikan yang belum optimal karena masih banyak sekolah yang belum terakreditasi minimal B yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran dan perkembangan siswa.

Selanjutnya, aspek kesehatan masyarakat juga berdampak, terutama dengan tingginya persentase masyarakat usia di atas 25 tahun dengan pendidikan terendah. Rendahnya cakupan pasangan usia subur yang mengikuti program Keluarga Berencana dan minimnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh masyarakat menunjukkan tantangan serius dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketidakpartisipasian masyarakat dalam kegiatan olahraga dan pembinaan kepemudaan, rendahnya budaya literasi, serta minimnya sarana dan prasarana layanan trantibum-linmas dan pemadam kebakaran, semakin menambah kompleksitas permasalahan sosial.

Sisi kebudayaan dan sejarah juga tidak luput dari kendala, mulai dari belum adanya penetapan cagar budaya hingga minimnya fasilitas museum untuk melestarikan benda-benda sejarah dan cagar budaya. Selain itu, masalah terkait dengan kependudukan, pemberdayaan sosial, dan layanan rehabilitasi menjadi tantangan serius yang membutuhkan pendekatan terpadu dan kolaboratif. Dalam bidang politik dan pengambilan keputusan, rendahnya

partisipasi perempuan menambah dimensi ketidaksetaraan yang perlu diatasi. Semua permasalahan tersebut menunjukkan kompleksitas dan urgensi penanganan serta perlunya kerjasama lintas sektor dalam menciptakan perubahan yang signifikan dalam ketahanan sosial Kabupaten Muna Barat.

Tabel 3. 1 Akar Permasalahan dan Inti Permasalahan Bidang Sosial

Akar Permasalahan	Inti Permasalahan	Solusi
Belum meratanya distribusi tenaga pengajar terutama di pulau-pulau kecil	Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Peningkatan Kualitas Guru dengan melakukan pelatihan berkelanjutan dan distribusi guru yang merata
Belum optimalnya cakupan layanan pendidikan kesetaraan		Peningkatan Infrastruktur Pendidikan seperti Pembangunan fasilitas di daerah terpencil dan penyediaan akses digital
Belum optimalnya mutu pendidikan disebabkan masih banyak sekolah yang belum terakreditasi minimal B		Pemanfaatan Teknologi Dalam Pendidikan
Tingginya (48,35%) masyarakat usia di atas 25 tahun dengan latar belakang paling tinggi berpendidikan SD dan SMP		Program Beasiswa dan Bantuan Finansial
Masih rendahnya cakupan pasangan usia subur yang mengikuti program Keluarga Berencana	Belum Optimalnya Sistem Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Infrastruktur Kesehatan
Belum optimalnya pelayanan obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan		Peningkatan Ketersediaan dan Kompetensi Tenaga Kesehatan
Rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan kesehatan masyarakat ditandai dengan masyarakat rendahnya masyarakat yang menerapkan hidup bersih dan sehat (76,87%)		Perbaiki Sistem Manajemen dan Pelayanan Kesehatan
Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan Puskesmas. Pembinaan Posyandu oleh Puskesmas		Peningkatan Edukasi dan Kesadaran Kesehatan Masyarakat
Masih rendahnya budaya literasi masyarakat	Rendahnya literasi masyarakat	Peningkatan Akses ke Buku dan Bahan Bacaan (Perpustakaan Keliling dan Perpustakaan Digital)
Belum efektifnya pembinaan kepemudaan dan olahraga	Kuranginya partisipasi dan perkembangan yang optimal dalam pembinaan kepemudaan dan olahraga	Program Pelatihan dan Pembinaan Olahraga Usia Dini
Minimnya <i>event</i> olahraga dan kepemudaan skala kabupaten		Kolaborasi dan Kemitraan Dengan Komunitas Dalam Peningkatan Akses dan Partisipasi Event Olahraga
Masih minimnya kuantitas dan kompetensi sumber daya aparatur petugas trantibumlinmas dan petugas pemadam kebakaran	Terbatasnya kuantitas dan kualitas aparat serta sarpras dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman	Peningkatan jumlah aparat keamanan seperti petugas keamanan lingkungan dan pemadam kebakaran sesuai kebutuhan wilayah dan Pelatihan Berkelanjutan untuk meningkatkan

Akar Permasalahan	Inti Permasalahan	Solusi
Keterbatasan sarana dan prasarana layanan trantibum-linmas, pemadam kebakaran, dan penanganan bencana alam		keterampilan teknis, taktis, dan soft skills aparat dalam menjaga keamanan.
		Penerapan teknologi seperti aplikasi pelaporan kejahatan, sistem pengawasan berbasis AI dan pusat kendali keamanan terintegrasi.
		Pembangunan pos keamanan di area strategis, terutama di daerah rawan konflik atau kejahatan.
Belum adanya penetapan Cagar Budaya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kurangnya upaya pelestarian budaya dan peninggalan sejarah	Penguatan Kebijakan Pelestarian seperti Pembuatan Regulasi Perlindungan untuk melindungi situs budaya dan peninggalan sejarah dari perusakan, alih fungsi, atau eksploitasi.
Belum tersedianya museum untuk melestarikan benda-benda sejarah dan cagar budaya		Pembuatan arsip Digital dengan mendigitalisasi peninggalan sejarah dan warisan budaya untuk melestarikan informasi dalam jangka
		Revitalisasi tradisi dan kesenian dengan melakukan pelatihan seni tradisional dan festival budaya.
Belum efektifnya pembinaan pengendalian kependudukan	Pelayanan serta edukasi Keluarga Berencana yang belum optimal	Peningkatan Akses Layanan KB
Belum optimalnya pelaksanaan advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Keluarga Berencana		Edukasi Komprehensif tentang KB
Belum optimalnya pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga		Pendekatan Inklusif dan Sensitif Budaya dengan melibatkan tokoh adat dan pemuka agama
Minimnya kepemilikan aset produktif bagi rumah tangga miskin/miskin ekstrim dan PPKS	Ketidaksetaraan akses terhadap aset produktif bagi rumah tangga miskin	Peningkatan Akses terhadap Lahan dan Sumber Daya seperti Redistribusi lahan, Penyediaan lahan untuk UMKM dan Kemitraan Agribisnis
Belum terbentuknya sistem dan manajemen penanganan yang komprehensif dengan melibatkan kerjasama antar instansi dan profesi sehingga penanganan tidak bersifat sektoral dan terputus, termasuk didalamnya terkait kebijakan lokal mengenai pelayanan sosial	Keterbatasan Sistem Penanganan Terpadu dan Manajemen Data untuk Penanggulangan Kemiskinan	Pengembangan Sistem Satu Data Kemiskinan yang mencakup data real-time tentang rumah tangga miskin, program bantuan, dan status implementasi.
Belum terdatanya jumlah PPKS secara menyeluruh dan berkesinambungan sehingga tidak dapat menyeimbangi laju kemiskinan dan permasalahan sosial yang cenderung dinamis di masyarakat.		Pemutakhiran Data Berkala dan Integrasi berbagai instansi pemerintah (seperti Kementerian Sosial, BPS, dan Dinas Sosial) untuk meminimalkan duplikasi dan ketidaksesuaian data

Akar Permasalahan	Inti Permasalahan	Solusi
Adanya polemik terkait dengan akurasi Data Base Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		Peningkatan koordinasi dan Kolaborasi seperti pembentukan tim koordinasi lintas instansi, kemitraan dengan lembaga non pemerintah dan pendekatan komunitas
Masih rendahnya pemberdayaan kesejahteraan sosial	Belum optimalnya pemberdayaan dan layanan sosial	Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Sosial dengan memperluas penyebaran layanan ke daerah terpencil dan pengembangan pusat pelayanan terpadu
Masih minimnya layanan rehabilitasi sosial		Pendekatan Inklusif dengan Fokus pada Kelompok Rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, anak yatim, dan perempuan kepala keluarga dalam program layanan sosial.
Tingkat Partisipasi perempuan masih sangat rendah disbanding dengan laki-laki pada bidang politik, ekonomi dan pengambilan keputusan masih rendah	Ketidaksetaraan Partisipasi Gender dalam Politik, Ekonomi, dan Pengambilan Keputusan	Meningkatkan Peran Media dalam Kesetaraan Gender dengan melakukan Kampanye Media Sosial untuk mendukung gerakan kesetaraan gender dan memperjuangkan hak-hak perempuan dalam politik & ekonomi
		Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (Akses terhadap Pembiayaan, Peningkatan Keterampilan dan Jaminan Kesetaraan Upah)
		Peningkatan Akses Perempuan dalam Pengambilan Keputusan dengan melakukan Pelatihan Pengambilan Keputusan, Pemberdayaan dalam Organisasi Masyarakat Sipil dan Penyuluhan dan Pendidikan Kesetaraan Gender
Belum adanya layanan terintegrasi dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak	Tidak Terwujudnya Sistem Penanganan Terpadu untuk Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Membentuk tim lintas sektor yang melibatkan lembaga pemerintah (seperti kepolisian, kejaksaan, dan kementerian terkait), organisasi masyarakat sipil, serta lembaga swadaya masyarakat untuk menangani kasus kekerasan. Ini mencakup koordinasi antara pelayanan kesehatan, bantuan hukum, perlindungan sosial, dan rehabilitasi.
		Menetapkan protokol penanganan yang jelas dan standar di setiap lembaga yang terlibat, sehingga memastikan semua lembaga memiliki panduan yang sama dalam menangani kasus kekerasan

Permasalahan ekonomi di Kabupaten Muna Barat mencakup sejumlah hambatan yang memerlukan perhatian serius dalam upaya memperkuat sektor ekonomi lokal. Pertama, belum efektifnya promosi investasi daerah berdampak pada minimnya daya tarik bagi investor potensial. Kekurangan promosi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan peluang kerja di wilayah tersebut. Kedua, ketiadaan regulasi yang mengatur iklim usaha di daerah menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat mengurangi ketertarikan calon investor dan pelaku usaha lokal. Perlu adanya kerangka regulasi yang jelas dan mendukung untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif.

Selanjutnya, masalah ketiga berkaitan dengan masih rendahnya layanan perizinan dan non-perizinan di Kabupaten Muna Barat. Pelayanan yang kurang efisien dan terkendala dapat menghambat proses usaha dan pengembangan ekonomi lokal. Selain itu, rendahnya kemampuan pengelola koperasi dan pelaku UMKM dalam kewirausahaan dan pengembangan produktivitasnya menjadi kendala serius yang mempengaruhi pertumbuhan sektor ini. Minimnya akses permodalan bagi pelaku usaha UMKM dan koperasi, belum optimalnya kemitraan usaha, serta rendahnya *skill* pencari tenaga kerja menambah kompleksitas permasalahan ekonomi di Kabupaten Muna Barat.

Faktor lainnya melibatkan belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung aktivitas ekonomi. Kurangnya infrastruktur yang mendukung dapat menghambat pertumbuhan sektor ekonomi. Selain itu, pelaksanaan pelatihan tenaga kerja yang belum didasarkan pada kebutuhan pasar tenaga kerja dapat menciptakan ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dan tuntutan pasar.

Tabel 3. 2 Akar Permasalahan dan Inti Permasalahan Bidang Ekonomi

Akar Permasalahan	Inti Permasalahan	Solusi
Belum efektifnya promosi investasi daerah	Terbatasnya Dukungan dan Fasilitasi Pengembangan Ekosistem Investasi dan Usaha Lokal	Penyediaan Akses Modal dan Pembiayaan
Belum adanya regulasi yang mengatur iklim usaha di daerah		Penguatan Jaringan dan Kolaborasi dengan mendorong Kemitraan antara Pemerintah dan Sektor Swasta, Jaringan Usaha Lokal dan Fasilitasi Akses Pasar
Masih rendahnya layanan perizinan/ non perizinan		Peningkatan Akses Teknologi dan Inovasi dengan membangun infrastruktur digital yang dapat mendukung usaha lokal, termasuk akses internet yang terjangkau, platform e-commerce yang mudah diakses, dan perangkat lunak yang mendukung operasional bisnis

Akar Permasalahan	Inti Permasalahan	Solusi
Rendahnya kemampuan pengelola Koperasi dan pelaku UMKM dalam kewirausahaan dan pengembangan produktivitasnya	Terbatasnya kapasitas SDM dan dukungan terhadap pengembangan UMKM dan koperasi	Peningkatan Kualitas SDM dengan menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan yang mencakup berbagai aspek bisnis, seperti perencanaan usaha, pemasaran, manajemen keuangan, dan pengelolaan sumber daya manusia.
Masih rendahnya akses permodalan bagi pelaku usaha UMKM dan Koperasi		Memperkuat program pembiayaan mikro dan skema kredit yang terjangkau bagi UMKM
Belum optimalnya kemitraan usaha antara Koperasi dan UMKM dengan pelaku usaha lainnya		Memberikan insentif dalam bentuk subsidi pembiayaan bagi UMKM dan koperasi yang bergerak dalam sektor-sektor yang dianggap prioritas, seperti sektor pertanian, industri kreatif, dan teknologi.
Rendahnya skill pencari tenaga	Belum Optimalnya Sistem Pengembangan Keterampilan Tenaga Kerja	Memanfaatkan teknologi untuk menyediakan kursus pelatihan online yang terjangkau dan dapat diakses oleh lebih banyak tenaga kerja.
Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai		Membangun fasilitas pelatihan yang memadai, termasuk ruang kelas yang lengkap dengan peralatan yang sesuai dengan standar industri
Pelaksanaan pelatihan tenaga kerja belum didasarkan pada kebutuhan pasar tenaga kerja		Mengembangkan kurikulum pelatihan yang berbasis pada kebutuhan dunia industri untuk memastikan bahwa pelatihan yang diberikan sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja.

Infrastruktur merupakan pilar utama dalam mendukung kemajuan suatu wilayah, namun berbagai permasalahan mendasar masih menghambat potensi pembangunan. Pertama, terbatasnya sarana pendidikan dan fasilitas pembelajaran yang memadai menjadi kendala serius dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang merata dan berkualitas. Sementara itu, belum optimalnya infrastruktur dan ketersediaan layanan kesehatan menimbulkan tantangan dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau.

Kedua, masalah mendasar lainnya adalah rendahnya kualitas jaringan jalan, drainase, dan air bersih. Ketidaktepatan ini tidak hanya berdampak pada mobilitas dan aksesibilitas, tetapi juga memunculkan resiko terhadap kejadian bencana alam. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan fasilitas publik dalam kawasan permukiman menciptakan ketidaksetaraan dalam pelayanan dasar, mempengaruhi kualitas hidup masyarakat di berbagai lapisan. Oleh karena itu, solusi holistik dan kolaborasi antar stakeholder menjadi kunci dalam mengatasi

berbagai permasalahan ini, agar pembangunan infrastruktur dapat merata, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat.

Tabel 3. 3 Akar Permasalahan dan Inti Permasalahan Bidang Infrastruktur

Akar Permasalahan	Inti Permasalahan	Solusi
Belum meratanya pemenuhan sarana/prasarana pembelajaran, dan fasilitasnya;	Terbatasnya sarana pendidikan dan fasilitas pembelajaran yang memadai	Meningkatkan alokasi anggaran pendidikan, mempercepat distribusi sarana/prasarana ke daerah terpencil
Belum tersedianya layanan perpustakaan yang didukung teknologi informasi		Membangun perpustakaan digital berbasis teknologi informasi, melengkapi fasilitas dengan perangkat modern, serta menyediakan akses internet untuk mempermudah layanan dan pengelolaan koleksi.
Belum optimalnya kualitas belajar mengajar pada Pendidikan Anak Usia Dini, utamanya terkait dengan standar kompetensi pendidik dan Standar Sarana dan Prasarana;		Menyediakan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi pendidik PAUD dan mempercepat penyediaan sarana serta prasarana yang sesuai dengan standar pendidikan
Masih rendahnya minat baca masyarakat dan masih banyak sekolah yang belum memiliki perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional, baik sarana prasarananya, koleksi, SDM, maupun aspek-aspek perpustakaan lainnya.		Pembangunan perpustakaan yang sesuai standar nasional, melengkapi koleksi yang relevan, meningkatkan kompetensi pustakawan, serta mengadakan program literasi untuk mendorong minat baca masyarakat
Belum optimalnya kualitas belajar mengajar pada pendidikan SD dan pendidikan SMP utamanya terkait dengan kualitas Sarana dan Prasarana		Meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana, memastikan distribusi fasilitas pendidikan merata, dan melibatkan swasta dalam mendukung pengadaan infrastruktur sekolah
Belum optimalnya sarana/prasarana dan tenaga kesehatan dalam mendukung penerapan SPM dan layanan kesehatan bagi masyarakat pulau-pulau kecil	Belum Optimalnya Infrastruktur dan Ketersediaan Layanan Kesehatan	Mempercepat pengadaan sarana/prasarana kesehatan yang memadai, mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata, dan memanfaatkan layanan kesehatan keliling serta telemedicine untuk menjangkau masyarakat di pulau-pulau kecil
Belum optimalnya sarana/prasarana, fasilitas peralatan kedokteran, dan ketersediaan obat, serta kuantitas tenaga kesehatan di RSUD		Meningkatkan anggaran untuk pengadaan sarana, peralatan medis, dan obat-obatan, merekrut tenaga kesehatan sesuai kebutuhan, serta mengoptimalkan manajemen rumah sakit untuk pelayanan yang lebih efisien

Akar Permasalahan	Inti Permasalahan	Solusi
Relatif minimnya (27,91%) Desa/ Kelurahan yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) perpipaan dan terbatasnya akses masyarakat terhadap Air minum bagi masyarakat di pulau-pulau kecil;	Masih rendahnya kualitas jaringan jalan, drainase dan air bersih	Memperluas jaringan SPAM perpipaan dengan pembangunan infrastruktur yang lebih baik dan menyediakan solusi alternatif seperti instalasi air bersih untuk wilayah pulau-pulau kecil
Sistem jaringan jalan yang terbangun telah mendukung inter koneksitas antara pusat-pusat kegiatan lokal namun kondisinya yang belum memadai cukup tinggi (48,17%);		Meningkatkan kualitas dan pemeliharaan jaringan jalan dengan prioritas pada perbaikan ruas yang masih buruk untuk memastikan konektivitas yang lebih lancar
Belum optimalnya jaringan irigasi yang baik dan berfungsi (78%) dalam mendukung penyediaan air irigasi secara kontinu		Melakukan rehabilitasi dan perbaikan jaringan irigasi yang rusak serta memperluas sistem irigasi untuk memastikan pasokan air yang kontinu
Masih rendahnya tingkat hunian yang layak huni (67.32%)	Keterbatasan Infrastruktur dan Fasilitas Publik dalam Kawasan Permukiman	Meningkatkan program pembangunan perumahan murah dan layak huni serta memberikan insentif kepada pengembang untuk membangun rumah di daerah yang membutuhkan
Keterbatasan ketersediaan Prasarana, Sarana, dan utilitas Umum (PSU) kawasan permukiman (jalan lingkungan, sanitasi, drainase, air bersih, pengolahan sampah, sarana ibadah, dan sarana sosial lainnya).		Meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan dan perbaikan PSU kawasan permukiman serta melibatkan masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas tersebut.
Belum adanya Tempat pembuangan Akhir (TPA) yang dapat menyebabkan tingkat kerusakan lingkungan dan efek rumah kaca meningkat		Membangun TPA yang ramah lingkungan dan menerapkan sistem pengelolaan sampah yang efektif, seperti pemilahan sampah dan daur ulang
Keterbatasan sarana dan prasarana layanan trantibum-linmas, pemadam kebakaran, dan penanganan bencana alam		Meningkatkan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana, serta melatih petugas agar lebih siap dalam penanganan trantibum-linmas, kebakaran, dan bencana alam
Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana pengembangan olahraga		Meningkatkan investasi dalam pembangunan sarana dan prasarana olahraga serta mendukung program pengembangan olahraga di tingkat lokal
Gedung Perpustakaan Umum sebagai perpustakaan pembina semua jenis perpustakaan di tingkat kabupaten masih jauh dari kondisi ideal dengan masih terbatasnya sarana prasarana yang dimiliki sebagai penunjang penyelenggaraan		Meningkatkan anggaran untuk renovasi dan pengadaan sarana prasarana perpustakaan, serta memperkuat fasilitas layanan utama dan ekstensi agar lebih optimal

Akar Permasalahan	Inti Permasalahan	Solusi
pelayanan baik layanan utama maupun layanan ekstensi.		
Masih terbatasnya perpustakaan dan taman bacaan yang ada sehingga masyarakat masih sulit untuk mendapatkan bahan yang sesuai dengan kebutuhannya, yang adapun masih belum terbina dengan baik karena kendala anggaran dan sarana prasarana dan lebih mengandalkan swadaya masyarakat.		Meningkatkan pendanaan untuk pembangunan perpustakaan dan taman bacaan, serta melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan serta pengadaan bahan bacaan yang relevan.
Belum adanya Sarpras sistem sandi (Sissan)		Membangun sistem sandi yang terintegrasi dan aman, serta melatih aparat terkait untuk mengelola dan mengoperasikan sistem tersebut dengan baik
Terbatasnya kapasitas jaringan internet dan sarpras dalam mendukung implementasi e-government	Belum optimalnya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung implementasi e-government,	Meningkatkan kapasitas jaringan internet dan memperbarui sarana prasarana TIK untuk mendukung kelancaran implementasi e-government secara efektif.
Belum adanya RDTRW sebagai penjabaran implementasi RTRW Kabupaten Muna Barat Tahun 2020-2040		Menyusun dan mengesahkan RDTRW sebagai penjabaran rinci dari RTRW Kabupaten Muna Barat untuk memastikan perencanaan tata ruang yang lebih terarah.
Masih ditemukannya berbagai pelanggaran pemanfaatan ruang dan bangunan yang diakibatkan karena kurangnya sanksi dan penindakan atas pelanggaran yang terjadi		Memperkuat pengawasan, menegakkan sanksi tegas, dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai peraturan pemanfaatan ruang dan bangunan
Daerah belum memiliki RDTR yang dapat menjadi acuan pemanfaatan ruang dan zonasi secara lebih detail dalam setiap pengajuan izin usaha dan/atau kegiatan	Belum terwujudnya kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam peraturan penataan ruang	Menyusun dan menetapkan RDTR sebagai acuan resmi untuk pemanfaatan ruang dan zonasi dalam setiap pengajuan izin usaha atau kegiatan.
Belum optimalnya Penanganan kawasan permukiman kumuh di wilayah pesisir maupun daratan yang dan belum memenuhi target sesuai dengan SK Kumuh Tahun 2022 Kab. Muna Barat		Menyusun perencanaan dan pelaksanaan program penataan permukiman kumuh dengan melibatkan semua pihak terkait, serta alokasi anggaran yang memadai untuk mencapai target SK Kumuh 2022
Belum tersedianya data base penataan tanah di Kabupaten Muna Barat;	Belum Optimalnya Penataan dan Sertifikasi Tanah dan Lahan	Membangun sistem database yang terintegrasi untuk penataan tanah, dengan melibatkan instansi terkait dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pemeliharaan data secara sistematis

Akar Permasalahan	Inti Permasalahan	Solusi
Masih minimnya fasilitasi sertifikasi lahan masyarakat khususnya lahan masyarakat miskin;		Menyediakan program fasilitasi sertifikasi lahan dengan prioritas kepada masyarakat miskin, termasuk pembiayaan subsidi dan sosialisasi prosedur yang jelas
Belum optimalnya pelaksanaan fasilitas konflik pertanahan; dan		Melakukan koordinasi antar lembaga terkait, meningkatkan mediasi konflik pertanahan, dan mempercepat proses penyelesaian sengketa melalui jalur hukum yang jelas
Masih rendahnya kepemilikan sertifikasi lahan milik pemda		Melaksanakan proses sertifikasi lahan milik pemda melalui alokasi anggaran khusus dan koordinasi dengan BPN untuk mempermudah prosedur administrasi
Belum adanya layanan penyeberangan pelabuhan pengumpul regional yang menghubungkan Kabupaten Muna Barat dan Daratan Kendari (Torobulu);	Kurangnya konektivitas transportasi laut yang efektif dan optimal	Membangun dan mengoperasikan layanan penyeberangan pelabuhan pengumpul regional dengan rute dari Kabupaten Muna Barat ke Torobulu, Kendari, untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah
Belum memadainya layanan pelabuhan pengumpan lokal Pajala dan Latawe dalam mendukung kebutuhan mobilitas barang dan jasa antar Kabupaten Muna Barat dengan Kabupaten Sekitar (Pajala–Bombana dan Latawe- Torobulu);		Meningkatkan kapasitas dan fasilitas pelabuhan pengumpan lokal Pajala dan Latawe untuk mendukung mobilitas barang dan jasa antar Kabupaten Muna Barat dan Kabupaten sekitar
Belum optimalnya layanan pelabuhan pengumpan lokal (dermaga rakyat) akibat ujung causeway dermaga yang tidak mencapai titik surut terjauh, sehingga pada waktu air surut armada kapal tidak dapat berlabuh;		Memperpanjang causeway dermaga untuk mencapai titik surut terjauh, sehingga kapal dapat berlabuh dengan optimal sepanjang waktu
Belum tersedianya terminal tipe C sebagai pusat layanan angkutan umum di Kabupaten Muna Barat	Belum memadainya fasilitas transportasi darat	Membangun terminal tipe C yang representatif untuk meningkatkan layanan angkutan umum di Kabupaten Muna Barat

Tata kelola yang baik menjadi pondasi utama dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan di suatu wilayah. Kabupaten Muna Barat menghadapi serangkaian permasalahan yang mempengaruhi tata kelolanya secara menyeluruh. Pertama, belum optimalnya sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil mengindikasikan kelemahan dalam manajemen data dasar penduduk. Hal tersebut dapat berdampak pada akurasi perencanaan pembangunan, alokasi sumber daya, dan efisiensi layanan publik. Kedua, minimnya kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Muna Barat menjadi kendala serius dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Tantangan berikutnya muncul dari rendahnya tingkat inovasi dan kolaborasi dalam proses pembangunan desa. Ketidakmampuan untuk menerapkan solusi-solusi inovatif dan kurangnya kerjasama antar stakeholder dapat menghambat kemajuan pembangunan lokal. Oleh karena itu, perbaikan dalam tata kelola di Kabupaten Muna Barat memerlukan langkah-langkah strategis, termasuk peningkatan sistem administrasi kependudukan, pengembangan kompetensi SDM di OPD, serta pembangunan budaya inovasi dan kolaborasi dalam setiap tahap pembangunan desa.

Tabel 3. 4 Akar Permasalahan dan Inti Permasalahan Bidang Tata Kelola

Akar Permasalahan	Inti Permasalahan	Solusi
Sarana dan prasarana layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil belum memadai	Belum Optimalnya Sistem Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Muna Barat	Meningkatkan fasilitas dan infrastruktur layanan administrasi kependudukan serta melibatkan teknologi untuk mempercepat dan mempermudah proses administrasi
Belum optimalnya prosedur pengurusan administrasi kependudukan dan catatan sipil.		Menyederhanakan prosedur pengurusan administrasi dengan digitalisasi layanan dan pelatihan bagi petugas untuk mempercepat proses dan meningkatkan efisiensi.
Kurangnya inovasi jemput bola untuk masyarakat yang belum ber KTP		Mengimplementasikan program jemput bola dengan melakukan pelayanan keliling atau menggunakan teknologi untuk mempermudah masyarakat yang belum memiliki KTP
Belum efektifnya koordinasi penyusunan data statistik sektoral		Memperkuat koordinasi antar instansi terkait dengan membangun sistem data yang terintegrasi dan rutin melakukan pertemuan untuk evaluasi.
Belum adanya pengelolaan arsip yang baku oleh perangkat daerah		Menetapkan standar pengelolaan arsip yang baku dan menyediakan pelatihan bagi perangkat daerah untuk memastikan sistem arsip yang terstruktur dan efisien.
Minimnya kompetensi SDM OPD untuk mengakses informasi publik dalam laman website pemda	Minimnya Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Muna Barat	Memberikan pelatihan intensif bagi SDM OPD mengenai pengelolaan dan akses informasi publik melalui website pemda untuk meningkatkan kemampuan dan efisiensi
minimnya kompetensi SDM Aparatur pada masing-masing OPD dalam pengolahan data statistik sektoral		Mengadakan pelatihan rutin dan sertifikasi bagi aparatur OPD untuk meningkatkan keterampilan dalam pengolahan data statistik sektoral
Belum adanya aparatur yang memiliki kompetensi bidang persandian		Menyelenggarakan pelatihan khusus di bidang persandian dan merekrut aparatur yang memiliki kompetensi di bidang tersebut

Akar Permasalahan	Inti Permasalahan	Solusi
Belum optimalnya kinerja kelembagaan pemerintahan desa	Masih rendahnya inovasi dan kolaborasi dalam proses pembangunan desa	Memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintahan desa melalui pelatihan, peningkatan sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi untuk efisiensi kerja
Minimnya peran serta masyarakat dalam pembangunan desa		Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui program sosialisasi, pemberdayaan, dan penyuluhan agar mereka lebih aktif dalam proses pembangunan desa.
Belum optimalnya sinergitas antara prioritas pembangunan desa dan pembangunan Kabupaten		memperkuat koordinasi antara pemerintah desa dan kabupaten melalui forum rutin untuk menyelaraskan prioritas dan rencana pembangunan
Masih rendahnya daya saing dan kemandirian masyarakat desa baik dari sisi ekonomi maupun non ekonomi		Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi dan non-ekonomi melalui pelatihan keterampilan, akses pasar, dan penguatan jejaring sosial di tingkat desa

Ketahanan pangan merupakan isu strategis dalam pembangunan suatu wilayah dan Kabupaten Muna Barat tidak luput dari sejumlah permasalahan yang mempengaruhi sektor ini. Pertama, tingginya perubahan fungsi lahan persawahan menjadi lahan perkebunan menjadi kekhawatiran serius, mengingat sawah yang berkurang dapat mengancam ketersediaan bahan pangan pokok. Kedua, luasnya lahan kritis dan pekarangan yang masih belum dimanfaatkan secara optimal untuk tanaman pangan dapat menjadi potensi besar yang belum tergarap sepenuhnya. Tantangan ketiga muncul dari kurangnya pengembangan keanekaragaman pangan lokal, yang dapat mengakibatkan ketidakberagaman sumber pangan dan meningkatkan resiko kerentanan pangan. Selain itu, minimnya sarana dan prasarana produksi tanaman pangan membatasi produktivitas petani, menghambat peningkatan hasil pertanian.

Masalah terakhir berkaitan dengan belum optimalnya peran penyuluh dalam membina petani. Kurangnya dukungan dan bimbingan kepada petani dapat menghambat implementasi praktek pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dan terpadu untuk mengatasi permasalahan di sektor pangan, melibatkan peran aktif pemerintah, petani, dan pemangku kepentingan lainnya guna menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan, resilien, dan mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan baik.

Tabel 3. 5 Akar Permasalahan dan Inti Permasalahan Bidang Pangan

Akar Permasalahan	Inti Permasalahan	Solusi
Relatif tingginya perubahan fungsi lahan persawahan menjadi lahan perkebunan	Belum Optimalnya Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Lahan Pertanian	Memperkuat regulasi perlindungan lahan pertanian, memberikan insentif untuk mempertahankan lahan sawah, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya ketahanan pangan
Relatif luasnya lahan kritis dan lahan pekarangan yang belum dimanfaatkan untuk tanaman pangan		mengembangkan program rehabilitasi lahan kritis dan pemberdayaan petani untuk memanfaatkan lahan pekarangan dengan tanaman pangan yang cocok dan ramah lingkungan
Kurangnya pengembangan keanekaragaman pangan lokal		Mempromosikan dan mendukung penelitian serta pemanfaatan pangan lokal melalui program edukasi dan peningkatan akses pasar untuk produk pangan lokal
Minimnya sarana dan prasarana produksi tanaman pangan		Meningkatkan akses petani terhadap sarana dan prasarana pertanian melalui subsidi, kemitraan, dan penyediaan fasilitas yang memadai
Belum optimalnya peran penyuluh dalam membina petani	Minimnya upaya pemberdayaan petani	Meningkatkan kapasitas penyuluh melalui pelatihan rutin dan memperkuat komunikasi antara penyuluh dan petani untuk memberikan bimbingan yang lebih efektif

Lingkungan yang sehat dan berkelanjutan merupakan elemen krusial dalam pembangunan suatu wilayah. Namun, Kabupaten Muna Barat menghadapi sejumlah permasalahan signifikan yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan. Pertama, belum optimalnya pengelolaan sampah melalui sistem 3R (Reduce, Reuse, Recycle) menjadi tantangan serius dalam menghadapi dampak lingkungan negatif dari peningkatan produksi sampah. Kondisi ini dapat berpotensi menciptakan ketidakseimbangan ekologis dan merugikan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, pengelolaan keanekaragaman hayati dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih belum optimal, yang dapat berdampak pada kerusakan habitat alami dan hilangnya ruang terbuka yang penting untuk kesehatan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Masalah ketiga terkait dengan rendahnya data yang tercatat pada AKSARA Bappenas terkait efek rumah kaca. Ketidakpastian data mengenai emisi gas rumah kaca dapat menghambat upaya mitigasi perubahan iklim dan perencanaan adaptasi yang efektif. Oleh karena itu, upaya bersama dan perbaikan dalam pengelolaan sampah, konservasi keanekaragaman hayati, serta pemantauan yang akurat terhadap emisi gas rumah kaca menjadi

imperatif untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan sehat di Kabupaten Muna Barat.

Tabel 3. 6 Akar Permasalahan dan Inti Permasalahan Bidang Lingkungan

Akar Permasalahan	Inti Permasalahan	Solusi
Belum optimalnya pengelolaan sampah sistem 3R	Pengelolaan lingkungan hidup yang belum optimal	Meningkatkan edukasi masyarakat, menyediakan fasilitas pemilahan sampah, dan memperkuat kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta dalam implementasi sistem 3R
Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman hayati dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Memperkuat kebijakan konservasi, meningkatkan pembangunan RTH, dan melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati secara berkelanjutan
Masih rendahnya data yang tercatat pada AKSARA Bappenas terkait efek rumah kaca		Meningkatkan koordinasi antara instansi terkait untuk memperbaiki pengumpulan, pemantauan, dan pelaporan data efek rumah kaca secara lebih sistematis dan terintegrasi

3.2. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas yaitu daerah atau masyarakat di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi atau kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan atau keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dalam rangka untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis maka diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Isu strategis dapat diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu:

- 1) Permasalahan Pembangunan Nasional, Provinsi, hingga pada tingkat Daerah;
- 2) Dinamika Internasional, Nasional, dan regional yang mempengaruhi pembangunan Daerah; dan
- 3) Dokumen Perencanaan Daerah.

Olehnya itu, analisis mengenai isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Berikut beberapa isu strategis yang dimiliki baik pada tingkat nasional, provinsi, hingga tingkat daerah di Kabupaten Muna Barat.

a. Isu Strategis Global

1. Konflik Internasional Antara Negara Rusia dan Negara Ukraina

Terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina cukup mengguncang dunia terutama dalam bidang politik global dan pasar internasional sehingga mengancam terjadi krisis global, hal ini membawa tantangan baru ke dalam hubungan internasional. Kejadian ini tentu sangat berdampak jangka panjang terhadap ekonomi di seluruh dunia. Invasi Rusia terhadap Ukraina menjadiperistiwa global terkini yang sangat mempengaruhi seluruh negara di dunia. Invasi terhadap Ukraina oleh Rusia secara resmi dilakukan pada tanggal 24 Februari 2022, yang kemudian hal ini menandai kembali terjadinya perang yang terakhir kali terjadi di Eropa sejak tahun 1945 sehingga perang antara Rusia dan Ukraina ini memiliki implikasi yang sangat besar bagi pasar global yang memiliki potensi menghasilkan dampak yang berjenjang pada ekonomi di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan Rusia dan Ukraina memiliki peranan yang sangat besar pada pasar minyak, gas, gandum, energi, makanan, dan pupuk global.

perang antara Rusia dan Ukraina memiliki pengaruh dalam perekonomian antara negara di seluruh dunia dan salah satunya yang berpengaruh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Perang yang terjadi mengakibatkan kenaikan harga minyak dunia hal ini yang sangat mempengaruhi perekonomian dunia. Diketahui bahwa terdapat beberapa kenaikan harga komoditas seperti minyak bumi, gas bumi dan hasil pertambangan yang dikenakan kepada seluruh dunia. Negara-negara di Asia Tenggara menjadi negara yang cukup bergantung pada Rusia dalam hal komoditas minyak bumi karena letak geografis yang tidak terlalu jauh jika dibandingkan dengan Amerika Serikat. Rusia menjadi salah satu yang memiliki peran sangat besar di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, Rusia memiliki

keterikatan dengan beberapa negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Indonesia dan Thailand dalam hal hubungan perekonomian dan militer. Berdasarkan hubungan ekonomi yang terjalin antara Vietnam dan Rusia mendapatkan total perekonomian lebih dari 2% PDB. Selain itu, Indonesia dan Thailand memiliki total perdagangan sekitar 1% PDB. Meskipun, perekonomian seluruh dunia berdampak atas perang yang terjadi dimana mendapatkan kurang dari 1% PDB, tetapi ketiga Negara ini memiliki hubungan ekonomi yang cukup erat. Selain itu, Vietnam, Indonesia dan Thailand juga menjadi negara yang memiliki hubungan militer yang cukup dekat seperti pembelian alutsista dan lain sebagainya.

2. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Dengan terbentuknya kawasan ekonomi terintegrasi di wilayah Asia Tenggara yang dikenal dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC), Indonesia dan sembilan anggota ASEAN lainnya memasuki persaingan yang sangat ketat di bidang ekonomi. Pada dasarnya, MEA merupakan wadah yang sangat penting bagi kemajuan negara-negara ASEAN dalam mewujudkan kesejahteraan sehingga keberadaannya harus disikapi dengan positif. Dan diharapkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara bisa berkompetisi dan bisa menempatkan ASEAN masuk ke dalam pasar terbesar di dunia.

Sebagai masyarakat yang dinamis, sudah selayaknya kita harus bisa melihat lebih banyak dampak positif dari adanya pasar bebas Asia Tenggara atau MEA. ASEAN Economic Community atau MEA secara garis besar terfokus dalam empat hal, yaitu:

- a) MEA sebagai pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara yang difungsikan sebagai sebuah kawasan kesatuan pasar dan basis produksi. Terciptanya kesatuan pasar dan basis produksi tersebut akan menghilangkan batasan terhadap arus barang, investasi, modal, jasa, dan tenaga profesional antar negara di Asia Tenggara.
- b) MEA berorientasi untuk membentuk kawasan ekonomi yang memiliki daya saing tinggi dengan kebijakan-kebijakan, perlindungan konsumen, dan berbagai macam perjanjian untuk saling menciptakan kondisi ekonomi yang adil.
- c) Menumbuhkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang

memiliki daya saing tinggi serta ditunjang dengan kemudahan dalam mendapatkan modal.

- d) MEA terintegrasi dengan perekonomian global sehingga jangkauan pasar yang diraih negara-negara di kawasan Asia Tenggara jauh lebih optimal.

Dengan demikian, negara peserta ditantang untuk bersaing secara ketat satu sama lain. Pasar bebas harus disadari betul kondisinya agar terus bisa mengembangkan kemampuan dalam mengikuti persaingan di bidang apa pun. Banyak peluang yang bisa diambil dari MEA seperti yang dijabarkan berikut ini.

3. Perubahan Iklim

Perubahan iklim diduga kuat terjadi akibat terjadinya pemanasan global. Perubahan iklim merupakan berubahnya kondisi temperatur atau suhu dan pola cuaca dengan jangka waktu yang panjang. Diperkirakan terjadinya peningkatan suhu global sebagai akumulasi dari meningkatnya emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari berbagai sumber emisi, khususnya dari pemanfaatan energi fosil untuk pelaksanaan aktivitas manusia. Sejak revolusi industri, emisi GRK mengalami peningkatan yang sangat cepat, khususnya gas karbondioksida (CO₂), metana (CH₄), nitrous oksida (N₂O). Gas-gas ini memiliki sifat seperti kaca sehingga adanya gas ini di atmosfer akan menimbulkan efek rumah kaca.

Di Indonesia, cuaca ekstrim lebih banyak terjadi yang mengganggu kegiatan ekonomi. Para petani dan nelayan tidak dapat lagi menentukan masa tanam, masa panen dan masa melaut yang dapat menghasilkan tangkapan optimal. Banjir dan kekeringan sudah terjadi dimana-mana serta kejadian banjir rob juga telah lebih sering dialami masyarakat kota yang berlokasi di pinggir laut. Gelombang panas (El Nino) yang menyebabkan kebakaran gambut dan gelombang basah (La Nina) yang menyebabkan banjir sudah mengalami perubahan masa terjadinya.

4. Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan

kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjagakualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kalimat kuncinya adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (sosial, ekonomi dan lingkungan).

Untuk menjamin implementasi TPB/SDGs berjalan dengan baik, ada beberapa prinsip yang telah disepakati juga diadopsi oleh Indonesia. Prinsip pertama adalah universality. Prinsip ini mendorong penerapan TPB/SDGs di semua negara baik negara maju maupun negara berkembang. Dalam konteks nasional, implementasi TPB/SDGs akan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Prinsip kedua adalah integration.

b. Isu Strategis Nasional

1. Lingkungan Hidup

Gambaran lingkungan Indonesia berdasarkan Buku Status Lingkungan Hidup Indonesia 2020 berdasarkan 3 (tiga) matra utama, yakni lahan, air dan udara, adalah sebagai berikut:

1) Lahan

a) Tata Guna Lahan/Luas Tutupan Lahan

Luas seluruh daratan Indonesia pada tahun 2019 adalah 187,8 juta Ha yang tersebar 6 (enam) kelompok pulau/ kepulauan besar (ekoregion) atau 34 provinsi. Daratan Indonesia ini terbagi atas lahan berhutan seluas 94,1 juta Ha atau 50,0% dari luas total daratan

b) Deforestasi

Deforestasi di Indonesia selama periode tahun 2014 – 2019 memperlihatkan tren penurunan, dari 1,09 juta Ha pada tahun 2014 menjadi 0,46 juta Ha pada tahun 2019. Untuk periode tahun yang sama, deforestasi lahan terbesar terjadi pada ekoregion Kalimantan (0,1491 juta Ha), diikuti Sumatera (0,0897

juta Ha), Papua (0,0774 Ha), dan Sulawesi – Maluku (0,0764 juta Ha).

c) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Indeks Kualitas Tutupan Lahan atau IKTL merupakan indeks yang menggambarkan kinerja pengelolaan tutupan lahan termasuk di dalamnya aspek konservasi, rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial yang disajikan secara sederhana sehingga mudah dipahami. IKTL nasional yang dicapai pada tahun 2015 adalah 58,30, menurun menjadi 56,88 pada tahun 2017. Angka IKTL kemudian memperlihatkan tren peningkatan menjadi 61,03 pada tahun 2018 dan 62,0 pada tahun 2019.

2) Air

a) Kuantitas Air

Sumber daya air yang tersedia di wilayah Indonesia mencapai 3,9 triliun m³/tahun, menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari 10 negara kaya air. Akan tetapi yang dapat dimanfaatkan sebesar 17,69% dari total sumber daya air yang tersedia atau 691,3 juta m³/tahun. Sekitar 25,30% dari 691,3 juta m³/tahun air, sebagian besar dimanfaatkan sebagai sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan irigasi, sedangkan sisanya untuk memenuhi kebutuhan domestik, perkotaan, dan industri, serta sebagai sumber energi terbarukan dari sumber daya air, yang meliputi:

b) Kualitas Air

Secara umum, indeks kualitas air Indonesia pada tahun 2015 menunjukkan secara nasional kualitas air sungai prioritas berada dalam kualitas cukup baik dengan angka IKA sebesar 65,86, yang kemudian turun menjadi 58,68 pada tahun 2017.

3) Udara

Pencemaran udara di wilayah perkotaan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia. Kecenderungan penurunan kualitas udara di beberapa kota besar di Indonesia telah terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Kebutuhan akan transportasi dan energi yang semakin meningkat, sejalan dengan bertambahnya jumlah

penduduk memberikan konsekuensi meningkatnya pencemaran udara yang berpotensi memberikan dampak pada kesehatan manusia dan lingkungan.

2. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

c. Isu Strategis Sulawesi Tenggara

Bagian ini menjelaskan isu-isu strategis berdasarkan penelaahan dari gambaran kondisi daerah, isu global, dan nasional, maka diidentifikasi isu strategis pembangunan Sulawesi Tenggara kedepan, sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi Belum Inklusif

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan belum cukup apabila tidak diikuti dengan pembangunan ekonomi yang memperhatikan kualitas kehidupan, yaitu pertumbuhan inklusif. Pertumbuhan inklusif merupakan pertumbuhan yang menuntut adanya partisipasi bagi semua pihak agar turut andil dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, sehingga ketika perekonomian mulai tumbuh maka kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran akan mengalami penurunan.

2. Penurunan Angka Kemiskinan

Kemiskinan tidak hanya merupakan isu daerah atau nasional, bahkan merupakan isu global yang menjadi kesepakatan negara-negara yang

tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa pada September 2015. Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (the 2030 Agenda for Sustainable Development (SDGs)) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.

3. Mengurangi Ketimpangan Antarkelompok dan Antarwilayah

Ketimpangan antarkelompok meliputi ketimpangan sosial dan ekonomi mencakup akses terhadap pendidikan yang kurang merata, kesenjangan dalam akses kesehatan dan pelayanan medis, serta ketimpangan lapangan kerja dan upah yang tidak adil. Infrastruktur yang tidak merata juga menjadi faktor yang memperburuk kesenjangan antar daerah. Ketimpangan sosial dan ekonomi ini menghambat potensi pembangunan sosial dan mengancam keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Faktor penyebab yang menjadi ketimpangan tersebut antara lain kondisi demografi yang memiliki perbedaan, kondisi pendidikan yang tidak merata, kurangnya lapangan kerja, dan perbedaan status sosial di masyarakat.

4. Daya Saing dan Produktivitas Tenaga Kerja Tenaga Kerja Belum Optimal

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan ekonomi didasarkan pada sistem ekonomi kerakyatan dan pengembangan sektor unggulan, terutama yang banyak menyerap tenaga kerja dan berorientasi pada ekspor yang didukung dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi untuk memperkuat landasan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing serta berorientasi pada globalisasi ekonomi.

5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan

Meningkatnya angka RLS dan HLS ini tentunya seiring dengan

memadainya fasilitas pendidikan. Kedepan, fasilitas pendidikan harus semakin baik karena dilembaga itulah akan melahirkan manusia yang menjadi masadepan bangsa. sarana kesehatan, serta tenaga kesehatan, yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat di seluruh kabupaten/kota.

6. Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Penunjang lainnya.

Pembangunan ekonomi sering didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan pendapatan riil per kapita dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan struktur sosial dan perubahan sikap serta perilaku masyarakat, perbaikan sistem kelembagaan (ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya). Adanya pembangunan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

7. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Titik krusial dalam tata kelola pemerintahan adalah keterbukaan informasi dan transparansi publik, akuntabilitas kinerja pembangunan, keterlibatan masyarakat dalam merencanakan kebijakan, dan adanya koordinasi antara pemangku kebijakan dalam mencapai tujuan dalam mewujudkan visi. Kondisi tersebut harus didukung dengan profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Penyediaan ruang informasi dan pengaduan masyarakat harus semakin transparan dan mudah diakses.

8. Mitigasi Bencana Menuju Pembangunan Berkelanjutan

Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan daerah yang dikategorikan wilayah rawan bencana, antar lain: bencana tanah longsor, gelombang pasang, rawan banjir, rawan gempa bumi, rawan gerakan tanah, rawan tsunami, dan rawan abrasi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tetap fokus dalam upaya mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana tersebut yang dapat terjadi setiap saat dan dapat berdampak besar yang tidak dapat diprediksisebelumnya, maka harus terus melakukan Mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan

fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Pembangunan berkelanjutan merupakan isu krusial yang harus diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah, termasuk dalam RPJPD.

d. Isu Strategis Kabupaten Muna Barat

1. Kualitas Sumber Daya Manusia

1) Kualitas SDM yang masih rendah

Kabupaten Muna Barat menghadapi keterbatasan pembangunan sumber daya manusia yang signifikan di berbagai aspek, salah satunya disebabkan oleh belum meratanya akses dan kualitas pelayanan pendidikan. Terbatasnya akses fisik ke lembaga pendidikan dan ketidaksetaraan dalam mutu pendidikan juga menjadi hambatan serius dalam pengembangan potensi anak-anak dan pemuda di Kabupaten Muna Barat. Kendala ini dapat membatasi kesempatan mereka untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, yang pada masanya dapat berdampak pada kemajuan ekonomi dan sosial di tingkat lokal. Selain itu, rendahnya literasi masyarakat dan kurangnya partisipasi serta perkembangan optimal dalam pembinaan kepemudaan dan olahraga dapat menambah keterbatasan sumber daya manusia di aspek kognitif, sosial, dan fisik.

Selanjutnya, belum optimalnya sistem kesehatan masyarakat menjadi kendala serius dalam membangun sumber daya manusia yang sehat dan produktif. Keterbatasan dalam penyediaan layanan kesehatan, termasuk obat dan perbekalan kesehatan, dapat berdampak negatif pada tingkat kesehatan masyarakat. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas kesehatan dan reproduksi juga menjadi kendala dalam pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Muna Barat. Kurangnya pemahaman tentang praktik hidup sehat, perawatan kesehatan reproduksi, dan pentingnya peran individu dalam menjaga kesehatan dapat mengakibatkan penyebaran penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko penyakit serta mengurangi produktivitas dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya yang terkoordinasi dari pemerintah daerah, lembaga pendidikan, penyedia layanan kesehatan, dan organisasi kepemudaan. Program-program pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas

pendidikan, serta kampanye kesehatan dan literasi dapat menjadi langkah-langkah strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang lebih unggul di Kabupaten Muna Barat.

2) Belum optimalnya Sistem Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana

Belum optimalnya Sistem Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Muna Barat merupakan hasil dari beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah rendahnya efektivitas pembinaan pengendalian kependudukan menjadi pemicu utama. Ketidakmaksimalan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya mengendalikan pertumbuhan penduduk dapat mempengaruhi kesadaran dan partisipasi masyarakat. Diperlukan upaya nyata dalam meningkatkan pendekatan pembinaan yang lebih terarah dan terfokus agar informasi dan pemahaman mengenai kebijakan pengendalian kependudukan dapat tersebar secara luas dan di terima dengan baik oleh masyarakat.

Kedua, permasalahan terkait dengan pelaksanaan advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dalam program Keluarga Berencana. Upaya advokasi yang belum optimal dan kurangnya edukasi kepada masyarakat mengenai Keluarga Berencana dapat menghambat penyebaran informasi dan pemahaman yang benar. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan strategi komunikasi yang lebih efektif, melibatkan berbagai pihak, seperti lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil, guna mendukung keberhasilan program Keluarga Berencana dan Sistem Pengendalian Kependudukan secara keseluruhan.

Permasalahan yang ketiga adalah belum optimalnya pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga. Pelayanan yang belum memadai dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga, seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, dapat menghambat kesuksesan program keluarga berencana. Diperlukan pembenahan dalam penyediaan layanan yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk meningkatkan ketahanan dan pemberdayaan keluarga. Kesenambungan inilah yang akan membantu mewujudkan sistem pengendalian kependudukan dan Keluarga Berencana yang lebih optimal di Kabupaten Muna Barat.

3) **Belum Terpenuhinya Kesetaraan dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak**

Ketidaksetaraan partisipasi gender dalam politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan di Kabupaten Muna Barat ditunjukkan oleh partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan masih rendah, baik dalam ranah politik maupun ekonomi. Ketidaksetaraan ini menciptakan ketidakseimbangan dalam representasi dan pengambilan kebijakan, sehingga suara perempuan kurang terdengar. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk mendorong peningkatan partisipasi perempuan di berbagai bidang, termasuk penyediaan peluang dan dukungan untuk melibatkan mereka secara aktif dalam kehidupan politik dan ekonomi.

Selanjutnya, Kabupaten Muna Barat juga belum memiliki sistem penanganan terpadu untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga menjadi kendala dalam memberikan perlindungan yang memadai. Tanpa sistem yang terpadu, penanganan kasus kekerasan dapat menjadi terfragmentasi dan kurang efektif. Perlu adanya upaya serius dalam mengintegrasikan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga perlindungan perempuan dan anak, kepolisian, dan sektor kesehatan, untuk bekerja sama dalam menangani kasus kekerasan. Penguatan kerjasama ini dapat menciptakan pendekatan yang holistik dan mendukung korban kekerasan dengan lebih baik.

Terakhir, perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu kesetaraan dan perlindungan perempuan dan anak. Edukasi dan kampanye informasi yang menyeluruh dapat membantu mengubah norma dan perilaku yang mendukung kekerasan dan ketidaksetaraan. Melalui pendekatan ini, masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang lebih aktif dalam mendukung hak-hak perempuan dan anak serta berperan dalam mencegah kekerasan. Pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan informasi dapat menjadi landasan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi perempuan dan anak.

2. **Keamanan dan Kenyamanan**

1) **Keterbatasan dalam pengelolaan dan penanganan darurat di Kabupaten Muna Barat**

Kabupaten Muna Barat menghadapi permasalahan terkait keterbatasan dalam pengelolaan dan penanganan darurat. Permasalahan pertama adalah masih minimnya kuantitas dan kompetensi sumber daya aparatur petugas trantibum-linmas dan petugas

pemadam kebakaran. Dengan jumlah petugas yang terbatas, pengawasan dan penanganan kejadian darurat, seperti kebakaran atau insiden lainnya, menjadi sulit dilaksanakan secara efektif. Kuantitas yang kurang memadai dapat memperlambat respon terhadap situasi darurat, meningkatkan resiko kerugian, dan mengurangi tingkat keamanan masyarakat.

Permasalahan kedua adalah keterbatasan sarana dan prasarana dalam layanan trantibum-linmas, pemadam kebakaran, dan penanganan bencana alam di Kabupaten Muna Barat. Kurangnya peralatan, kendaraan, dan fasilitas yang memadai dapat menghambat upaya evakuasi, pemadaman kebakaran, dan penanganan korban bencana. Keterbatasan ini memperumit tugas petugas darurat dalam memberikan respon cepat dan efisien terhadap situasi darurat yang mungkin timbul.

Secara keseluruhan, keterbatasan kuantitas dan kompetensi petugas, bersama dengan keterbatasan sarana dan prasarana, menciptakan tantangan yang signifikan dalam pengelolaan dan penanganan darurat di Kabupaten Muna Barat. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan investasi dalam peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia, penyediaan peralatan dan fasilitas yang memadai, serta perencanaan yang matang dalam penanggulangan bencana. Upaya ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat setempat.

3. Kebudayaan

1) **Belum optimal pelestarian budaya dan peninggalan sejarah sebagai identitas masyarakat lokal**

Salah satu permasalahan pada aspek kebudayaan di Kabupaten Muna Barat adalah belum optimalnya pelestarian budaya dan peninggalan sejarah sebagai identitas masyarakat lokal, yang dipicu oleh belum adanya penetapan Cagar Budaya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tanpa penetapan resmi ini, banyak potensi cagar budaya dan peninggalan sejarah yang mungkin tidak mendapatkan perlindungan dan perhatian yang memadai, meninggalkan resiko kerusakan dan kehilangan identitas budaya masyarakat setempat.

Permasalahan kedua terkait dengan belum tersedianya museum sebagai sarana untuk melestarikan benda-benda sejarah dan cagar budaya yang ada. Museum memiliki peran krusial dalam menjaga dan memamerkan warisan budaya, tetapi keberadaan museum di Kabupaten Muna Barat masih terbatas. Tanpa adanya museum, upaya untuk menyajikan dan memahami nilai-nilai sejarah serta kekayaan budaya lokal

menjadi terhambat. Pembangunan museum dan penetapan Cagar Budaya menjadi langkah strategis untuk memastikan pelestarian yang optimal terhadap aset budaya dan sejarah masyarakat lokal, sekaligus meningkatkan pemahaman serta apresiasi terhadap warisan tersebut.

4. Kemiskinan

1) Belum optimalnya manajemen dan upaya penanggulangan kemiskinan

Kabupaten Muna Barat memiliki tantangan dalam manajemen dan upaya penanggulangan kemiskinan. Salah satu permasalahan utamanya adalah ketidaksetaraan akses terhadap aset produktif bagi rumah tangga miskin. Rumah tangga miskin seringkali memiliki minimnya kepemilikan aset produktif seperti lahan pertanian, modal usaha, atau properti. Ketidaksetaraan ini menciptakan ketidaksetaraan dalam peluang ekonomi, sehingga menyulitkan mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan langkah-langkah konkret seperti pemberian bantuan modal, pelatihan, dan pendampingan agar rumah tangga miskin dapat memiliki akses dan memanfaatkan aset produktif dengan lebih efektif.

Selanjutnya, keterbatasan sistem penanganan terpadu dan manajemen data untuk penanggulangan kemiskinan menjadi hambatan serius dalam memahami dan mengatasi masalah kemiskinan. Kurangnya integrasi data antar instansi dan manajemen data yang tidak efisien menghambat identifikasi dan pemahaman mendalam terhadap kondisi kemiskinan di tingkat rumah tangga. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan infrastruktur sistem informasi yang dapat mengintegrasikan data dengan baik. Sistem yang lebih efektif dapat memudahkan pemantauan dan evaluasi serta mendukung pengambilan kebijakan yang lebih akurat dalam penanggulangan kemiskinan.

Selain itu, terdapat juga permasalahan terkait pemberdayaan dan layanan sosial yang masih belum optimal. Pemberdayaan masyarakat miskin melalui program-program yang mendukung peningkatan kapasitas dan keterampilan mereka perlu diperkuat. Langkah-langkah nyata seperti memberikan pelatihan keterampilan, bantuan modal, dan mendukung usaha mikro dapat meningkatkan kemampuan ekonomi rumah tangga miskin. Selain itu, peningkatan kualitas layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan sangat penting untuk memberikan dukungan holistik kepada masyarakat miskin. Kolaborasi yang erat antar berbagai pihak, termasuk

pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan sektor swasta, perlu ditingkatkan agar pemberdayaan dan layanan sosial dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

5. Daya Saing Ekonomi

1) Belum Optimalnya Ekosistem Investasi dan Usaha Daerah

Terdapat beberapa permasalahan yang menghambat optimalnya ekosistem investasi dan usaha daerah di Kabupaten Muna Barat. Salah satu permasalahan utamanya adalah belum efektifnya promosi investasi di daerah. Promosi yang kurang optimal dapat menghambat daya tarik daerah bagi investor, sehingga peluang investasi yang sebenarnya potensial tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Diperlukan strategi promosi investasi yang lebih proaktif dan terarah untuk menarik minat investor, baik dari dalam maupun luar daerah.

Kendala selanjutnya terletak pada ketiadaan regulasi yang mengatur iklim usaha di daerah. Keberadaan regulasi yang jelas dan mendukung bisnis menjadi faktor kunci dalam membentuk lingkungan usaha yang kondusif. Tanpa regulasi yang memadai, pelaku usaha akan menghadapi ketidakpastian hukum dan peraturan, yang dapat menghambat perkembangan usaha dan investasi. Oleh karena itu, penyusunan regulasi yang jelas dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal sangat penting untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Selain itu, masih rendahnya layanan perizinan dan non-perizinan juga menjadi permasalahan serius. Layanan yang lambat dan tidak efisien dapat menghambat proses investasi dan pertumbuhan usaha. Peningkatan kualitas dan efisiensi layanan perizinan, seperti proses perizinan yang transparan dan cepat, serta pelayanan non-perizinan yang mendukung kebutuhan usaha, menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing daerah dalam menarik investasi dan mendukung pertumbuhan sektor ekonomi lokal.

2) Terbatasnya Pengembangan Kapasitas dan Dukungan bagi UMKM dan Koperasi

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pengembangan kapasitas dan dukungan bagi UMKM dan Koperasi di Kabupaten Muna Barat adalah rendahnya kemampuan pengelola Koperasi dan pelaku UMKM dalam kewirausahaan dan pengembangan produktivitas. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola usaha menyebabkan keterbatasan dalam strategi pengembangan dan pemasaran produk, serta pengelolaan aspek keuangan. Oleh karena itu, dibutuhkan program pelatihan dan pendampingan yang komprehensif untuk meningkatkan

kapasitas pengelola dan pelaku UMKM, termasuk pemahaman tentang manajemen usaha dan inovasi produk.

Permasalahan lain yang turut mempengaruhi UMKM dan Koperasi adalah masih rendahnya akses permodalan bagi pelaku usaha. Keterbatasan dana dapat menjadi hambatan serius dalam pengembangan dan perluasan usaha. Pentingnya menciptakan skema pembiayaan yang inklusif, baik melalui kerjasama dengan lembaga keuangan maupun melalui program pemerintah yang mendukung pembiayaan mikro dan kecil. Selain itu, pelaku UMKM dan Koperasi juga perlu didorong untuk memahami dan memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan alternatif.

Belum optimalnya kemitraan usaha antara Koperasi dan UMKM dengan pelaku usaha lainnya juga menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan. Kerjasama yang kuat dan saling mendukung antar-pelaku usaha dapat menciptakan sinergi yang memperkuat ekosistem UMKM dan Koperasi. Inisiatif pemerintah dan lembaga terkait dapat membantu memfasilitasi pembentukan kemitraan yang saling menguntungkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan demikian, akan tercipta lingkungan bisnis yang mendukung bagi UMKM dan Koperasi di Kabupaten Muna Barat.

3) Daya saing tenaga kerja yang masih rendah

Daya saing tenaga kerja di Kabupaten Muna Barat menghadapi tantangan signifikan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Salah satu permasalahan utamanya adalah masih rendahnya skill pencari tenaga kerja di daerah tersebut. Keterbatasan dalam keahlian dan keterampilan pekerja dapat membatasi peluang pekerjaan yang tersedia, terutama di sektor-sektor yang membutuhkan tingkat keahlian khusus. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualifikasi melalui program pelatihan dan pendidikan kejuruan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal.

Permasalahan lain yang turut berkontribusi terhadap rendahnya daya saing tenaga kerja adalah belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Infrastruktur yang tidak memadai, seperti transportasi, ketersediaan fasilitas pelatihan, dan aksesibilitas ke pusat-pusat industri, dapat menghambat pengembangan keterampilan tenaga kerja dan membatasi pertumbuhan sektor-sektor tertentu. Diperlukan investasi dalam pengembangan infrastruktur untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan ekonomi.

Selanjutnya, pelaksanaan pelatihan tenaga kerja yang belum didasarkan pada kebutuhan pasar tenaga kerja juga menjadi permasalahan. Diperlukan koordinasi yang lebih baik antara lembaga pelatihan, pemerintah daerah, dan pelaku industri untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja dan menyelaraskan program pelatihan dengan permintaan pasar kerja. Hal ini akan membantu menjamin bahwa tenaga kerja yang dihasilkan memiliki keterampilan yang relevan dan dapat bersaing di tingkat lokal maupun nasional. Dengan mengatasi ketiga permasalahan tersebut, diharapkan daya saing tenaga kerja di Kabupaten Muna Barat dapat meningkat, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi tingkat pengangguran.

4) Keterbatasan sumber daya dan penerapan IPTEKIN dalam pengembangan ekonomi industri

Penerapan Inovasi, Penelitian, dan Teknologi (IPTEKIN) dalam pengembangan ekonomi industri dianggap strategis ke depan karena memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing suatu wilayah. Melalui IPTEKIN, dapat dilakukan upaya pengembangan produk dan proses inovatif dalam sektor industri, meningkatkan efisiensi produksi, serta mempercepat adaptasi terhadap perubahan pasar global. Selain itu, IPTEKIN juga dapat menjadi katalisator untuk menciptakan industri-industri baru yang berbasis pengetahuan dan teknologi tinggi, memberikan peluang lapangan kerja berkualitas, serta meningkatkan nilai tambah produk dan jasa. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan inovasi, penerapan IPTEKIN tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga membangun fondasi ekonomi yang berkelanjutan dan tahan terhadap perubahan zaman.

Keterbatasan sumber daya finansial dan manusia menjadi kendala utama dalam penerapan IPTEKIN di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Muna Barat yang masih mengalami keterbatasan dana untuk investasi dalam riset dan pengembangan teknologi industri, serta kurangnya sumber daya manusia yang terampil dalam bidang IPTEKIN. Selain itu, ketidakpastian regulasi dan kebijakan pemerintah lokal juga menjadi perhatian. Kebijakan yang tidak konsisten atau kurang mendukung pengembangan industri berbasis IPTEKIN dapat menjadi hambatan serius. Tingginya resiko pada proyek inovatif dan kurangnya kesadaran akan manfaat IPTEKIN juga dapat membuat pelaku industri enggan untuk mengambil resiko dan berinvestasi dalam perubahan teknologi. Terlebih produk-produk industri di

Kabupaten Muna Barat masih sulit untuk menembus pasar yang lebih luas. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi.

Untuk mengatasi tantangan ini, Kabupaten Muna Barat perlu mengidentifikasi prioritas pembangunan ekonomi berbasis IPTEKIN, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan meningkatkan koordinasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan. Langkah-langkah tersebut akan membantu menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi, memberikan insentif bagi pengembangan industri yang berkelanjutan, dan meningkatkan daya saing ekonomi lokal di Kabupaten Muna Barat.

5) Belum berkembangnya pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan (ekonomi biru, bioekonomi, dan ekonomi kreatif)

Pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan di Kabupaten Muna Barat, terutama melalui sektor ekonomi biru, bioekonomi, dan ekonomi kreatif, dianggap strategis ke depan karena membawa dampak positif secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pertama, sektor ekonomi biru memungkinkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya kelautan dengan cara yang berkelanjutan. Dengan melibatkan industri perikanan yang bijak, akuakultur, dan pariwisata laut yang berkelanjutan, ekonomi biru dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, dan memberikan kontribusi pada ketahanan pangan dan ekonomi wilayah.

Kedua, bioekonomi memberikan alternatif berkelanjutan dalam memanfaatkan sumber daya hayati dan biomassa. Dengan menggeser pola konsumsi dan produksi menuju solusi yang ramah lingkungan, bioekonomi dapat merangsang pertumbuhan ekonomi sambil mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pemanfaatan limbah organik untuk energi terbarukan, pengembangan bahan baku biomassa, dan pertanian berkelanjutan merupakan komponen-komponen strategis dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Terakhir, ekonomi kreatif dianggap strategis karena memiliki potensi untuk menjadi mesin inovasi dan kreativitas, mendorong diversifikasi ekonomi, dan meningkatkan daya saing wilayah. Sektor ini melibatkan seni, teknologi, desain, dan industri kreatif lainnya yang tidak hanya menciptakan nilai ekonomi tetapi juga memperkaya budaya lokal dan mempercepat transformasi digital. Dengan mengutamakan pembangunan ekosistem yang mendukung kreativitas dan inovasi,

ekonomi kreatif dapat menjadi pilar strategis dalam memajukan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi baru ini bukan hanya tentang penciptaan nilai ekonomi tetapi juga tentang menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan, menjadikannya strategis untuk keberlanjutan dan kemakmuran jangka panjang.

6. Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur

1) Keterbatasan infrastruktur dan fasilitas publik sebagai hambatan pembangunan berkelanjutan

Kabupaten Muna Barat memiliki tantangan dalam pembangunan berkelanjutan akibat keterbatasan infrastruktur dan fasilitas publik di berbagai sektor. Ketidakmerataan pemenuhan sarana/prasarana pembelajaran dapat mengganggu pengembangan pendidikan sebagai fondasi penting bagi pembangunan manusia. Kondisi ini yang kemudian akan menciptakan ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan. Belum tersedianya layanan perpustakaan yang didukung teknologi informasi juga turut menjadi faktor penghambat peningkatan kualitas pembelajaran karena membatasi kemampuan siswa dan masyarakat dalam mengakses informasi dan pengetahuan. Selain itu, rendahnya minat baca masyarakat dan kekurangan perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional, baik dari segi sarana prasarana, koleksi, SDM, maupun aspek-aspek perpustakaan lainnya juga membatasi masyarakat dalam mengakses sumber pengetahuan.

Keterbatasan infrastruktur di Kabupaten Muna Barat juga digambarkan dari belum optimalnya sarana/prasarana dan tenaga kesehatan dalam mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan layanan kesehatan bagi masyarakat di pulau-pulau kecil, yang menciptakan ketidaksetaraan dalam akses kesehatan. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pengembangan olahraga dan minimnya ketersediaan sarana dan prasarana trantibum-linmas, pemadam kebakaran, dan penanganan bencana alam menciptakan ketidaksiapan dalam menghadapi situasi darurat dan memitigasi resiko bencana. Diperlukan upaya komprehensif dan sinergis untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas publik di Kabupaten Muna Barat guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

2) Belum optimalnya pengelolaan dan penataan ruang di Kabupaten Muna Barat

Isu strategis yang dihadapi Kabupaten Muna Barat adalah belum optimalnya pengelolaan dan penataan ruang, yang disebabkan oleh beberapa faktor kunci. Pertama, terdapat kesenjangan antara kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam peraturan penataan ruang dengan implementasinya di lapangan. Kesenjangan ini mencakup pelanggaran peraturan tata ruang yang dapat berdampak negatif pada struktur dan kualitas lingkungan, serta dapat menghambat pembangunan berkelanjutan. Kurangnya keterpaduan antara peraturan dan pelaksanaan dapat menciptakan ketidakseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan.

Selanjutnya, kendala lain yang menjadi isu strategis adalah belum optimalnya penataan dan sertifikasi tanah dan lahan. Proses penataan dan sertifikasi tanah yang tidak maksimal dapat menciptakan ketidakpastian kepemilikan dan penggunaan lahan. Hal ini dapat menjadi kendala serius dalam merencanakan dan mengelola ruang secara efektif. Selain itu, tanah yang tidak bersertifikat dapat menjadi sumber konflik agraria dan dapat memperlambat investasi dan pembangunan wilayah.

Untuk mengatasi isu strategis ini, diperlukan langkah-langkah yang komprehensif, termasuk pembenahan peraturan penataan ruang agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Sertifikasi tanah dan lahan perlu dipercepat dengan melibatkan pihak terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk meningkatkan kepastian hukum dan mendukung pengelolaan ruang yang lebih efektif. Selain itu, perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai kesepakatan dan implementasi yang lebih baik dalam pengelolaan dan penataan ruang Kabupaten Muna Barat.

3) Belum optimalnya infrastruktur dan layanan transportasi dalam mendukung konektivitas daerah

Isu strategis yang dihadapi Kabupaten Muna Barat adalah belum optimalnya infrastruktur dan layanan transportasi yang mempengaruhi konektivitas daerah. Salah satu permasalahan utama adalah belum adanya layanan penyeberangan pelabuhan pengumpul regional yang menghubungkan Kabupaten Muna Barat dengan Daratan Kendari (Torobulu). Ketiadaan layanan penyeberangan ini menghambat aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah, mempersulit mobilitas penduduk serta distribusi

barang dan jasa antara Kabupaten Muna Barat dan wilayah sekitarnya, khususnya Daratan Kendari sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara.

Permasalahan selanjutnya terkait dengan ketidakmemadainya layanan pelabuhan pengumpan lokal di Pajala dan Latawe untuk mendukung mobilitas barang dan jasa antar Kabupaten Muna Barat dengan Kabupaten Sekitar (Pajala–Bombana dan Latawe-Torobulu). Kondisi ini dapat mengakibatkan keterbatasan dalam pertukaran ekonomi antar wilayah serta mempengaruhi pertumbuhan ekonomi lokal. Keseimbangan dan keberlanjutan dalam distribusi logistik dan aktivitas ekonomi menjadi terhambat akibat minimnya fasilitas pelabuhan yang memadai.

Selain itu, belum optimalnya layanan pelabuhan pengumpan lokal, terutama dermaga rakyat, menciptakan tantangan tambahan. Ujung causeway dermaga yang tidak mencapai titik surut terjauh menyulitkan armada kapal untuk berlabuh pada waktu air surut. Hal ini dapat menimbulkan gangguan pada keberlanjutan transportasi laut, menghambat kelancaran distribusi barang, dan merugikan aktivitas ekonomi lokal yang bergantung pada konektivitas maritim.

Langkah-langkah strategis perlu diambil untuk mengatasi isu ini. Diperlukan pembangunan layanan penyeberangan pelabuhan regional yang menghubungkan Kabupaten Muna Barat dengan Daratan Kendari untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas wilayah. Peningkatan layanan pelabuhan pengumpan lokal di Pajala dan Latawe juga menjadi penting untuk mendukung aktivitas ekonomi antar wilayah. Selain itu, optimalisasi layanan pelabuhan pengumpan lokal, termasuk dermaga rakyat, melibatkan rekayasa struktur untuk mengatasi kendala air surut perlu menjadi prioritas.

Selain transportasi perairan, transportasi darat di Kabupaten Muna Barat juga memiliki hambatan, yaitu belum tersediannya terminal tipe C sebagai pusat layanan angkutan umum. Penyediaan terminal tipe C sebagai pusat layanan angkutan umum di Kabupaten Muna Barat akan mendukung efisiensi dan aksesibilitas transportasi publik dalam wilayah tersebut. Sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat perlu ditingkatkan untuk mencapai perbaikan infrastruktur dan layanan transportasi yang lebih optimal.

7. Ketahanan Pangan

1) Belum optimalnya ketahanan pangan dan pemberdayaan petani

Kabupaten Muna Barat menghadapi isu strategis terkait ketahanan pangan dan pemberdayaan petani yang menunjukkan belum optimalnya kondisi sektor pertanian di wilayah ini. Salah satu permasalahan utamanya adalah relatif tingginya perubahan fungsi lahan persawahan menjadi lahan perkebunan. Praktek ini dapat berdampak negatif pada ketahanan pangan karena mengurangi luas lahan yang dapat digunakan untuk produksi tanaman pangan. Transformasi lahan yang tidak terkendali dapat mengancam ketersediaan bahan pangan lokal dan meningkatkan ketergantungan pada produk pertanian dari luar wilayah. Permasalahan lain terkait luasnya lahan kritis dan lahan pekarangan yang belum dimanfaatkan untuk tanaman pangan. Potensi lahan yang tidak optimal dalam pemanfaatan untuk produksi pangan menciptakan ketidakseimbangan antara kapasitas lahan yang dimiliki dengan kebutuhan pangan lokal. Kurangnya pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber potensial untuk tanaman pangan juga dapat menghambat diversifikasi produksi dan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.

Ketahanan pangan yang belum optimal juga tercermin dari kurangnya pengembangan keanekaragaman pangan lokal. Keanekaragaman pangan merupakan aspek penting dalam mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan. Kurangnya perhatian terhadap jenis tanaman lokal yang dapat tumbuh di wilayah tersebut dapat mengakibatkan ketidakberagaman sumber pangan, meningkatkan kerentanan terhadap perubahan iklim, dan mengurangi fleksibilitas dalam menghadapi tantangan produksi. Selanjutnya, minimnya sarana dan prasarana produksi tanaman pangan menjadi permasalahan krusial. Petani membutuhkan akses yang memadai terhadap sarana produksi seperti benih berkualitas, pupuk, dan pestisida, serta prasarana irigasi yang efisien. Kurangnya infrastruktur ini dapat membatasi kapasitas produksi petani, menghambat peningkatan produktivitas, dan menyulitkan adaptasi terhadap perubahan iklim. Terakhir, belum optimalnya peran penyuluh dalam membina petani juga menjadi isu strategis. Penyuluh pertanian memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan teknis, memperkenalkan inovasi, dan meningkatkan keterampilan petani. Jika peran penyuluh tidak dioptimalkan, petani mungkin kesulitan mengadopsi praktek pertanian yang lebih berkelanjutan dan efisien.

Mengatasi isu-isu ini memerlukan pendekatan yang terintegrasi, melibatkan pemerintah daerah, stakeholder pertanian, dan masyarakat lokal. Perlunya kebijakan

yang mendukung pemanfaatan lahan secara berkelanjutan, pengembangan keanekaragaman pangan, peningkatan sarana dan prasarana pertanian, serta strategi pemberdayaan petani dan penyuluh pertanian yang lebih efektif.

8. Lingkungan Hidup

1) **Belum optimalnya pengelolaan lingkungan dan konservasi sumber daya alam di Kabupaten Muna Barat**

Kabupaten Muna Barat menghadapi isu strategis terkait pengelolaan lingkungan dan konservasi sumber daya alam yang belum optimal, yang tercermin dari beberapa permasalahan signifikan. Salah satu tantangan utama adalah belum optimalnya pengelolaan sampah sistem 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Keterbatasan infrastruktur dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap praktek-praktek pengelolaan sampah yang berkelanjutan dapat mengakibatkan penumpukan sampah, pencemaran lingkungan, dan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Perlunya peningkatan kesadaran dan infrastruktur yang mendukung praktek 3R menjadi kunci dalam mengatasi isu ini.

Selanjutnya, Kabupaten Muna Barat juga menghadapi permasalahan terkait pengelolaan keanekaragaman hayati dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Belum optimalnya upaya konservasi dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dapat berpotensi mengancam ekosistem alam, termasuk habitat spesies endemik yang mungkin ada di wilayah tersebut. Pemanfaatan lahan yang tidak terencana dengan baik juga dapat menyebabkan hilangnya Ruang Terbuka Hijau, yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomis bagi masyarakat.

Selain itu, rendahnya data yang tercatat pada AKSARA Bappenas terkait efek rumah kaca menunjukkan ketidakefektifan dalam pemantauan dampak lingkungan. Data yang akurat dan terkini mengenai emisi gas rumah kaca sangat penting untuk merancang kebijakan mitigasi perubahan iklim dan memahami dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Penyusunan kebijakan yang efektif memerlukan data yang handal dan terukur untuk mendukung pengambilan keputusan yang berkelanjutan.

Untuk mengatasi isu-isu tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, peningkatan kapasitas dalam pengelolaan sampah, upaya konservasi keanekaragaman hayati, dan pemantauan yang lebih baik terhadap efek rumah kaca. Penyuluhan dan edukasi masyarakat terkait praktik 3R,

pengelolaan keanekaragaman hayati, dan pentingnya RTH dapat menjadi kunci untuk mencapai pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Kerjasama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat perlu ditingkatkan untuk menciptakan keberlanjutan dalam pengelolaan lingkungan di Kabupaten Muna Barat.

2) Perubahan Iklim

Pentingnya isu perubahan iklim bagi pembangunan daerah di Kabupaten Muna Barat tak dapat diabaikan mengingat potensi dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Pertama, Kabupaten Muna Barat memiliki sektor pertanian yang menjadi sektor unggulan daerahnya. Perubahan iklim dapat mempengaruhi produksi pertanian, baik melalui perubahan pola hujan, suhu, maupun frekuensi bencana alam. Oleh karena itu, perlu pengembangan strategi pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim untuk menjaga ketahanan pangan dan mata pencaharian petani.

Kedua, Kabupaten Muna Barat terletak di wilayah pesisir yang rentan terhadap kenaikan permukaan laut dan cuaca ekstrim. Dampak perubahan iklim seperti banjir rob, erosi pantai, dan kerusakan ekosistem laut dapat merugikan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, pembangunan daerah harus memperhatikan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap resiko bencana akibat perubahan iklim, termasuk pengelolaan sumber daya alam pesisir dan pelestarian ekosistem laut.

Ketiga, potensi perubahan iklim juga berdampak pada sektor pariwisata Kabupaten Muna Barat. Keberlanjutan sektor pariwisata dapat terancam oleh perubahan iklim seperti kerusakan terumbu karang dan kehilangan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan harus mencakup strategi pelestarian lingkungan dan pengelolaan pariwisata yang ramah lingkungan untuk menjaga daya tarik destinasi pariwisata lokal.

Pentingnya memasukan isu perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Muna Barat adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa upaya pembangunan tidak hanya berdampak positif saat ini tetapi juga berkelanjutan dan tangguh terhadap tantangan masa depan yang dihadapi akibat perubahan iklim.

9. Pelayanan dan Pemberdayaan

1) Belum optimalnya sistem pelayanan publik

Isu strategis terkait belum optimalnya sistem pelayanan publik di Kabupaten Muna Barat dipicu oleh sejumlah permasalahan mendasar. Pertama, sarana dan prasarana layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang belum memadai menjadi kendala utama. Kurangnya infrastruktur yang memadai dapat menghambat efisiensi dalam pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil, berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam pemberian layanan kepada masyarakat.

Kemudian, Kabupaten Muna Barat saat ini belum memiliki *mall* pelayanan publik yang konsepnya menyediakan berbagai layanan publik dalam satu tempat. Masyarakat yang hendak mendapatkan pelayanan publik harus menuju dari suatu tempat ke tempat yang lain. Konsep pelayanan publik yang belum terpusat mampu menghambat efisiensi layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Selanjutnya, belum optimalnya prosedur pengurusan administrasi kependudukan dan catatan sipil juga menjadi permasalahan krusial. Adanya kendala atau kebingungan dalam prosedur pengurusan dapat menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat, memperlambat proses, dan meningkatkan potensi kesalahan administratif. Peningkatan kejelasan dan efektivitas prosedur administrasi kependudukan menjadi kunci dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Ketidakefektifan dalam inovasi jemput bola untuk masyarakat yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) juga menjadi isu yang perlu dicermati. Pendekatan proaktif dan inovatif dalam mendekati masyarakat yang belum terdaftar dapat meningkatkan penetrasi pelayanan administrasi kependudukan, memastikan bahwa setiap warga mendapatkan akses yang lebih mudah dan cepat dalam mendapatkan dokumen kependudukan.

Kemudian, belum efektifnya koordinasi penyusunan data statistik sektoral menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang terintegrasi. Koordinasi yang buruk dapat mengakibatkan duplikasi data, kurangnya akurasi, dan kesulitan dalam merumuskan kebijakan yang berbasis data. Perlu diperkuat kerjasama antar-OPD dan instansi terkait guna meningkatkan kualitas dan keterkaitan data sektoral.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di lingkungan OPD menjadi krusial. Pelatihan dan pengembangan keterampilan SDM dalam mengakses informasi publik, pengelolaan arsip yang baku, serta analisis dan pengolahan data statistik sektoral perlu diperkuat. Sementara itu, pembangunan kebijakan inovatif dan proaktif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan juga menjadi fokus penting. Melalui serangkaian tindakan ini, Kabupaten Muna Barat dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

2) Belum adanya sistem satu data Muna Barat

Perlu adanya sistem satu data di Kabupaten Muna Barat karena dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan koordinasi dalam pengelolaan data. Dengan memiliki satu sumber data terintegrasi, berbagai sektor dan lembaga pemerintah daerah dapat mengakses informasi yang konsisten dan terkini. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan responsif terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Sistem satu data juga meminimalkan resiko kesalahan dan duplikasi data, mengurangi beban administratif, dan mempercepat proses pengumpulan, analisis, dan pelaporan informasi.

Selain itu, sistem satu data sangat penting untuk mendukung implementasi program dan kebijakan yang holistik dan terpadu. Dengan memiliki data yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat merancang strategi pembangunan yang berbasis pada informasi yang akurat dan komprehensif. Sistem ini juga memudahkan pemantauan dan evaluasi kinerja program, sehingga pemerintah dapat mengidentifikasi dampak positif dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Dengan demikian, sistem satu data tidak hanya membantu efisiensi administratif tetapi juga meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

3) Rendahnya efektivitas dan kemandirian pembangunan desa di Kabupaten Muna Barat

Kabupaten Muna Barat menghadapi isu strategis terkait rendahnya efektivitas dan kemandirian pembangunan desa yang dipicu oleh sejumlah permasalahan mendasar. Pertama, belum optimalnya kinerja kelembagaan pemerintahan desa menjadi hambatan utama dalam penyelenggaraan pembangunan. Kelembagaan yang

belum efektif dapat menyebabkan kurangnya koordinasi, kurangnya transparansi, dan rendahnya akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya dan implementasi program pembangunan di tingkat desa.

Selanjutnya, minimnya peran serta masyarakat dalam pembangunan desa menjadi permasalahan signifikan. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam merumuskan dan melaksanakan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Rendahnya partisipasi masyarakat dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara rencana pembangunan dengan kebutuhan sebenarnya di tingkat desa, mengurangi efektivitas program pembangunan.

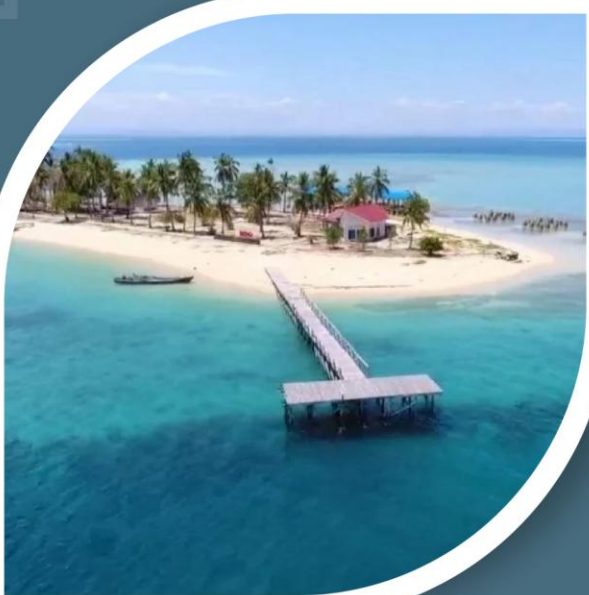
Isu strategis ini juga mencakup belum optimalnya sinergitas antara prioritas pembangunan desa dengan pembangunan Kabupaten secara keseluruhan. Ketidaksesuaian prioritas pembangunan dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan secara menyeluruh. Diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah desa dan pemerintah Kabupaten dalam menyusun rencana pembangunan yang terintegrasi dan saling mendukung.

Terakhir, masih rendahnya daya saing dan kemandirian masyarakat desa, baik dari sisi ekonomi maupun non-ekonomi, menjadi tantangan yang perlu diatasi. Rendahnya daya saing dapat menghambat pertumbuhan ekonomi desa dan kemandirian masyarakat. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat desa, memperkuat sektor-sektor unggulan, dan memberdayakan masyarakat dalam mengelola potensi lokal mereka.

Untuk mengatasi isu-isu tersebut, Kabupaten Muna Barat perlu melakukan reformasi dalam kinerja kelembagaan pemerintahan desa, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan, meningkatkan koordinasi antar instansi di tingkat desa dan Kabupaten, serta memberikan dukungan nyata untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian masyarakat desa. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan pembangunan desa di Kabupaten Muna Barat dapat menjadi lebih efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat setempat.

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH



4.1. VISI

Penetapan strategi pembangunan daerah yang dirumuskan secara efektif akan mampu memberikan banyak manfaat dan keuntungan bagi daerah. Dukungan data dan informasi menjadi mutlak diperlukan untuk merumuskan strategi yang efektif. Dalam penetapan strategi-strategi tersebut biasa dikembangkan sesuai dengan situasi, kondisi dan kearifan lokal. Berdasarkan kondisi Kabupaten Muna Barat saat ini, tantangan yang dihadapi dalam dua puluh tahunan mendatang, juga dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh Muna Barat dalam konstelasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dirumuskan visi pembangunan daerah tahun 2025–2045:

“MUNA BARAT 2045 YANG MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN”

MUNA BARAT merupakan salah satu kabupaten (daerah otonom baru) yang terdapat di Provinsi Sulawesi Tenggara hasil pemekaran dari Kabupaten Muna pada tahun 2014. Ibu kota Kabupaten Muna Barat berlokasi di Komplek Bumi Praja Kota Laworo, Kecamatan Sawerigadi. Secara regulasi, landasan pembentukan daerah otonom baru Kabupaten Muna Barat dimuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pembentukan Kabupaten Muna Barat terdiri atas 11 (sebelas) kecamatan yang meliputi Kecamatan Sawerigadi, Kecamatan Barangka, Kecamatan Lawa, Kecamatan Wadaga, Kecamatan Tiworo Selatan, Kecamatan Maginti, Kecamatan Tiworo Tengah, Kecamatan Tiworo Utara, Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kecamatan Kusambi, dan Kecamatan Napano Kusambi.

MANDIRI artinya bahwa pembangunan daerah sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan merupakan upaya membangun kemandirian. Kemandirian bukan berarti situasi dan kondisi dalam keterisolasian. Kemandirian mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan masyarakat, baik dalam suatu negara maupun bangsa. Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya. Untuk membangun kemandirian mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi melalui peningkatan daya saing yang menjadi kunci kemandirian. Selain itu, secara prinsip kemandirian mencerminkan suatu sikap untuk mengenali potensi dan kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang tersedia serta tantangan yang dihadapinya. Karena menyangkut sikap, kemandirian pada dasarnya adalah masalah budaya dalam arti seluasluasnya. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap

aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Kemandirian yang demikian adalah paham yang proaktif dan bukan reaktif atau defensif yang tercermin antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan daerahnya; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemampuan pembiayaan pembangunan daerah yang makin kokoh; serta kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokoknya.

SEJAHTERA Konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil). Dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi sejahtera adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan per kapita pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran terbuka, menurunnya jumlah penduduk miskin; terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif; meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai oleh terpenuhinya hak sosial masyarakat yang mencakup akses pada pelayanan dasar, sehingga mampu meningkatkan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olahraga, serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama; terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender pada seluruh bidang pembangunan, kesejahteraan dan perlindungan anak; tersedianya infrastruktur yang memadai; meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab yang mampu mendukung pembangunan daerah

BERKELANJUTAN adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang. Prinsip utama pembangunan berkelanjutan ialah mempertahankan kualitas hidup bagi seluruh manusia pada masa sekarang dan pada masa depan secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan prinsip kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Pendekatan yang digunakan dalam pembangunan berkelanjutan merupakan pendekatan yang menyeluruh. Pembangunan berkelanjutan sangat memperhatikan dampak dari setiap tindakan sosial dan ekonomi terhadap lingkungan hidup. Dampak buruk terhadap lingkungan hidup harus dihindari dari setiap kegiatan sosial dan ekonomi sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga pada masa sekarang dan pada masa mendatang.

Tabel 4.1 Sasaran dan Indikator Visi RPJPD Kabupaten Muna Barat 2025 - 2045

No	Sasaran Visi	KABUPATEN MUNA BARAT		
		Indikator	Baseline 2025	Target 2045
1	Pendapatan per kapita meningkat	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	36,16	56,81
		b. NTP/NTPi	101,6	104,74
		c. NTN	124	127,14
		d. Kontribusi PDB Industri Pengolahan	2,74	8,5
2	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan (%)	14,03	1,35
		b. Kontribusi PDRB Kab. Ke Prov	1,92	5,43
		c. Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,46	8,56
		d. Rasio gini (Indeks)	0,31	0,3
3	Kepemimpinan Daerah yang Berkualitas	a. Reformasi Birokrasi (Indeks)	51,13	74,81
		b. Nilai SAKIP Daerah	CC	A
		c. Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	22,48	60,48
4	Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	a. Tingkat Pengangguran Terbuka	2,4	1,5
		b. Indeks Pembangunan Manusia	66,21	78,6
5	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,92	88,68
		b. Penurunan Emisi GRK (%)	16,69	73,94

Eksistensi Kabupaten Muna Barat sejatinya masih tergolong muda karena merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Muna pada tahun 2014. Kabupaten Muna Barat memiliki cita-cita jangka panjang yang telah dituangkan dalam visi RPJPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2025-2045, yaitu mewujudkan Kabupaten Muna Barat yang Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan di akhir periode RPJPD. Dalam mencapai cita-cita tersebut diperlukan beberapa upaya transformatif untuk mendukung proses pembangunan dan meningkatkan ketahanan wilayah. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat wilayah Kabupaten Muna Barat yang masih berkembang dengan karakteristik wilayahnya yang berupa kepulauan menjadikan Kabupaten Muna Barat lebih rentan terhadap guncangan.

Ketahanan wilayah menjadi aspek yang perlu diperhatikan sebab kemampuan adaptasi perlu dipupuk demi mengatasi ancaman, tragedi, keterpurukan, atau sumber tekanan lain yang signifikan. Wujud ketahanan wilayah tersebut dapat dicerminkan dalam berbagai dimensi pembangunan, seperti optimalisasi bidang pendidikan, kesehatan, pemeliharaan keseimbangan lingkungan, manajemen air, manajemen energi, dan penciptaan model komunikasi yang efektif. Pendidikan dan kesehatan menjadi bidang pertama yang perlu dioptimalisasi tingkat

pelayanannya demi mewujudkan ketahanan wilayah Kabupaten Muna Barat. Skala pelayanan dasar yang diselenggarakan Kabupaten Muna Barat perlu ditingkatkan pada level perguruan tinggi melalui yayasan yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Tidak hanya itu, pengadaan pelayanan serta sarana dan prasarana dasar untuk pendidikan di bawah level perguruan tinggi juga penting untuk ditingkatkan sesuai dengan eksistensi guru dan murid. Penguatan sistem pendidikan juga perlu memperhatikan muatan pembelajaran dalam mengembangkan pemahaman filosofis dan eksploratif, seperti pendidikan karakter, kebudayaan, serta adat istiadat.

Selain penguatan sistem pendidikan, pelayanan dalam bidang kesehatan turut menjadi fokus peningkatan ketahanan daerah. Kondisi ini dapat diatasi dengan peningkatan mutu, pengadaan infrastruktur berupa sarana dan prasarana, serta akses terhadap pelayanan dasar. Satu di antara permasalahan di bidang kesehatan yang perlu diatasi adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan. Hingga saat ini, pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi, dan balita belum diadakan sesuai standar. Selain itu, standar jumlah personil kesehatan juga masih terbatas. Dengan begitu, perlu dilakukan peningkatan dalam pengadaan infrastruktur dan rekrutmen tenaga kesehatan yang memiliki jumlah berimbang dengan masyarakat yang dilayani.

Permasalahan terkait akses pelayanan dasar masih menjadi masalah hingga pada pemenuhan kebutuhan primer. Dalam hal ini, isu kedaulatan pangan di Kabupaten Muna Barat turut menjadi bagian dari problematika ketahanan wilayah. Gagasan dasar ketahanan pangan di Kabupaten Muna Barat dapat diaplikasikan sesuai dengan empat area prioritas kedaulatan pangan, yaitu hak terhadap pangan, akses terhadap sumber-sumber daya produktif, pengarusutamaan produksi ramah lingkungan, serta perdangangan dan pasar lokal. Kedaulatan pangan sendiri didukung untuk menormalisasikan pola pertanian berbasis keluarga, yaitu petani dapat menanam sendiri dan memanfaatkan sendiri hasil lahannya (*land to mouth*). Dengan demikian, ketahanan pangan dapat perlahan dicapai dengan upaya memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani terhadap akses lahan usaha, sumberdaya air untuk pertanian, benih dan bibit, pupuk dan obat-obatan, sistem pertanian efektif, serta keputusan mekanisme produksi (perdagangan).

Aspek pemenuhan pelayanan dasar lainnya yang perlu dioptimalkan demi menjaga ketahanan daerah dari suatu krisis adalah manajemen energi. Pengelolaan energi yang sesuai dengan kondisi geografis Kabupaten Muna Barat adalah berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT). Pemanfaatan energi langsung dari bentang alam kepulauan, seperti air, angin, dan

gelombang memiliki potensi produksi tingkat energi lebih tinggi daripada besaran yang dikonsumsi. Tidak hanya itu, pemanfaatan EBT dapat dimanfaatkan sebagai kontributor mitigasi perubahan iklim sehingga aspek kerentanan bencana hidrometeorologis dapat diminimalisasi.

Bersamaan dengan energi, air turut menjadi satu di antara sumber daya yang sangat dibutuhkan masyarakat. Ketahanan sumber daya air perlu dilestarikan demi keberlangsungan kehidupan dan banyak kegiatan lainnya. Mutu air layak minum dan layak guna perlu diperhatikan agar dapat disalurkan serta dialokasikan sesuai kebutuhan. Sebagai air dengan baku mutu paling tinggi, air minum tentu perlu dikaji pemenuhannya melalui ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung, seperti Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM). Eksistensi SPAM dan masyarakat yang terlayani perlu disesuaikan dengan total jumlah penduduk di setiap desa dan kecamatan pada Kabupaten Muna Barat untuk dapat bertaraf ideal. Selain itu, air layak guna juga perlu dialirkan demi memenuhi kebutuhan produksi, pertanian, pengelolaan perikanan, industri dan lain sebagainya. Pemerintah dapat memanfaatkan potensi penyediaan EBT demi mengoptimalkan pengadaan pelayanan sumber daya air.

Satu di antara pendekatan yang dapat diaplikasikan oleh pemerintah daerah terkait EBT adalah memanfaatkan konsep *Water-Energy-Food-Ecosystem Nexus (WEFE Nexus) Environment*. Implementasi konsep tersebut secara strategis mampu mengatasi pertampalan isu pangan, energi, dan ketersediaan air yang mampu meminimalisasi dampak perubahan iklim sehingga mampu berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Kerja sama yang sinergis antarsetiap SKPD harus direncanakan untuk mengkaji keterkaitan antara ketahanan pangan, energi, dan air. Hasil kajian tersebut perlu diupayakan untuk tersusun menjadi kebijakan yang komprehensif demi pemenuhan pelayanan dasar yang optimal.

Ketahanan wilayah erat kaitannya dengan keseimbangan lingkungan yang dipengaruhi oleh daya dukung dan daya tampung wilayah. Jika keseimbangan tersebut diabaikan dan alam mulai bergejolak, maka mitigasi dan adaptasi perlu disiapkan untuk menghadapinya. Kerentanan bencana merupakan suatu ancaman yang memungkinkan terjadinya shock sehingga dapat menimbulkan keterpurukan. Guna meminimalisasi risiko tersebut, upaya mitigasi dan adaptasi perlu dijabarkan oleh pemerintah daerah demi terlaksananya keamanan dan kenyamanan bersama. Upaya mitigasi dapat dilakukan dengan mengatur tata bangunan dan permukiman di lokasi bantaran badan air. Selain itu upaya adaptasi dapat dilakukan dengan

membangun talud sungai dan tanggul laut, mendirikan rambu petunjuk arus balik pada pantai, serta mengadakan jalur evakuasi dan titik kumpul pada kawasan rawan bencana.

Berdasarkan seluruh rangkaian upaya membentuk ketahanan daerah, menciptakan model komunikasi horizontal dan vertikal merupakan perihal penting untuk menangani kondisi buruk, utamanya pada tingkat awal. Jika terjadi peristiwa yang mengancam, baik konflik sosial maupun bencana, model komunikasi yang tepat akan berperan baik dalam menyampaikan kondisi darurat. Dalam hal ini, rencana SKPD yang terintegrasi turut diperlukan dalam meminimalisasi risiko atau dampak kejadian shock yang dialami. Pada aspek kebencanaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) perlu merencanakan langkah mitigasi non-struktural, seperti pelatihan dan simulasi evakuasi bencana. Hal ini merupakan model komunikasi yang cukup efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana. Tidak hanya itu, mitigasi struktural seperti penyediaan Ealy Warning System (EWS) untuk peringatan dini juga perlu dilakukan demi mempersiapkan masyarakat. Kondisi tersebut sama halnya dengan model komunikasi untuk menahan guncangan dari konflik sosial, seperti memelihara kondisi damai dalam bermasyarakat serta mengutamakan koordinasi yang sinergis antara pemangku kepentingan dan elemen masyarakat.

Secara keseluruhan, untuk mewujudkan visi Kabupaten Muna Barat yang Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan, perlu dilakukan serangkaian upaya terintegrasi dalam berbagai dimensi pembangunan. Fokus utama melibatkan optimalisasi layanan pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, penguatan sistem pertanian berbasis keluarga demi kedaulatan pangan, pengelolaan energi berbasis Energi Baru Terbarukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim, dan pelestarian sumber daya air. Selain itu, upaya mitigasi dan adaptasi terhadap risiko bencana serta penerapan model komunikasi yang efektif juga menjadi kunci dalam membangun ketahanan wilayah secara menyeluruh. Dengan pendekatan holistik ini, Kabupaten Muna Barat dapat memperkuat keseimbangan ekosistemnya, mencapai ketahanan terhadap ancaman, dan mengarahkan pembangunan menuju keberlanjutan yang berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

4.2. MISI

Misi merupakan pernyataan umum mengenai langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Perumusan misi dalam dokumen perencanaan dirancang dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan strategis, termasuk pengaruh dari luar dan dalam, serta menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang terkait dengan pembangunan daerah. Misi dibuat dengan tujuan mengartikan arah atau

langkah-langkah yang akan diambil untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi **“Muna Barat 2045 Yang Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan”** maka akan didukung oleh 5 misi berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, unggul, cerdas, sehat, beriman, dan berbudaya.
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan daya saing berbasis potensi lokal melalui dukungan IPTEKIN dengan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
3. Mewujudkan infrastruktur berkelanjutan dan tata ruang wilayah yang inklusif, ramah lingkungan, dan berkeadilan.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, kolaboratif, bertanggung jawab, dan profesional.
5. Mewujudkan ekosistem wilayah yang berketahanan, tangguh, dan adaptif.

Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Misi ini merupakan upaya mendorong pelaksanaan pendidikan yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi pada seluruh jenis dan jenjang pendidikan. Pembangunan pada sektor kesehatan difokuskan pada upaya peningkatan pelayanan kesehatan dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai secara merata pada seluruh wilayah. Selain itu pula, dalam rangka menjamin kemudahan akses pendidikan dan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, maka perlu diberikan perlindungan sosial pada golongan masyarakat kurang mampu.

Misi 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi dan daya saing berbasis potensi lokal melalui dukungan IPTEKIN dengan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Misi ini merupakan upaya mendorong perekonomian wilayah melalui peningkatan produksi dan produktivitas pada berbagai komoditas unggulan daerah yang didukung dengan implementasi ilmu pengetahuan dan inovasi (IPTEKIN). Implementasi IPTEKIN dilakukan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat untuk mengembangkan berbagai usaha ekonomi dalam meningkatkan nilai tambah hasil-hasil produksi berbagai komoditas unggulan yang berorientasi pada peningkatan pendapatan per kapita.

Misi 3: Mewujudkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan tata ruang wilayah yang inklusif, ramah lingkungan dan berkeadilan

Misi ini merupakan upaya untuk mendorong kemudahan akses terhadap kebutuhan infrastruktur dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi transportasi dan konektivitas jaringannya, air bersih, sanitasi, telekomunikasi, jaringan listrik dan infrastruktur dasar lainnya dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan sekitar. Seluruh aktivitas pembangunan harus mempedomani dokumen rencana tata ruang yang sudah ditetapkan. Dokumen rencana tata ruang tidak terbatas menyediakan alokasi ruang untuk pembangunan fisik, sosial dan ekonomi serta dampak pembangunannya skala lokal saja tetapi harus dapat memperhatikan dampaknya secara luas pada wilayah perencanaan. Olehnya itu, penyusunan dokumen rencana tata ruang harus lebih ramah lingkungan dan berkeadilan dengan melibatkan seluruh *stakeholder* sejak proses penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.

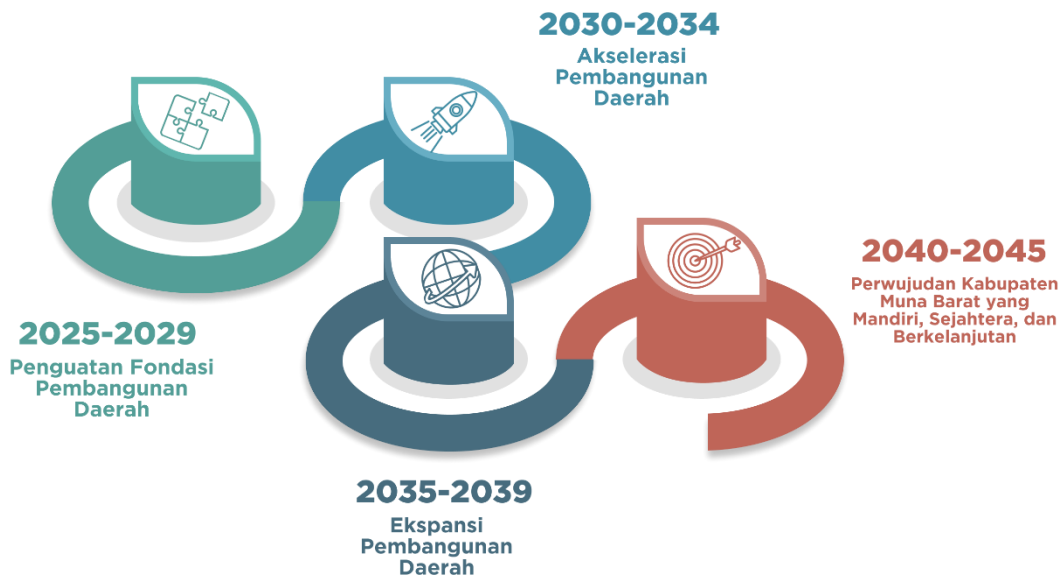
Misi 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, kolaboratif, dan profesional.

Misi ini adalah upaya mewujudkan pemerintahan daerah memiliki tata kelola pemerintahan yang jujur, bertanggung jawab, disiplin dan dapat bekerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini harus didukung oleh peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam meningkatkan pelayanan publik melalui inovasi.

Misi 5: Mewujudkan ekosistem wilayah yang berketahanan, tangguh, dan adaptif

Misi ini merupakan upaya mewujudkan ekosistem wilayah yang memiliki ketahanan, keberdayaan, dan kemampuan adaptasi yang optimal. Pembangunan dilakukan untuk menciptakan lingkungan berkelanjutan yang mampu menghadapi berbagai tantangan, serta memberdayakan masyarakat agar dapat menghadapi dinamika wilayah dengan tangguh dan berdaya saing.

Dalam menjalankan misi-misi tersebut, maka disusun *roadmap* pembangunan di setiap periode RPJMD, yang kemudian disebut sebagai agenda pembangunan lima tahunan agar proses pembangunan yang dijalankan dapat lebih terukur dan tepat sasaran. *Roadmap* pembangunan tersebut disajikan dalam gambar berikut.



Gambar 4.1 Roadmap Implementasi RPJPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2025-2045

Pada periode pertama RPJPD (2025-2029), Kabupaten Muna Barat menaruh fokus utama pada penguatan fondasi pembangunan daerah. Penguatan fondasi menjadi langkah awal yang krusial sebagai tahap awal untuk menciptakan landasan bagi pertumbuhan berkelanjutan di masa yang akan datang. Penguatan fondasi yang dimaksud mencakup berbagai aspek mulai dari infrastruktur dasar pendidikan, kesehatan, jaringan jalan, listrik, air bersih hingga telekomunikasi menjadi titik sentral perhatian pemerintah daerah. Melalui investasi besar dalam aspek-aspek ini, Kabupaten Muna Barat dapat memberikan akses yang merata dan berkualitas kepada seluruh penduduknya. Selain itu, penguatan kapasitas institusi pemerintah setempat dan peningkatan tata kelola diimplementasikan untuk memberikan dasar yang kuat dalam penyelenggaraan layanan publik.

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Muna Barat menjadi langkah dasar dalam mewujudkan cita-cita besar pada tahun 2045. Infrastruktur yang dibangun seperti pembangunan jaringan transportasi darat maupun laut menjadi pondasi utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan juga distribusi sumber daya serta peningkatan kesetaraan antar masyarakat. Jaringan listrik yang handal juga menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung aktivitas masyarakat dan perkembangan sektor industri. Selain itu, penyediaan air bersih yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat sangatlah penting mengingat Kabupaten Muna Barat memiliki beberapa daerah yang berbentuk kepulauan yang tidak semuanya memiliki sumber mata air. Di samping itu, pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan keterampilan SDM juga tidak kalah pentingnya.

Dengan mengutamakan penguatan fondasi pembangunan sebagai tahap pertama, sebuah wilayah tidak hanya siap untuk menghadapi tantangan dan peluang di masa depan, tetapi juga membentuk dasar yang kuat untuk pertumbuhan berkelanjutan. Fondasi yang kokoh menciptakan lingkungan yang stabil bagi perkembangan ekonomi dan ketangguhan terhadap perubahan dan krisis yang mungkin terjadi. Tercipta juga landasan yang handal bagi sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sehingga apabila terjadi situasi krisis maupun perubahan ekonomi global, maka Kabupaten Muna Barat dapat terus berkembang di tengah ketidakpastian. Fondasi yang kokoh menjadi investasi strategis yang tidak hanya memberikan kestabilan saat ini, tetapi juga memastikan kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan di masa depan.

Periode kedua RPJPD (2030-2034), Kabupaten Muna Barat mengambil langkah progresif untuk memasuki fase akselerasi pembangunan daerah. Fokus utamanya adalah meningkatkan kualitas serta kesetaraan infrastruktur dasar untuk mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan tekad untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan, pemerintah daerah memusatkan perhatian pada perbaikan dan perluasan sumber daya yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Langkah-langkah yang konkret melibatkan peningkatan produktivitas ekonomi melalui diversifikasi sektor-sektor kunci dan pemberdayaan usaha lokal. Kabupaten Muna Barat juga memprioritaskan pengembangan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, dengan memperkuat mekanisme partisipatif dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administratif, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kabupaten Muna Barat pada periode ini tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi yang cepat tetapi juga membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan yang lebih tahan terhadap ketidakpastian dan tantangan global.

Pada Periode tiga RPJPD (2035-2039), Kabupaten Muna Barat menjadikan fokusnya pada ekspansi pembangunan daerah setelah berhasil mengimplementasikan percepatan pembangunan pada periode sebelumnya. Dalam langkah progresif ini, prioritas utama beralih ke peningkatan kapasitas dan cakupan pembangunan di seluruh wilayah kabupaten. Upaya yang dilakukan mencakup penguatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) dan keberlanjutan pemberdayaan masyarakat, melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta pelatihan keterampilan yang berkelanjutan.

Kabupaten Muna Barat juga fokus pada perluasan pemanfaatan teknologi dalam sektor perekonomian, memastikan bahwa inovasi teknologi digunakan sebagai pendorong utama pertumbuhan. Hal ini melibatkan pengembangan ekosistem teknologi yang mendukung pelaku usaha lokal dan mempercepat transformasi digital di berbagai sektor ekonomi. Selain itu, langkah-langkah strategis diambil untuk menata infrastruktur dan memanfaatkan tata ruang yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan, dengan memprioritaskan prinsip-prinsip pelestarian alam dan pengurangan dampak lingkungan negatif.

Penerapan *good governance*, yang didukung oleh *e-government*, menjadi landasan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Kabupaten Muna Barat juga memperkuat ketahanan masyarakat dan lingkungan dalam menghadapi perubahan, dengan fokus pada peningkatan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana dan perubahan iklim. Pada periode ini, Kabupaten Muna Barat terus bergerak membangun masa depan yang berkelanjutan, inklusif, dan mampu menanggapi dinamika global dengan cermat dan tangkas.

Pada tahap terakhir RPJPD (2040-2044), Kabupaten Muna Barat berkomitmen sepenuhnya untuk mewujudkan visi sebagai entitas yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan. Fokus utama terletak pada pencapaian target pembangunan berkelanjutan, mencakup dimensi ekonomi, sosial, infrastruktur, tata kelola, lingkungan, dan ketahanan daerah.

Ekonomi Kabupaten Muna Barat juga telah meraih tingkat kemandirian yang signifikan, menjadi inklusif, dan meningkatkan daya saing di tingkat nasional dan internasional. Ruang hidup dan infrastruktur di Muna Barat mencerminkan standar kualitas yang tinggi, berkelanjutan, dan memperhatikan prinsip inklusivitas untuk memastikan manfaat pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Tata kelola pemerintahan di Kabupaten Muna Barat mencapai tingkat integrasi, kolaborasi, dan profesionalisme yang tinggi, menghasilkan efisiensi dan responsivitas yang optimal terhadap kebutuhan masyarakat.

Mewujudkan Kabupaten Muna Barat yang berketahanan, tangguh, dan adaptif menjadi pilar krusial dalam mencapai visi jangka panjang. Pemerintah daerah berfokus pada langkah-langkah konkret untuk memastikan ketangguhan daerah dalam menghadapi perubahan eksternal dan tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Kabupaten Muna Barat berusaha menciptakan masa depan yang tidak hanya stabil dan sejahtera, tetapi juga adaptif dan mampu bertransformasi mengikuti perkembangan dinamis dalam konteks global.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK



5.1. ARAH KEBIJAKAN DAERAH

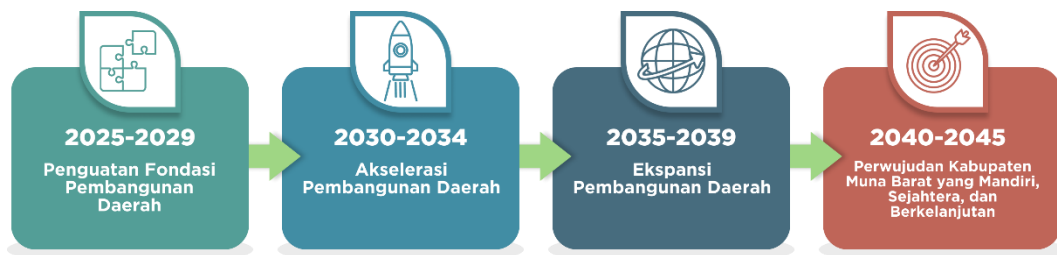
Arah kebijakan merupakan suatu implementasi konkret dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai visi daerah. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah menjadi pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD. Dalam implementasinya, arah kebijakan daerah haruslah selaras dengan arah kebijakan nasional. Di mana pentahapan implementasi RPJPN 2025-2045 dibagi ke dalam empat tahapan dengan tema sebagai berikut.



Gambar 5. 1 Pentahapan Implementasi RPJPN 2025-2045

Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas, 2023

Berdasarkan hal tersebut, arah kebijakan Kabupaten Muna Barat terbagi menjadi empat periode: (1) 2025-2029, (2) 2030-2034, (3) 2035-2039, dan (4) 2040-2044. Arah kebijakan perlu dirumuskan secara tepat untuk menjadi landasan yang lebih terperinci dalam mencapai sasaran pokok sesuai visi yang telah ditetapkan. Untuk pencapaian visi “**Muna Barat 2045 Yang Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan**” arah kebijakan terdiri atas:



Gambar 5. 2 Pentahapan Arah Kebijakan Umum Kabupaten Muna Barat 2025-2045

Tahapan arah kebijakan kemudian dikelompokkan menurut misi yang telah ditetapkan. Arah kebijakan dan sasaran pokok telah dirumuskan dengan mengintegrasikan berbagai aspek pembangunan mulai dari sosial hingga ketahanan daerah. Arah kebijakan ini menjadi pedoman konkret yang mendukung serta mengarahkan kebijakan dan program pembangunan yang akan direncanakan dan dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Muna Barat pada tiap periodenya. Arah kebijakan pada tiap periode ditentukan berdasarkan identifikasi tantangan dan potensi Kabupaten Muna Barat pada tiap periode lima tahunan.

Periode pertama arah kebijakan berfokus pada penguatan fondasi pembangunan daerah. Dasar pembangunan daerah yang kuat meliputi kondisi sosial budaya, ekonomi, serta infrastruktur yang memadai, yang kemudian didukung oleh kualitas pemerintahan yang baik, serta ketahanan daerah yang kuat maka dapat mendukung pembangunan daerah di periode selanjutnya yang akan masuk ke tahap akselerasi pembangunan daerah. Pada periode kedua ini arah kebijakan mendukung percepatan pembangunan dengan meningkatkan dan menyempurnakan kondisi sosial budaya, ekonomi, infrastruktur, tata kelola pemerintah yang semakin baik, dan peningkatan ketahanan masyarakat. Pada periode ketiga memasuki tahap ekspansi pembangunan daerah yang meliputi meningkatkan keunggulan Kabupaten Muna Barat dari seluruh aspek dan mewujudkan kestabilan serta keberlanjutan pembangunan yang telah diwujudkan di periode sebelumnya. Hingga pada periode terakhir akan terwujud kondisi masyarakat Kabupaten Muna Barat yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan. Berikut adalah penjabaran arah kebijakan sesuai dengan misi pembangunan daerah di Kabupaten Muna Barat.

Tabel 5. 1 Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2025-2045

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		I (2025-2029)	II (2030-2034)	III (2035-2039)	IV (2040-2045)
MUNA BARAT 2045 YANG MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, unggul, cerdas, sehat, beriman, dan berbudaya.	Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan primer serta pemberdayaan masyarakat berbasis moral dan budaya	Penyempurnaan kualitas dan kesetaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kualitas SDM	Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan pemberdayaan	Perwujudan SDM Muna Barat yang unggul, sehat, beriman, dan berbudaya
	Mewujudkan kemandirian ekonomi dan daya saing berbasis potensi lokal melalui dukungan IPTEKIN dengan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat	Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang didukung oleh proses hilirisasi SDA dan riset inovasi, beserta peningkatan produktivitas tenaga kerja lokal	Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi	Perluasan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi serta peningkatan integrasi jaringan rantai ekonomi untuk memperluas akses pasar	Perwujudan ekonomi Muna Barat yang mandiri, inklusif, dan berdaya saing
	Mewujudkan infrastruktur berkelanjutan dan tata ruang wilayah yang inklusif, ramah lingkungan, dan berkeadilan	Pemenuhan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pelayanan publik dan pengelolaan lingkungan hidup yang keberlanjutan lingkungan dan tata ruang	Pengembangan pemanfaatan infrastruktur dan pengelolaan tata ruang yang efisien dengan memperhatikan keberlanjutan	Perluasan akses terhadap infrastruktur dan pemanfaatan tata ruang yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan	Perwujudan ruang hidup dan infrastruktur Muna Barat yang berkualitas, berkelanjutan, dan inklusif bagi seluruh masyarakat

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		I (2025-2029)	II (2030-2034)	III (2035-2039)	IV (2040-2045)
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, kolaboratif, dan profesional	Pengembangan sistem pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai dengan kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar	Pembangun tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan tepat fungsi disertai peningkatan kualitas ASN dan regulasi yang efektif yang didukung oleh digitalisasi pelayanan publik	Peningkatan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan sesuai prinsip <i>good governance</i> di dukung oleh penerapan <i>e-government</i> dan kerjasama antar wilayah kabupaten/kota maupun provinsi	Perwujudan tata kelola pemerintahan Kabupaten Muna Barat yang berintegritas, kolaboratif, dan profesional
	Mewujudkan ekosistem wilayah yang berketahanan, tangguh, dan adaptif	Penguatan ketahanan wilayah sebagai landasan dan modal dasar pembangunan	Peningkatan ketahanan wilayah dalam rangka mempersiapkan masyarakat dan ekologi yang tangguh	Pemantapan ketangguhan masyarakat dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan	Perwujudan Kabupaten Muna Barat yang berketahanan, tangguh, dan adaptif

Misi 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan masyarakat yang berkualitas, unggul, cerdas, sehat, beriman, dan berbudaya



Gambar 5. 3 Pentahapam Arah Kebijakan Misi 1

Misi mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Muna Barat yang berkualitas, unggul, cerdas, sehat, beriman, dan berbudaya diimplementasikan melalui empat tahap arah kebijakan. Pada tahap pertama arah kebijakan difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan primer serta pemberdayaan masyarakat yang berbasis moral dan budaya. Pemerintah Kabupaten Muna Barat menyadari bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi yang kuat untuk membangun masyarakat yang tangguh. Oleh karena itu, langkah-langkah konkrit diambil untuk memastikan bahwa setiap warga memiliki akses merata terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan berkualitas. Pendidikan dan kesehatan dipandang sebagai hak dasar yang tidak bisa ditawar.

Dalam konteks pendidikan, pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendidikan dasar seperti sekolah dan penambahan kuantitas tenaga pendidik sehingga dapat dipastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Selain itu, akses pendidikan diperluas melalui program beasiswa dan insentif bagi keluarga kurang mampu. Pemberdayaan masyarakat dalam konteks pendidikan dilakukan dengan memberikan ruang partisipasi aktif dalam pengelolaan dan pengembangan sekolah di tingkat lokal. Pada sisi kesehatan, langkah-langkah serupa diambil untuk memastikan layanan kesehatan primer yang merata. Pusat-pusat kesehatan diperkuat dan diperluas jangkauannya untuk mencakup seluruh wilayah Muna Barat. Program kesehatan preventif diperkenalkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gaya hidup sehat dan pencegahan penyakit. Dalam konteks pemberdayaan, masyarakat didorong

untuk mengambil peran aktif dalam upaya pencegahan dan pemeliharaan kesehatan mereka sendiri.

Aspek kunci dalam kebijakan ini adalah pemberdayaan masyarakat berbasis moral dan budaya. Pemerintah tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan dilandasi oleh nilai-nilai lokal. Program pemberdayaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan konteks budaya setempat, mengakar pada nilai-nilai kearifan lokal. Hal ini bertujuan untuk membangun fondasi yang kokoh, di mana masyarakat tidak hanya sehat dan terdidik, tetapi juga mempertahankan identitas budaya mereka dengan bangga. Dengan menggabungkan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan berbasis nilai-nilai moral dan budaya, tahap pertama ini membentuk dasar kuat untuk pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan di Muna Barat.

Tahap kedua arah kebijakan difokuskan pada penyempurnaan kualitas dan kesetaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Maksud dari arah kebijakan ini adalah meningkatkan kualitas dan meratakan akses ke pelayanan pendidikan dan kesehatan, sambil mengintensifkan peningkatan kualitas SDM. Dalam sektor pendidikan, penyempurnaan kualitas pelayanan didorong melalui inovasi kurikulum, pelatihan guru, dan pengembangan sarana pendidikan. Pemerintah memberikan dukungan ekstra untuk meningkatkan keterampilan guru dan memperkenalkan metode pembelajaran yang responsif terhadap perkembangan zaman. Kesetaraan akses pendidikan ditegakkan dengan memperluas program beasiswa dan insentif bagi siswa dari lapisan masyarakat kurang mampu. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang merata dan mendorong inklusivitas.

Pada sisi kesehatan, fokus diberikan pada penyempurnaan kualitas pelayanan dan peningkatan akses. Pemerintah meningkatkan kapasitas pusat kesehatan dan mengintegrasikan teknologi dalam sistem pelayanan kesehatan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas. Program edukasi kesehatan masyarakat diperkuat untuk memberdayakan masyarakat dalam merawat kesehatan mereka sendiri. Dengan ini, tahap kedua bertujuan menciptakan masyarakat yang tidak hanya sehat secara fisik tetapi juga memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya pemeliharaan kesehatan.

Peningkatan kualitas SDM menjadi titik fokus penting. Program pelatihan dan pengembangan profesional diperluas untuk menciptakan tenaga kerja yang adaptif dan berdaya saing di pasar global. Kolaborasi dengan sektor industri diperkuat untuk memastikan bahwa keterampilan yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan memastikan

ketersediaan SDM yang berkualitas, tahap kedua ini diarahkan untuk meningkatkan potensi ekonomi dan daya saing Kabupaten Muna Barat di tingkat nasional dan internasional. Pada tahap kedua ini, Kabupaten Muna Barat berkomitmen untuk menciptakan fondasi pembangunan manusia yang tangguh dan berkelanjutan. Dengan meningkatkan kualitas dan meratakan akses di sektor pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat kualitas SDM, tahap kedua ini bertujuan memastikan bahwa masyarakatnya berkembang secara holistik dan dapat mengatasi perubahan zaman dengan cepat.

Tahap ketiga diwujudkan melalui arah kebijakan yang berfokus pada penguatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) dan keberlanjutan upaya pemberdayaan. Pemerintah, pada tahap ini menegaskan komitmennya untuk menjadikan SDM sebagai motor penggerak utama dalam mencapai kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Fokus utama kebijakan ini adalah pada peningkatan daya saing SDM dan menjaga berkelanjutan upaya pemberdayaan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan daya saing SDM, pemerintah Kabupaten Muna Barat mengambil langkah-langkah strategis. Investasi dalam riset dan inovasi diperkuat untuk mendorong pengembangan teknologi dan pengetahuan baru. Program pelatihan dan pendidikan lanjutan diperluas untuk memberikan kesempatan kepada SDM untuk terus mengembangkan keterampilan mereka sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Kolaborasi dengan sektor swasta ditingkatkan untuk memastikan bahwa SDM yang dihasilkan memiliki relevansi dan daya saing yang tinggi di tingkat global.

Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat ditempatkan pada pijakan keberlanjutan. Pemerintah mengadopsi model pemberdayaan yang inklusif, melibatkan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan. Program pelatihan kewirausahaan dan dukungan keuangan diperluas untuk mendukung kelompok-kelompok usaha masyarakat. Inisiatif pemberdayaan ekonomi lokal diperkuat untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketidaksetaraan. Keberlanjutan pemberdayaan juga diwujudkan melalui keterlibatan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah. Pemerintah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk menciptakan model kemitraan yang berkelanjutan, memastikan bahwa program pemberdayaan tidak hanya berlangsung dalam jangka pendek tetapi juga memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam tahap ini, pemerintah Muna Barat membangun landasan yang kokoh untuk masyarakat yang berdaya saing dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan wilayahnya. Pada tahap ketiga ini, Kabupaten Muna Barat berusaha mencapai sinergi antara perkembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Melalui penguatan SDM yang unggul dan keberlanjutan pemberdayaan, diharapkan dapat membentuk masyarakat yang tidak hanya berdaya saing di tingkat global

tetapi juga memiliki kapasitas untuk memelihara dan mengembangkan potensi mereka dalam jangka panjang.

Tahap keempat atau tahap terakhir ditandai oleh arah kebijakan yang berfokus pada perwujudan SDM Muna Barat yang unggul, sehat, beriman, dan berbudaya. Pada tahap ini, pemerintah Kabupaten Muna Barat memandang bahwa pencapaian kualitas hidup yang optimal tidak hanya melibatkan aspek ekonomi dan kesejahteraan fisik tetapi juga dimensi spiritual dan budaya. Kebijakan ini mengintegrasikan berbagai aspek pembangunan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang dan berdaya. Aspek beriman dan berbudaya menjadi inti dari kebijakan tahap ini. Pemerintah mendukung keberlanjutan nilai-nilai keagamaan dengan memperkuat program pendidikan keagamaan dan mendukung keberagaman budaya masyarakat. Kegiatan kebudayaan lokal diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, memastikan bahwa warisan budaya tetap hidup dan diapresiasi oleh generasi mendatang.

Pada arah kebijakan tahap keempat ini, Kabupaten Muna Barat menunjukkan visi yang holistik dalam merancang masa depannya. Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang memiliki kualitas hidup yang tinggi, sehat secara fisik dan spiritual, serta memegang teguh nilai-nilai budaya lokal. Keberlanjutan di setiap dimensi kehidupan dijadikan dasar untuk mencapai tujuan akhir pembangunan jangka panjang, menciptakan masyarakat yang berkembang seimbang dan harmonis.

Misi 2. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan daya saing berbasis potensi lokal melalui dukungan IPTEKIN dengan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat



Gambar 5. 4 Pentahapam Arah Kebijakan Misi 2

Pada periode pertama (2025-2029) arah kebijakan misi 2 difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang didukung oleh proses hilirisasi SDA dan riset inovasi, beserta peningkatan produktivitas tenaga kerja lokal. Untuk mencapai optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam (SDA), langkah awal yang krusial adalah melalui penerapan proses hilirisasi yang terarah. Proses hilirisasi tidak hanya terbatas pada ekstraksi bahan mentah, tetapi juga melibatkan peningkatan nilai tambah dan diversifikasi produk. Misalnya, dalam sektor pertanian, pengembangan industri pengolahan makanan atau produksi bioenergi dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya pertanian. Dukungan pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang mendorong investasi dalam teknologi dan infrastruktur hilirisasi dapat menjadi kunci dalam mewujudkan pengembangan ini. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga riset akan memfasilitasi implementasi proses hilirisasi yang lebih efektif.

Riset inovasi menjadi elemen penting dalam strategi ini. Pengembangan teknologi baru yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan SDA. Investasi dalam penelitian dan pengembangan inovatif juga membuka peluang untuk menemukan cara-cara baru dalam mendapatkan dan mengelola sumber daya alam. Dukungan pemerintah, baik melalui alokasi anggaran maupun insentif pajak untuk riset dan inovasi, akan merangsang partisipasi sektor swasta dan lembaga riset dalam pengembangan solusi-solusi baru yang berkelanjutan.

Peningkatan produktivitas tenaga kerja lokal dapat dicapai dengan memprioritaskan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Program pelatihan yang efektif harus diarahkan pada mengisi kesenjangan keterampilan yang ada dan mempersiapkan tenaga kerja lokal untuk berkontribusi dalam proses hilirisasi. Keterlibatan aktif pihak-pihak terkait, seperti industri dan lembaga pendidikan, akan membantu menciptakan jembatan yang erat antara dunia pendidikan dan industri. Selain itu, insentif pajak atau dukungan keuangan lainnya untuk perusahaan yang menerapkan kebijakan peningkatan keterlibatan tenaga kerja lokal dapat merangsang pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan keberlanjutan penggunaan sumber daya alam. Dengan sinergi antara hilirisasi, riset inovasi, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja lokal, strategi ini dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam.

Pada periode kedua (2030-2034), arah kebijakan diarahkan untuk peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber-sumber pertumbuhan

ekonomi, langkah-langkah strategis perlu ditempuh. Pertama, fokus utama harus diberikan pada investasi dalam infrastruktur yang mendukung konektivitas dan mobilitas. Pembangunan jaringan transportasi modern, termasuk jalan raya dan pelabuhan yang akan memfasilitasi distribusi barang dan jasa secara efisien, membuka akses ke wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Infrastruktur digital juga perlu diperkuat, memastikan konektivitas internet yang cepat dan handal, memberikan dorongan bagi sektor-sektor seperti e-commerce dan teknologi informasi.

Kedua, pemerintah perlu mendorong inovasi dan teknologi dalam berbagai sektor ekonomi. Program insentif dan pendanaan untuk riset dan pengembangan dapat mendorong adopsi teknologi canggih dan manufaktur digital. Peningkatan produktivitas dapat dicapai dengan mengotomatisasi proses-produksinya, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi biaya produksi. Selain itu, pendekatan kebijakan yang mendukung startup dan industri kreatif akan memberikan dorongan pada sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Terakhir, peningkatan produktivitas dan perluasan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan pengembangan sumber daya manusia. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja akan mempersiapkan tenaga kerja untuk menghadapi tuntutan ekonomi yang terus berubah. Program pelatihan yang didukung oleh pemerintah dan sektor swasta dapat membantu mengisi kesenjangan keterampilan dan memastikan bahwa tenaga kerja memiliki keterampilan yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Dengan merangkul pendekatan yang holistik melibatkan infrastruktur, inovasi teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia, suatu strategi komprehensif dapat membawa dampak positif pada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Pada periode ketiga (2035-2039) arah pengembangan wilayah didukung oleh perluasan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi serta peningkatan integrasi jaringan rantai ekonomi untuk memperluas akses pasar. Fokus pada investasi dalam infrastruktur teknologi dan konektivitas digital pada tahap ini dapat membentuk dasar transformasi digital. Hal ini mencakup pengembangan jaringan internet yang cepat, serta implementasi teknologi berbasis cloud dan big data untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas data. Dukungan pemerintah dalam bentuk insentif dan kebijakan yang mendukung pengembangan infrastruktur teknologi menjadi penting dalam mendorong perluasan pemanfaatan teknologi.

Selain itu, promosi adopsi teknologi di berbagai sektor ekonomi juga perlu dilakukan melalui penyediaan insentif untuk perusahaan yang mengadopsi teknologi digital, peluncuran

program pelatihan keterampilan digital, dan penciptaan lingkungan regulasi yang mendukung inovasi. Pendidikan dan pelatihan keterampilan digital juga harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa tenaga kerja memiliki keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital. Dengan meningkatkan tingkat adopsi teknologi di berbagai sektor, akan terjadi efisiensi operasional dan perluasan akses pasar.

Selanjutnya, kerjasama antara pelaku bisnis dalam rantai pasok juga diperkuat untuk mengurangi hambatan birokratis dan meningkatkan integrasi. Selain itu, program kemitraan antara sektor swasta, pemerintah, dan lembaga keuangan juga dapat diperkuat untuk mendukung inisiatif integrasi rantai pasok. Dengan demikian, pelaku bisnis, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dapat mengakses pasar secara lebih luas, meningkatkan daya saing, dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Periode keempat (2040-2044) yang merupakan periode perencanaan terakhir, fokus kebijakan diarahkan pada implementasi sistem pemantauan yang komprehensif untuk mengukur kemajuan ekonomi setempat. Indikator seperti pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), rasio kewirausahaan, tingkat kemiskinan, rasio gini, dan tingkat pengangguran terbuka dapat menjadi ukuran pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan dalam mencapai kemandirian ekonomi. Evaluasi rutin dan periodik akan memberikan gambaran yang akurat tentang sejauh mana kebijakan dan inisiatif yang diambil telah mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Evaluasi berkelanjutan perlu fokus pada inklusivitas ekonomi. Pemerintah dapat melibatkan kelompok masyarakat lokal dalam proses evaluasi untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok perempuan, kelompok etnis, dan pelaku usaha kecil. Evaluasi ini juga melibatkan penilaian dampak keberlanjutan lingkungan. Dalam rangka mewujudkan ekonomi yang berkelanjutan, penting untuk mengukur dampak lingkungan dari kegiatan ekonomi. Evaluasi dapat mencakup parameter seperti penggunaan sumber daya alam, emisi gas rumah kaca, dan dampak terhadap keanekaragaman hayati. Dengan memonitor dampak lingkungan secara cermat, pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan-kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa merugikan lingkungan alam yang berharga. Dengan menerapkan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan yang holistik, Muna Barat dapat memastikan bahwa perwujudan ekonominya tetap sejalan dengan prinsip kemandirian, inklusivitas, dan berdaya saing. Proses ini juga memberikan landasan data yang kuat untuk perbaikan dan penyesuaian

kebijakan selanjutnya, menjaga keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang dalam mewujudkan visi ekonomi yang berkelanjutan.

Misi 3. Mewujudkan infrastruktur berkelanjutan dan tata ruang wilayah yang inklusif, ramah lingkungan, dan berkeadilan



Gambar 5. 5 Pentahapam Arah Kebijakan Misi 3

Misi untuk mewujudkan infrastruktur berkelanjutan dan tata ruang wilayah yang inklusif, ramah lingkungan, dan berkeadilan diimplementasikan melalui empat tahap arah kebijakan yang dirancang untuk mengatasi tantangan tersebut. Pada tahap pertama, arah kebijakan menitikberatkan pada pemenuhan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pelayanan publik serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dalam konteks tata ruang. Dalam konteks ini, pemenuhan ketersediaan infrastruktur pelayanan publik di Kabupaten Muna Barat mengacu pada penyediaan fasilitas dan layanan mendasar yang dibutuhkan masyarakat, seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, dan utilitas umum lainnya. Pemastian kualitas infrastruktur menjadi fokus untuk memberikan pelayanan yang handal dan efisien kepada seluruh lapisan masyarakat. Pada saat yang sama, pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan mencakup upaya pelestarian sumber daya alam, pengurangan dampak lingkungan, dan penerapan praktik-praktik ramah lingkungan dalam pengembangan infrastruktur.

Maksud dari arah kebijakan ini adalah menciptakan landasan yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan dengan memprioritaskan keberlanjutan lingkungan dan peningkatan kualitas tata ruang. Langkah-langkah konkrit seperti peningkatan efisiensi energi, pelestarian area hijau, dan peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan publik akan

membentuk fondasi untuk mewujudkan tata ruang yang inklusif dan berkeadilan. Aksesibilitas memainkan peran yang krusial dalam mendukung ketahanan suatu wilayah karena kemampuan untuk dengan mudah mengakses sumber daya, layanan kritis, dan informasi yang diperlukan dalam situasi darurat maupun kondisi normal. Dengan infrastruktur yang mudah diakses, wilayah tersebut dapat merespon lebih efektif terhadap bencana alam, keadaan darurat, atau tantangan lainnya. Aksesibilitas yang baik juga memperkuat konektivitas antarwilayah, memungkinkan redistribusi sumber daya dan bantuan dengan cepat, sehingga membentuk fondasi yang kokoh untuk ketahanan komunitas dan keberlanjutan ekonomi. Tahap pertama ini tidak hanya menekankan pada pembangunan fisik, tetapi juga pada harmonisasi antara pelayanan publik, lingkungan hidup, dan tata ruang untuk mencapai tujuan misi secara holistic di Kabupaten Muna Barat.

Tahap kedua dalam arah kebijakan ini mengarah pada pengembangan pemanfaatan infrastruktur dan pengelolaan tata ruang yang efisien, dengan penuh perhatian terhadap prinsip keberlanjutan di Kabupaten Muna Barat. Upaya pengembangan infrastruktur berfokus pada optimalisasi penggunaan fasilitas publik, melibatkan peningkatan konektivitas transportasi, integrasi teknologi dalam manajemen infrastruktur, dan peningkatan kapasitas layanan publik. Langkah-langkah ini bertujuan memastikan bahwa infrastruktur yang ada dimanfaatkan secara efisien, sehingga mampu memberikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat, sambil tetap mempertimbangkan dampak lingkungan.

Di sisi pengelolaan tata ruang, tahap kedua menekankan keberlanjutan sebagai prinsip utama. Ini mencakup perencanaan ruang yang seimbang antara pembangunan dan pelestarian lingkungan, dengan memprioritaskan prinsip-prinsip desain kota yang berkelanjutan. Penataan ruang yang efisien, pelestarian ruang terbuka hijau, dan penekanan pada transportasi berkelanjutan menjadi elemen-elemen kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Melalui tahap kedua ini, diharapkan dapat terwujud infrastruktur yang tidak hanya efisien dalam pemanfaatannya, tetapi juga memperhitungkan keberlanjutan sebagai pijakan utama dalam setiap aspek pembangunan dan pengelolaan tata ruang di Kabupaten Muna Barat.

Tahap ketiga dari arah kebijakan ini mengarah pada perluasan akses terhadap infrastruktur dan pemanfaatan tata ruang dengan penekanan utama pada keberlanjutan lingkungan. Fokus utama tahap ini adalah memastikan bahwa akses masyarakat Kabupaten Muna Barat terhadap infrastruktur yang diperlukan dapat diperluas secara merata, sekaligus mempertimbangkan dampak lingkungan yang berkelanjutan. Perluasan akses terhadap

infrastruktur mengacu pada upaya meningkatkan jangkauan dan ketersediaan fasilitas publik, terutama di daerah yang mungkin sebelumnya kurang terlayani. Ini mencakup pengembangan transportasi umum, penyediaan air bersih, dan peningkatan aksesibilitas terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Dengan meratakan akses ini, diharapkan kesenjangan infrastruktur antarwilayah dapat diminimalkan, sambil tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan.

Selanjutnya, pemanfaatan tata ruang dalam tahap ketiga ini ditekankan pada cara yang ramah lingkungan. Perencanaan dan penggunaan lahan yang bijaksana menjadi fokus untuk memastikan bahwa pengembangan wilayah tidak merugikan lingkungan, melainkan mempromosikan pelestarian sumber daya alam. Keberlanjutan lingkungan menjadi dasar untuk penentuan lokasi pembangunan, dengan memprioritaskan pelestarian habitat alam dan pemanfaatan lahan yang efisien. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan tahap ketiga dapat memberikan kontribusi positif terhadap ketersediaan infrastruktur, sambil tetap memastikan keberlanjutan lingkungan sebagai komitmen utama dalam proses pembangunan.

Tahap keempat dari arah kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan ruang hidup dan infrastruktur di Kabupaten Muna Barat yang berkualitas, berkelanjutan, dan inklusif bagi seluruh masyarakat. Pencapaian kualitas tinggi dalam ruang hidup dan infrastruktur mencakup aspek-aspek seperti keamanan, ketersediaan layanan publik, dan kondisi bangunan yang memadai. Upaya ini bertujuan agar masyarakat dapat menikmati lingkungan yang nyaman, aman, dan mendukung kehidupan sehari-hari mereka.

Keberlanjutan menjadi landasan utama dalam pengembangan ruang hidup dan infrastruktur pada tahap ini. Hal ini mencakup integrasi praktik-praktik ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan, manajemen limbah yang efisien, dan pertimbangan dalam pemanfaatan lahan. Dengan demikian, infrastruktur yang dikembangkan tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan.

Selain itu, tahap keempat ini memprioritaskan inklusivitas di Kabupaten Muna Barat, dengan fokus pada aksesibilitas infrastruktur untuk semua warga, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi. Langkah-langkah ini mencakup peningkatan akses bagi mereka yang mungkin sebelumnya kurang terlayani, menciptakan lingkungan yang inklusif dan setara bagi seluruh komunitas. Dengan menggabungkan konsep berkualitas, berkelanjutan, dan inklusivitas, tahap ini diharapkan dapat menciptakan kondisi ruang hidup dan infrastruktur yang memadukan kebutuhan masyarakat dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh.

Misi 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, kolaboratif, dan profesional



Gambar 5. 6 Pentahapam Arah Kebijakan Misi 4

Arah kebijakan pada tahap pertama yang mengenai pengembangan sistem pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai dengan kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar mengarah pada usaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Maksud dari arah kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui beberapa langkah konkret. Terdapat penekanan pada pengembangan sistem pelayanan publik. Hal mencakup upaya untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Perbaikan proses layanan dan penerapan teknologi informasi dianggap sebagai langkah penting dalam meningkatkan kualitas keseluruhan sistem.

Selanjutnya, arah kebijakan ini menitikberatkan pada peningkatan kompetensi pegawai pemerintah. Hal ini mencakup upaya memberdayakan aparatur pemerintah dengan peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan etika kerja. Dengan meningkatkan kompetensi, diharapkan pegawai pemerintah dapat melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan mereka dengan lebih baik. Penting juga dicatat bahwa arah kebijakan ini menekankan keterkaitannya dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM digunakan sebagai acuan untuk menentukan kewenangan dan spesifikasi tugas di setiap unit pelayanan publik. Dengan demikian, diharapkan setiap unit dapat beroperasi secara efektif sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, arah kebijakan ini memiliki tujuan akhir untuk memastikan

ketersediaan dan kualitas pelayanan dasar, seperti pendidikan, dengan meningkatkan efisiensi, kompetensi, dan keteraturan dalam sistem pelayanan publik.

Arah kebijakan pada tahap kedua yaitu mengenai pembangunan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan tepat fungsi disertai peningkatan kualitas ASN dan regulasi yang efektif yang didukung oleh digitalisasi pelayanan publik menekankan langkah-langkah konkret untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan modern. Arah kebijakan ini fokus pada pembangunan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, di mana sinergi antarinstansi pemerintah menjadi landasan utama. Tepatnya penempatan fungsi pemerintah sesuai dengan tugas dan kewenangannya menjadi fokus, sehingga setiap unit dapat beroperasi secara efisien dan efektif.

Peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi prioritas dalam arah kebijakan ini. Melalui program pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas pegawai, diharapkan ASN dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan meningkatkan profesionalisme ASN, dapat diperoleh tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan berkualitas. Regulasi yang efektif juga menjadi fokus pada tahap kedua ini. Upaya untuk menyusun regulasi yang jelas, efisien, dan relevan akan memperkuat landasan hukum bagi kebijakan pemerintah. Hal ini tidak hanya mendukung tata kelola yang baik tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha. Selanjutnya, arah kebijakan ini mengadvokasi digitalisasi pelayanan publik sebagai sarana untuk mendukung efisiensi dan aksesibilitas. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, diharapkan pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat dan terjangkau. Digitalisasi juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Arah kebijakan pada tahap ketiga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan dengan berfokus pada prinsip good governance, penerapan e-government, dan mendorong kerjasama antar wilayah Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Prinsip good governance menjadi fondasi kunci dalam upaya meningkatkan kapabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan efektivitas institusi, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Penerapan e-government menjadi strategi penting dalam mendukung peningkatan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi diharapkan dapat mengoptimalkan proses administratif, meningkatkan efisiensi, serta memberikan layanan publik yang lebih cepat dan terjangkau.

Selain itu, e-government juga diharapkan dapat memperkuat transparansi dengan menyediakan akses yang lebih mudah bagi masyarakat terhadap informasi pemerintah.

Kerjasama antar wilayah kabupaten/kota maupun provinsi menjadi elemen kunci dalam mewujudkan peningkatan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan. Kolaborasi ini mencakup pertukaran sumber daya, informasi, dan praktik terbaik antar daerah. Dengan memperkuat kerjasama, diharapkan dapat tercipta sinergi yang mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di berbagai wilayah. Secara keseluruhan, tahap ketiga ini menjadikan prinsip good governance, e-government, dan kerjasama antar wilayah sebagai pilar utama untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang lebih adaptif, efektif, dan responsif.

Arah kebijakan pada tahap keempat menargetkan perwujudan tata kelola pemerintahan Kabupaten Muna Barat yang berintegrasi, kolaboratif, dan profesional. Fokus pada tahap ini adalah mengintegrasikan seluruh komponen penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan secara bersinergi dan efisien. Aspek integrasi dalam arah kebijakan ini menjadi hal penting yang mencakup penyalarsan dan penggabungan berbagai program dan kebijakan yang ada. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pemerintah saling mendukung dan tidak saling bertentangan. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan dapat berjalan secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan pembangunan secara holistik.

Kolaborasi menjadi kunci dalam tahap keempat ini, di mana pemerintah Kabupaten Muna Barat diharapkan dapat bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, masyarakat sipil, dan pemerintah daerah lainnya. Kolaborasi ini dapat melibatkan pertukaran informasi, sumber daya, dan pengalaman untuk mengatasi berbagai tantangan dan menciptakan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian, profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi fokus utama. Ini melibatkan peningkatan kapabilitas aparatur pemerintah, penerapan standar etika, dan peningkatan efisiensi administratif. Dengan meningkatkan profesionalisme, diharapkan pemerintahan Kabupaten Muna Barat dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Misi 5. Mewujudkan ekosistem wilayah yang berketahanan, tangguh, dan adaptif



Gambar 5. 7 Pentahapam Arah Kebijakan Misi 5

Misi pembangunan Kabupaten Muna Barat dalam mewujudkan ekosistem wilayah yang berketahanan, tangguh, dan adaptif diimplementasikan dalam empat tahap arah kebijakan. Arah kebijakan tahap pertama yang berfokus pada penguatan ketahanan wilayah sebagai landasan dan modal dasar pembangunan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap konsep ketahanan wilayah sebagai fondasi utama bagi perkembangan wilayah. Penguatan ketahanan wilayah diartikan sebagai upaya menyeluruh untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko, tantangan, dan perubahan lingkungan. Dalam konteks ini, ketahanan wilayah bukan hanya sekadar respons terhadap bencana alam, tetapi juga melibatkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk menciptakan landasan yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Langkah pertama ini menekankan pentingnya membangun fondasi yang kuat melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam mengelola risiko dan meningkatkan kesiapan terhadap perubahan. Dengan memprioritaskan ketahanan wilayah sebagai modal dasar pembangunan, tahap pertama ini berusaha menciptakan lingkungan yang mampu menghadapi tantangan jangka pendek dan panjang, memastikan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan.

Arah kebijakan tahap kedua membawa konsep peningkatan ketahanan wilayah ke tingkat lebih tinggi dengan menitikberatkan pada persiapan masyarakat dan ekologi yang tangguh. Penguatan ketahanan wilayah diarahkan pada pengembangan kapasitas adaptif masyarakat serta perlindungan dan konservasi ekosistem. Hal ini mencakup program pelatihan

dan edukasi yang mendalam untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana dan perubahan lingkungan, serta penerapan praktik-praktik konservasi yang berkelanjutan. Langkah-langkah konkret dalam tahap ini melibatkan penyusunan rencana adaptasi yang terintegrasi, mencakup pemetaan risiko, pengembangan jalur evakuasi, dan upaya-upaya untuk memperkuat struktur sosial dan ekologi. Sistem informasi yang terpadu juga diimplementasikan untuk memastikan akses cepat dan akurat terhadap informasi terkini terkait risiko dan penanganan darurat. Dengan peningkatan ketahanan wilayah yang difokuskan pada kesiapsiagaan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem, tahap kedua ini membawa dampak positif yang signifikan terhadap resiliensi dan daya tangguh wilayah.

Arah kebijakan tahap tiga, "Pemantapan ketangguhan masyarakat dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan," menunjukkan kesinambungan komitmen dalam menghadapi dinamika perubahan dengan memberikan penekanan pada upaya pemantapan ketangguhan. Fokus utama pada tahap ini adalah memastikan bahwa masyarakat dan lingkungan wilayah memiliki kapasitas yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang. Pemantapan ketangguhan masyarakat diimplementasikan melalui program-program pelatihan lanjutan, peningkatan akses terhadap sumber daya, dan penguatan struktur sosial yang inklusif. Langkah-langkah konkret juga mencakup pengembangan mekanisme perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara langsung. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, terutama terkait dengan kebijakan yang memengaruhi ketahanan wilayah, menjadi kunci untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dan relevan. Selain itu, pemantapan ketangguhan lingkungan melibatkan inisiatif-inisiatif konservasi yang lebih mendalam, pemulihan ekosistem yang terdegradasi, dan penerapan praktik-praktik berkelanjutan untuk menjaga keberlanjutan ekologi.

Melalui tahap ini, harapannya adalah mencapai tingkat ketangguhan yang lebih tinggi, di mana masyarakat dan lingkungan tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga berkembang positif di bawah tekanan perubahan yang terus-menerus. Kolaborasi antara semua pemangku kepentingan tetap menjadi elemen kunci dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pada tahap ini, menciptakan fondasi yang lebih kokoh bagi pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan tangguh.

Tahap keempat berfokus pada arah kebijakan untuk perwujudan Kabupaten Muna Barat yang berketahanan, tangguh, dan adaptif. Arah kebijakan ini merupakan puncak dari serangkaian langkah strategis yang telah diambil untuk mengembangkan ekosistem wilayah secara komprehensif. Pada tahap ini, fokus utama ditekankan pada implementasi konsep-

konsep ketahanan, keberlanjutan, dan adaptabilitas secara konkret di tingkat Kabupaten Muna Barat. Arah kebijakan ini mendorong penerapan langkah-langkah strategis dan inovatif yang dapat menghadapi tantangan masa depan, termasuk bencana alam, perubahan iklim, dan dinamika sosial-ekonomi.

Pencapaian Kabupaten Muna Barat yang berketahanan mengharuskan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga non-profit. Kolaborasi lintas-sektor ini esensial untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang holistik dan berkelanjutan. Penerapan teknologi yang terkini dan integrasi sistem informasi yang terpadu diharapkan dapat memastikan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan inisiatif pembangunan berkelanjutan. Perwujudan Kabupaten Muna Barat yang adaptif menciptakan lingkungan yang responsif terhadap perubahan dan mampu mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Kebijakan ini juga mempromosikan keberlanjutan, memastikan bahwa upaya pembangunan saat ini tidak mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Dengan mengintegrasikan konsep-konsep ini ke dalam kebijakan pembangunan, diharapkan Kabupaten Muna Barat dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam mewujudkan ekosistem wilayah yang berdaya tahan, tangguh, dan adaptif secara berkelanjutan.

5.2. SASARAN POKOK

Fokus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2025-2045 menjadi poin sentral yang memberikan arah dan konsentrasi untuk mencapai visi yang telah dirumuskan. Sasaran ini mencakup serangkaian pencapaian yang harus direalisasikan selama periode tersebut, dengan memperhatikan setiap tahapannya. Penggunaan indikator tingkat dampak yang bersifat progresif menjadi aspek kunci dalam menetapkan pencapaian ini. Oleh karena itu, setiap tindakan dan program pembangunan akan dinilai berdasarkan dampak positif yang dihasilkan, dan yang lebih penting, perkembangan yang terjadi seiring berjalannya waktu.

Penerapan indikator tingkat dampak memungkinkan pemantauan yang lebih efisien terhadap kemajuan pembangunan, dengan mengukur apakah tujuan dan visi daerah telah diwujudkan secara konkret. Sasaran pokok yang dibuat berdasarkan indikator ini juga membantu memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memiliki relevansi dengan visi dan tujuan jangka panjang. Dengan demikian, RPJPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2025-2045 dapat menjadi alat yang efektif dalam mengarahkan upaya pembangunan di Kabupaten Muna Barat menuju masa depan yang lebih baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Tabel 5. 2 Arah Pembangunan dan Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2025-2045

NO	MISI	TRANSFORMASI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	SASARAN POKOK
1.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan masyarakat yang berkualitas, unggul, cerdas, sehat, beriman, dan berbudaya	Transformasi Sosial	IE1. Kesehatan untuk Semua	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, sarana prasarana yang lengkap, serta pengembangan jaminan kesehatan	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, sarana prasarana yang lengkap, serta pelayanan kesehatan yang bermutu
				Penyuluhan/ sosialisasi upaya kesehatan dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif yang didukung oleh upaya kuratif dan rehabilitatif khususnya terkait stunting dan penyakit lainnya	
			IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	Peningkatan kualitas pendidikan melalui pemerataan dan akses pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan	Meningkatnya sumberdaya pendidikan yang handal, tata kelola pendidikan yang sistematis, dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak.
	Peningkatan mutu SDM pendidik, relevansi, akuntabilitas dan daya saing pendidikan, serta peningkatan sarana dan prasarana sekolah yang berkualitas sebagai upaya pemenuhan standar pendidikan				

NO	MISI	TRANSFORMASI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	SASARAN POKOK
			IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	Fasilitasi peningkatan kesempatan kerja/berusaha, peningkatan kesejahteraan sosial dan perlindungan tenaga kerja serta peningkatan kualitas tenaga kerja yang mampu bersaing di era global yang berdampak pada stabilitas ekonomi	Perwujudan ekonomi Muna Barat yang mandiri, inklusif, dan berdaya saing
			IE 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Pengembangan sikap dan perilaku masyarakat yang beriman, bertakwa, inovatif, dan kreatif, serta peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemberdayaan	Meningkatnya perilaku masyarakat yang bermoral, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan tetap menjunjung toleransi antar suku dan agama serta nilai-nilai Pancasila
				Terwujudkannya pengembangan dan pelestarian fungsi kawasan budaya, adat, bahasa daerah dan peninggalan sejarah sebagai identitas masyarakat lokal	Meningkatnya kesadaran akan pelestarian budaya, adat, bahasa daerah dan peninggalan sejarah sebagai identitas masyarakat lokal
			IE 14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan serta peningkatan keluarga berkualitas	Kesetaraan dan keadilan pembangunan melalui kebijakan yang responsif gender dan peningkatan kualitas keluarga

NO	MISI	TRANSFORMASI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	SASARAN POKOK
2.	Mewujudkan kemandirian ekonomi dan daya saing berbasis potensi lokal melalui dukungan IPTEKIN dengan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat	Transformasi Ekonomi	IE 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Peningkatan kualitas dan mutu sektor pendukung Indeks Pembangunan Manusia yang merata dan berkeadilan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing dengan memanfaatkan IPTEKIN secara berkesinambungan
				Mendorong pengembangan standarisasi produk dan jasa untuk meningkatkan daya saing, meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah (UKM) di daerah, sehingga memperkuat basis ekonomi dalam negeri.	Mewujudkan kemandirian ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan industri, UMKM dan perdagangan yang berorientasi ekspor untuk mengurangi kesenjangan
				Peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat lokal melalui berbagai aspek yang mendukung peningkatan perekonomian dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan	
			IE 5. Penerapan Ekonomi Hijau	Memperkuat Sistem agribisnis dan agroindustri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian, kehutanan dan kelautan yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh	Mendorong pertumbuhan ekonomi baru (ekonomi biru, bioekonomi, dan ekonomi kreatif) dengan tujuan untuk membuka lapangan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat.

NO	MISI	TRANSFORMASI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	SASARAN POKOK
			IE 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Pengembangan perekonomian daerah yang berorientasi dan berdaya saing global dengan memanfaatkan sebesar-besarnya potensi lokal yang memerhatikan sumber daya alam secara berkelanjutan dan membangun keterkaitan sistem produksi dan distribusi ekonomi lokal yang kokoh.	Meningkatnya pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam untuk menjamin ketahanan pangan daerah dan pelestarian fungsi lingkungan hidup
			IE 11. Stabilitas Ekonomi Makro	Mengupayakan pengembangan kelembagaan ekonomi melalui penciptaan regulasi dan perizinan yang efisien, efektif, nondiskriminatif dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat, serta melindungi konsumen di berbagai sektor untuk menghindari kesenjangan di antara masyarakat	Perwujudan ekonomi Muna Barat yang mandiri, inklusif, dan berdaya saing
				Menjadikan wisata Kab. Muna Barat sebagai bagian dari agenda wisata Unggulan Provinsi Sulawesi Tenggara	
				Pengembangan pasar tradisional yang maju, mampu memberikan ruang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat yang didukung oleh promosi yang berbasis teknologi	

NO	MISI	TRANSFORMASI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	SASARAN POKOK
3.	Mewujudkan infrastruktur berkelanjutan dan tata ruang wilayah yang inklusif, ramah lingkungan, dan berkeadilan	Landasan Transformasi	IE 8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Pengembangan sistem pembangunan penataan ruang yang diarahkan pada pembangunan wilayah yang terpadu, nyaman, efisien dalam pengelolaan, serta mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan rencana tata ruang sebagai landasan atau acuan kebijakan spasial bagi pembangunan lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan seimbang.	Meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, dan lingkungan di desa
				Pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni dan lingkungan yang sehat, aman dan nyaman, bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah serta terintegrasinya sarana prasarana permukiman	Meningkatnya ketahanan infrastruktur wilayah yang andal
			IE 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Pengembangan sistem penanganan sanitasi pada permukiman yang diarahkan pada peningkatan kesadaran seluruh pihak yang terlibat terhadap pentingnya peningkatan pengelolaan dan pelayanan persampahan dan drainase	Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan prasarana dan sarana pelayanan dasar wilayah

NO	MISI	TRANSFORMASI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	SASARAN POKOK
				Pengembangan sumber daya air untuk penyediaan air yang berkelanjutan, peningkatan cakupan pelayanan kebutuhan air bersih serta penanganan sumber daya air secara terpadu lintas wilayah	
4.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, kolaboratif, dan profesional	Transformasi Tata Kelola	IE 6. Transformasi Digital	Peningkatan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip good governance guna memperkuat pelaksanaan otonomi daerah yang di dukung oleh penerapan e-government dan pengembangan kerjasama antar wilayah Kabupaten/Kota maupun Provinsi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat
			IE 9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Pengembangan pelayanan pemerintahan yang semakin baik, dengan menerapkan sistem informasi manajemen daerah yang didukung oleh infrastruktur teknologi informasi yang handal untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat Pengembangan sistem pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai dengan kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar	Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, beretika, dan bertanggung jawab, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)

NO	MISI	TRANSFORMASI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	SASARAN POKOK
				<p>Penyelenggaraan evaluasi dan monitoring kinerja pemerintah daerah yang profesional dan berkualitas</p> <p>Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika dan bertanggungjawab serta anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme</p> <p>Peningkatan kapasitas dan kemandirian kemampuan keuangan daerah disertai dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang potensial serta dikelola dengan mengembangkan prinsip-prinsip akuntabel, transparan, ekonomis, efisien dan efektif guna mewujudkan kemandirian pembangunan daerah</p>	
5.	Mewujudkan ekosistem wilayah yang berketahanan, tangguh, dan adaptif	Kerangka Implementasi Transformasi	IE 15. Lingkungan Hidup Berkualitas	Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang efektif berdasarkan tata kelola yang baik melalui perumusan kebijakan yang berwawasan lingkungan, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat.	Meningkatkan penanganan lingkungan yang berkelanjutan

NO	MISI	TRANSFORMASI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	SASARAN POKOK
			IE 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Penanganan yang terintegrasi dalam sistem pengelolaan sampah dan limbah yang ramah terhadap lingkungan serta menjamin daya dukung pembangunan berkelanjutan sehingga berdampak pada penurunan GRK	Meningkatkan ketahanan Kabupaten Muna Barat dari berbagai ancaman bencana

Tabel 5.3 Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Muna Barat 2025 – 2045

NO	ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	CAPAIAN		KETERANGAN
				BASELINE 2025	TARGET 2045	
1	IE1. Kesehatan untuk Semua	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, sarana prasarana yang lengkap, serta pelayanan kesehatan yang bermutu	Usia Harapan Hidup	71,17	78,3	
			Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	208	20	
			Prevalensi Stunting	24,4	6	
			Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (%)	51	100	
			Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (%)	87	100	
			Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	100	100	

NO	ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	CAPAIAN		KETERANGAN
				BASELINE 2025	TARGET 2045	
2	IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	Meningkatnya sumberdaya pendidikan yang handal, tata kelola pendidikan yang sistematis, dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak.	Literasi Membaca	63,325	82	
			Numerasi	61,425	80	
			Rata-Rata Lama Sekolah	7,86	12,5	
			Harapan Lama Sekolah	12,62	15,5	
			Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	22,98	26,02	
3	IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	Perwujudan ekonomi Muna Barat yang mandiri, inklusif, dan berdaya saing	Tingkat Kemiskinan	14,03	1,35	
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	100	100	
4	IE 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Meningkatnya perilaku masyarakat yang bermoral, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan tetap menjunjung toleransi antar suku dan agama serta nilai-nilai Pancasila	Indeks Pembangunan Kebudayaan	0	60	

NO	ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	CAPAIAN		KETERANGAN
				BASELINE 2025	TARGET 2045	
		Meningkatnya kesadaran akan pelestarian budaya, adat, bahasa daerah dan peninggalan sejarah sebagai identitas masyarakat lokal	Indeks Kerukunan Umat Beragama	0	83	
5	IE 14. Keluarga Berkualitas, Keadilan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Keadilan pembangunan melalui kebijakan yang responsif gender dan peningkatan kualitas keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	51,27	75	
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,586	0,29	
6	IE 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing dengan memanfaatkan IPTEKIN secara berkesinambungan	Rasio PDRB Industri Pengolahan	2,74	8,5	
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum	0,15	1,04	
			Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)	0	0,12	
		Mewujudkan kemandirian ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan industri, UMKM dan perdagangan yang	Rasio Kewirausahaan	5,15	8,68	
			Tingkat Pengangguran Terbuka	2,22	1,5	
			Indeks Inovasi Daerah	22,48	60,48	

NO	ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	CAPAIAN		KETERANGAN
				BASELINE 2025	TARGET 2045	
		berorientasi ekspor untuk mengurangi kesenjangan	Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan	58,27	73,4	
7	IE 5. Penerapan Ekonomi Hijau	Mendorong pertumbuhan ekonomi baru (ekonomi biru, bioekonomi, dan ekonomi hijau) dengan tujuan untuk membuka lapangan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat.	Indeks Ekonomi Hijau Daerah :			
			Persentase Luas Tutupan Hutan dari Luas Daratan	4,73	5,5	
			Kualitas Air	71,55	90	
			Kualitas Udara	87,7	95	
			Produktivitas Pertanian (ton/ha)	13,09	27,01	
8	IE 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Meningkatnya pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam untuk menjamin ketahanan pangan daerah dan pelestarian fungsi lingkungan hidup	Ekspor Barang dan Jasa (%)	17,32	57,9	
9	IE 11. Stabilitas Ekonomi Makro	Perwujudan ekonomi Muna Barat yang mandiri, inklusif, dan berdaya saing	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	1,21	4,4	
			Indeks Perkembangan Harga (IPH)	0,53	0,95-2	

NO	ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	CAPAIAN		KETERANGAN
				BASELINE 2025	TARGET 2045	
10	IE 8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, dan lingkungan di desa	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	0	100	
		Meningkatnya ketahanan infrastruktur wilayah yang andal	Persentase Desa Mandiri (%)	0	3,09	
11	IE 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan prasarana dan sarana pelayanan dasar wilayah	Konsumsi Listrik Per Kapita (Kwh)	n.a	3200	
			Prevalensi Ketidacukupan konsumsi Pangan	n.a	0,66	
			Kapasitas Air Baku	0	4	
			Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan	0	100	
12	IE 6. Transformasi Digital	Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat	Indeks Pembangunan TIK	0	7,5	
13		Meningkatnya profesionalisme	Indeks Pelayanan Publik	2,75	5	

NO	ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	CAPAIAN		KETERANGAN
				BASELINE 2025	TARGET 2045	
	IE 9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, beretika, dan bertanggung jawab, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1,82	5	
			Indeks Reformasi Hukum	57,66	95	
14	IE 15. Lingkungan Hidup Berkualitas	Meningkatkan penanganan lingkungan yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,92	88,68	
			Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	0	50	
15	IE 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan Kabupaten Muna Barat dari berbagai ancaman bencana	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	0	73,94	

5.3. KINERJA WAJIB KABUPATEN MUNA BARAT

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah bertujuan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi aktif masyarakat. Mengingat perbedaan karakteristik tiap daerah dan untuk memastikan bahwa otonomi daerah benar-benar mengutamakan kesejahteraan masyarakat secara adil, diharapkan setiap daerah otonom tetap berfokus pada tujuh aspek pembangunan. Oleh karena itu, selain mencapai target kinerja yang mencerminkan visi pembangunan hingga tahun 2045, berikut merupakan target kinerja wajib Kabupaten Muna Barat:

Tabel 5.4 Kinerja Wajib Kabupaten Muna Barat 2025-2045

VISI	INDIKATOR	TARGET			
		I (2025-2029)	II (2030-2034)	III (2035-2039)	IV (2040-2044)
MUNA BARAT 2045 YANG MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN	IPM	70,16	72,98	75,79	78,6
	Prevalensi Stunting	14,05	11,11	9,08	6,28
	Prevalensi Kesakitan Penduduk	12,93	10,12	8,1	6
	Angka Kriminalitas	66,23	53,94	41,68	29,42
	iBangga	65,5	69,8	73,2	75
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,55	0,41	0,37	0,29
	Persentase Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	36%	55%	73%	100%

VISI	INDIKATOR	TARGET			
		I (2025-2029)	II (2030-2034)	III (2035-2039)	IV (2040-2044)
	LPE (%)	5,2	6,68	7,12	8,56
	PDRB per kapita	43,05	48,11	52,62	56,81
	Angka kemiskinan (%)	10,47	7,43	4,39	1,35
	Rasio kewirausahaan	7,23	7,78	8,33	8,68
	Gini rasio	0,318	0,314	0,312	0,30
	Net Ekspor	-1.290.692,89	-1.181.605,63	-1.081.738,24	-990.311,49
	TPT	2,2	2	1,7	1,5
	Produktivitas tenaga kerja	75,2	84,92	94,7	104,5
	IKLH	79,04	83,67	85,82	88,68
	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	62,7	73,03	85,15	93,42
	Persentase Rumah Layak Huni	75,58	78,8	82,16	85,66
	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi	84,08	87,86	91,8	95,94
	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan, dan Pedesaan	92,25	96,96	98,49	100

VISI	INDIKATOR	TARGET			
		I (2025-2029)	II (2030-2034)	III (2035-2039)	IV (2040-2044)
	Indeks Pelayanan Publik	95	97	99	100
	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,15	93,24	95,35	97,52
	Nilai SAKIP Daerah	B	BB	A	A
	Indeks Profesionalitas ASN	60-62 (rendah)	63-66 (rendah)	67-70 (rendah)	71-73 (sedang)
	Indeks Reformasi Birokrasi	56,54	64,45	73,77	74,81
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,332	2,932	3,532	4
	Indeks Inovasi Daerah	31,98 (inovatif)	41,48 (inovatif)	50,98 (inovatif)	60,48 (sangat inovatif)
	Indeks Desa Membangun	0,7	0,75	0,81	0,88
	Indeks Ketahanan Pangan	82,05	84,95	87,85	90,75
	Indeks Ketahanan Daerah	0,75 (Sedang)	0,79 (Sedang)	0,84 (Sedang)	0,89 (Tinggi)

BAB VI

PENUTUP



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muna Barat tahun 2025-2045 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang baru. RPJPD ini juga menjadi pedoman bagi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Barat dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas pembangunan yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna Barat yang berdimensi waktu lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Muna Barat yang berdimensi tahunan.

6.1 KAIDAH PELAKSANAAN

RPJPN Tahun 2025-2045 bersifat imperatif terhadap RPJPD, sehingga substansi dalam RPJPD harus mengikuti RPJPN dengan memperhatikan kewenangan daerah dan kemampuan daerah. Hasil pembangunan harus dapat dinikmati secara lebih merata dan adil oleh segenap warga masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan lahir dan batin dalam suasana yang demokratis, aman, tentram, dan damai. Keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2025-2045 dalam mewujudkan visi “**Muna Barat 2045 Yang Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan**”. Visi tersebut sejalan dengan Visi Nasional 2045 yaitu **Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan** serta Visi RPJPD Provinsi Terwujudnya **Sulawesi Tenggara yang Berdaya Saing, Maju dan Berkelanjutan**. Visi tersebut dapat terwujud melalui partisipasi seluruh pelaku pembangunan yang saling bersinergi dan berkesinambungan dengan memperhatikan kaidah pelaksanaan pembangunan yang meliputi : a) Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan; dan b) Kerangka Pengendalian.

6.2 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Muna Barat 2045 maka diperlukan peningkatan pembiayaan sektor publik yang dilakukan melalui perluasan sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan yang mencakup: a) Penguatan Perencanaan Pembiayaan; b) perluasan kerjasama dengan pihak terkait untuk mengembangkan sumber pembiayaan, terutama pembiayaan ekonomi yang inovatif dengan syarat ketentuan yang menguntungkan daerah; c) penerapan instrumen kerjasama pemerintah dengan badan usaha dan pemberdayaan industri; d) optimalisasi pemanfaatan aset daerah



**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Muna Barat**

Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworo, Desa
Kampobalano, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat